



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 79 TAHUN 2019

TENTANG

PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI
KAWASAN KENDAL – SEMARANG – SALATIGA
– DEMAK – GROBOGAN, KAWASAN
PURWOREJO – WONOSOBO – MAGELANG –
TEMANGGUNG, DAN KAWASAN BREBES –
TEGAL – PEMALANG

RENCANA INDUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN
KENDAL – SEMARANG – SALATIGA – DEMAK – GROBOGAN, KAWASAN
PURWOREJO – WONOSOBO – MAGELANG – TEMANGGUNG, DAN KAWASAN
BREBES – TEGAL – PEMALANG



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Daftar Isi

Daftar Isi	i
I. MENUJU JAWA TENGAH YANG SEJAHTERA, MAJU, DAN MANDIRI	
1. Pendahuluan	I.1
2. Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah	I.2
3. Posisi Geostrategis Jawa Tengah dalam Konteks Nasional	I.4
4. Potensi dan Tantangan.....	I.5
5. Keterkaitan Rencana Induk dengan Perencanaan Nasional dan Daerah	I.9
6. Pilar Utama Pembangunan Dalam Rangka Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah	I.10
II. PRINSIP DASAR DAN PRASYARAT KEBERHASILAN PERCEPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN DI JAWA TENGAH	
1. Prinsip Dasar	II.1
2. Arah Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah	II.11
3. Kebutuhan Program/Kegiatan dan Proyek Prioritas Dalam Rangka Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah	II.24
III. POSTUR GEOGRAFI WILAYAH, EKONOMI, DAN KONEKTIVITAS JAWA TENGAH	
1. Kondisi Geografi Wilayah Jawa Tengah	III.1
2. Postur Ekonomi Jawa Tengah	III.9
3. Sektor/Kegiatan Ekonomi Prioritas Jawa Tengah	III.15
4. Kawasan Sentra Produksi dan Komoditas Unggulan	III.21



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5.	Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri	III.36
6.	Aliran Komoditas Barang dan Tata Niaga Komoditas Unggulan	III.37
7.	Aliran Komoditas Barang Produksi Industri Pengolahan	III.39
8.	Kegiatan Ekonomi Lainnya	III.42
9.	Kondisi Infrastruktur, Konektivitas, dan Sistem Logistik Eksisting Jawa Tengah	III.48
IV.	KAWASAN PERCEPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI JAWA TENGAH	
1.	Kawasan Pengembangan Kawasan Industri (KI) Kendal	IV.1
2.	Kawasan Pendukung Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur dan Sekitarnya	IV.35
3.	Kawasan Pendukung Pembangunan Kawasan Industri (KI) Brebes	IV.58
V.	PELAKSANAAN DAN TATA KELOLA RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KAWASAN DI JAWA TENGAH	
1.	Tahapan Pelaksanaan	V.1
2.	Sumber Pendanaan	V.4
3.	Kemudahan Dalam Perizinan dan Fasilitas Insentif	V.8
4.	Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi	V.9
VI.	LAMPIRAN DAFTAR PROGRAM/KEGIATAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KAWASAN DI JAWA TENGAH	
1.	Kawasan Kedungsepur	VI.1
2.	Kawasan Wanarakuti	VI.7
3.	Kawasan Banglor	VI.10
4.	Kawasan Purwomanggung	VI.13
5.	Kawasan Subosukawonosraten	VI.17
6.	Kawasan Bregasmalang	VI.21
7.	Kawasan Barlingmascakeb	VI.27



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- | | | |
|----|--------------------------|-------|
| 8. | Kawasan Petanglong | VI.31 |
| 9. | Lintas Kawasan | VI.34 |



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KAWASAN

BAB I

MENUJU JAWA TENGAH YANG SEJAHTERA, MAJU, DAN MANDIRI

1. Pendahuluan

Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan guna meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian nasional.

Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi dilaksanakan secara seimbang untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Oleh karena itu seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah dan swasta memiliki peran mengisi pembangunan ekonomi daerah dan harus mampu bekerjasama melalui bentuk pengelolaan terpadu antar sektor, antar program, dan antar wilayah.

Dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah yang terdiri atas:

- a. Kawasan Kedungsepur yang terdiri atas Kendal – Kota Semarang – Semarang – Kota Salatiga – Demak – Grobogan;
- b. Kawasan Purwomanggung yang terdiri atas Purworejo – Wonosobo – Magelang – Kota Magelang – Temanggung; dan
- c. Kawasan Bregasmalang yang terdiri atas Brebes – Kota Tegal – Tegal – Pemasang.

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan nilai tambah pembangunan Kawasan Kedungsepur, Purwomanggung, dan Bregasmalang dilakukan pengembangan kawasan pendukung sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. Kawasan Barlingmascakeb yang terdiri atas Banjarnegara – Purbalingga – Banyumas – Cilacap – Kebumen;
- b. Kawasan Petanglong yang terdiri atas Pekalongan – Batang – Kota Pekalongan;
- c. Kawasan Wanarakuti yang terdiri atas Jepara – Kudus – Pati;
- d. Kawasan Banglor yang terdiri atas Rembang – Blora; dan
- e. Kawasan Subosukawonosraten yang terdiri atas Kota Surakarta – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Wonogiri – Sragen – Klaten.

Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi pada kawasan tersebut dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang yang selanjutnya disebut Rencana Induk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Rencana Induk dimaksud menjadi pedoman/acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota untuk menetapkan kebijakan dan program/kegiatan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Kedungsepur, Kawasan Purwomanggung, Kawasan Bregasmalang, dengan didukung pengembangan Kawasan Barlingmascakeb, Kawasan Petanglong, Kawasan Wanarakuti, Kawasan Banglor, dan Kawasan Subosukawonosraten.

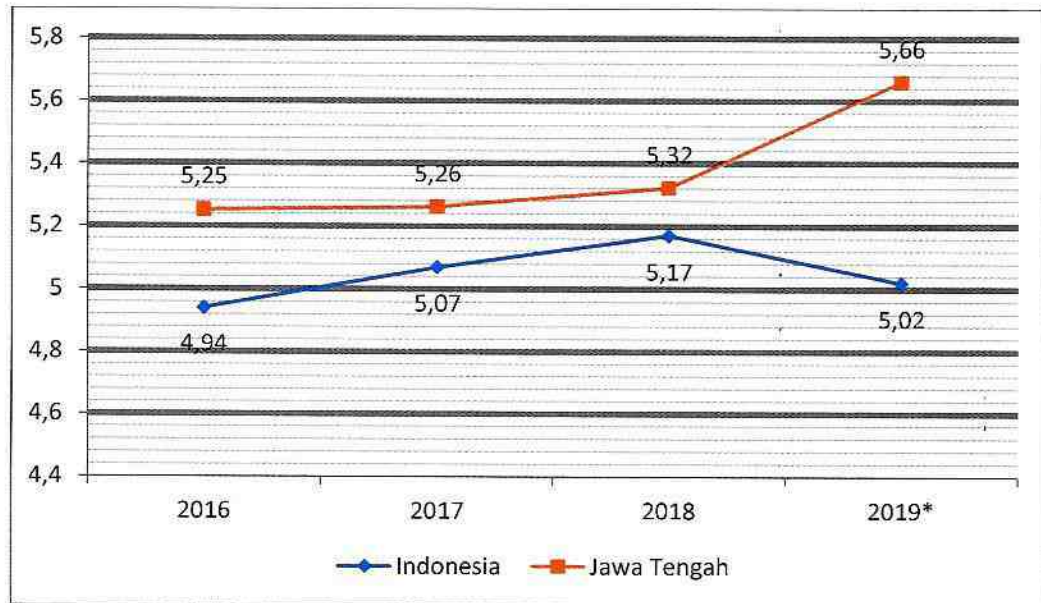
2. Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 perlu dilakukan percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Oleh karena itu, Pemerintah menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

nasional ditentukan oleh laju pertumbuhan ekonomi di daerah yang salah satunya melalui pembangunan ekonomi antar kawasan.



Gambar : Grafik Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah dan PDB Nasional Tahun 2016-2019

Sumber: Bank Indonesia, 2019

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah pada triwulan III tahun 2019 sebesar 5,66% (yoy), hal tersebut meningkat jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,32% (yoy). Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai kategori penyediaan akomodasi dan makan minum. Berbeda dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, pada triwulan III tahun 2019 hanya tumbuh sebesar 5,02% (yoy) dan lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun 2018 sebesar 5,17%. Secara umum, ekonomi Indonesia mendapat dukungan salah satunya dari Sektor Industri Pengolahan yang tumbuh 4,15% melalui peningkatan permintaan luar negeri terhadap furnitur, Dari data tersebut, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara umum masih lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Jika dilihat dari sisi persentase penduduk miskin, Jawa Tengah mencatatkan angka 10,80% (3,47 juta orang) pada semester I tahun 2019,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

lebih tinggi dari persentase penduduk miskin Indonesia sebesar 9,41%. Di Jawa Tengah, komoditi makanan berperan dalam peningkatan garis kemiskinan di Jawa Tengah, dimana kondisi tersebut juga terjadi pada Garis Kemiskinan di Indonesia.

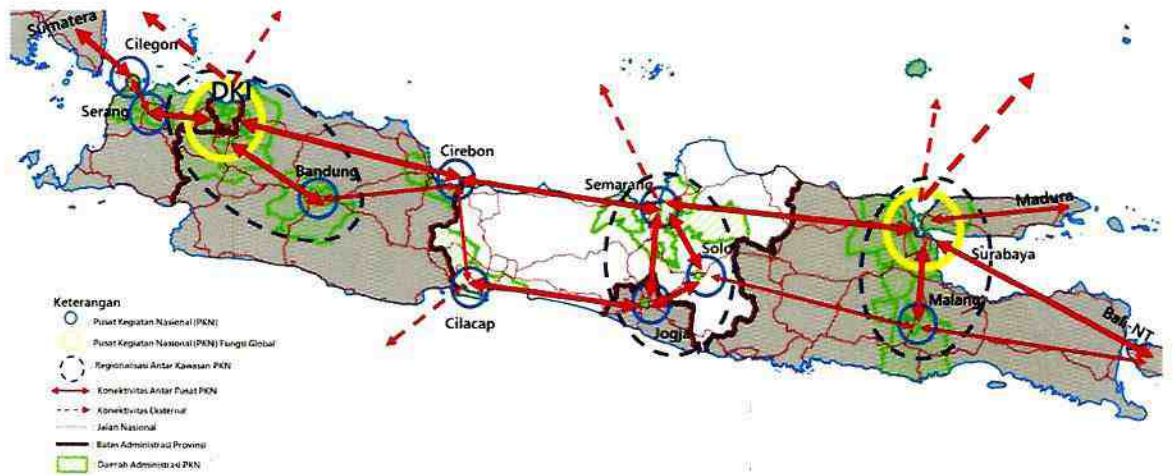
Dalam rangka pencapaian target pertumbuhan ekonomi Kawasan Jawa Tengah sebesar 7% perlu dilakukan upaya dan strategi berupa (i) mendorong investasi industri strategis, (ii) penguatan konektivitas dan sistem logistik melalui pembangunan infrastruktur, (iii) penguatan sumber daya manusia dan iptek, (iv) mendorong ekspor produk tekstil dan non tekstil, makanan dan minuman, dan furnitur, (v) melakukan substitusi impor, dan (vi) pengembangan sektor kepariwisataan.

3. Posisi Geostrategis Jawa Tengah Dalam Konteks Nasional

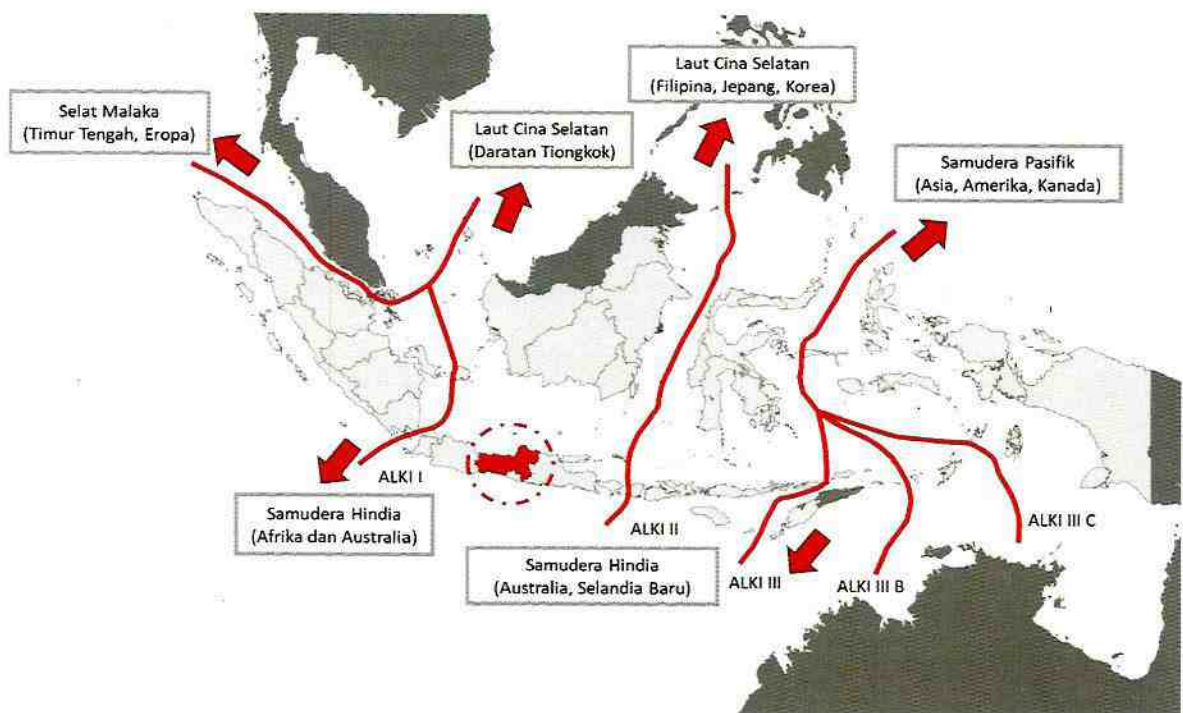
Secara geografis, Jawa Tengah berada di antara Jawa Barat dan Jawa Timur, sehingga memiliki potensi maupun tantangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam peranannya menghubungkan kedua wilayah tersebut. Sistem Perkotaan Semarang yang didalamnya terdapat Ibukota Jawa Tengah berada diantara dua kota metropolitan yaitu DKI Jakarta dan Surabaya. DKI Jakarta merupakan ibukota negara Indonesia sebagai pintu gerbang utama menuju negara Indonesia. Sedangkan, Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar kedua setelah DKI Jakarta dan dikatakan sebagai pintu gerbang wilayah timur, maka dalam konstelasi regional Jawa Tengah memiliki peran yang sangat strategis sebagai penghubung antara dua kota metropolitan. Selain itu, Sistem Perkotaan Semarang juga menjadi bagian dari konsep Segitiga Emas Joglosemar (Yogyakarta – Solo – Semarang).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Gambar : Posisi Geostrategis Jawa Tengah dalam Pulau Jawa



Gambar : Posisi Geostrategis Jawa Tengah dalam Konstelasi Nasional

4. Potensi dan Tantangan

a. Potensi

Dalam rangka mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah, terdapat potensi antara lain sebagai berikut:

1) Sektor Pertanian dan Industri

Posisi Jawa Tengah yang strategis berada diantara Jawa Barat dan Jawa Timur, memiliki ketersediaan lahan untuk



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dikembangkan antara lain lahan pertanian dan kehutanan yang produktif, serta ketersediaan sumber daya manusia dengan upah tenaga kerja yang kompetitif.

2) Konektivitas Jalur Arteri Primer Pantai Utara (Pantura) dan Pantai Selatan (Pansela) Jawa

Konektivitas Jawa Tengah didukung adanya jalur Arteri Primer Pantura dan Arteri Primer Pansela Jawa yang membuka potensi untuk pengembangan Jawa Tengah sebagai salah satu pusat logistik barang dan jasa.

3) Simpul Transportasi Udara

Keberadaan infrastruktur transportasi udara di Jawa Tengah didukung oleh dua bandara internasional (Ahmad Yani Semarang dan Adi Soemarmo Boyolali) dan dua bandara lokal (Tunggulwulung Cilacap dan Dewadaru Karimunjawa Jepara) dapat memperkuat konektivitas antar kawasan, termasuk kemajuan sektor kepariwisataan, industri dan perdagangan di Jawa Tengah.

4) Simpul Transportasi Laut

Transportasi Laut di Jawa Tengah didukung oleh Pelabuhan Tanjung Mas Semarang sebagai Pelabuhan Utama, Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap dan Pelabuhan Tegal sebagai Pelabuhan Pengumpul, dan 8 (delapan) Pelabuhan Pengumpan Regional (Batang, Sluke Rembang, Tasik Agung Rembang, Juwana Pati, Jepara, Karimunjawa, Legon Bajak dan Kendal), serta tiga pelabuhan lokal (Brebes, Pekalongan, dan Pemasang). Keberadaan infrastruktur transportasi laut dapat memperkuat konektivitas dan sistem logistik antar wilayah.

5) Struktur Perkotaan yang hierarki dan terintegrasi

Berdasarkan struktur Pusat-Pusat Perkotaan, Jawa Tengah memiliki 3 (tiga) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yakni PKN Cilacap, PKN Kedungsepur, dan PKN Surakarta, 10 (sepuluh) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di Boyolali, Klaten, Tegal, Pekalongan, Kudus, Cepu, Magelang, Wonosobo,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kebumen, Purwokerto, serta 67 (enam puluh tujuh) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang tersebar di seluruh Jawa Tengah. Selain itu di Jawa Tengah terdapat 5 (lima) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Borobudur dan sekitarnya, Dieng dan sekitarnya, Merapi - Merbabu dan sekitarnya, Karimun Jawa dan sekitarnya, dan Sangiran dan sekitarnya. Keberadaan pusat-pusat perkotaan tersebut berpotensi mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah.

b. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah antara lain sebagai berikut:

1) Arah pembangunan ekonomi belum berorientasi keluar (*Outward Looking*) yang bersinergi dengan pengembangan internal wilayah

Belum optimalnya simpul-simpul transportasi dan konektivitas antar simpul, sehingga diperlukan intervensi dalam penguatan konektivitas dan pengembangan sistem transportasi.

2) Pengembangan regional belum dilaksanakan secara optimal

Implementasi kebijakan pengembangan regional belum berjalan secara optimal yang ditandai dengan belum berperannya pusat-pusat kegiatan ekonomi yang ada dan konektivitas antar pusat kegiatan masih bergerak secara parsial. Selain itu, belum dikembangkannya pusat-pusat kegiatan ekonomi yang baru dalam mendorong pemerataan pembangunan ekonomi wilayah.

3) Ketersediaan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) sebagai salah satu perangkat operasional pelaksanaan pembangunan

Belum lengkapnya dokumen RRTR yang digunakan sebagai instrumen penting untuk mengetahui kesesuaian rencana pola ruang dengan rencana pengembangan kawasan secara lebih detail. Salah satu dokumen RRTR adalah Rencana Detail Tata



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ruang (RDTR) yang diharapkan memberikan kepastian hukum terhadap investasi.

4) Belum optimalnya pembangunan daerah yang berkelanjutan

Pembangunan daerah harus mempertimbangkan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk dapat menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengurangi dampak lingkungan akibat pembangunan dan pemanfaatan lahan. Pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan sangat dibutuhkan dalam setiap proses pembangunan.

5) Belum optimalnya destinasi pariwisata di Jawa Tengah sebagai tujuan wisatawan

Wisatawan yang berkunjung ke destinasi pariwisata di Jawa Tengah menunjukkan lama tinggal yang rendah, dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana pariwisata, belum tertatanya atraksi, dan belum adanya konektivitas menuju kawasan wisata. Untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan tersebut maka perlu percepatan perbaikan atraksi, amenities, dan aksesibilitas. Disamping itu, pengemasan paket wisata belum terintegrasi dengan baik, sehingga diperlukan optimalisasi promosi paket perjalanan wisata yang mengedepankan atraksi wisata, amenities dan aksesibilitas.

6) Belum optimalnya pengembangan Kawasan Industri

Tantangan pengembangan dan perluasan kawasan industri di Jawa Tengah terhambat oleh penyiapan infrastruktur utama berupa energi, konektivitas, air, dan pengolahan limbah yang sangat dibutuhkan industri padat modal dan padat energi serta optimalisasi dukungan dari sisi perizinan dan non perizinan.

7) Belum optimalnya kesiapan daerah dalam memanfaatkan investasi

Investasi pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi perlu diimbangi dengan kesiapan daerah dalam menerima manfaat investasi, terutama dalam hal penyediaan tenaga kerja yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kompeten dan sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan, upah yang kompetitif serta kemudahan perizinan dalam berinvestasi. Selain itu, perlu pengembangan potensi unggulan-unggulan lokal yang ada pada wilayah pendukung.

8) **Struktur Perekonomian masih timpang**

Struktur perekonomian Jawa Tengah dari sisi permintaan lebih besar dari penawaran dengan indikasi nilai impor lebih besar dibandingkan dengan ekspor. Perekonomian Jawa Tengah didominasi oleh konsumsi Rumah Tangga (61%) dengan nilai investasi hanya sebesar (33%), namun pertumbuhan keduanya hanya berkisar 4,3% - 4,7% sehingga perlu dikembangkan potensi-potensi dari industri kreatif/usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), produk substitusi impor, dan tenaga kerja yang kompetitif.

5. **Keterkaitan Rencana Induk Dengan Perencanaan Nasional dan Daerah**

Rencana Induk merupakan bagian yang terintegrasi dan komplementer dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta bukan dimaksudkan untuk mengganti dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada seperti rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, rencana tata ruang.



Gambar : Integrasi Rencana Induk Sebagai Bagian Integral Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah

Sementara itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah tahun 2018-2023, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah memberikan penegasan khusus pada inklusivitas pembangunan yang berpusat pada rakyat, yang secara implisit



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

mengandung makna pembangunan yang berkeadilan dan merata. Strategi umum pembangunan Jawa Tengah tahun 2018-2023 juga secara lebih tegas menyatakan keberpihakannya kepada rakyat miskin melalui strategi pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan. Berlandaskan strategi pembangunan ekonomi yang inklusif tersebut, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah berupaya dengan meningkatkan aktivitas ekonomi dan kelembagaan ekonomi UMKM dan koperasi, meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, serta percepatan kinerja sektor industri agro maupun non-agro. Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya meningkatkan kontribusi sektor pariwisata melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing dengan tetap melestarikan budaya lokal. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Rencana Induk telah disusun selaras dengan arah pembangunan nasional serta arah kebijakan umum dalam RPJMD tahun 2018-2023, khususnya terkait peningkatan konektivitas antar wilayah dan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

6. Pilar Utama Pembangunan Dalam Rangka Percepatan Dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah

Dalam menopang dan mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah dibutuhkan landasan atau pilar utama melalui (i) pengembangan sektor dan komoditas unggulan, (ii) pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi eksisting di wilayah pengembangan, (iii) penguatan konektivitas dan sistem logistik antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, (iv) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah, dan (v) peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Gambar : Pilar Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Jawa Tengah

Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan pendekatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah pengembangan, baik yang telah ada maupun yang baru. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional/spasial. Dalam rangka meningkatkan daya saing setiap wilayah diharapkan setiap kabupaten/kota dapat mengembangkan sektor dan produk yang menjadi keunggulannya. Tujuan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut untuk memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah serta memperbaiki ketimpangan spasial pembangunan ekonomi.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan mengembangkan klaster industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan tersebut disertai dengan penguatan konektivitas antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan antara pusat pertumbuhan ekonomi dengan lokasi kegiatan ekonomi serta infrastruktur pendukungnya.

Pada era ekonomi berbasis pengetahuan, mesin pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada kapitalisasi hasil penemuan menjadi produk inovasi. Dalam konteks ini, peran sumber daya manusia yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

berpendidikan menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Oleh karena itu, tujuan utama di dalam sistem pendidikan dan pelatihan untuk mendukung hal tersebut diatas haruslah dapat menciptakan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan sains dan teknologi.

Peningkatan SDM yang produktif merupakan salah satu upaya untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi kawasan. Dalam rangka menghasilkan tenaga kerja yang produktif, diperlukan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan. Dalam ekonomi yang semakin bergeser ke arah ekonomi berbasis IPTEK, peran pendidikan tinggi sangat penting, antara lain untuk menghasilkan tenaga kerja yang unggul dan produktif serta memiliki kemampuan untuk menguasai IPTEK sesuai perkembangan zaman. Hal tersebut, bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Pengembangan program pendidikan akademik diarahkan pada penyelarasan bidang dan program studi dengan potensi pengembangan ekonomi di setiap kawasan. Program akademik harus menjadi jejaring yang mengisi dan mengembangkan rantai nilai tambah dari setiap komoditas atau sektor yang dikembangkan di setiap kawasan. Perguruan tinggi sebagai pusat riset dikembangkan menjadi bagian penting dari pusat inovasi nasional. Pengembangan perguruan tinggi sebagai pusat riset didasarkan pada prinsip integrasi, *resource sharing*, dan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

Kemampuan masyarakat di suatu kawasan untuk meningkatkan inovasi dapat menjadi dorongan peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berkesinambungan serta meningkatkan daya saing kawasan secara nasional. Inovasi yang berbasis pada kapitalisasi produk riset teknologi akan memberi dampak langsung pada peningkatan produktivitas yang berkelanjutan terhadap penggunaan faktor produksi yang tidak dapat diperbaharui, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan dan menstabilkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB II

PRINSIP DASAR DAN PRASYARAT KEBERHASILAN PERCEPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN DI JAWA TENGAH

1. Prinsip Dasar

Rencana Induk disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar dan prasyarat keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsip dasar percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi membutuhkan perubahan dalam cara pandang dan perilaku seluruh pemangku kebijakan sebagai berikut:

- Perubahan harus terjadi untuk seluruh komponen masyarakat;
- Perubahan pola pikir (*mindset*) dimulai dari Pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan birokrasinya;
- Perubahan membutuhkan semangat kerja keras dan keinginan untuk membangun kerja sama dalam kompetisi yang sehat;
- Pemanfaatan dan penguatan modal sosial dalam masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- Produktivitas, inovasi, dan kreativitas didorong oleh IPTEK;
- Peningkatan jiwa kewirausahaan;
- Peningkatan peran dunia usaha dalam pembangunan ekonomi; dan
- Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan termasuk penurunan emisi gas rumah kaca.

Selain prinsip-prinsip dasar, perwujudan percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah juga ditentukan oleh prasyarat keberhasilan sebagai berikut:

a. Peran Aktif dan Kerja Sama antara Pemerintah dan Dunia Usaha (Swasta, BUMN, BUMD)

Peran aktif dan kerja sama pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) dapat mendukung keberhasilan percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi di Jawa Tengah dengan memperhatikan 4 (empat) hal. *Pertama*, program/kegiatan yang telah disiapkan oleh kementerian/lembaga. *Kedua*,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pengendalian perencanaan yang dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik. *Ketiga*, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detail rencana lokasi pembangunan. *Keempat*, penajaman integrasi sumber pendanaan. Pemerintah bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif dan infrastruktur yang menunjang untuk mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah.

Peran dan keterlibatan dunia usaha dalam percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah juga sangat penting khususnya terkait pembiayaan pembangunan, keterbatasan ruang fiskal (pajak), pemberian pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik, disamping itu dunia usaha juga berperan dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Hal-hal tersebut dilaksanakan melalui berbagai skema, termasuk melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur, maupun melalui skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).

Dengan demikian percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah harus didukung oleh komitmen pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) dan dunia usaha dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pemerintah memberikan kesempatan yang sama dalam hal perizinan dan kemudahan berinvestasi/berusaha kepada dunia usaha, baik yang berskala besar, menengah, kecil dan mikro;
- 2) Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan yang dibutuhkan oleh dunia usaha;
- 3) Pemerintah menciptakan kondisi ekonomi makro, hukum dan sosial yang kondusif untuk berusaha;
- 4) Pemerintah memberikan komitmen nyata dalam menciptakan kondisi yang kondusif untuk percepatan penyediaan infrastruktur yang andal;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5) Pemerintah menyediakan perlindungan dan pelayanan dasar sosial;
- 6) Dunia usaha meningkatkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja;
- 7) Dunia usaha melakukan inovasi untuk mengembangkan teknologi dan metode produksi dalam rangka meningkatkan daya saing nasional;
- 8) Dunia usaha berkomitmen dalam menerapkan *good corporate governance* dan mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- 9) Bentuk usaha pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efektif dan efisien dengan manajemen yang berdasarkan keberlanjutan; dan
- 10) Mendorong integrasi pusat penelitian dan pengembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan berlandaskan pelestarian lingkungan.

b. Reformasi Birokrasi

Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah memerlukan dukungan reformasi birokrasi pemerintah dengan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, dapat mengatur kehidupan masyarakat dan mendukung kebutuhan sektor usaha terutama kemudahan dalam perizinan;
- 2) Melakukan reformasi birokrasi pada area perubahan, yaitu; organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir (*mindset*) serta budaya kerja (*culture set*); dan
- 3) Komitmen terhadap penerapan *good governance*.

c. Penguatan Konektivitas antar Wilayah di Jawa Tengah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Konektivitas antar wilayah yang andal mempunyai peran penting bagi kelancaran distribusi barang dan jasa dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Oleh karena itu, penguatan konektivitas antar wilayah di Jawa Tengah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Sistem infrastruktur yang andal dan terkoneksi agar dapat menekan biaya logistik dan distribusi;
- 2) Identifikasi simpul-simpul transportasi yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi;
- 3) Penguatan konektivitas intra dan antar wilayah pengembangan di Jawa Tengah sampai dengan konektivitas antar kawasan di Indonesia;
- 4) Penguatan jaringan komunikasi dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi guna mendukung kegiatan perekonomian; dan
- 5) Penguatan sistem logistik, sistem transportasi, pengembangan wilayah, dan sistem komunikasi dan informasi secara terpadu.

d. Optimalisasi Pusat-Pusat Kegiatan Ekonomi Eksisting

Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah didorong oleh kebutuhan internal maupun eksternal akan dorongan inovatif (pembaruan) dari kelompok sektor dan lokasi geografi yang dinamis. Suatu wilayah akan tumbuh dan berkembang diawali dari pusat kota yang berinteraksi melalui pusat-pusat kegiatan ekonomi. Proses pembangunan akan berstruktur secara makro melalui hierarki wilayah pusat dan kemudian dari pusat ke masing-masing wilayah pendukungnya (*hinterland*).

Sistem hierarki perkotaan menggambarkan jenjang fungsi perkotaan sebagai akibat adanya perbedaan jumlah, jenis, dan kualitas dari fasilitas yang tersedia pada suatu kota. Semakin tinggi hierarki suatu kota maka semakin besar fungsi dan pengaruhnya kota tersebut terhadap kota-kota disekitarnya.

Adapun pusat-pusat pertumbuhan kegiatan ekonomi di Jawa Tengah dikategorikan menjadi Sistem Perkotaan dan Kawasan

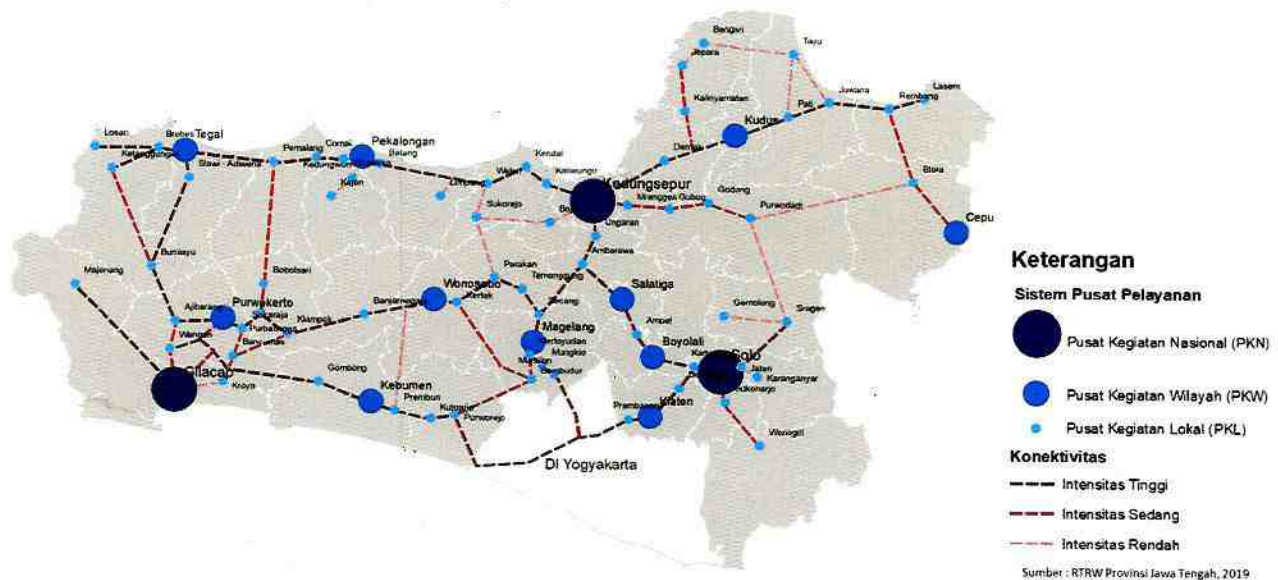


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Strategis. Sistem Perkotaan terdiri dari PKN, PKW, dan PKL. Berdasarkan RTRW Jawa Tengah, kawasan strategis terdiri atas Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi, Kawasan Strategis Sosial Budaya, dan Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.

Sistem perkotaan di Jawa Tengah terdiri sebagai berikut:

- 1) Pengembangan PKN (Kawasan Perkotaan Surakarta, Kawasan Perkotaan Kedungsepur, dan Kawasan Perkotaan Cilacap);
- 2) Pengembangan PKW (Kawasan Perkotaan Boyolali, Klaten, Tegal, Pekalongan, Kudus, Cepu, Magelang, Wonosobo, Kebumen, dan Purwokerto); dan
- 3) Pengembangan PKL meliputi sejumlah 67 kawasan perkotaan berbeda.



Gambar 6 : Sistem Perkotaan Jawa Tengah

Kawasan strategis dari aspek Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah terdiri atas:

- 1) Pengembangan Kawasan Agropolitan Manggamas di Kabupaten Pemalang, Purbalingga, Brebes, dan Banyumas, Kawasan Agropolitan Girisuka di Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- Karanganyar, Kawasan Agropolitan Semarboyong di Kabupaten Semarang, Boyolali, dan Magelang, dan Kawasan Agropolitan Sobobanjar di Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara; dan
- 2) Pengembangan Kawasan Industri Terpadu di Rembang, Kendal – Semarang – Demak, Brebes dan Cilacap – Kebumen.

Optimalisasi pusat-pusat kegiatan ekonomi eksisting di Jawa Tengah dilakukan dengan cara penguatan infrastruktur, khususnya untuk kawasan-kawasan yang sudah memiliki pusat-pusat ekonomi terbangun. Penguatan infrastruktur tersebut diterapkan untuk kawasan:

- 1) Kedungsepur yang meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Grobogan dengan *quick win* pengembangan **Kawasan Industri Kendal**;
- 2) Purwomanggung yang meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung dengan *quick win* pengembangan **Kawasan Pariwisata Borobudur**; dan
- 3) Bregasmalang yang meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang dengan *quick win* pembangunan **Kawasan Industri Brebes**.

e. **Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru**

Dalam rangka mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi, pendekatan pembangunan wilayah dilakukan dengan cara menerapkan sistem perwilayahan dengan membagi wilayah perencanaan menjadi beberapa kawasan yang memiliki keterkaitan secara fungsional. Pembangunan ekonomi dengan mengedepankan sektor dan komoditas unggulan berbasis wilayah merupakan upaya pemantapan dalam perumusan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi Jawa Tengah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan serasi dan seimbang, baik di dalam wilayah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pembangunan maupun antar wilayah pembangunan, sehingga dapat tercipta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dilakukan dengan dukungan infrastruktur eksisting ditambah dengan infrastruktur tambahan guna mendukung pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan pusat ekonomi dilakukan untuk kawasan-kawasan yang aktivitas ekonominya masih belum optimal dan perlu didorong untuk menciptakan kesejahteraan serta memajukan pemerataan ekonomi di Jawa Tengah. Pendekatan ini diterapkan pada kawasan:

- 1) **Banglor** meliputi Kabupaten Rembang dan Blora serta kawasan **Wanarakuti** yang meliputi Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara sebagai Kawasan Pendukung dari Kawasan Prioritas **Kedungsepur**;
- 2) **Subosukawonosraten** meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten sebagai Kawasan Pendukung dari Kawasan Prioritas **Purwomanggung**; dan
- 3) **Barlingmascakeb** meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen serta kawasan **Petanglong** meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Pekalongan sebagai Kawasan Pendukung dari Kawasan Prioritas **Bregasmalang**.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Gambar 7 : Sistem Perwilayahan Pembangunan Ekonomi Jawa Tengah

f. Pemanfaatan Potensi Kemaritiman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sektor kelautan kemaritiman menjadi kewenangan di tingkat provinsi untuk jarak sejauh 0-12 mil dari daratan dan menjadi kewenangan pemerintah pusat untuk jarak lebih dari 12 mil dari daratan. Hal tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi kemaritiman yang ada di wilayahnya.

Wilayah laut utara Jawa dan laut selatan Jawa memiliki perbedaan kondisi alam, sosial, dan ekonomi yang berpengaruh terhadap arah pengembangan sektor kelautan. Wilayah laut di utara Jawa Tengah merupakan wilayah perairan dangkal dengan bentuk pantai melandai serta didukung dan dipengaruhi oleh keberadaan pusat-pusat kota di sepanjang pesisir pantai utara Jawa Tengah. Sedangkan di laut selatan Jawa Tengah, kondisi wilayah perairan memiliki ombak besar dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, dengan pusat kota/pemerintahan di selatan Jawa Tengah cukup berjarak dari wilayah pesisirnya. Dengan kondisi demikian, arah pengembangan potensi kelautan akan menggunakan strategi yang berbeda untuk wilayah utara dan selatan Jawa Tengah.

Potensi sumber daya laut di Jawa Tengah bagian utara berupa perikanan tangkap dan budidaya tambak (ikan dan udang), serta industri pengolahan hasil laut berorientasi untuk konsumsi regional, dan jumlah nelayan yang hampir 80% (delapan puluh persen) berada di utara Jawa Tengah. Dengan kondisi demikian, hasil laut juga relatif terserap dengan cepat guna mendukung aktivitas masyarakat dan ekonomi di kota-kota pesisir utara Jawa. Hal lain yang perlu menjadi perhatian yaitu dalam pengembangan potensi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kemaritiman di utara Jawa Tengah adalah tekanan lingkungan yang besar akibat beban penduduk serta faktor alam seperti abrasi, penurunan ekosistem mangrove, dan penurunan permukaan tanah.

Dalam pengembangan potensi sumber daya laut di Jawa Tengah yang optimal dan berkelanjutan perlu didukung dengan adanya perencanaan dan pengelolaan ruang laut yang baik. Perencanaan dan pengelolaan tersebut harus secara optimal dan komprehensif diatur dalam dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (RZWP3K).

g. Kebijakan Ketahanan Pangan, Air dan Energi

Kebijakan ketahanan pangan menjadi salah satu prasyarat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan Jawa Tengah berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Kedaulatan pangan memperhatikan dimensi konsumsi dan produksi;
- 2) Adanya jaminan ketersediaan air untuk mencukupi kebutuhan lahan pertanian;
- 3) Ketersediaan, kecukupan dan pemerataan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sehat dan produktif;
- 4) Diversifikasi konsumsi jenis/produk pangan dengan mengacu pada potensi produk atau komoditas pangan daerah; dan
- 5) Peningkatan produktivitas pangan melalui peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan, khususnya untuk bibit maupun teknologi pasca panen.

Kebijakan terkait penyediaan air bersih tidak terfokus pada pembangunan infrastruktur, namun juga harus memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:

- 1) Pemerintah memastikan ketersediaan dan akses terhadap air bagi seluruh penduduk;
- 2) Penyediaan air bersih memperhatikan kelestarian lingkungan sumber air untuk menjaga keberlanjutannya;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3) Pengembangan hutan tanaman harus dilanjutkan guna memastikan peningkatan luas hutan untuk keberlanjutan ketersediaan air; dan
- 4) Kabupaten/kota memiliki luasan hutan sebagai persentase tertentu dari luas wilayahnya.

Kebijakan ketahanan energi didasarkan pada manajemen penyediaan dan pemanfaatan energi di Jawa Tengah yang meliputi:

- 1) Jaminan ketersediaan dan kontinuitas pasokan energi untuk pengembangan kawasan industri;
- 2) Pengaturan komposisi energi di Jawa Tengah diarahkan pada bauran energi (*energy mix*), efisiensi energi, dan diversifikasi energi, khususnya ke arah pengembangan energi baru dan terbarukan yang mendukung pembangunan ekonomi Jawa Tengah secara berkelanjutan; dan
- 3) Tata kelola pertambangan yang baik (*good mining practice*) untuk meminimalkan kerusakan lingkungan.

h. Mitigasi Perubahan Iklim untuk Memastikan Keberlanjutan Pembangunan

Prinsip keberlanjutan pembangunan tidak terlepas dari mitigasi perubahan iklim. Perubahan iklim mengakibatkan kenaikan muka air laut, sehingga wilayah utara Jawa Tengah semakin rentan terhadap bahaya banjir genangan atau banjir rob.

Mitigasi perubahan iklim dapat dilakukan dengan upaya antara lain adaptasi terhadap perubahan iklim, penyesuaian perencanaan infrastruktur dan desain terhadap dampak risiko perubahan iklim, pengembangan ekonomi rendah emisi karbon, dan pengembangan teknologi tepat guna.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. Arah Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah

a. Arah Pengembangan Kawasan di Jawa Tengah

Pengembangan kawasan di Jawa Tengah diarahkan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berdaya saing berbasis pertanian, industri, dan pariwisata, dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan kawasan yang berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan kondisi fisiografis dan geografis kewilayahan, karakter dan potensi wilayah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengembangkan 8 (delapan) kawasan, yaitu Kedungsepur, Wanarakuti, Banglor, Purwomanggung, Subosukawonosraten, Bregasmalang, Barlingmascakeb, dan Petanglong. Pengelompokan kawasan tersebut bertujuan untuk dapat lebih mengoptimalkan potensi lokal, mempertahankan keberagaman hasil produk serta menciptakan pemerataan pembangunan ekonomi yang memiliki ciri kuat produk unggulan. Adapun kebijakan pengembangan kawasan di Jawa Tengah adalah sebagaimana berikut:

- 1) Poros pengembangan utara-utara yang membentang dari Bregasmalang – Petanglong – Kedungsepur – Wanarakuti – Banglor dikembangkan dengan memantapkan pembangunan di koridor utara, sehingga tetap mampu menjadi pendorong ekonomi kawasan di Jawa Tengah;
- 2) Poros pengembangan selatan-selatan yang membentang dari Barlingmascakeb – Purwomanggung – Subosukawonosraten dengan mempercepat pembangunan di koridor selatan, sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi kawasan;
- 3) Poros pengembangan utara-selatan yang menghubungkan Bregasmalang dengan Barlingmascakeb, Petanglong dengan Purwomanggung, serta Wanarakuti dan Banglor dengan Subosukawonosraten dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi kawasan;
- 4) Poros pengembangan bagian tengah Jawa Tengah diarahkan untuk meningkatkan fungsi konservasi di kawasan bagian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

tengah Jawa Tengah (Hulu Daerah Aliran Sungai) pada daerah Gunung Slamet – Sindoro – Sumbing – Merbabu – Merapi – Lawu; dan

- 5) Pengembangan wilayah kelautan diarahkan untuk mengembangkan potensi ekonomi sosial dan budaya secara berkelanjutan.

Tabel 1 : Sektor Unggulan Masing-Masing Kawasan

No.	Kawasan	Kabupaten/Kota	Sektor Unggulan
1.	Kedungsepur	a. Kabupaten Kendal; b. Kabupaten Demak; c. Kabupaten Semarang; d. Kota Semarang; e. Kota Salatiga; dan f. Kabupaten Grobogan.	a. Perdagangan dan Jasa; b. Pertanian; c. Industri; d. Pariwisata; e. Perikanan; f. Panas Bumi; g. Pertambangan; dan h. Minyak dan Gas Bumi.
2.	Wanarakuti	a. Kabupaten Jepara; b. Kabupaten Kudus; dan c. Kabupaten Pati.	a. Pertanian; b. Industri; c. Perdagangan dan Jasa; d. Perikanan; dan e. Pertambangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Kawasan	Kabupaten/Kota	Sektor Unggulan
3.	Banglor	a. Kabupaten Rembang; dan b. Kabupaten Blora.	a. Pertanian; b. Industri; c. Pariwisata; d. Minyak dan Gas Bumi; e. Perikanan; dan f. Pertambangan.
4.	Purwomanggung	a. Kabupaten Purworejo; b. Kabupaten Wonosobo; c. Kota Magelang; d. Kabupaten Magelang; dan e. Kabupaten Temanggung.	a. Pertanian; b. Pariwisata; c. Perdagangan dan Jasa; d. Industri; dan e. Panas Bumi.
5.	Subosukawonosraten	a. Kota Surakarta; b. Kabupaten Boyolali; c. Kabupaten Sukoharjo; d. Kabupaten Karanganyar; e. Kabupaten Wonogiri; f. Kabupaten Sragen; dan g. Kabupaten Klaten.	a. Perdagangan dan Jasa; b. Industri; c. Pertanian; d. Pariwisata; dan e. Panas Bumi.
6.	Bregasmalang	a. Kabupaten Brebes;	a. Industri; b. Perdagangan dan Jasa;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Kawasan	Kabupaten/Kota	Sektor Unggulan
		b. Kota Tegal; c. Kabupaten Tegal; dan d. Kabupaten Pemasang.	c. Pertanian; d. Pariwisata; e. Perikanan; f. Kehutanan; dan g. Pertambangan.
7.	Barlingmascakeb	a. Kabupaten Banjarnegara; b. Kabupaten Purbalingga; c. Kabupaten Banyumas; d. Kabupaten Cilacap; dan e. Kabupaten Kebumen.	a. Pertanian; b. Industri; c. Pariwisata; d. Perdagangan dan Jasa; e. Perikanan; f. Pertambangan; dan g. Panas Bumi.
8.	Petanglong	a. Kota Pekalongan; b. Kabupaten Batang; dan c. Kabupaten Pekalongan.	a. Industri; b. Perdagangan dan Jasa; c. Pertanian; d. Pariwisata; e. Perikanan; f. Kehutanan; dan g. Pertambangan.

Sumber: RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023

b. Pengembangan Kawasan Prioritas Jawa Tengah

Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah terdiri dari 3 (tiga) *quick wins* yang menjadi dasar penetapan 3 (tiga) kawasan prioritas yaitu:

- 1) **Kawasan Prioritas Kedungsepur dengan *quick win* Pengembangan Kawasan Industri Kendal**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kawasan Industri (KI) Kendal dibangun berdasarkan RTRW Provinsi Jateng Tahun 2009-2029 dan RTRW Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031. Luas Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kendal sendiri telah ditentukan sebesar 4.500 Ha.

2) **Kawasan Prioritas Purwomanggung dengan *quick win* Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur**

Kawasan Pariwisata Borobudur merupakan *Cultural Heritage Masterpiece* – Mahakarya Budaya Dunia, diharapkan menjadi magnet dan daya tarik wisatawan manca negara. Lokasi Borobudur yang berada di Kabupaten Magelang, berbatasan dengan DI Yogyakarta tentu harus dapat mengoptimalkan potensi lainnya yang ada di Kawasan Purwomanggung.

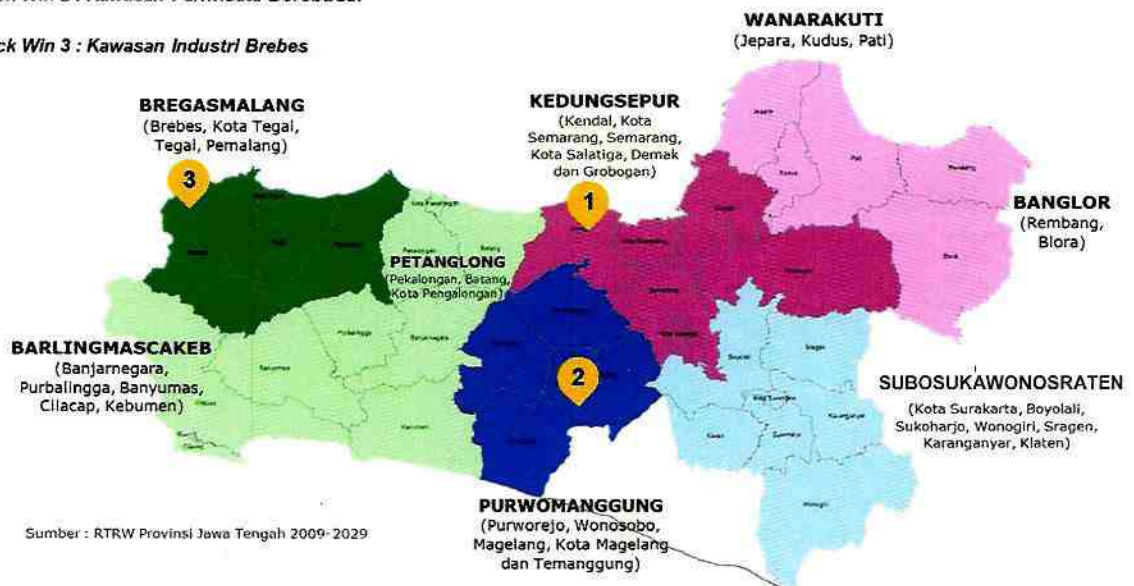
3) **Kawasan Prioritas Bregasmalang dengan *quick win* Pembangunan Kawasan Industri Brebes**

Kawasan Industri (KI) Brebes ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi dari sisi Ekonomi, diarahkan sebagai pembentukan pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk memacu pertumbuhan di Bregasmalang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 Quick Win 1 : Kawasan Industri Kendal
- 2 Quick Win 2 : Kawasan Pariwisata Borobudur
- 3 Quick Win 3 : Kawasan Industri Brebes



Gambar 8 : Delineasi 3 (tiga) Quick Wins dalam Konstelasi Wilayah Pengembangan Jawa Tengah

c. Pengembangan Kawasan Pendukung Jawa Tengah

Pengembangan 3 (tiga) Kawasan Prioritas di Jawa Tengah dengan *quick wins* KI Kendal, Kawasan Pariwisata Borobudur dan KI Brebes, tidak dapat dilepaskan dengan pengembangan kawasan pendukung sebagai *hinterland*-nya. Adapun kawasan pendukung yang perlu dikembangkan untuk kawasan prioritas sebagai berikut:

- 1) Kawasan Pendukung **Kedungsepur** (KI Kendal), meliputi:
 - a) Wilayah Pengembangan **Banglor** yang meliputi Kabupaten Rembang dan Blora; dan
 - b) Wilayah Pengembang **Wanarakuti** meliputi wilayah Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara.
- 2) Kawasan Pendukung **Purwomanggung** (Kawasan Pariwisata Borobudur), meliputi Wilayah Pengembangan **Subosukawonosraten** yang meliputi wilayah Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3) Kawasan Pendukung **Bregasmalang** (KI Brebes), meliputi:
 - a) Wilayah Pengembangan **Barlingmascakeb** yang meliputi wilayah Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen; dan
 - b) Wilayah Pengembangan **Petanglong** yang meliputi wilayah Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Pekalongan.

d. Kerangka Strategis dan Kebijakan Penguatan Konektivitas

Maksud dan tujuan penguatan konektivitas di Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- 1) Menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi utama untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan, melalui inter-modal *supply chains systems*;
- 2) Memperluas pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan aksesibilitas dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke *hinterland*-nya; dan
- 3) Menyebarkan manfaat pembangunan secara luas (pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan) melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan dalam rangka pemerataan pembangunan.

e. Penguatan Konektivitas (Intra Kawasan, Antar Kawasan, dan Konektivitas Internasional)

Salah satu strategi dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan suatu daerah dibutuhkan adanya penguatan konektivitas. Terkait hal tersebut terdapat 3 (tiga) prinsip konektivitas sebagai berikut:

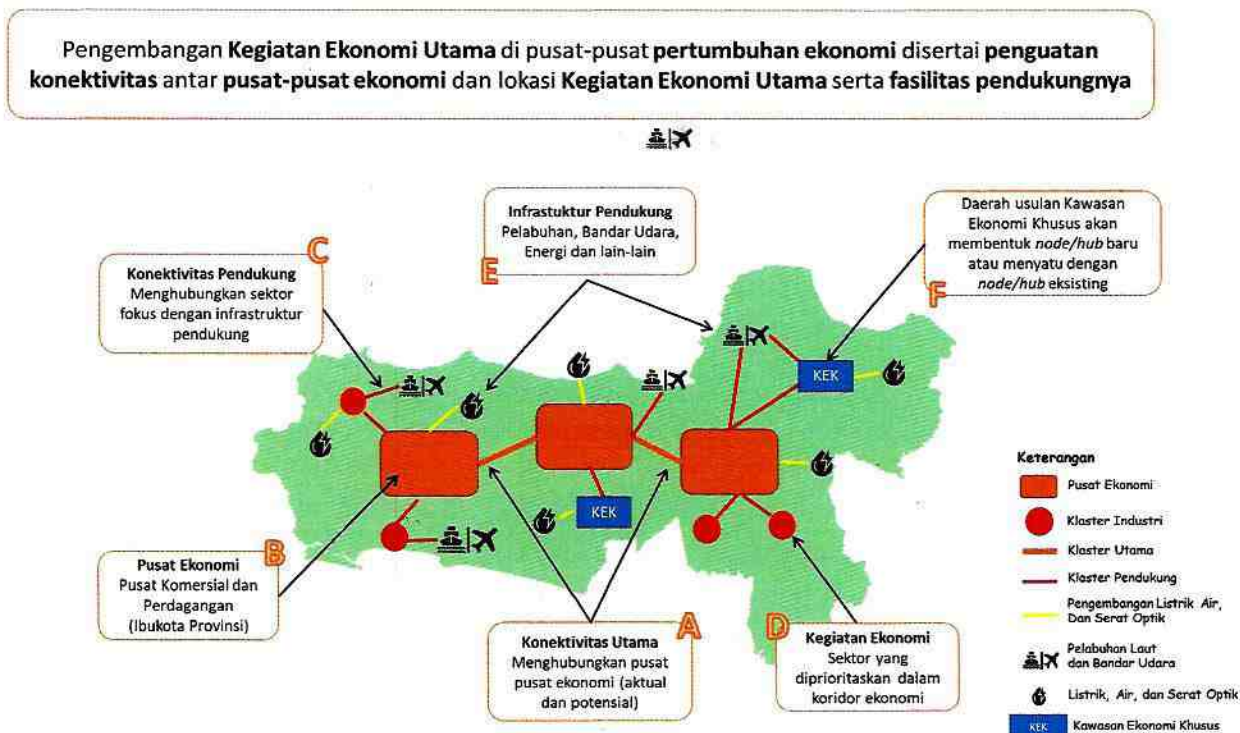
- 1) Konektivitas memaksimalkan pertumbuhan melalui keterpaduan kawasan (*inclusive development*) dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
- 2) Konektivitas memperluas pertumbuhan melalui keterkaitan hubungan wilayah-wilayah dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3) Konektivitas berdampak pada pencapaian pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut, maka konektivitas dibutuhkan untuk menginterkoneksi spasial guna mereduksi potensi terciptanya kesenjangan perekonomian dan kesejahteraan yang semakin tajam dalam masyarakat antar daerah di Jawa Tengah, juga diharapkan dapat terwujudnya keterkaitan yang bersifat sinergis dan simbiosis mutualisme dalam berbagai kegiatan pembangunan wilayah, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah yang tentunya akan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 9 : Konsep Penguatan Konektivitas Jawa Tengah

Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah sangat tergantung pada terwujudnya konektivitas Pusat-Pusat Pertumbuhan (intra dan antar kawasan)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

maupun konektivitas ekonomi lokal/regional Jawa Tengah dengan pasar nasional dan internasional. Dengan pertimbangan tersebut Rencana Induk menetapkan penguatan konektivitas sebagai salah satu dari 5 (lima) pilar utama.

Konektivitas merupakan pengintegrasian 4 (empat) komponen kebijakan yang terdiri dari Sistem Logistik, Sistem Transportasi, Pengembangan wilayah, Teknologi Informasi dan Komunikasi/Information and Communication Technology (TIK/ICT), dalam kerangka dan cara pandang yang utuh. Upaya ini perlu dilakukan agar dapat diwujudkan konektivitas yang berdaya guna dan berdaya saing.

Saat ini permasalahan logistik internasional dan nasional sulit dipisahkan dari masalah logistik regional di Jawa Tengah, yang memerlukan sinkronisasi berbagai kebijakan-kebijakan yang ada, mulai dari perencanaan tata ruang, alur rantai pasokan, dan memperkuat ketahanan rantai pasokan terhadap gangguan atau bencana. Salah satu permasalahan di Jawa Tengah adalah masih tingginya biaya logistik ke berbagai destinasi yang menjadikan aktivitas perekonomian Jawa Tengah menjadi kurang kompetitif. Ke depannya, diperlukan strategi dan upaya yang kuat dalam perbaikan tata kelola kepelabuhanan di Jawa Tengah.

Selain biaya logistik jalur laut, biaya logistik jalur darat dan udara di Jawa Tengah pun perlu diperhatikan dalam upaya optimasi konektivitas infrastruktur kedepannya. Dibutuhkan mekanisme pengendalian biaya logistik yang andal, agar biaya logistik jalur darat dan udara dapat dikurangi untuk menarik lebih banyak investor, serta mengoptimasi kegiatan usaha di Jawa Tengah.

Percepatan dan pemerataan pembangunan kawasan membutuhkan strategi penguatan konektivitas yang mampu menghubungkan infrastruktur dengan sentra produksi ekonomi. Strategi penguatan konektivitas dilakukan baik antar Kawasan Ekonomi, intra Kawasan Ekonomi hingga konektivitas internasional untuk mendorong percepatan pendapatan daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Gambar 1 : Strategi Penguatan Konektivitas Antar Kawasan Ekonomi, Intra Kawasan Ekonomi hingga Konektivitas Internasional

Konsepsi tersebut akan menjadi tulang-punggung di Jawa Tengah yang membentuk postur konektivitas regional, nasional sampai dengan internasional dan sekaligus diharapkan berfungsi menjadi instrumen pendorong dan penarik keseimbangan ekonomi wilayah, yang tidak hanya dapat mendorong kegiatan ekonomi yang lebih merata ke seluruh wilayah Jawa Tengah, tetapi dapat juga menciptakan kemandirian dan daya saing ekonomi Jawa Tengah yang kompetitif.

Untuk mencapai pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional, pembangunan dilakukan dengan pendekatan integrasi sektoral dan regional dengan penguatan konektivitas. Sebagai bentuk penguatan konektivitas, alokasi APBN untuk penyediaan infrastruktur Indonesia terus meningkat, begitu pula dengan partisipasi swasta dalam mendukung penyediaan infrastruktur di Indonesia. Pembangunan infrastruktur diantaranya melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) mencapai total investasi Rp4.180 Triliun, dengan total investasi di Jawa Tengah mencapai Rp439,5 Triliun.

Adapun penguatan konektivitas serta pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah telah di implementasikan melalui

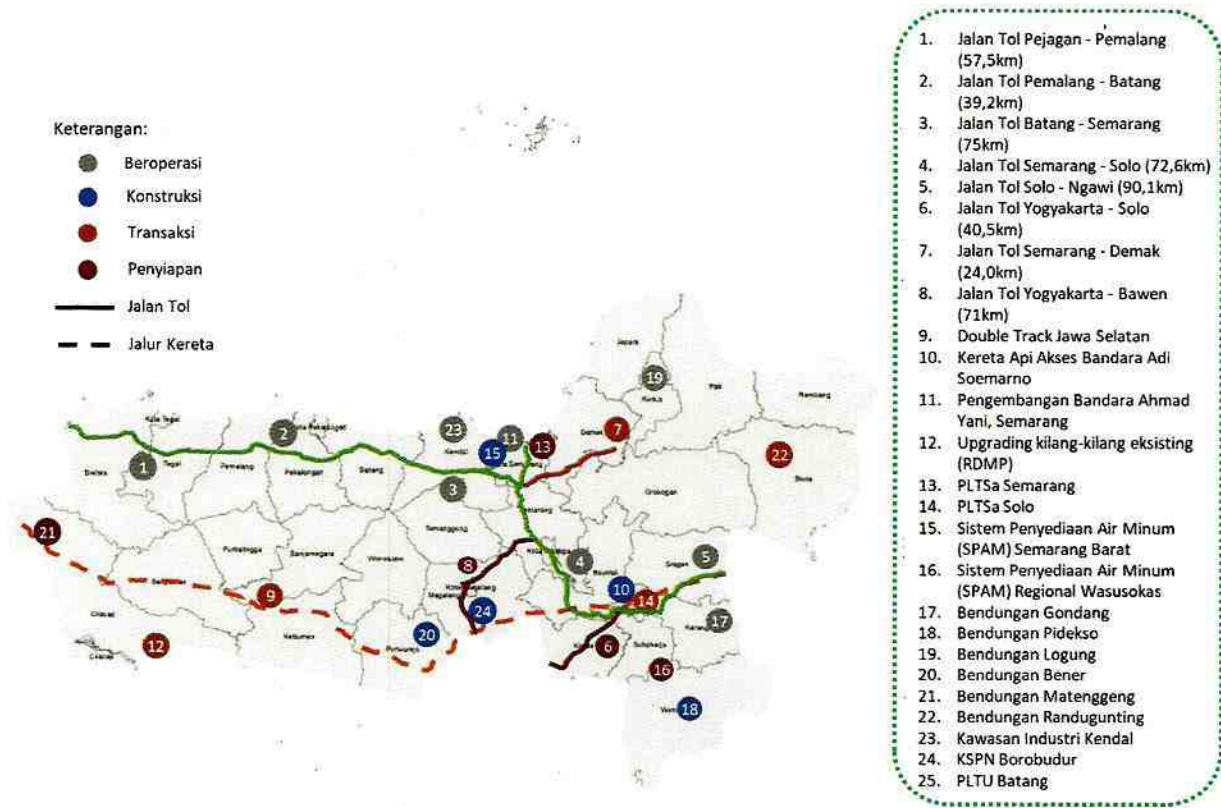


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional terdapat 25 (dua puluh lima) proyek. Tantangan selanjutnya adalah percepatan konektivitas antara PSN yang telah dibangun dengan sentra produksi ekonomi, seperti kawasan industri, sentra pertanian, dan perdagangan, serta kawasan destinasi pariwisata.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Gambar 10 : Persebaran PSN Infrastruktur

Sumber: Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), 2019

Tabel 2 : Pembangunan Infrastruktur PSN

No	PSN	Status Proyek
1	Jalan Tol Pejagan - Pemalang (57,5km)	Beroperasi
2	Jalan Tol Pemalang - Batang (39,2km)	Beroperasi
3	Jalan Tol Batang - Semarang (75km)	Beroperasi
4	Jalan Tol Semarang - Solo (72,6km)	Beroperasi
5	Jalan Tol Solo - Ngawi (90,1km)	Beroperasi
6	Jalan Tol Yogyakarta - Solo (40,5km)	Penyiapan
7	Jalan Tol Semarang - Demak (24,0km)	Transaksi
8	Jalan Tol Yogyakarta - Bawen (71km)	Penyiapan
9	Double Track Jawa Selatan	Penyiapan
10	Kereta Api Akses Bandara Adi Soemarno	Konstruksi
11	Pengembangan Bandara Ahmad Yani, Semarang	Beroperasi
12	Upgrading kilang-kilang eksisting (RDMP)	Transaksi
13	PLTSa Semarang	Penyiapan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	PSN	Status Proyek
14	PLTSA Solo	Transaksi
15	SPAM Semarang Barat	Konstruksi
16	SPAM Regional Wasusokas	Penyiapan
17	Bendungan Gondang	Konstruksi
18	Bendungan Pidekso	Konstruksi
19	Bendungan Logung	Operasi
20	Bendungan Bener	Konstruksi
21	Bendungan Matenggeng	Penyiapan
22	Bendungan Randugunting	Transaksi
23	Kawasan Industri Kendal	Operasional
24	KSPN Borobudur	Konstruksi
25	PLTU Batang	Konstruksi

Sumber: Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIIP), 2019

f. Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor

Dalam upaya peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi kawasan di Jawa Tengah, perlu didorong ekspor terutama untuk produk sektor unggulan seperti komoditas kayu dan pengolahan kayu, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, dan makan minum. Adapun pengendalian impor, dengan mendorong investasi industri hulu (tekstil dan produk tekstil) dan substitusi impor seperti makanan minuman, serat rayon, dan perisa. Untuk mendorong ekspor, perlu diberikan berbagai fasilitas kemudahan dan insentif fiskal pada industri berorientasi ekspor, selain itu perlu juga mendorong pengembangan produk-produk holtikultura yang mempunyai daya saing dan potensi ekspor tinggi.

g. Pemerataan Antarwilayah, Membuka Lapangan Kerja, Mengurangi Kemiskinan, dan Pengangguran

Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah ke depan didorong untuk semakin inklusif



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dan berkualitas, diharapkan akan berdampak pada percepatan penurunan kemiskinan dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Penyediaan *basic life access* untuk penduduk miskin perkotaan dan pedesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, dan kelompok rentan lainnya;
- 2) Penguatan *sustainable livelihood* (keberlanjutan ekonomi masyarakat) melalui: keberantaraan akses masyarakat terhadap modal dan jaminan kredit modal, teknologi, pasar, dan manajemen usaha, pengembangan *startup* wirausaha baru, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat, peningkatan peran dan produktivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes);
- 3) Penguatan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan antara lain melalui peningkatan dan perluasan pengelolaan basis data, dan basis spasial dengan pengelolaan dan pemanfaatan basis data terpadu; dan
- 4) Menurunkan pengangguran melalui upaya: peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.

h. Penguatan Kemampuan Sumber Daya Manusia

Peran sumber daya manusia yang berpendidikan menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Oleh karena itu, tujuan utama dalam sistem pendidikan dan pelatihan harus dapat menciptakan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia antara lain dengan meningkatkan kualitas pendidikan termasuk pendidikan tinggi, pendidikan menengah kejuruan, pengembangan pelatihan kerja, dan pengembangan lembaga sertifikasi yang berkaitan dan terintegrasi dengan klaster-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

klaster industri. Untuk itu perlu diimbangi dengan meningkatkan kegiatan dan pengembangan riset melalui kolaborasi antar Pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi.

3. Kebutuhan Program/Kegiatan dan Proyek Prioritas Dalam Rangka Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah

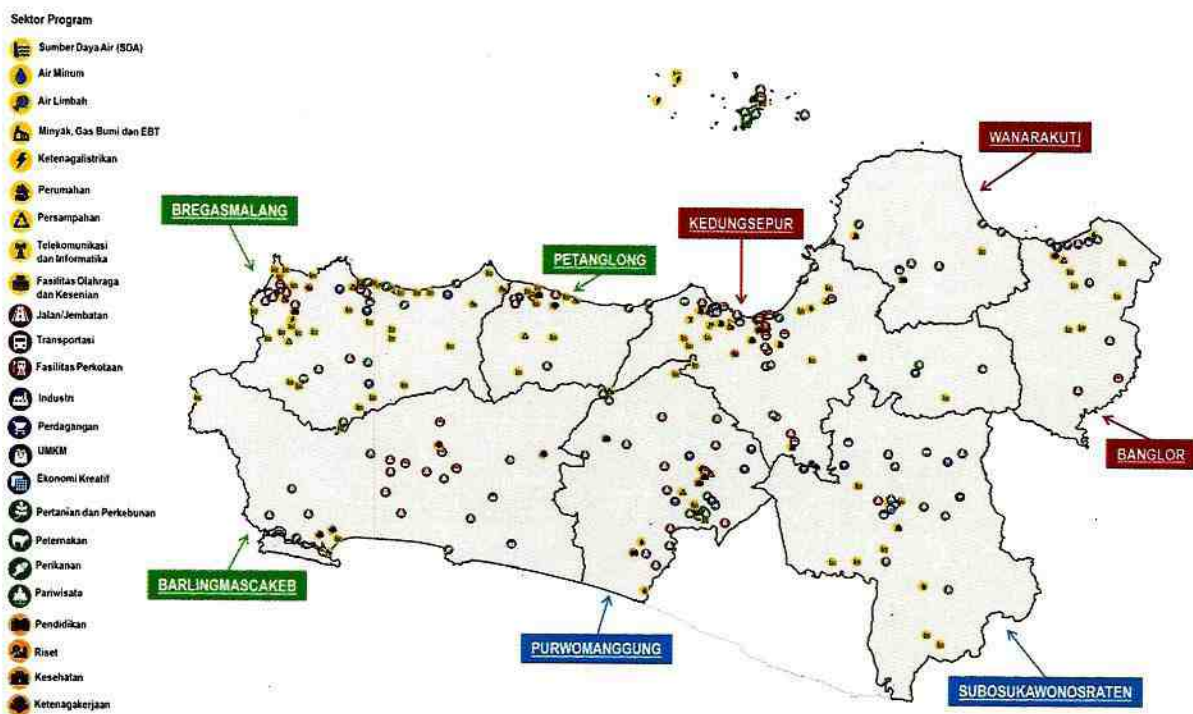
Berdasarkan potensi dan tantangan serta arah kebijakan percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah, maka dibutuhkan program/kegiatan dan proyek prioritas, diantaranya;

- a. Pengembangan kawasan ekonomi berbasis sektor unggulan baik sektor industri pengolahan dan manufaktur, pariwisata, pertanian dan perkebunan, peternakan, serta perikanan dan kelautan;
- b. Pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan konektivitas antar kawasan, seperti pembangunan dan rehabilitasi prasarana jalan/jembatan baik jalan tol dan jalan nasional, revitalisasi dan reaktivasi jalur kereta api, pembangunan pelabuhan, dan pengembangan bandara, serta pembangunan sistem transportasi perkotaan terpadu;
- c. Pembangunan infrastruktur lain yang menunjang kegiatan perekonomian kawasan di Jawa Tengah yang berorientasi pada optimalisasi sumber daya alam melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), bendungan, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan pengembangan sektor energi minyak dan gas bumi serta energi baru terbarukan untuk menunjang sektor ketenagalistrikan; pengembangan sistem telekomunikasi dan informatika; serta penyediaan perumahan termasuk fasilitas penunjang hingga sistem utilitas terpadu;
- d. Pengembangan sektor ekonomi lokal, baik melalui penciptaan serta pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, dan perdagangan; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menunjang kegiatan perekonomian serta mendorong pembangunan di bidang sosial baik melalui pengembangan sektor ketenagakerjaan melalui pusat pelatihan kerja, pengembangan pendidikan vokasi, riset, dan teknologi, serta sektor pembangunan di bidang kesehatan.



Gambar 11 : Persebaran Kebutuhan Program/ Kegiatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jawa Tengah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
BAB III

**POSTUR GEOGRAFI WILAYAH, EKONOMI, DAN KONEKTIVITAS
JAWA TENGAH**

1. Kondisi Geografi Wilayah Jawa Tengah

a. Wilayah Administrasi

Posisi astronomis Jawa Tengah terletak di $5^{\circ}40'$ - $8^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan $108^{\circ}30'$ - $111^{\circ}30'$ Bujur Timur. Secara administratif, di sebelah selatan berbatasan dengan DI Yogyakarta; di sebelah barat berbatasan dengan Jawa Barat; di bagian timur berbatasan dengan Jawa Timur. Selain itu, Jawa Tengah diapit oleh 2 (dua) wilayah perairan, yaitu Laut Jawa di sebelah utara dan Samudera Hindia di sebelah selatan.

Ibukota Jawa Tengah berkedudukan di Kota Semarang. Jawa Tengah terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) kabupaten dan 6 (enam) kota, serta memiliki 573 kecamatan yang meliputi 7.809 desa dan 769 kelurahan.



Gambar 12 : Peta Administratif Jawa Tengah

Sumber: Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta (2018) dan BPS Jawa Tengah (2019)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 3 : Luas Wilayah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah

Kabupaten	Data Administrasi	
	Luas(km ²)	Persentase
1. Cilacap	2.124,47	6,48
2. Banyumas	1.335,30	4,07
3. Purbalingga	677,55	2,07
4. Banjarnegara	1.023,73	3,12
5. Kebumen	1.211,74	3,69
6. Purworejo	1.091,49	3,33
7. Wonosobo	981,41	2,99
8. Magelang	1.102,93	3,36
9. Boyolali	1.008,45	3,07
10. Klaten	658,22	2,01
11. Sukoharjo	489,12	1,49
12. Wonogiri	1.793,67	5,47
13. Karanganyar	775,44	2,36
14. Sragen	941,54	2,87
15. Grobogan	2.013,86	6,14
16. Blora	1.804,59	5,50
17. Rembang	887,13	2,70
18. Pati	1.489,19	4,54
19. Kudus	425,15	1,30
20. Jepara	1.059,25	3,23
21. Demak	900,12	2,74
22. Semarang	950,21	2,90
23. Temanggung	837,71	2,55
24. Kendal	1.118,13	3,41
25. Batang	788,65	2,40
26. Pekalongan	837,00	2,55
27. Pemasang	1.118,03	3,41
28. Tegal	876,10	2,67
29. Brebes	1.902,37	5,80

Kota	Data Administrasi	
	Luas(km ²)	Persentase
1. Magelang	16,06	0,05
2. Surakarta	46,01	0,14
3. Salatiga	57,36	0,17
4. Semarang	373,78	1,14
5. Pekalongan	45,25	0,14
6. Tegal	39,68	0,12
Jawa Tengah	32.800,69	100

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2018

Luas wilayah Jawa Tengah 32.800,69 km² atau 25,60% dari luas Pulau Jawa. Wilayah tersebut meliputi daratan di bagian tengah Pulau Jawa serta pulau-pulau kecil, yakni Kepulauan Karimunjawa di Kabupaten Jepara dan Pulau Nusakambangan di Kabupaten Cilacap. Wilayah kabupaten/kota terluas adalah Kabupaten Cilacap dengan luas 2.124,47km² atau 6,48% dari luas Jawa Tengah, sedangkan wilayah terkecil Kota Magelang dengan luas 16,06 km² atau 0,05% dari luas Jawa Tengah.

b. Kondisi Fisik Wilayah

Topografi wilayah Jawa Tengah memiliki relief yang beragam, yaitu dataran, landai, bergelombang, perbukitan, hingga pegunungan terjal. Pada wilayah pegunungan terjal terdapat zona



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

gunung api dengan titik tertinggi berada di puncak Gunung Slamet (3.434 meter di atas permukaan laut/mdpl). Wilayah pegunungan, dataran tinggi, serta gunung api ini menempati bagian tengah yang membujur dari arah barat ke timur sejajar dengan Pulau Jawa, sedangkan wilayah dataran rendah, hampir tersebar di seluruh wilayah pesisir pantai utara maupun pesisir pantai selatan Pulau Jawa.



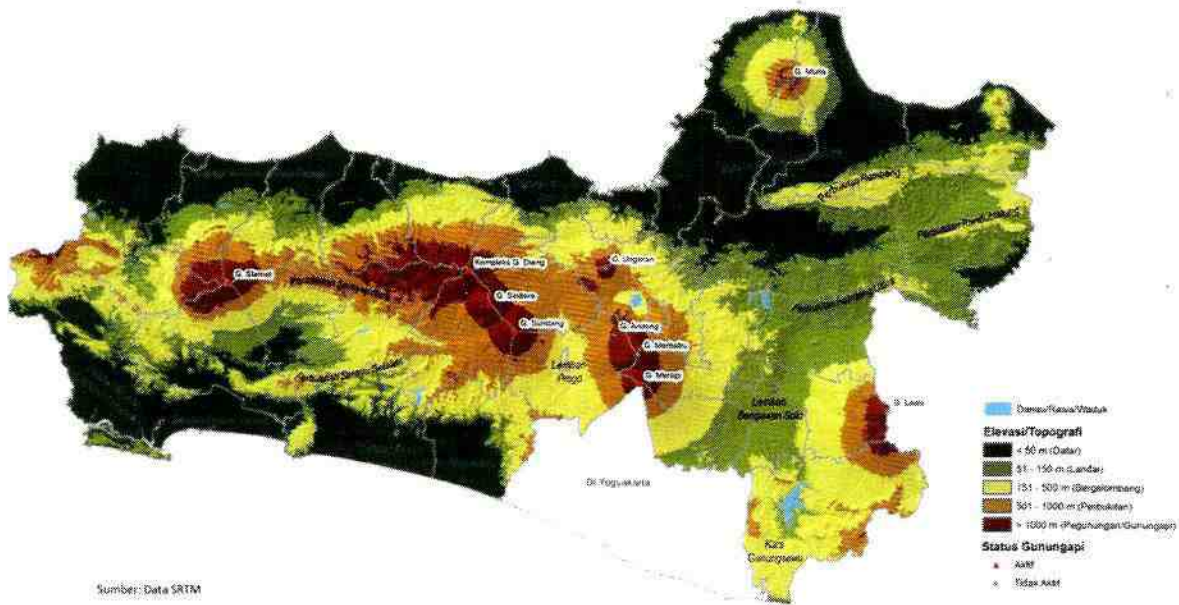
Gambar 13 : Peta Topografi 3 Dimensi Jawa Tengah

Sumber: Data Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), 2019

Secara geomorfologis, Jawa Tengah memiliki segmen perbukitan diantaranya: (1) Perbukitan Serayu Utara dan Selatan di bagian barat Jawa Tengah, (2) Perbukitan kapur Kendeng, Randublatung, dan Rembang di bagian timur laut Jawa Tengah yang terhubung hingga ke Jawa Timur dengan potensi galian tambang batu kapur dan gamping, dan (3) Perbukitan karst yang mengandung batuan karbonat gamping berada di Karst Karangbolong (selatan Kebumen) serta Karst Gunungsewu (selatan Wonogiri). Kedua perbukitan karst ini berpotensi dikembangkan untuk sektor pendidikan (penelitian) dan pariwisata.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Gambar 14 : Peta Kondisi Fisik Topografi Jawa Tengah

Sumber: Data SRTM, 2019

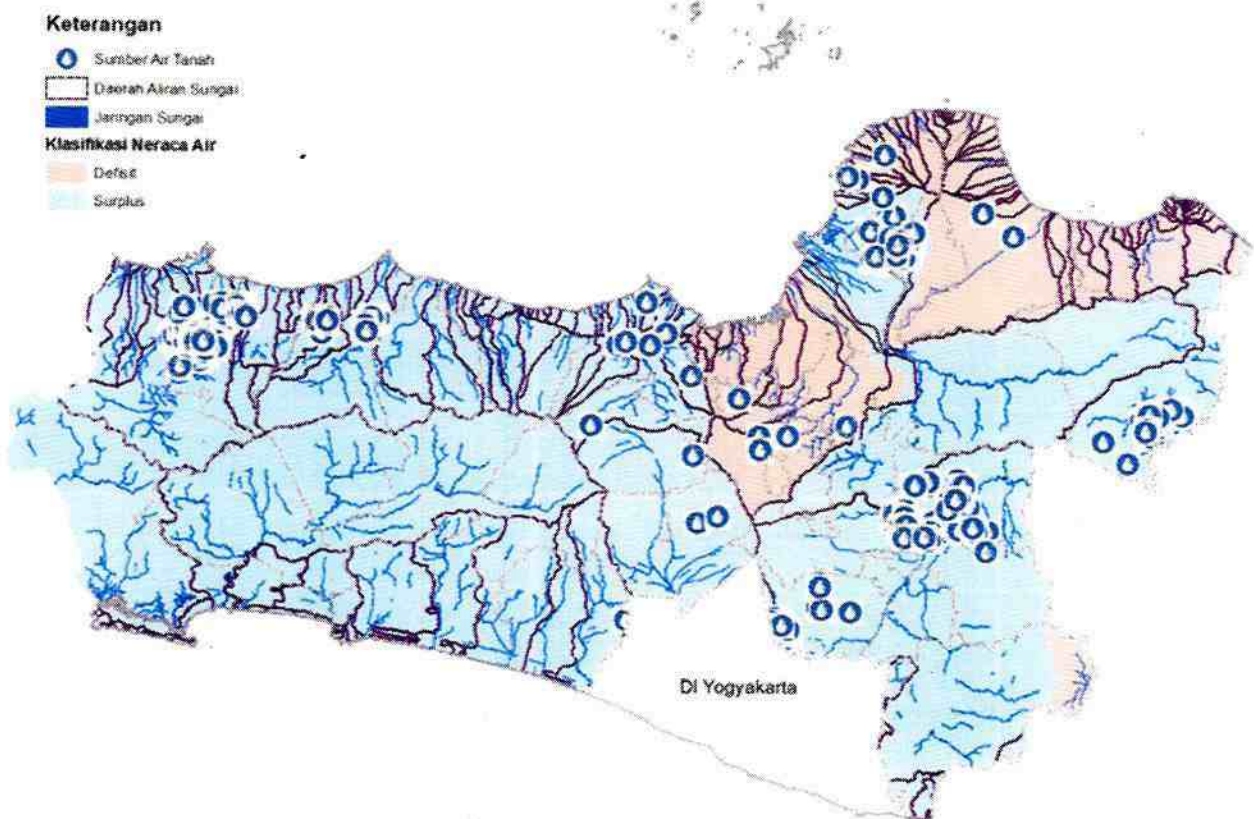
Berdasarkan profil geomorfologis, Jawa Tengah dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik gunung api kuartar yang tersebar di bagian tengah sebelah barat, yaitu gunung api aktif seperti: Gunung Slamet, Gunung Sindoro-Sumbing, Kompleks Vulkanik Dieng, Gunung Merapi-Merbabu, Gunung Andong-Telomoyo, serta gunung tidak aktif seperti Gunung Lawu dan Gunung Ungaran. Selain itu, terdapat gunung api purba yang berlokasi jauh di utara dan terpisah dari rangkaian gunung api lainnya, yakni Gunung Muria dan Gunung Lasem.

Proses vulkanik gunung api di bagian tengah mendorong terbentuknya material tanah yang subur dan kaya kandungan mineral sehingga berpotensi untuk mendukung pengembangan pertanian dan perkebunan di Jawa Tengah. Kekayaan sumber daya alam akibat aktivitas vulkanik direpresentasikan dengan munculnya potensi mata air panas hingga panas bumi untuk pembangkit listrik yang saat ini dimanfaatkan khususnya di Dataran Tinggi Dieng.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Aktivitas gunung api juga memicu terbentuknya mata air yang menjadi sumber air baku sungai-sungai besar di Jawa Tengah, seperti: Sungai Serayu (Barlingmascakeb dan Wonosobo), Sungai Bengawan Solo (Subosukawonosraten), Sungai Progo (Purwomanggung), Wilayah Sungai Jratunseluna (Wanarakuti, Banglor, dan Kedungsepur), Sungai Luk Ulo - Bogowonto (Purworejo, Wonosobo, dan Kebumen), Sungai Bodri - Kuto (Kedungsepur), dan Sungai Pemali - Comal (Petanglong-Bergasmalang). Keberadaan aliran sungai di Jawa Tengah berfungsi pula untuk mendukung suplai air tanah dengan debit yang beragam, sebagai sumber daya air baku permukaan, pemenuhan kebutuhan irigasi, dan pembangkit listrik pada bendungan-bendungan.



Gambar 15 : Peta Daerah Aliran Sungai Jawa Tengah

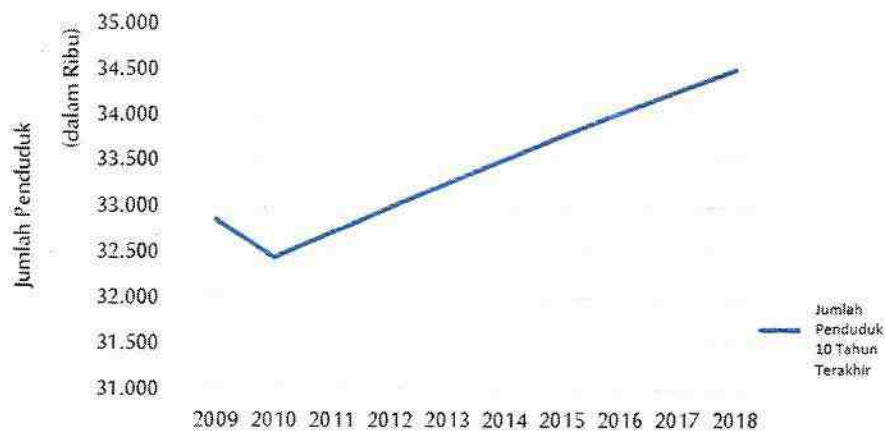
Sumber: Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2018



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

c. Kependudukan

Data kependudukan tahun 2019 menunjukkan total penduduk tahun 2018 sebanyak 34.490.835 jiwa yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Jumlah penduduk tersebut meningkat berdasarkan data 10 (sepuluh) tahun terakhir (2009 – 2018) dengan rata-rata peningkatan sebanyak 162.627 jiwa.



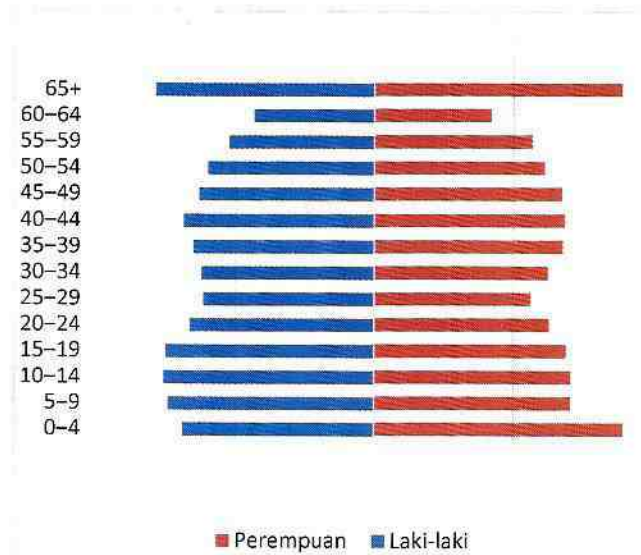
Gambar 16 : Grafik Jumlah Penduduk 10 tahun Terakhir (2009 – 2018) di Jawa Tengah

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2019 (Data Diolah)

Penduduk Jawa Tengah didominasi usia produktif/angkatan kerja berdasarkan piramida penduduk dan rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Piramida penduduk Jawa Tengah menunjukkan tipe piramida stasioner, yaitu penduduk Jawa Tengah didominasi struktur penduduk usia produktif/angkatan kerja (15 - 64 tahun) sebanyak 26.145.271 jiwa atau 75,8% dari total penduduk Jawa Tengah. Sementara itu, kelompok usia tidak produktif (< 14 tahun dan >64 tahun) hanya 32,2% dari total penduduk Jawa Tengah atau sejumlah 11.127.649 jiwa. Berdasarkan rasio ketergantungan yang menunjukkan angka sebesar 42,5, setiap 100 penduduk produktif menanggung beban 42 penduduk tidak produktif.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Gambar 17 : Piramida Penduduk Jawa Tengah
Sumber: BPS Jawa Tengah, 2019 (Data Diolah)

Berdasarkan jumlah usia produktif dan rasio ketergantungan, Jawa Tengah mengalami bonus demografi. Bonus demografi dimaknai sebagai keuntungan ekonomis yang didapatkan akibat semakin besarnya jumlah penduduk produktif. Hal ini menjadi potensi besar bagi Jawa Tengah untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

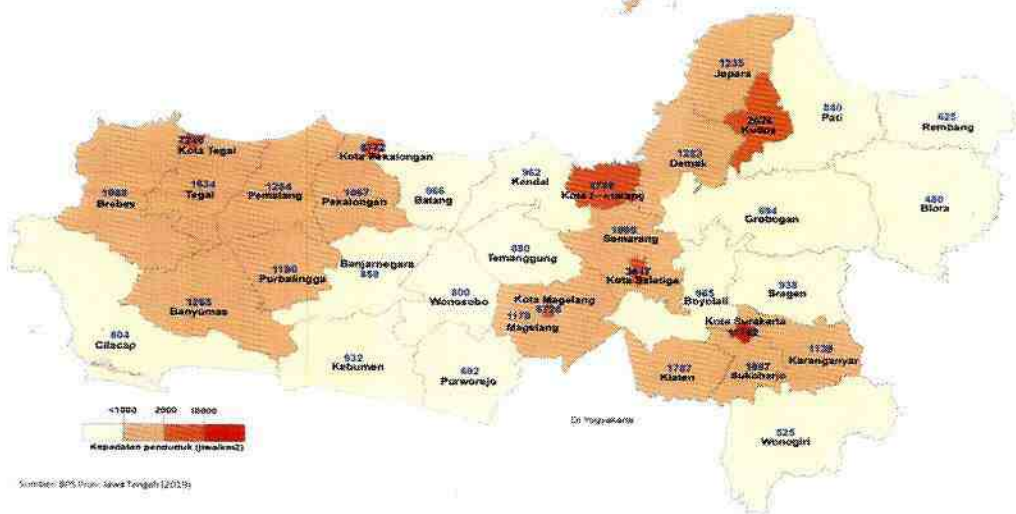
Peluang bonus demografi diproyeksikan hanya terjadi sampai tahun 2030. Hal ini memerlukan arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang tepat, antara lain penyiapan kualitas sumber daya manusia yang akan masuk ke angkatan kerja terutama sektor padat karya seperti industri, penyiapan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, penerapan kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, serta penerapan strategi *link and match* dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Kepadatan penduduk di Jawa Tengah tahun 2018 tercatat sebesar 1.060 jiwa/km². Nilai ini meningkat dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar 1.051 jiwa/km². Sebaran kepadatan penduduk di kabupaten/kota menunjukkan bahwa Kota Surakarta menjadi kota dengan kepadatan penduduk tertinggi sebesar 11.770



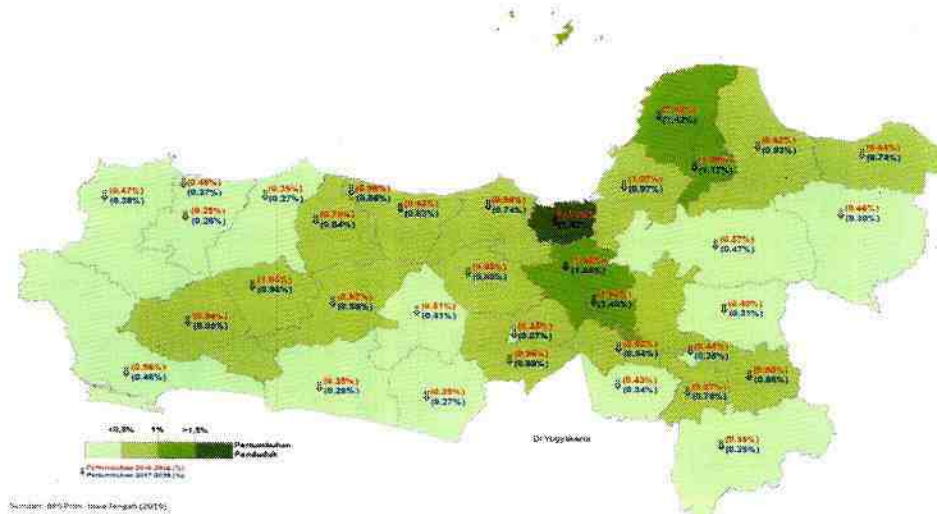
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

jiwa/km², sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kabupaten Blora sebesar 481 jiwa/km².



Gambar 18 : Peta Kepadatan Penduduk Jawa Tengah
Sumber: BPS Jawa Tengah, 2019

Berdasarkan data laju pertumbuhan penduduk tahun 2010 sampai dengan tahun 2018, seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah mengalami penurunan laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kota Semarang dengan presentase sebesar 1,62%. Hal tersebut dikarenakan Kota Semarang merupakan pusat ekonomi, pemerintahan, dan pendidikan sehingga mendorong banyaknya migrasi masuk dari para pekerja dan pelajar.



Gambar 19 : Peta Pertumbuhan Penduduk Jawa Tengah
Sumber : BPS Jawa Tengah, 2019



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. Postur Ekonomi Jawa Tengah

a. Kontribusi Jawa Tengah Terhadap Perekonomian Nasional



Gambar 20 : PDRB Jawa Tengah Berdasarkan Lapangan Usaha (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2018

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2019

Pada triwulan II tahun 2019, perekonomian Jawa Tengah menyumbang 8,57% terhadap perekonomian nasional, atau 14,37% terhadap perekonomian Pulau Jawa. Dengan besaran persentase tersebut, Jawa Tengah menjadi penyumbang keempat terbesar dalam perekonomian nasional maupun Pulau Jawa setelah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Pelaksanaan pembangunan nasional harus memperhatikan aspek pemerataan antar-sektor maupun pemerataan pembangunan ekonomi antar kota dan desa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kontribusi PDRB per Sektor Jawa Tengah Terhadap PDB Nasional



Gambar 21 : Kontribusi PDRB per Sektor Jawa Tengah terhadap Nasional 2018

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2019

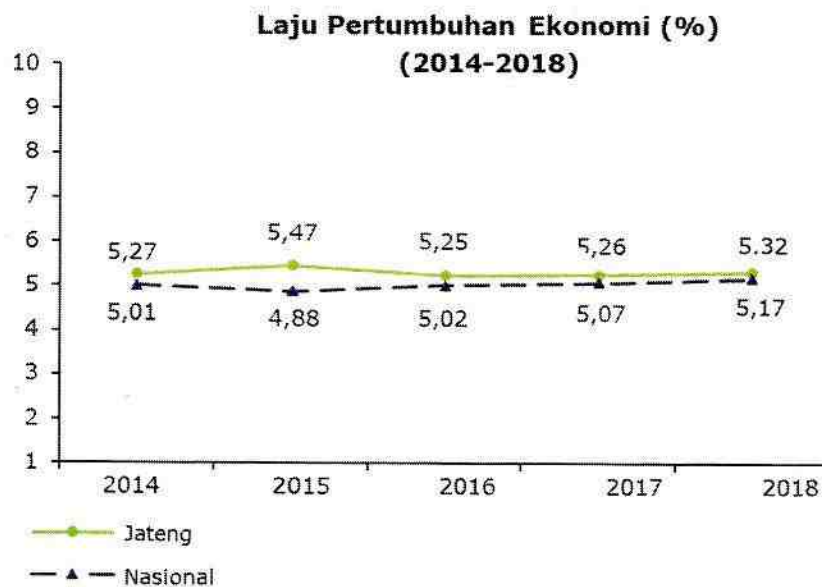
Sektor industri pengolahan di Jawa Tengah memberikan kontribusi terhadap industri manufaktur nasional sebesar 16,74% yang merupakan sektor penyumbang tertinggi bagi PDRB. Di sisi lain sektor jasa pendidikan memberikan kontribusi sebesar 11,83% terhadap PDRB sektor pendidikan. Kontribusi Jawa Tengah yang paling kecil terhadap perekonomian nasional adalah sektor gas dan listrik sebesar 0,69%.

b. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II tahun 2019 tercatat sebesar 5,62% (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2019 sebesar 5,12% (yoy). Kinerja perekonomian Jawa Tengah tersebut berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat pada level 5,05% (yoy). Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan laju perekonomian Kawasan Jawa yaitu sebesar 5,68% (yoy).



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA



Gambar 22 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah 2014-2018

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2019

Capaian pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tersebut sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II tahun 2019 berada pada kisaran 5,3%-5,7% (yoy). Pada triwulan II tahun 2019, Jawa Tengah termasuk dalam provinsi yang tumbuh terakselerasi sebesar 5,62% (Sumber: Bank Indonesia, 2019).

Tabel 4 : Laju Pertumbuhan Komponen PDRB Jawa Tengah

Komponen PDRB	2014	2015	2016	2017	2018
Konsumsi Rumah Tangga	4,31	4,45	4,56	4,62	4,69
Konsumsi Lembaga Nonprofit	8,62	-3,04	5,61	4,43	7,62
Konsumsi Pemerintah	2,91	2,61	-0,58	3,07	2,98
Investasi	4,52	5,24	5,99	7,5	7,68
Perubahan Inventori	-22,63	-68,78	49,25	4,97	5,92
Ekspor Luar Negeri	10,66	0,28	-3,02	13,54	12,02
Net Ekspor Antar Wilayah	-6,8	1,46	2,8	0,6	46,66
Impor	-7,29	-15,27	-4,37	9,58	32,61

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2019



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan komponen pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran Jawa Tengah tahun 2014-2018, net ekspor antarwilayah mencatatkan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 yaitu mencapai 46,66% yang disebabkan oleh naiknya aktivitas perdagangan antarwilayah. Di samping itu, pengeluaran dari sisi impor mengalami pertumbuhan sebesar 32,61% pada tahun 2018, yaitu dari impor bahan baku yang sejalan dengan naiknya ekspor antarwilayah. Disisi lain, pertumbuhan yang cukup stagnan terjadi pada konsumsi pemerintah pada kisaran 2%-3% dan pengeluaran pada konsumsi rumah tangga pada kisaran 4,31%-4,69%.

c. Penanaman Modal dan Investasi

Kinerja pembangunan urusan penanaman modal ditunjukkan melalui indikator pertumbuhan proyek Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN. Jumlah proyek investasi di Jawa Tengah pada tahun 2014-2018 cenderung meningkat. Pada tahun 2014, jumlah proyek investasi sebanyak 407 proyek, dan meningkat menjadi 3.653 proyek di tahun 2018, yang terdiri dari 1.380 proyek PMA dan 2.273 proyek PMDN.

Tabel 5 : Jumlah Proyek PMDN dan PMA di Jawa Tengah Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahun 2014 - 2018

Tahun	Jumlah Proyek			Pertumbuhan Proyek PMA dan PMDN (%)
	PMA	PMDN	Jumlah	
2014	224	183	407	38,91
2015	608	873	1.481	263,88
2016	1.060	1.008	2.068	39,64
2017	955	1.403	2.358	14,02
2018	1.380	2.273	3.653	54,9

Realisasi investasi PMDN dan PMA di Jawa Tengah pada periode tahun 2014-2018 menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dimana pada tahun 2014 realisasi investasi sebesar Rp18,588 triliun meningkat tajam menjadi Rp59,27 triliun di tahun 2018. Peningkatan jumlah proyek dan realisasi investasi ini mengindikasikan bahwa Jawa Tengah memiliki prospek dan daya tarik bagi para investor seiring dengan peningkatan kualitas infrastruktur, penetapan upah tenaga kerja yang kompetitif, rencana pembangunan kawasan industri pada beberapa daerah, peningkatan pelayanan melalui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan komitmen pemerintah daerah melalui kebijakan pro investasi. Perkembangan nilai investasi PMDN dan PMA dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6 : Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN dan PMA berdasarkan LKPM Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

Tahun	Nilai Investasi (Rp triliun)			Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN (%)
	PMA	PMDN	Jumlah	
2014	4,986	13,602	18,588	9,45
2015	10,630	15,411	26,041	40,10
2016	14,113	24,070	38,183	46,63
2017	31,673	19,866	51,539	34,98
2018	31,790	27,474	59,270	15,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jawa Tengah, 2019

Berdasarkan hasil analisis *Incremental Capital-Output Ratio* (ICOR) diperoleh nilai sebesar 5,53 pada tahun 2019 dan 5,21 pada tahun 2023. Penurunan nilai ICOR tersebut menunjukkan bahwa investasi telah dilakukan dengan efisien. Kebutuhan pembiayaan pada tahun 2019 kurang lebih sebesar Rp466 triliun dan pada tahun 2023 sebesar Rp774 triliun, sehingga total kebutuhan investasi pembangunan di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2019 – 2023 sebesar Rp3.058 triliun.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 7 : Kebutuhan Investasi dan Asumsi ICOR Jawa Tengah

Tahun	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	Kebutuhan Investasi	
		Pembentukan Modal Bruto (PMTB) HB (Rp juta)	Asumsi ICOR
2019	5,66	466.000.678	5,5
2020	5,99	530.939.767	5,4
2021	6,33	603.254.088	5,37
2022	6,66	684.076.443	5,29
2023	7,00	774.411.823	5,21
TOTAL		3.058.682.799	

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jawa Tengah, 2019

d. Tenaga Kerja

Peningkatan nilai investasi PMA dan PMDN memberikan pengaruh positif pada penyerapan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang terserap pada investasi PMA dan PMDN di tahun 2014 sebanyak 81.362 orang dan meningkat menjadi sebanyak 84.447 orang pada tahun 2018.

Tabel 8 : Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan LKPM Jawa Tengah Tahun
2014 – 2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMA/PMDN	81.362	89.638	175.212	129.240	84.447
Jumlah seluruh Proyek PMA/PMDN	407	1.481	2.068	2.358	2.279

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jawa Tengah, 2019



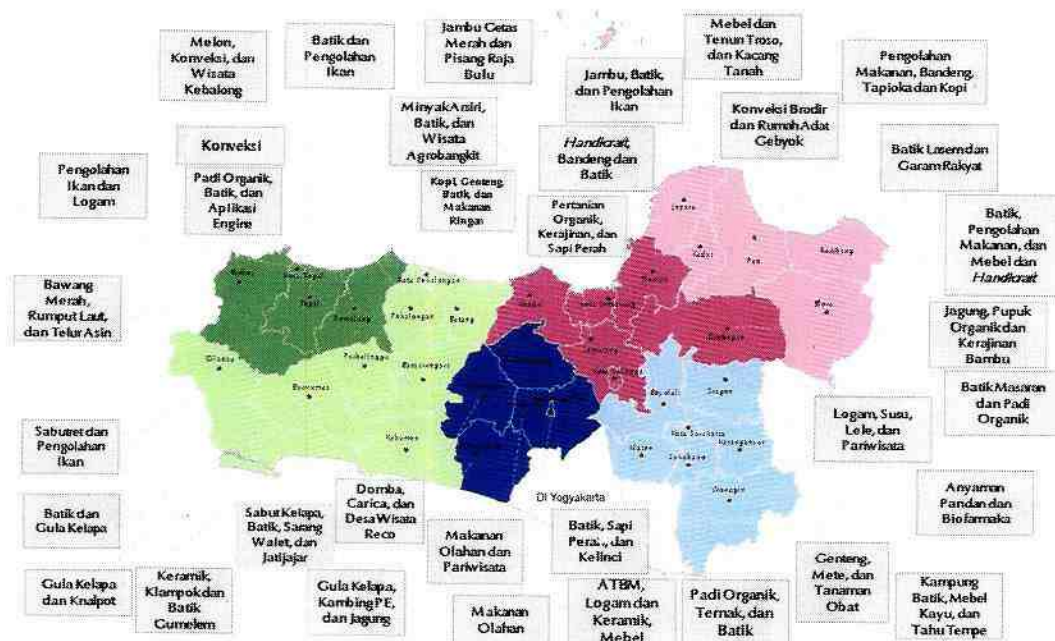
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. Sektor/Kegiatan Ekonomi Prioritas Jawa Tengah

Kegiatan ekonomi prioritas Jawa Tengah ditopang oleh empat sektor utama yaitu industri pengolahan, perdagangan, pertanian, kehutanan dan perikanan, serta jasa dan pariwisata.



Gambar 1 : Kontribusi PDRB dari Empat Sektor Utama Kegiatan Ekonomi Prioritas di Jawa Tengah



Gambar 24 : Peta Profil Komoditas Mitra Binaan PEL Jawa Tengah

Sumber: Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, 2019



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

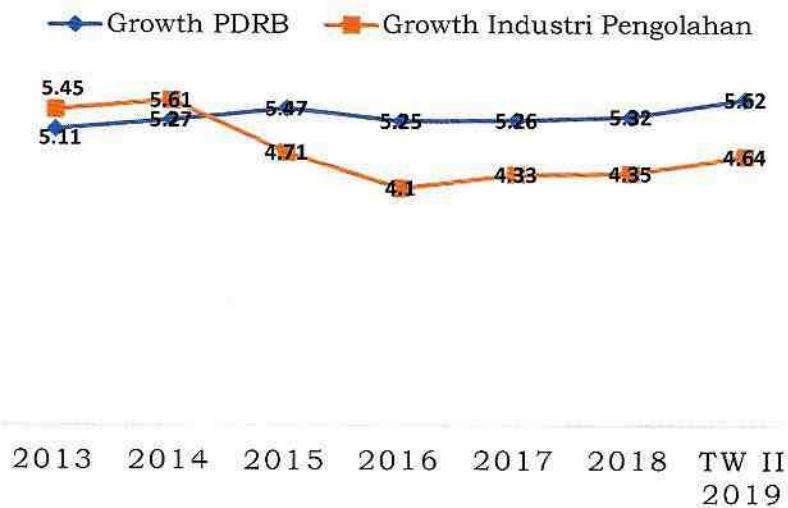
a. Sektor Industri Pengolahan

Pelemahan volume perdagangan dunia akibat perlambatan ekonomi global telah mempengaruhi kinerja industri di Jawa Tengah. Impor bahan baku industri menurun sebesar 5,55% (yoy) pada triwulan I tahun 2019, terutama pada produk tekstil, bahan kimia, logam, bahan makanan, dan migas. Industri yang mengalami penurunan pertumbuhan adalah industri besar dan sedang, sementara industri kecil dan mikro cenderung mengalami penguatan. Adanya perlambatan industri besar terjadi pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) sejak tahun 2012, padahal sektor ini memiliki potensi besar menyumbang 8,2% terhadap PDRB industri pengolahan. Industri lain yang melambat akibat penurunan impor bahan baku adalah industri makanan dan minuman; pengolahan tembakau; dan industri batu bara dan pengilangan migas. Di sisi lain ditinjau dari nilai ekspor, terdapat potensi industri yang konsisten menyumbang surplus perdagangan yakni industri kayu dan mebel serta TPT yang menyumbang surplus perdagangan dengan pangsa pasar mencapai 48% dari total ekspor Jawa Tengah. Industri makan minum selalu tercatat defisit (net impor). Oleh karena itu, diperlukan penciptaan industri-industri yang berpeluang melakukan substitusi bahan baku impor serta menggerakkan surplus perdagangan untuk memacu pertumbuhan industri pengolahan Jawa Tengah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

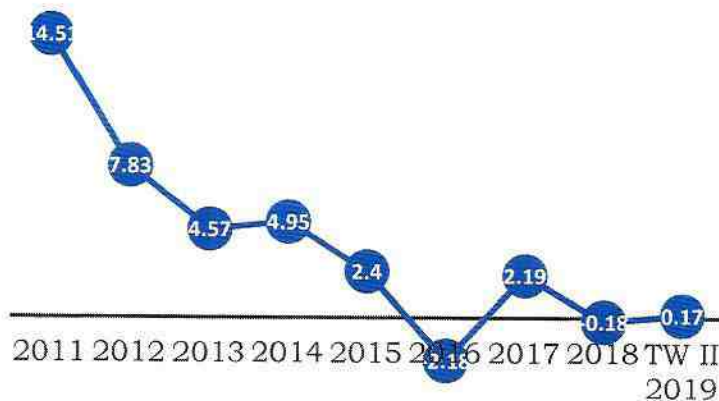
Pertumbuhan PDRB dan Industri Pengolahan



Gambar 25 : Pertumbuhan PDRB dan Industri Pengolahan di Jawa Tengah

Sumber: BPS Jawa Tengah dan Bank Indonesia, 2019

Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang



Gambar 26 : Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang di Jawa Tengah

Sumber: BPS Jawa Tengah dan Bank Indonesia, 2019

Pelemahan volume perdagangan dunia yang diakibatkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan ketegangan hubungan dagang antar negara serta perang dagang Amerika dan Tiongkok telah mempengaruhi kinerja ekspor Jawa Tengah yang mengalami penurunan. Di sisi lain, impor bahan baku industri mengalami penurunan sebesar 5,55% (yoy) pada triwulan I tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2019. Hal tersebut terjadi pada bahan baku industri pengolahan seperti produk tekstil, bahan kimia, logam, dan bahan makanan untuk industri. Selain itu, impor migas juga mengalami penurunan yang berakibat pada penurunan produksi industri kilang minyak.

Industri yang mengalami penurunan pertumbuhan adalah industri besar dan sedang, sementara industri kecil dan mikro cenderung mengalami penguatan. Berdasarkan data Bank Indonesia, Industri TPT memegang peranan penting terhadap perekonomian Jawa Tengah karena memiliki kontribusi terbesar keempat terhadap PDRB industri pengolahan. Subsektor industri ini menyumbang 8,2% terhadap PDRB industri pengolahan Jawa Tengah setelah industri makanan dan minuman, pengolahan tembakau, dan industri batu bara dan kilang migas. Pertumbuhan industri TPT menunjukkan tren yang cenderung melambat sejak tahun 2012, meskipun memasuki tahun 2016 mulai mengalami perbaikan.

Ditinjau dari sisi ekspor, subsektor pengolahan juga menjadi salah satu industri yang konsisten menyumbang surplus neraca perdagangan Jawa Tengah. Ekspor utama disumbangkan oleh komoditas TPT, kayu dan mebel, serta makan minum. Industri TPT serta kayu dan mebel secara konsisten selalu mengalami surplus neraca perdagangan dan menjadi penyumbang terbesar terhadap total ekspor Jawa Tengah, dengan pangsa mencapai 48%. Sementara itu, industri makan minum selalu tercatat defisit. Kedepannya perlu dipertimbangkan industri-industri yang berpeluang untuk dilakukan substitusi impor.

b. Sektor Perdagangan

Sektor perdagangan besar dan eceran pada semester I tahun 2019 mengalami pertumbuhan 6,34% (yoy), melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan I yang tercatat sebesar 6,80% (yoy). Secara umum pertumbuhan di sektor ini mencapai 5,70% dari tahun 2018 atau meningkat dari catatan tahun 2014 sebesar 4,7%. Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran ini berkaitan dengan berkembangnya industri pengolahan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Gambar 27 : Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran
Sumber: BPS Jawa Tengah, 2019

c. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Jawa Tengah hingga Agustus 2019 tercatat meningkat sebesar 5,18% (yoy). Khusus untuk sektor pertanian tercatat meningkat cukup signifikan dari pencapaian pada triwulan I tahun 2019 yang tercatat tumbuh 0,93% (yoy) (Bank Indonesia, 2019). Terjadinya penguatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada triwulan I tahun 2019 diperoleh dari subsektor tanaman pangan (padi).

d. Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan penyumbang PDRB keempat terbesar setelah industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Pada tahun 2018, sektor jasa pariwisata mencatatkan PDRB sebesar Rp120 triliun atau berkontribusi sebesar 9,79% terhadap PDRB Jawa Tengah. Pengembangan kepariwisataan menjadi penting untuk meningkatkan penerimaan daerah dan negara, serta memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan di Jawa Tengah.

Pada tahun 2018, jumlah wisatawan sebanyak 49,62 juta, terdiri atas 0,68 juta wisatawan asing, dan 48,94 juta wisatawan domestik. Jumlah wisatawan ini meningkat 21,32% dibanding tahun 2017 yang tercatat sebesar 40,90 juta. Selain itu, terdapat 2.006 usaha hotel di Jawa Tengah, dengan rata-rata durasi menginap tamu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

asing pada hotel berbintang selama 2,25 hari, sedangkan durasi menginap tamu domestik selama 1,41 hari.

Tabel 9 : Fasilitas Pariwisata Jawa Tengah

Tahun	Hotel Bintang	Hotel Non Bintang	Pondok Wisata	Restoran	Rumah Makan	Biro Perjalanan Wisata (BPW)	Agen Perjalanan Wisata (APW)
2018	291	1.130	765	294	1.588	211	313
2017	279	1.336	765	499	3.861	619	232
2016	240	1.387	823	280	2.567	673	159
2015	194	1.548	823	274	2.478	661	153
2014	183	1.198	823	268	2.429	648	150
2013	166	1.297	341	126	2.797	575	64

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2019

Konsep pengembangan pariwisata Jawa Tengah menghubungkan segitiga emas pariwisata Joglosemar yaitu Yogyakarta, Solo, dan Semarang, dengan Borobudur sebagai daya tarik utama. Pengembangan Joglosemar tidak hanya terfokus pada tiga daerah, namun juga termasuk daerah pengembangan di sekitarnya.

Potensi pariwisata Joglosemar dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pariwisata Semarang dan sekitarnya (Grobogan, Jepara, Demak, Kudus)

Sam Poo Kong	Museum KA Ambarawa	Museum Kartini
Lawang Sewu	Candi Gedong Songo	Kawasan Rawa Pening
Kawasan Kota Lama	Masjid Agung Demak	Karimunjawa
Umbul Sidomukti	Gunung Muria Colo	Bleduk Kuwu

- 2) Pariwisata Magelang dan sekitarnya (Wonosobo, Temanggung)

Candi Borobudur, Mendut, Pawon	Situs Liyangan, Pringapus dan Jumprit	Kawasan Dataran Tinggi Dieng
Taman Kyai Langgeng	Ketep Pass	Tracking Merapi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Wisata Arung Jeram Elo-Progo	Taman Wisata Kalianget	Agrowisata Tambi dan Telaga Menjer
---------------------------------	------------------------	---------------------------------------

3) Pariwisata Solo dan sekitarnya (Karanganyar, Wonogiri, Sragen)

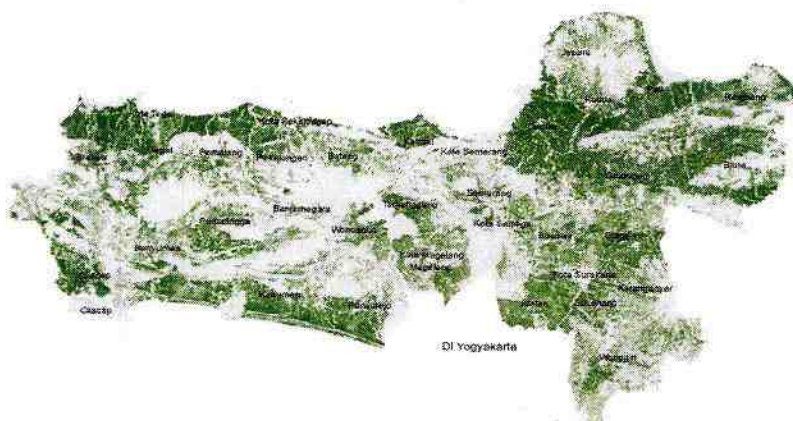
Keraton Kasunanan	Istana Mangkunegaran	Galeri Batik
Kampung Laweyan	Candi Sukuh-Cetho	Museum Sangiran
Kawasan Tawangmangu	Waduk Gajahmungkur	Karst Gunungsewu

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2019

4. Kawasan Sentra Produksi dan Komoditas Unggulan

a. Tanaman Pangan

Jawa Tengah merupakan salah satu penghasil utama produk pangan untuk menunjang ketahanan pangan nasional. Adapun komoditas pangan unggulan di Jawa Tengah pada tahun 2018 adalah padi dengan jumlah produksi sebesar 11.167.933 ton, jagung sebesar 3.414.906 ton, dan kedelai sebesar 166.195 ton. Adapun sentra produksi padi berada di wilayah Grobogan, Cilacap, Demak, Blora, dan Pati. Wilayah sentra jagung berada di Grobogan dan Cilacap. Adapun sentra produksi padi digambarkan melalui sebaran lahan sawah sebagai berikut:



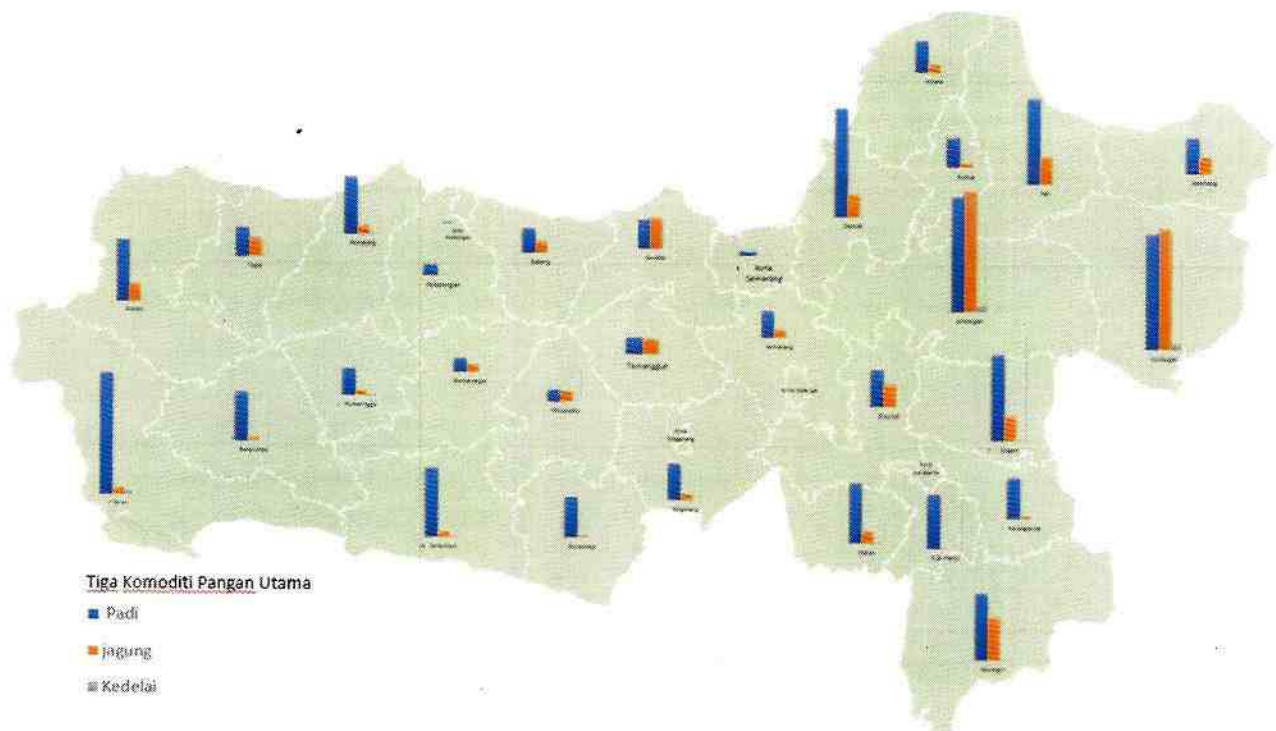
Gambar 28 : Distribusi Lahan Sawah di Jawa Tengah

Sumber: Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2018



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pada tahun 2018, produksi padi sebesar 11.167.933 ton, meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar 10.344.816 ton, dengan produktivitas tertinggi berada di Kota Surakarta dan terendah di Kabupaten Pekalongan. Produksi jagung sebesar 3.414.906 ton, meningkat dibanding tahun 2013 sebesar 2.930.911 ton dengan produktivitas tanaman jagung tertinggi berada di Kabupaten Jepara dan Klaten. Produksi kedelai sebesar 166.195 ton, meningkat dibanding tahun 2013 sebesar 93.318 ton dengan produktivitas tanaman Kedelai tertinggi berada di Kabupaten Brebes, Blora, dan Cilacap.



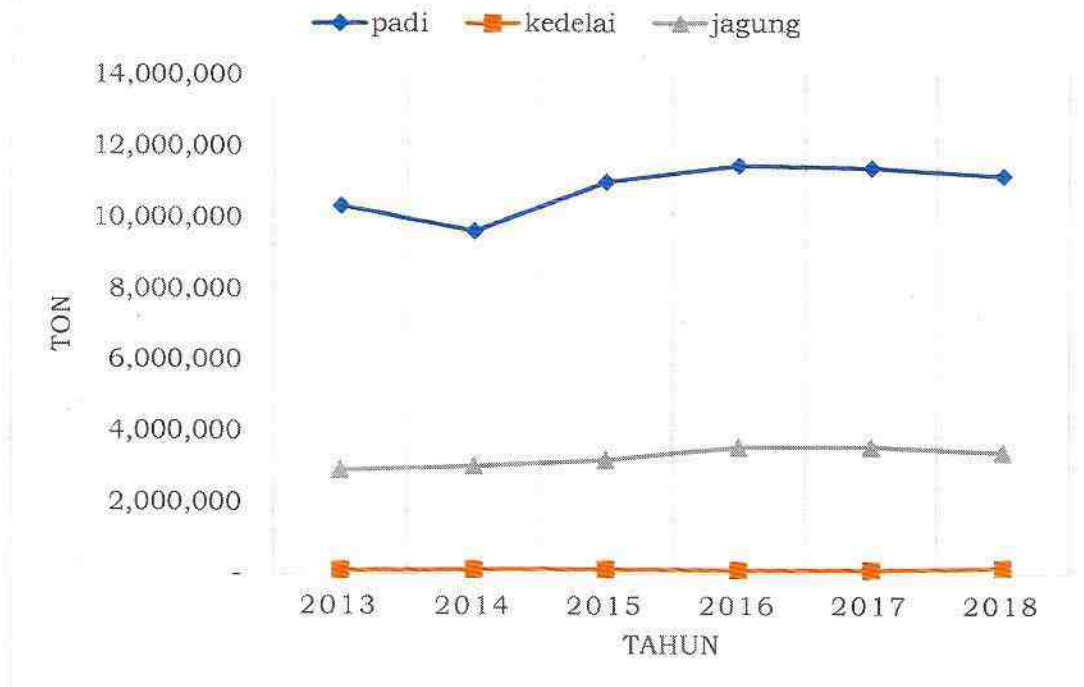
Gambar 29 : Peta Produksi Pangan di Kabupaten / Kota Berdasarkan Tiga Produk Utama Pangan (Padi, Jagung, Kedelai)

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2019 (Data Olah)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PRODUKSI PAJALE



Gambar 30 : Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018

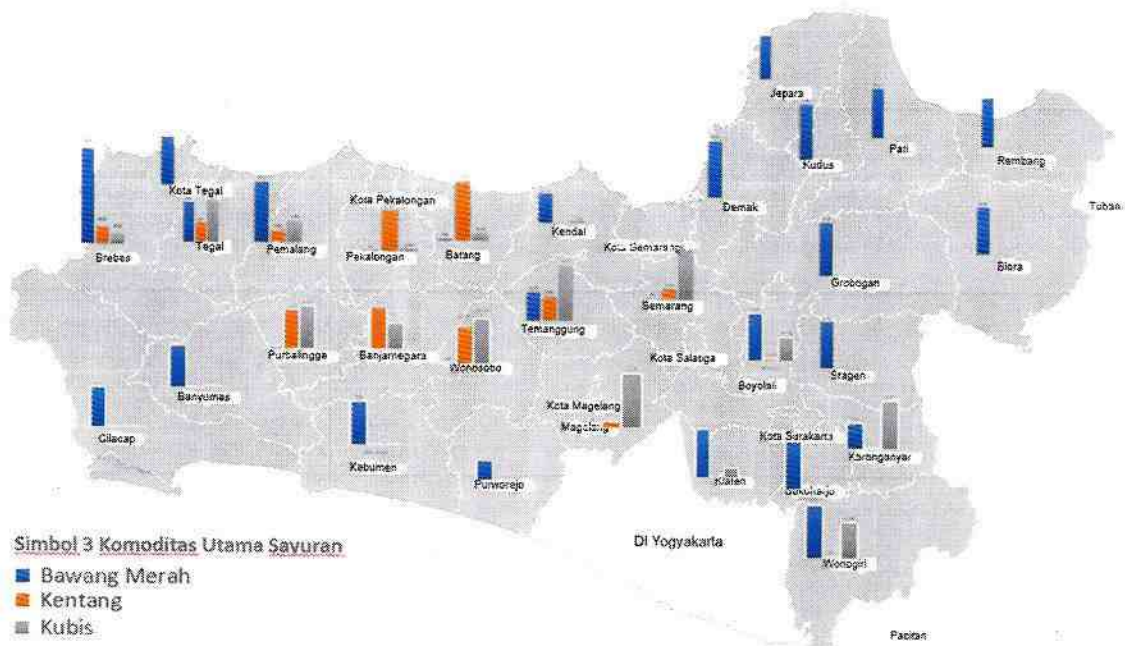
Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, 2019

b. Hortikultura

Komoditas utama hortikultura di Jawa Tengah terdiri dari bawang merah dan cabai besar. Produksi bawang merah tertinggi pada tahun 2016 sebesar 5.466,84 ton. Sentra produksi tanaman bawang merah berada di Kabupaten Brebes, Demak, Pati, Kendal, dan Tegal. Produksi cabai besar tertinggi pada tahun 2017 sebesar 1.955.705 ton, dengan produksi tertinggi berada di Kabupaten Pemalang, Cilacap, dan Kabupaten Semarang.

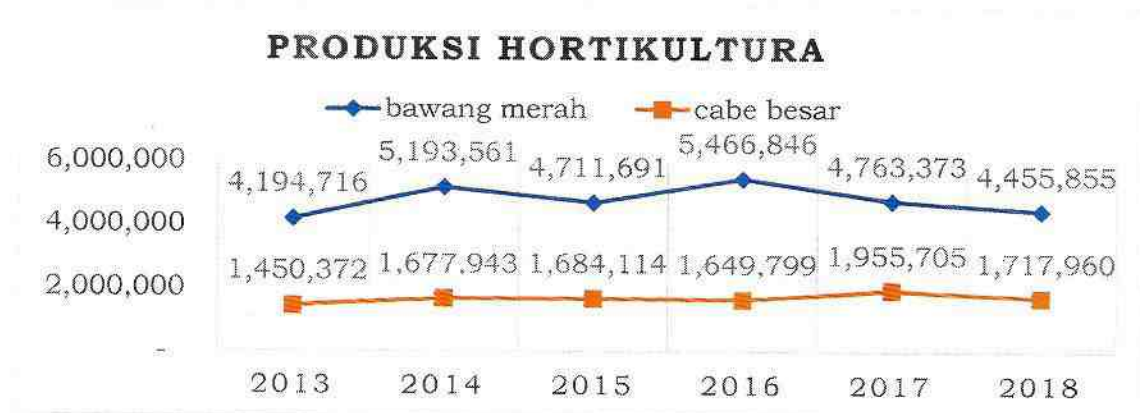


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Gambar 31 : Peta Produksi Hortikultura di Kabupaten / Kota berdasarkan Tiga Produk Utama Sayuran

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2019 (Data Olah)



Gambar 32 : Produksi Tanaman Hortikultura Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, 2019

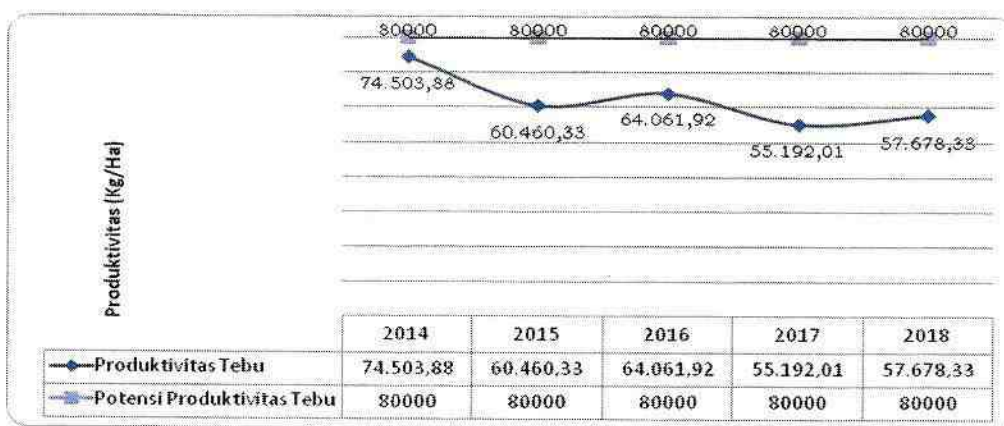
c. Perkebunan

Komoditas utama perkebunan di Jawa Tengah terdiri dari tebu, kopi, dan kelapa. Produktivitas tebu pada kurun waktu tahun 2013-2018 relatif turun, dengan produktivitas tahun 2014 sebesar 74,503 ribu kg/ha menjadi sebesar 57,678 ribu kg/ha pada tahun 2018. Produktivitas kelapa pada kurun waktu tahun 2014-2018



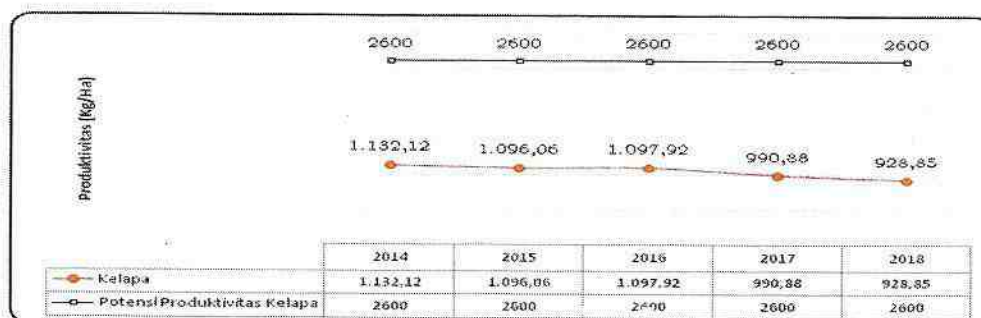
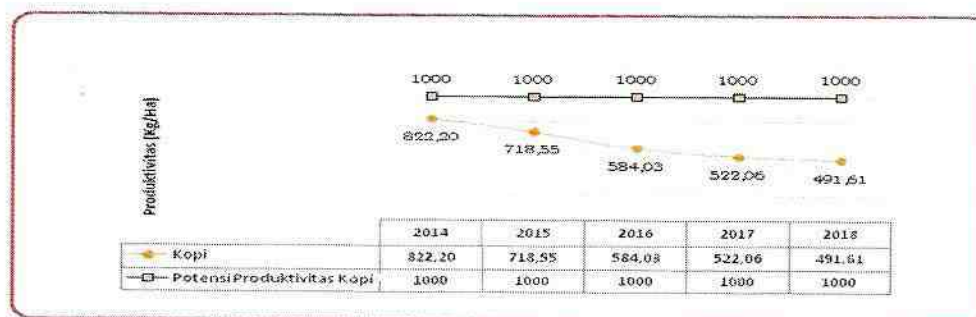
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

mengalami penurunan dari 1,132 ribu kg/ha di tahun 2014 menjadi 928,85 kg/ha pada tahun 2018. Produktivitas kopi mengalami penurunan pada periode tahun yang sama, dari 822,2 kg/ha di tahun 2014 menjadi 491,61 kg/ha di tahun 2018. Pada komoditas utama perkebunan, potensi produktivitas rata-rata di Jawa Tengah untuk tanaman tebu sebesar 800 kuintal/ha, kelapa sebesar 26 kuintal/ha, dan kopi 10 kuintal/ha.



Gambar 33 : Produktivitas Perkebunan Tebu Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, 2019



Gambar 34 : Grafik Persandingan Produktivitas Komoditas Kelapa dan Kopi terhadap Komoditas Tebu Jawa Tengah Tahun 2014-2018

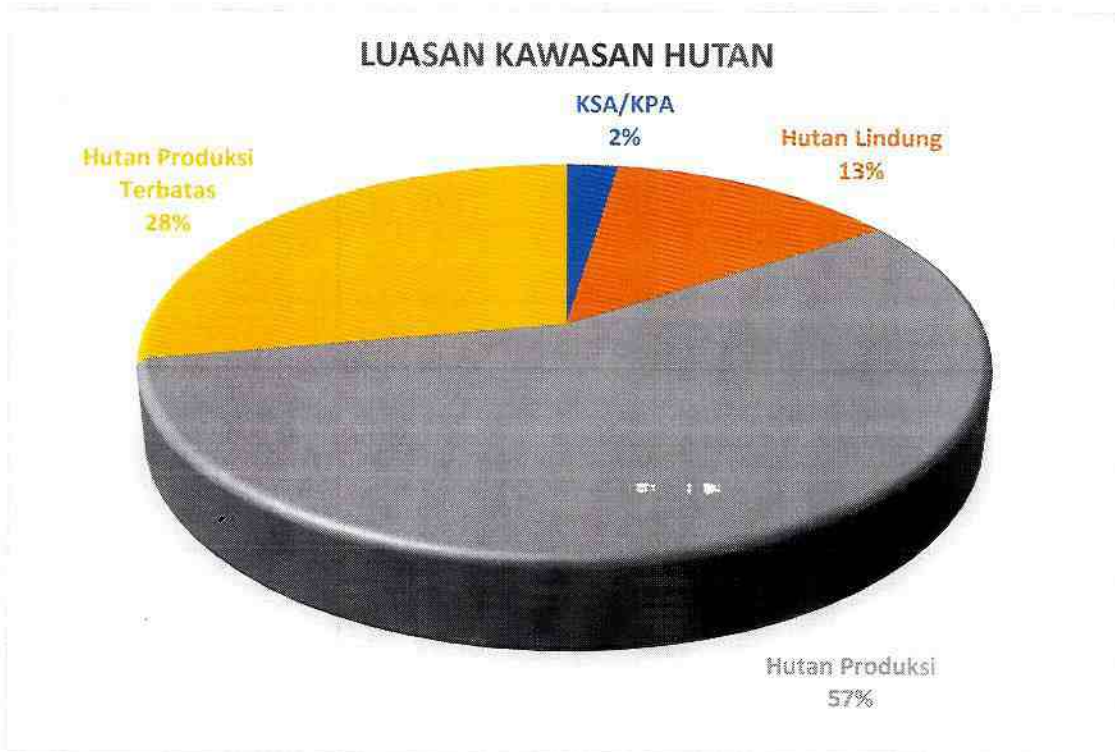
Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah, 2019



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

d. Kehutanan

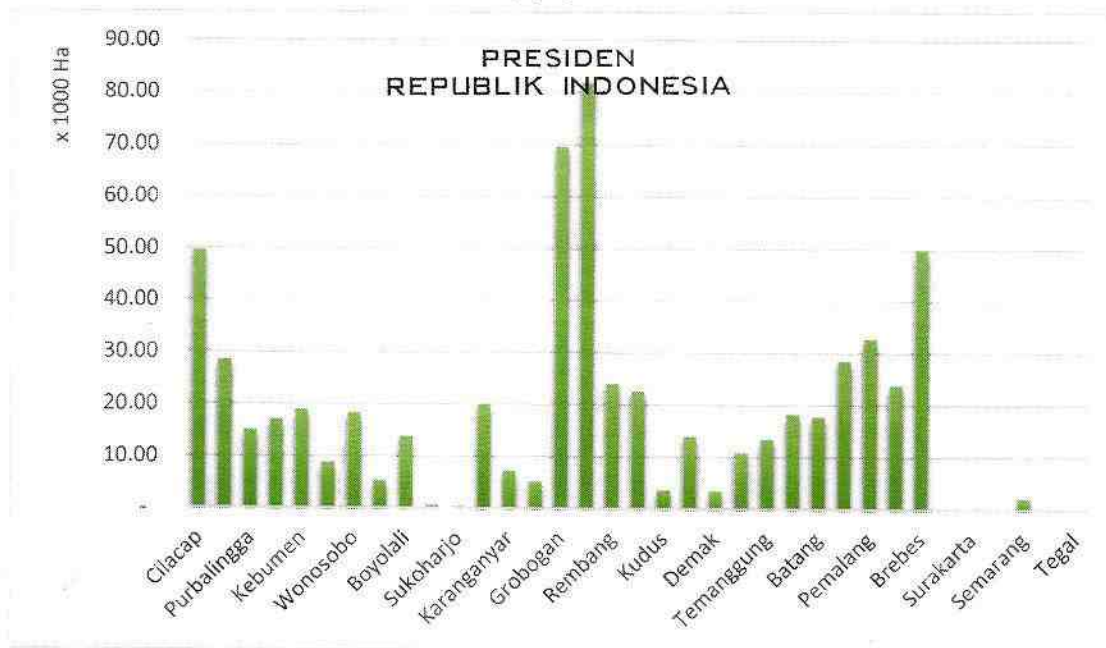
Jawa Tengah mempunyai kawasan hutan kurang lebih seluas 626.580 ha dengan komposisi menurut fungsi kawasan yaitu Hutan Lindung sebesar 14%, Hutan Produksi Terbatas (HPT) sebesar 29%, dan Hutan Produksi Tetap (HP) sebesar 57% seperti ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 35 : Komposisi dan Persentase Luasan Kawasan Hutan di Jawa Tengah

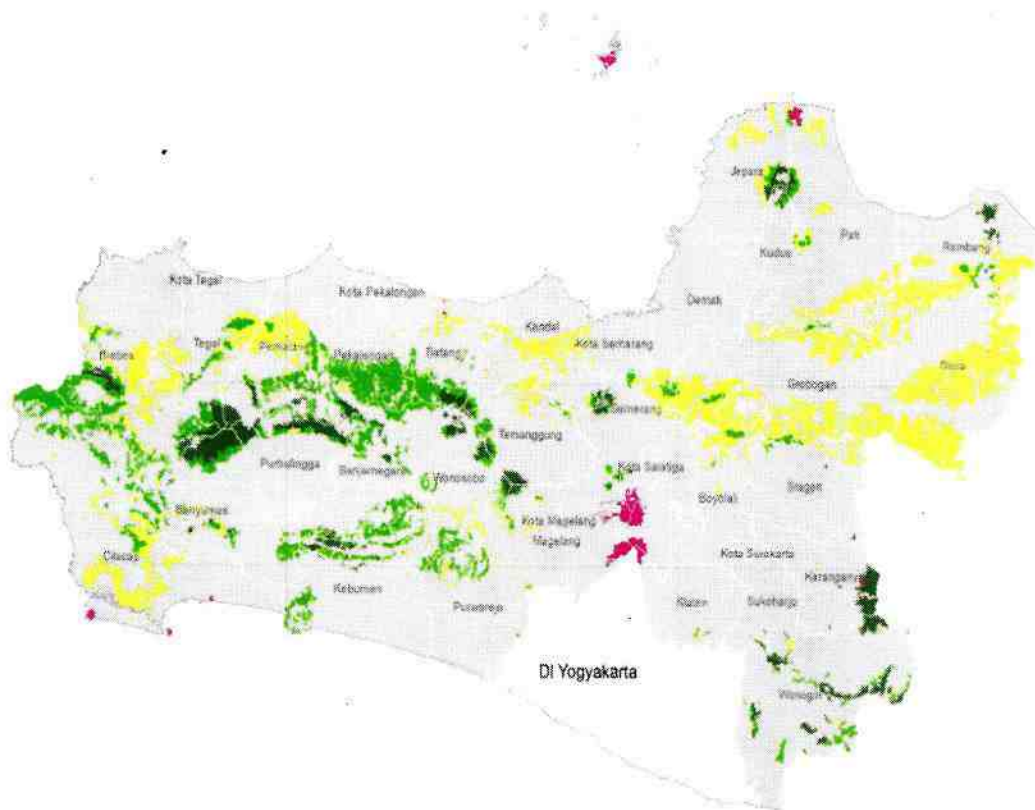
Sumber: BPS Jawa Tengah, 2018

Berdasarkan wilayah administrasi, kawasan hutan berada di seluruh wilayah kabupaten, sedangkan untuk wilayah kota hanya ada di Kota Semarang berupa HP dengan luas 1.915,01 ha atau 0,31% dari kawasan hutan yang ada di Jawa Tengah sebagaimana pada gambar berikut:



Gambar 36 : Distribusi Kawasan Hutan menurut wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2018

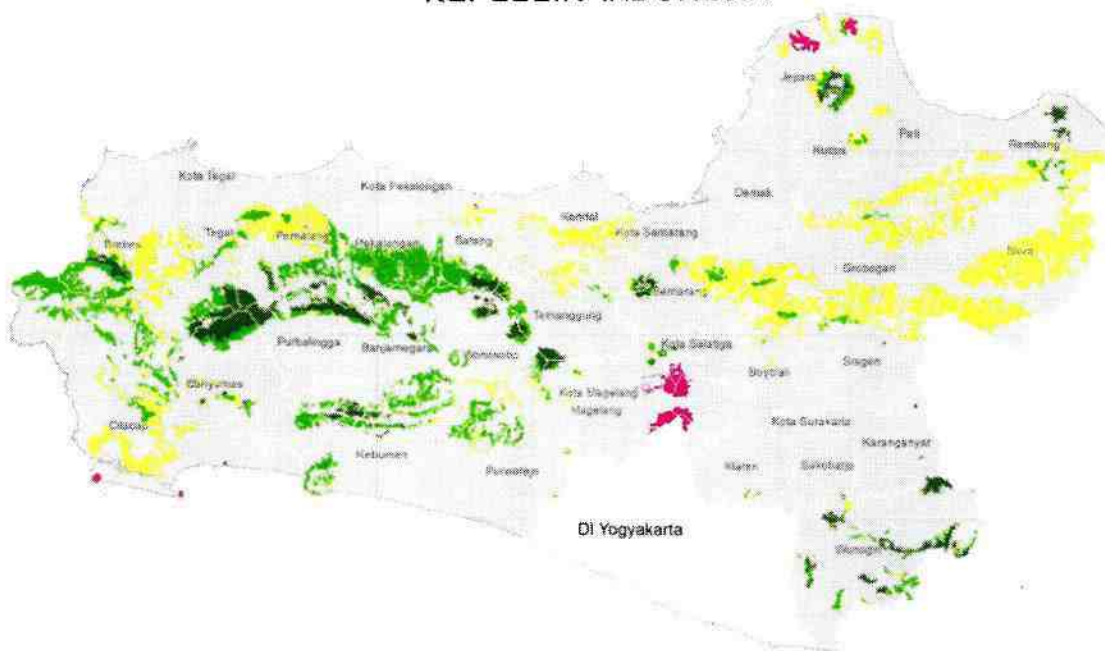


Gambar 37 : Penunjukan Kawasan Hutan Jawa Tengah

Sumber: Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2018



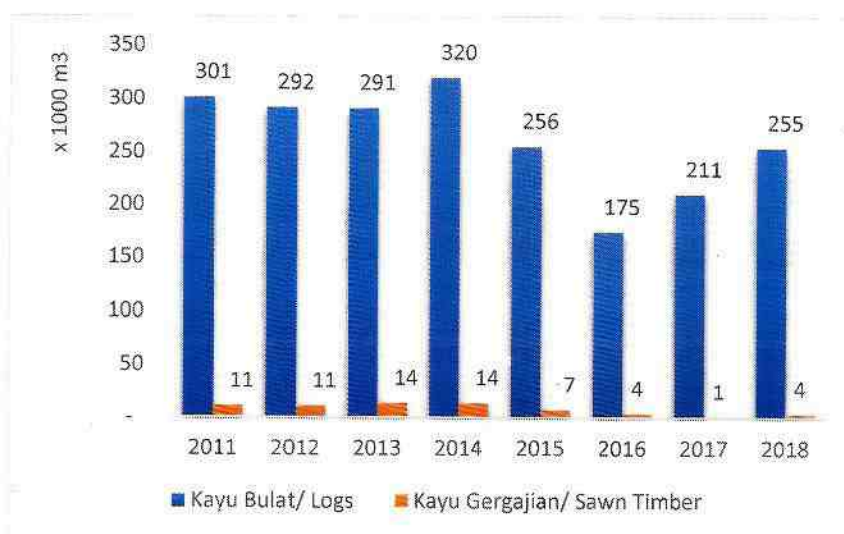
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Gambar 38 : Penetapan Kawasan Hutan Jawa Tengah

Sumber: Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2018

Produksi kayu hutan menurut jenis produksi di Jawa Tengah dari tahun 2011 – 2018 berfluktuasi dan cenderung menurun dari tahun 2011 sejumlah 312.354 m³ menjadi 258.455 m³ namun demikian, dalam 3 tahun terakhir menunjukkan kenaikan produksi dari 178.914 m³ menjadi 258.455 m³.



Gambar 39 : Produksi Kayu Hutan Menurut Jenis Produksi di Jawa Tengah (m³),
2013–2018

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2019 (Data Olah)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pada tahun 2017, hutan negara di Jawa Tengah seluas 651.214,02 ha dan hutan rakyat seluas 597.890 ha, sehingga luas lahan yang berfungsi sebagai kawasan hutan seluas 1.249.104,02 ha. Lahan kritis di Jawa Tengah seluas 634.601 ha terdiri dari 469.664 ha di luar kawasan hutan dan 164.937 ha di dalam kawasan hutan.

Terkait pemanfaatan hasil hutan, jumlah industri pengolahan hasil hutan kayu menunjukkan kecenderungan meningkat. Arah pengembangan selanjutnya adalah dengan membentuk industri pengolahan hasil hutan kayu yang mempunyai Sertifikat Verifikasi Legal Kayu (SVLK). Gambaran mengenai produksi hasil hutan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10 : Produksi Hasil Hutan Asal Hutan Rakyat dan Hutan Negara Jawa Tengah Tahun 2012 - 2016 (dalam ribu m³)

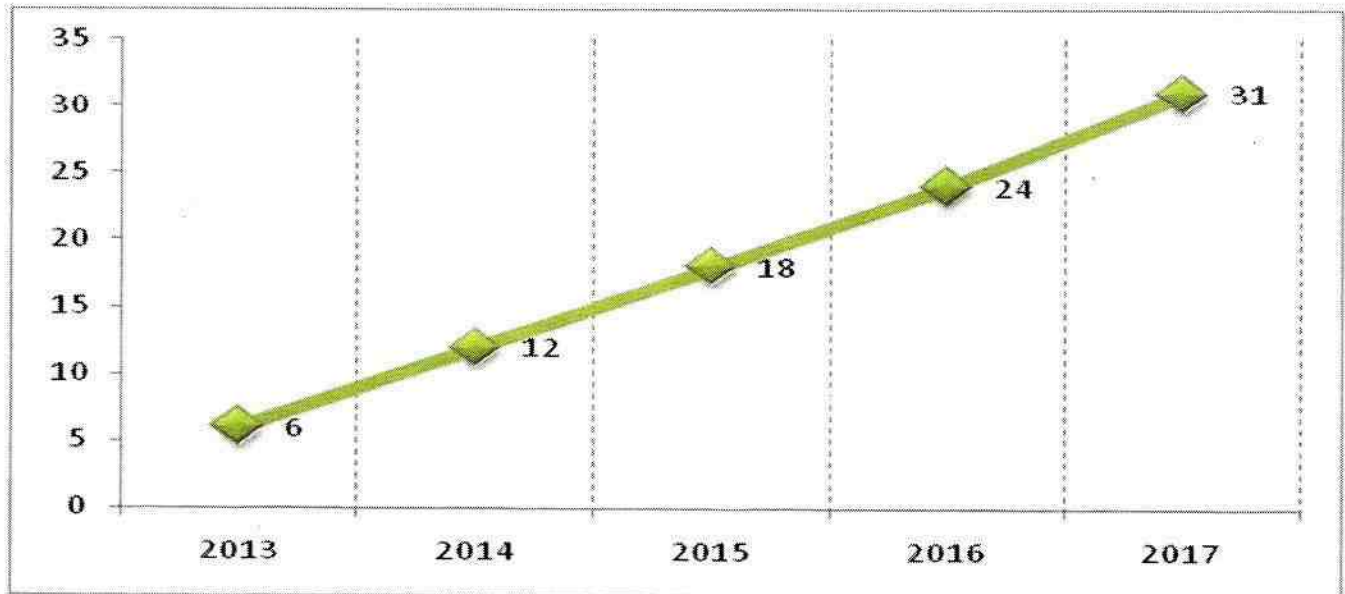
No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Produksi Hasil Hutan Asal Hutan Rakyat	1.391,81	582,55	1.664,72	2.123,74	2.687,30
2	Produksi Hasil Hutan Asal Hutan Negara	3,01	2,92	2,89	3,20	2,56
3	Total Produksi Hasil Hutan	169,30	87,45	195,39	244,36	294,30

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah, 2018



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jumlah sertifikasi hutan rakyat di Jawa Tengah selama tahun 2013-2017 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 40 : Grafik Perkembangan Sertifikasi Hutan Rakyat Jawa Tengah Tahun 2013-2017

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah, 2018

Jumlah sertifikasi hutan rakyat sampai dengan tahun 2017 sebanyak 31 unit. Adapun sertifikasi industri primer yang mengolah kayu sebanyak 536 unit dari total keseluruhan sebanyak 643 unit. Besarnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB tahun 2013 sebesar 0,53% menurun menjadi 0,43% pada tahun 2017. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 11 : Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Jawa Tengah Tahun
2013-2017 (dalam Milyar)

No	Kontribusi Terhadap PDRB	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Nilai Sektor Kehutanan	4.093,45	4.073,35	3.997,57	3.823,96	3.830,30
2	Nilai Total PDRB	726.655,12	764.959,15	806.765,09	849.313,20	894.050,47
3	Kontribusi (%)	0,56	0,53	0,5	0,45	0,43

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2018

e. Perikanan

Kabupaten/kota Jawa Tengah yang berada di wilayah pesisir utara dan wilayah pesisir selatan memiliki potensi ekonomi yang besar dengan adanya sumber daya laut, salah satunya sumber daya perikanan yang tersebar di 17 (tujuh belas) kabupaten/kota.



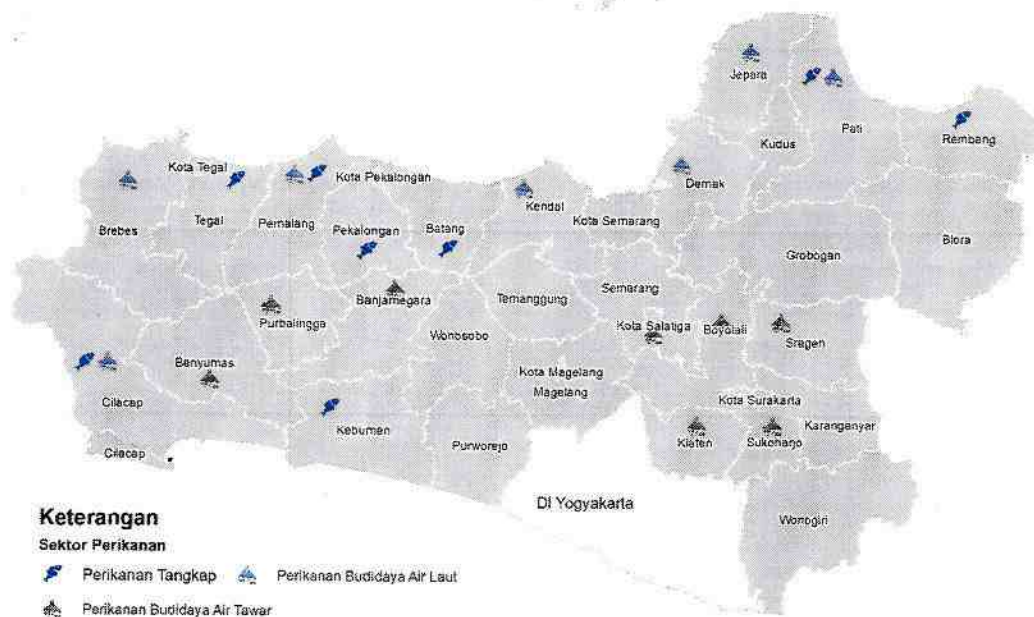
Gambar 41 : Grafik Produksi Perikanan Tangkap Tahun
2014-2018 Jawa Tengah

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, 2019



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kawasan Petanglong merupakan kawasan yang memiliki potensi perikanan laut terbesar di Jawa Tengah dengan jumlah tangkapan ikan sebesar 66.672 ton. Potensi terbesar kedua berada di Kawasan Wanarakuti dengan jumlah tangkapan ikan sebesar 62.010 ton, sedangkan kabupaten dengan jumlah tangkapan ikan terbesar di Jawa Tengah adalah Kabupaten Pati sebesar 53.469 ton.



Gambar 42 : Peta Sebaran Sentra Produksi Perikanan Jawa Tengah

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2019

Capaian produksi perikanan tangkap didukung dengan ketersediaan armada kapal perikanan. Pada tahun 2018, terdapat 24.954 unit kapal yang terdiri dari kapal dengan ukuran di bawah 5 GT sampai di atas 30 GT. Produktivitas kapal perikanan tergantung pada ukuran tonase kapal, bahan kapal yang digunakan, kekuatan mesin kapal, jenis alat penangkapan ikan yang digunakan, jumlah trip operasional penangkapan per tahun, kemampuan tangkap rata-rata per trip, dan wilayah penangkapan ikan. Berdasarkan hal tersebut, perhitungan perkiraan kapasitas produksi perikanan tangkap tahun 2018 di Jawa Tengah adalah sebesar 474.572 ton. Kapasitas produksi tersebut masih lebih tinggi dibanding dengan capaian produksi perikanan tangkap pada tahun 2018 sebesar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

446.277 ton. Perbandingan angka produksi ideal dengan produksi perikanan tangkap menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap di Jawa Tengah masih belum optimal.

Tabel 12 : Jumlah Armada Perikanan Tangkap dan Kapasitas Produksi Ideal
Jawa Tengah Tahun 2018

No	Ukuran (GT)	Jumlah Kapal	Kapasitas Produksi Ideal
1	< 5	16.823	63.086
2	05-10	4.696	61.048
3	10-30	2.595	136.238
4	> 30	840	214.200
Jumlah		24.954	474.572

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, 2019

Selain potensi perikanan, Jawa Tengah merupakan salah satu penghasil garam nasional. Sentra produksi garam berada di Kabupaten Brebes, Demak, Jepara, Pati dan Rembang dengan total lahan seluas 6.608,78 ha. Pada periode tahun 2014 – 2018, produksi garam mengalami fluktuasi dengan arah cenderung positif dengan puncak produksi di tahun 2015 sebesar 841.543,56 ton.



Gambar 43 : Grafik Produksi Garam Rakyat Jawa Tengah Tahun 2014-2018

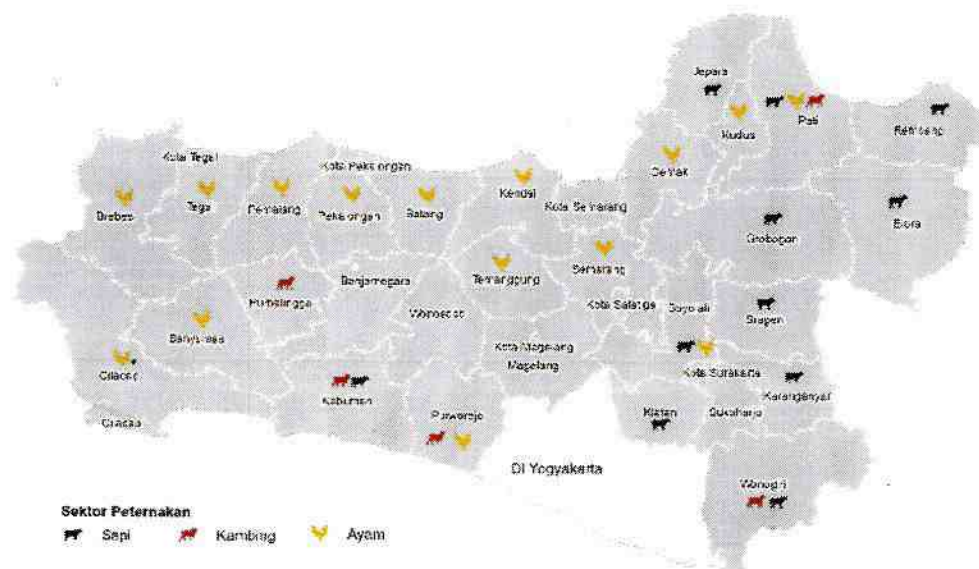
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, 2019



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

f. Peternakan

Terdapat tiga jenis ternak yang diusahakan di Jawa Tengah. Pertama, ternak besar yang meliputi sapi (potong dan perah), kerbau, serta kuda. Kedua, ternak kecil terdiri atas kambing, domba, dan babi. Ketiga, aneka ternak yang termasuk di dalamnya unggas (ayam kampung, ayam pedaging, ayam petelur, dan itik).



Gambar 44 : Peta Sebaran Komoditas Peternakan Jawa Tengah

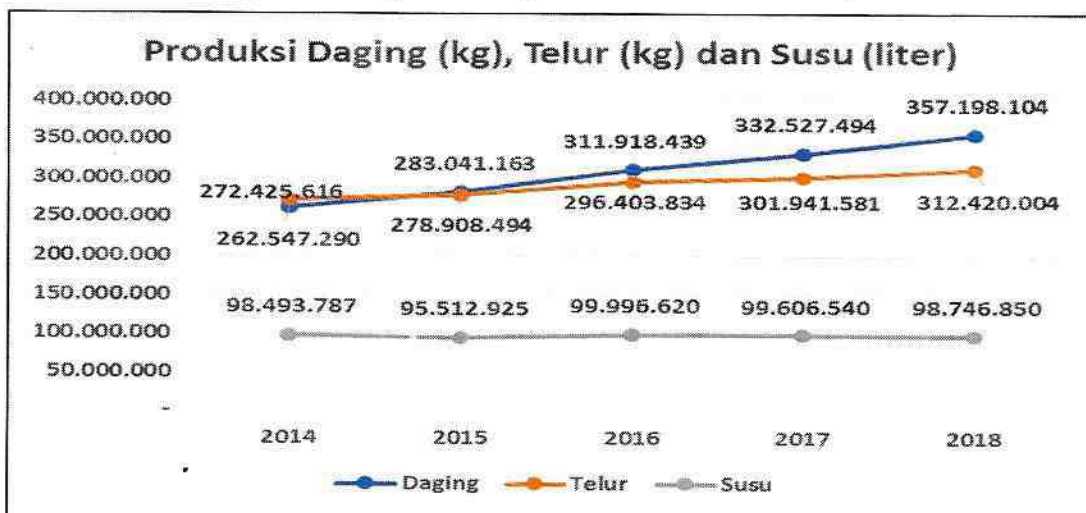
Sumber: Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2018

Produksi hasil peternakan di Jawa Tengah tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014. Produksi daging meningkat dari sebesar 262.547.290 kg pada tahun 2014 menjadi sebesar 357.198.104 kg pada tahun 2018. Produksi telur juga mengalami peningkatan dari sebesar 272.425.616 kg pada tahun 2014 menjadi sebesar 312.420.004 kg pada tahun 2018. Komoditas susu relatif mengalami peningkatan pada kurun waktu tahun 2014-2018, dari 98.493.787 liter di tahun 2014 menjadi 98.746.850 liter di tahun 2018.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Perkembangan populasi ternak sapi potong, sapi perah, dan kambing pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 juga relatif mengalami peningkatan. Populasi sapi potong pada tahun 2014 sejumlah 1.592.638 ekor meningkat menjadi 1.751.799 ekor pada tahun 2018. Populasi sapi perah pada tahun 2014 sejumlah 122.566 ekor, meningkat menjadi 138.747 ekor pada tahun 2018, sedangkan populasi kambing pada tahun 2017 sejumlah 3.957.917 ekor, meningkat menjadi menjadi 3.937.103 ekor pada tahun 2018.



Gambar 45 : Grafik Produksi Daging, Telur, dan Susu Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Sumber: Bappeda Jawa Tengah, 2019



Gambar 46 : Grafik Populasi Sapi Potong, Sapi Perah dan Kambing Jawa Tengah Tahun 2014-2018

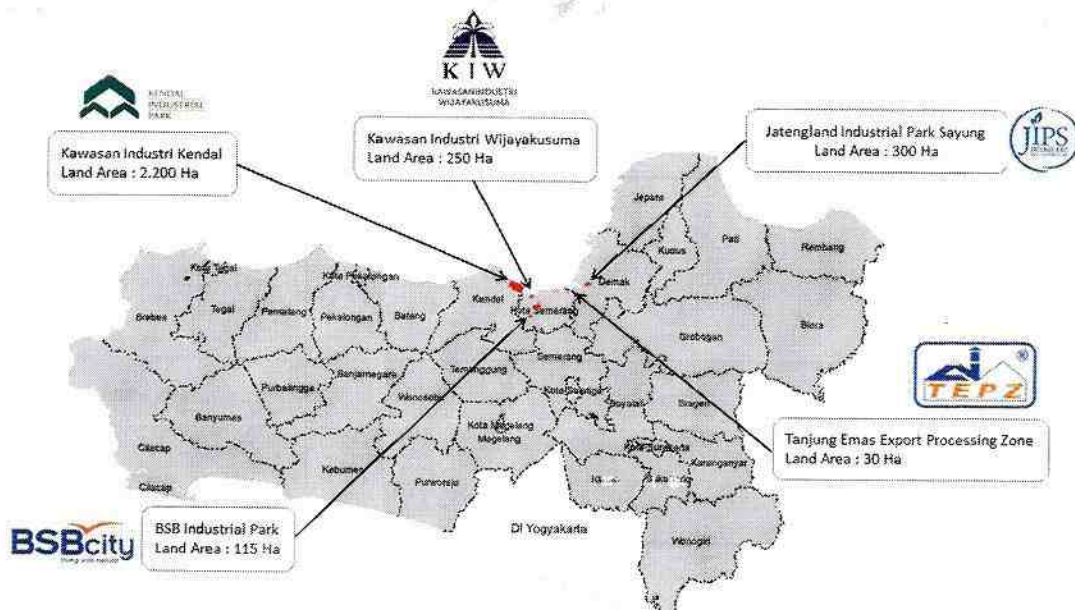
Sumber: Bappeda Jawa Tengah, 2019



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5. Kawasan Industri dan Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan industri ditetapkan untuk membentuk lingkungan yang kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor, impor, dan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi. Terdapat 5 (lima) kawasan industri di Jawa Tengah yang meliputi Kawasan Industri Wijayakusuma, Kawasan Industri Kendal, Kawasan Industri Bukit Semarang Baru (BSB), Tanjung Emas *Export Processing Zone*, dan Jatengland Industrial Park Sayung yang tersebar di Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, dan Kota Semarang.



Gambar 47 : Peta Sebaran Kawasan Industri di Jawa Tengah

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2019

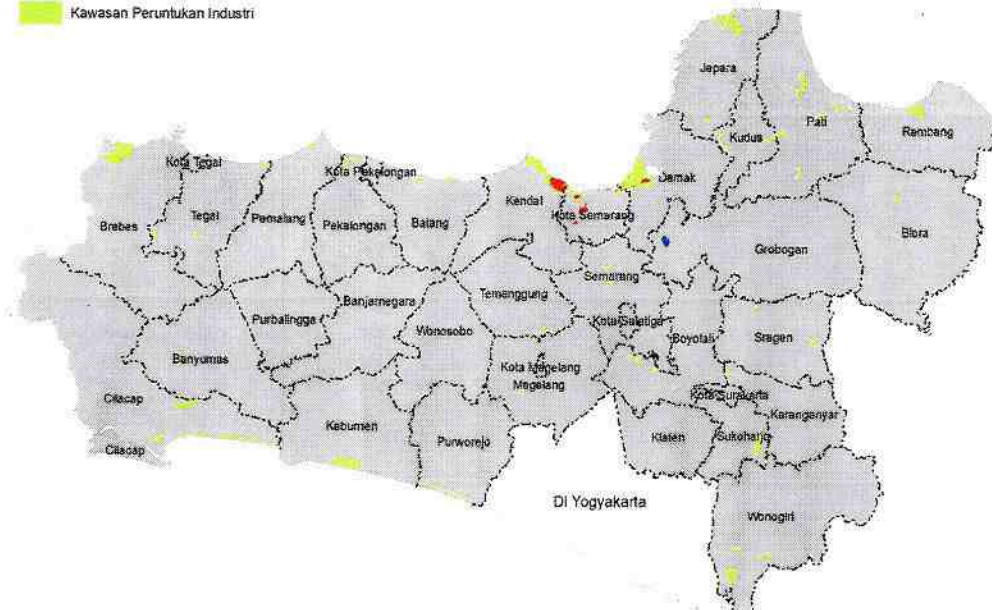
Kawasan Peruntukan Industri (KPI) berdasarkan RTRW Provinsi dan kabupaten/kota tersebar di Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora, Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, Boyolali, Temanggung, Purworejo, Kebumen, Banyumas, Cilacap, Kota Semarang, dan Kota Pekalongan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Keterangan

-  Kawasan Industri Eksisting
-  Rencana Kawasan Industri
- Polas Ruang (RTRW Provinsi Jawa Tengah)**
-  Kawasan Peruntukan Industri



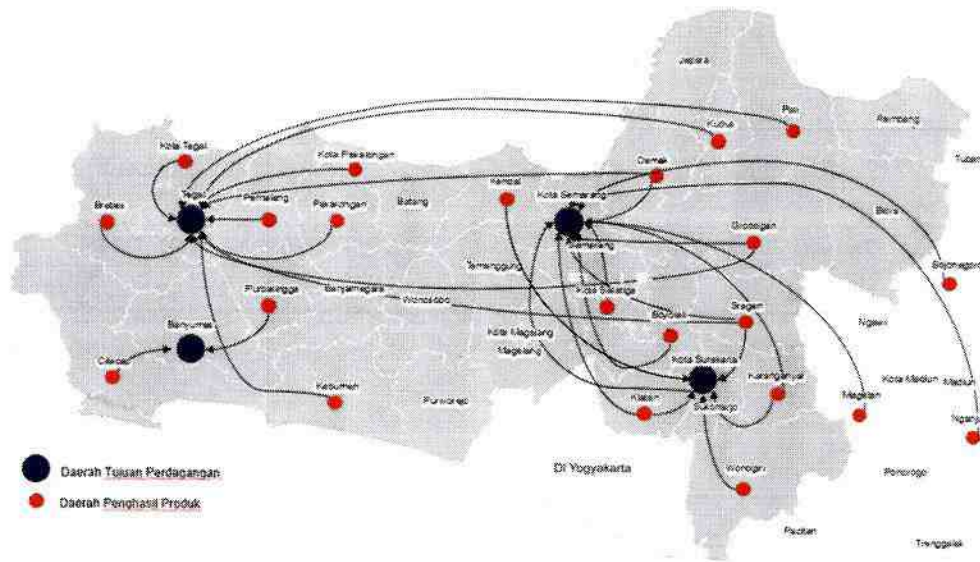
Gambar 48 : Peta Peruntukan Kawasan Industri dalam RTRW Jawa Tengah
Sumber: Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2018

6. Aliran Komoditas Barang dan Tata Niaga Komoditas Unggulan

Jawa Tengah merupakan salah satu sentra produksi pangan nasional, terutama hasil pertanian dengan komoditas beras, cabai merah, dan bawang merah. Berdasarkan peta aliran perdagangan komoditas beras Jawa Tengah, sebagian besar kebutuhan beras dijual secara terpusat di beberapa daerah yakni Tegal, Banyumas, Semarang, dan Surakarta. Aliran perdagangan beras di Kabupaten Tegal diperoleh dari produksi mandiri dan pasokan beberapa daerah, yakni Kabupaten Pemalang, Demak, dan Kebumen. Secara keseluruhan, pembelian beras cenderung terpusat di beberapa daerah saja dan tidak terdistribusi secara merata, sedangkan pembelian beras oleh pedagang dari daerah Tegal cenderung merata dibandingkan Banyumas, Semarang, dan Surakarta.



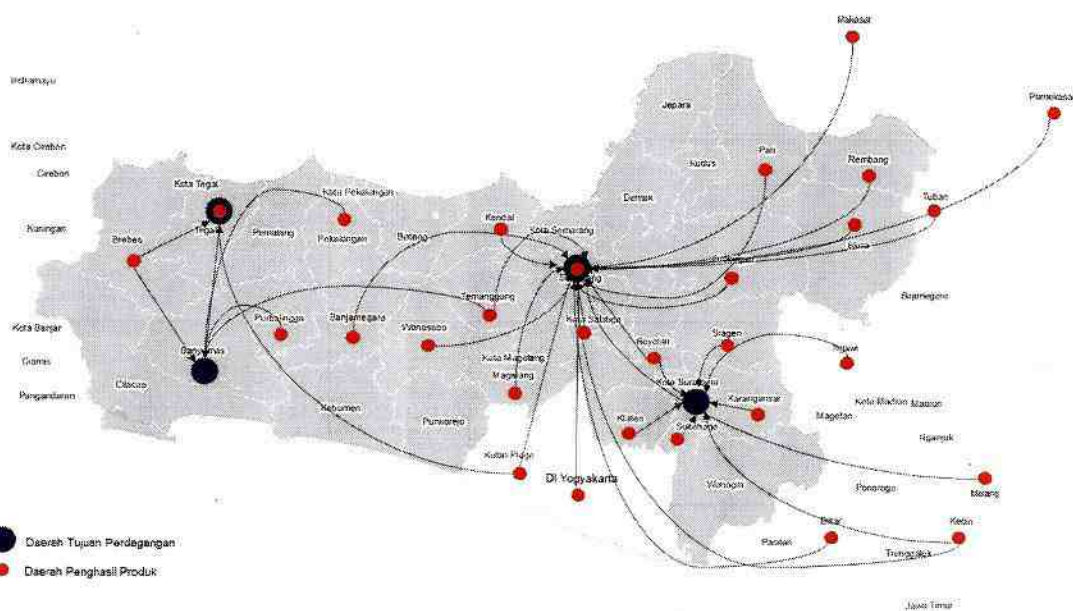
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Gambar 49 : Aliran Pembelian Komoditi Beras Jawa Tengah dan Sekitarnya

Sumber: Bank Indonesia, 2015

Komoditas pangan cabai merah Jawa Tengah memiliki rantai perdagangan yang dipasok dari daerah Temanggung, Magelang, dan Blora. Selain itu, rantai perdagangan tersebut juga masih mengandalkan pasokan berasal dari Jawa Timur khususnya Blitar, Kediri, dan Ngawi.



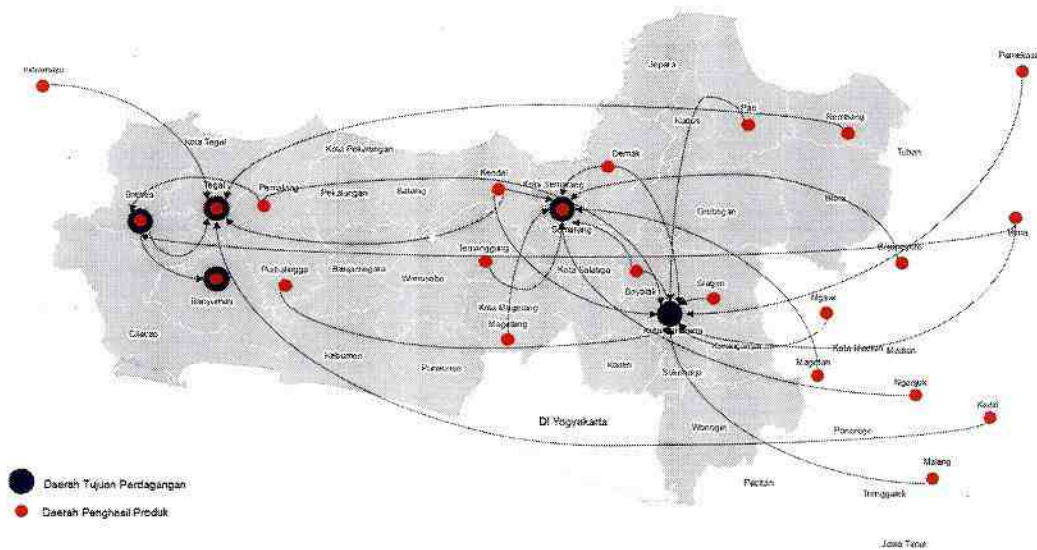
Gambar 50 : Aliran Pembelian Komoditas Cabai Merah Antar Daerah Jawa Tengah dan Sekitarnya

Sumber: Bank Indonesia, 2015



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Produksi komoditas bawang merah terbesar berada di Kabupaten Brebes. Hal ini menjadikan Jawa Tengah sebagai salah satu pemasok kebutuhan bawang merah nasional. Selain berasal dari hasil produksi sendiri, Brebes sebagai sentra perdagangan bawang merah juga mendapat pasokan dari Pematang, Bima, dan Nganjuk.



Gambar 51 : Aliran Pembelian Komoditas Bawang Merah Antar Daerah Jawa Tengah dan Sekitarnya

Sumber: Bank Indonesia, 2015

Berdasarkan gambaran tata niaga aliran komoditas pangan Jawa Tengah, potensi perluasan pasar produksi pangan masih dapat ditingkatkan melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang lebih baik.

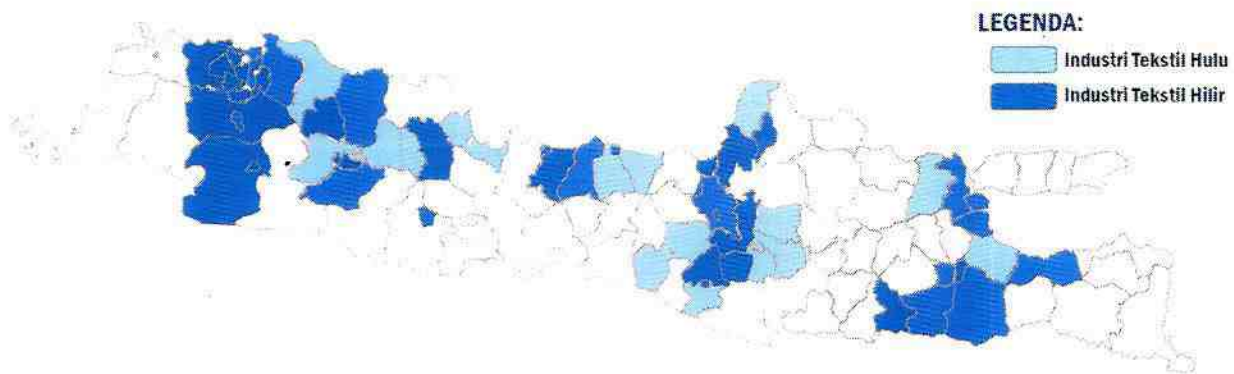
7. Aliran Komoditas Barang Produksi Industri Pengolahan

Produksi unggulan industri TPT Jawa Tengah menyumbang 28,9 % dari total industri besar TPT di Pulau Jawa. Industri tekstil skala sedang di Jawa Tengah merupakan industri penyumbang kedua terbanyak di Pulau Jawa, setelah Jawa Barat dengan jumlah 1.043 industri tekstil skala sedang (26,4%). Output produksi bahan setengah jadi seperti serat, benang, dan bahan kimia pendukung industri TPT banyak dihasilkan oleh Jawa Barat (56,14%), dan output



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

produksi tekstil terbanyak kedua berasal dari Jawa Tengah dengan 22,82% output produksi. Industri TPT Jawa Tengah menyumbang surplus ekspor terutama dari komoditas garmen. Pasokan bahan baku industri TPT Jawa Tengah diperoleh dari dalam negeri, diantaranya dari Jakarta, Surabaya, Semarang, dan luar negeri salah satunya dari Tiongkok. Industri TPT Jawa Tengah terkonsentrasi di kawasan Semarang, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, serta Pekalongan. Berdasarkan potensi ekspor, komoditas garmen memiliki potensi yang cukup tinggi. Ekspor TPT Jawa Tengah yang terdiri dari komoditas benang (22%), garmen (73%), kain (5%), dan serat (0%) ditujukan ke negara Amerika Serikat, negara-negara di Eropa, dan Jepang.



Gambar 52 : Peta Spasial Industri Tekstil Pulau Jawa

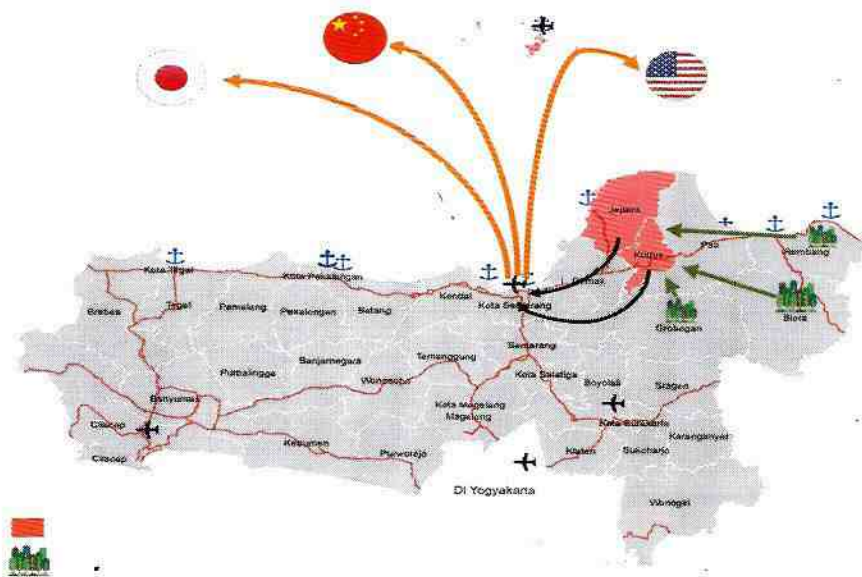
Sumber: Bank Indonesia, 2019

Dari sisi perdagangan barang produksi industri olahan Jawa Tengah, beberapa komoditas memberikan surplus ekspor seperti komoditas pengolahan TPT, komoditas kayu dan pengolahan kayu, serta alas kaki. Industri kayu dan furnitur mengolah bahan baku kayu yang diperoleh dari Kabupaten Jepara dan Kabupaten Kudus. Tren ekspor industri produk kayu dan furnitur tetap mengalami peningkatan, sementara impornya juga mengalami peningkatan meskipun kecil. Bahan baku yang digunakan biasanya berasal dari kayu olahan Perhutani, hutan rakyat, dan koperasi. Aktivitas produksi meliputi industri kayu olahan yang diolah menggunakan mesin dan peralatan impor dari Tiongkok dan Taiwan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tujuan ekspor komoditas furnitur yang terdiri dari kayu olahan non furnitur (49%), furnitur (38%), dan kayu lembar (13%) diarahkan ke negara Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Hambatan terhadap usaha furnitur Jawa Tengah berupa banyaknya bahan kayu yang belum dapat dimanfaatkan karena belum adanya teknologi.



Gambar 53 : Aliran Ekspor Komoditas Kayu Jawa Tengah

Sumber: Bank Indonesia, 2019

Selain sub sektor industri tekstil dan furnitur, tingginya potensi ekspor industri pengolahan di Jawa Tengah juga didukung oleh industri alas kaki. Kebutuhan bahan baku industri alas kaki yang terdiri dari kain dan karet sintetis diperoleh dari dalam negeri serta luar negeri (Tiongkok, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan). Industri alas kaki Jawa Tengah tersebar di Kabupaten Brebes, Semarang, Temanggung, Jepara, Karanganyar, dan Kota Salatiga. Pemasaran produk alas kaki mencakup pasar dalam negeri dan luar negeri (Amerika Serikat, Belgia, Inggris, dan Jepang).

Jawa Tengah juga memiliki beberapa industri pengolahan lain seperti industri pengecoran, industri karoseri, dan industri knalpot. Industri pengecoran logam terpusat di kawasan Ceper, Kabupaten Klaten yang merupakan salah satu sentra industri pengecoran logam terbesar di Indonesia. Sumber bahan baku industri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pengecoran Jawa Tengah yang meliputi bahan baku skrap, bahan bekas, bijih besi, dan lainnya dipasok dari dalam negeri, diantaranya dari Jakarta, Surabaya, Semarang, dan luar negeri. Hasil produksi sektor industri pengecoran tersebut biasanya digunakan dalam permesinan, industri Agen Pemegang Merek (APM) otomotif, *after sales*, alat berat, kereta api, konstruksi, dan penelitian.

Sektor usaha karoseri Jawa Tengah terdiri dari usaha industri karoseri dengan skala besar dan kecil. Pengolahan karoseri Jawa Tengah membutuhkan bahan baku plat besi, mur baut, bahan *fiberglass*, kaca, karet, cat, dan dempul yang dipasok dari wilayah dalam negeri, meliputi Jakarta, Surabaya, dan Semarang serta dari luar negeri, salah satunya dari Tiongkok. Industri karoseri tersebar di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang. Industri ini berkembang sebagai industri komponen dengan menggunakan mesin pabrik dari Tiongkok, Taiwan, dan negara lainnya. Konsumen industri karoseri bergerak dalam bidang perusahaan otobus, industri dalam negeri dan pemerintah, perusahaan logistik, perorangan, dan jasa travel.

Jawa Tengah memiliki industri pengolahan knalpot konvensional yang sudah dipasarkan ke seluruh Indonesia. Bahan baku industri knalpot diperoleh dari berbagai daerah seperti Tegal, Jakarta, Cilegon, Cikarang, dan Surabaya. Industri knalpot Jawa Tengah terkonsentrasi di Kabupaten Purbalingga. Konsumen industri knalpot Purbalingga meliputi pedagang APM, *after sales*, perorangan di dalam negeri, militer, dan pedagang besar.

8. Kegiatan Ekonomi Lainnya

a. Jasa Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum pada triwulan II tahun 2019 tumbuh sebesar 19,40% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan pertumbuhan pada triwulan I tahun 2019 sebesar 12,59% (yoy). Nilai pertumbuhan tersebut merupakan nilai tertinggi dibanding pertumbuhan pada triwulan II tahun 2014 - 2018 yang rata-rata tumbuh sebesar 6,61%. Peningkatan laju



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pertumbuhan yang sangat signifikan pada sektor penyedia jasa akomodasi dan makan minum terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 8,17%.



Gambar 54 : Grafik Kontribusi Penyediaan Jasa Akomodasi dan Makan Minum

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2019

Laju pertumbuhan sektor penyedia jasa akomodasi dan makan minum berbanding lurus dengan berkembangnya industri pariwisata di Jawa Tengah. Berdasarkan data tahun 2019, Kawasan Kedungsepur memiliki jumlah akomodasi hotel terbanyak dibandingkan kedua kawasan prioritas lainnya di Jawa Tengah dengan jumlah akomodasi terbanyak berada di Semarang sebanyak 235 hotel.

b. Informasi dan Komunikasi

Pada triwulan II tahun 2019, sektor informasi dan komunikasi mengalami pertumbuhan sebesar 12,41% (yoy). Pertumbuhan lapangan usaha informasi dan komunikasi yang meningkat mengindikasikan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap teknologi informasi. Secara umum, perkembangan teknologi yang diikuti dengan peningkatan kesadaran terhadap teknologi mendorong penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan usaha semakin masif. Hal tersebut dapat terlihat dari berkembangnya *e-commerce* dan *startup company* yang berbasis teknologi informasi. Untuk meningkatkan pertumbuhan sektor informasi dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

komunikasi, perlu dilakukan peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan program pengembangan *e-government*.

c. Konstruksi

Pada triwulan II tahun 2019 sektor konstruksi mengalami pertumbuhan 3,45% (yoy). Sektor konstruksi Jawa Tengah didominasi oleh perusahaan kualifikasi kecil dengan nilai pekerjaan dibawah Rp2,5 miliar sebesar 65,74%. Perusahaan konstruksi dengan kualifikasi menengah dan besar sebagian besar berada di Kota Semarang. Perusahaan konstruksi di Jawa Tengah yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) hanya sebesar 12,92%.



Gambar 55 : Jumlah Perusahaan Konstruksi Jawa Tengah Tahun 2018

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2019



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 1 : Jumlah Usaha Konstruksi di Jawa Tengah tahun 2018

Kawasan	Kualifikasi Kecil			Kualifikasi Menengah		Kualifikasi Besar		Non Kualifikasi	Jumlah
	K1	K2	K3	M1	M2	B1	B2		
Bregasmalang	904	274	148	129	4	4	-	310	1.773
Barlingmascakeb	808	331	208	318	17	3	1	219	1.905
Petanglong	338	116	46	22	-	-	-	154	676
Kedungsepur	947	387	258	511	47	12	8	517	2.687
Wanarakuti	340	163	106	99	3	-	-	417	1.128
Banglor	465	152	77	45	1	1	-	180	921
Purwomanggung	506	238	117	89	4	2	-	295	1.251
Subosukawonosraten	986	402	204	225	8	3	-	588	2.416

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2019

d. Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih

Sektor lapangan usaha pengadaan listrik, gas, dan air bersih berjumlah 17.895 unit usaha/perusahaan, dengan komposisi berupa 10.762 atau 60,14% berasal dari usaha pengelolaan sampah, 3.609 usaha pengadaan listrik, dan 3.525 usaha pengelolaan air.

Tabel 14 : Jumlah Usaha Listrik, Gas, Pengelolaan Air, dan Limbah Jawa Tengah Tahun 2018

Wilayah Pengembangan	Pengadaan Listrik dan Gas	Pengelolaan Air
Bregasmalang	582	1.205
Barlingmascakeb	509	315
Petanglong	187	59
Kedungsepur	799	1.129
Wanarakuti	351	382
Banglor	248	442
Purwomanggung	391	94
Subosukawonosraten	451	339
TOTAL	3.518	3.965

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2019



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 26: Banyaknya Usaha, Pendapatan, dan Pengeluaran Usaha
Pertambangan dan Penggalian Tahun 2018

Bidang Usaha Pertambangan	Banyaknya Usaha	Pendapatan (Rp M)	Pengeluaran (Rp M)	Rasio Pengeluaran terhadap Pendapatan
Minyak Bumi dan Gas Alam, Panas Bumi	37	8.558	4.206	0,49
Bijih Logam	402	43.462	21.647	0,50
Pertambangan dan Penggalian Lainnya	30.851	1.177.397	483.743	0,41
Jasa Penunjang Pertambangan	17	471	35	0,07
Total	31.307	1.229.888	509.631	0,41

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2019.

9. Kondisi Infrastruktur, Konektivitas, dan Sistem Logistik Eksisting Jawa Tengah

a. Konektivitas dan Jaringan Infrastruktur

1) Sistem Jaringan Jalan

Backbone konektivitas antarwilayah di Jawa Tengah berupa sistem jaringan jalan sebagai jalur utama distribusi pergerakan barang dan jasa di dalam wilayah Jawa Tengah maupun keluar masuk antar provinsi. Sistem jaringan jalan di Jawa Tengah terdiri dari jaringan jalan tol sepanjang ± 326,96km dan jalan non tol sepanjang 30.576,475km (terdiri dari jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 16 : Panjang Jaringan Jalan Tol Jawa Tengah yang Telah Beroperasi

No.	Ruas Jalan Tol	Panjang (km)	Keterangan
1.	Pejagan – Pemalang	57,51	
	- Seksi Pejagan – SS Brebes	13,64	Operasional Juni 2016
	- Seksi SS Brebes – Tegal Barat	8,80	Operasional Juni 2016
	- Seksi Tegal Barat – Tegal Timur	7,88	Operasional Januari 2019
	- Seksi Tegal Timur – Bts. Pemalang	27,20	Operasional Januari 2019
2.	Pemalang – Batang	39	
	- Seksi SS Pemalang – SS Pekalongan	27,03	Operasional Januari 2019
	- Seksi SS Pekalongan – SS Batang	19,10	Operasional Januari 2019
3.	Batang – Semarang	75	
	- Seksi Batang – SS Batang Timur	4	Operasional Januari 2019
	- Seksi Batang Timur – SS Weleri	34	Operasional Januari 2019
	- Seksi SS Weleri – SS Kendal	15	Operasional Januari 2019
	- Seksi SS Kendal – SS Kaliwungu	11	Operasional Januari 2019
	- Seksi SS Kaliwungu – SS Krapyak	11	Operasional Januari 2019
4.	Semarang – Solo	75,70	
4.1	Semarang – Salatiga	42,20	
	- Seksi Tembalang – Ungaran	11,20	Operasional November 2011
	- Seksi Ungaran – Bawen	12,80	Operasional April 2014
	- Seksi Bawen – Salatiga	18,20	Operasional September 2017



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Ruas Jalan Tol	Panjang (km)	Keterangan
4.2	Salatiga – Boyolali	33,50	
	- Seksi Salatiga – Kartosuro	22,40	Operasional Januari 2019
	- Seksi Kartosuro - Karanganyar	11,10	Operasional Januari 2019
5.	Solo – Mantingan	55	
	- Seksi Boyolali - Karanganyar	12,52	Operasional Januari 2019
	- Seksi Karanganyar - Sragen	13,02	Operasional Januari 2019
	- Seksi Sragen - Mantingan	29,45	Operasional Januari 2019
	Subtotal A	302,21	
6.	Tol Kota Semarang		Operasional Juli 1983
	- Seksi A Krapyak – Jatingaleh		
	- Seksi B Sronдол – Jatingaleh		
	- Seksi C Jatingaleh – Tanjung Emas		
	Subtotal B	24,75	
	Total A + B	326,96	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2019



Gambar 58 : Gerbang Tol Karanganyar dan Ruas Tol Solo-Mantingan

Sumber: Pengelola Jalan Tol Solo-Ngawi, 2019



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 17 : Kondisi Infrastruktur Jalan Sesuai Kewenangan di Jawa Tengah
Tahun 2018

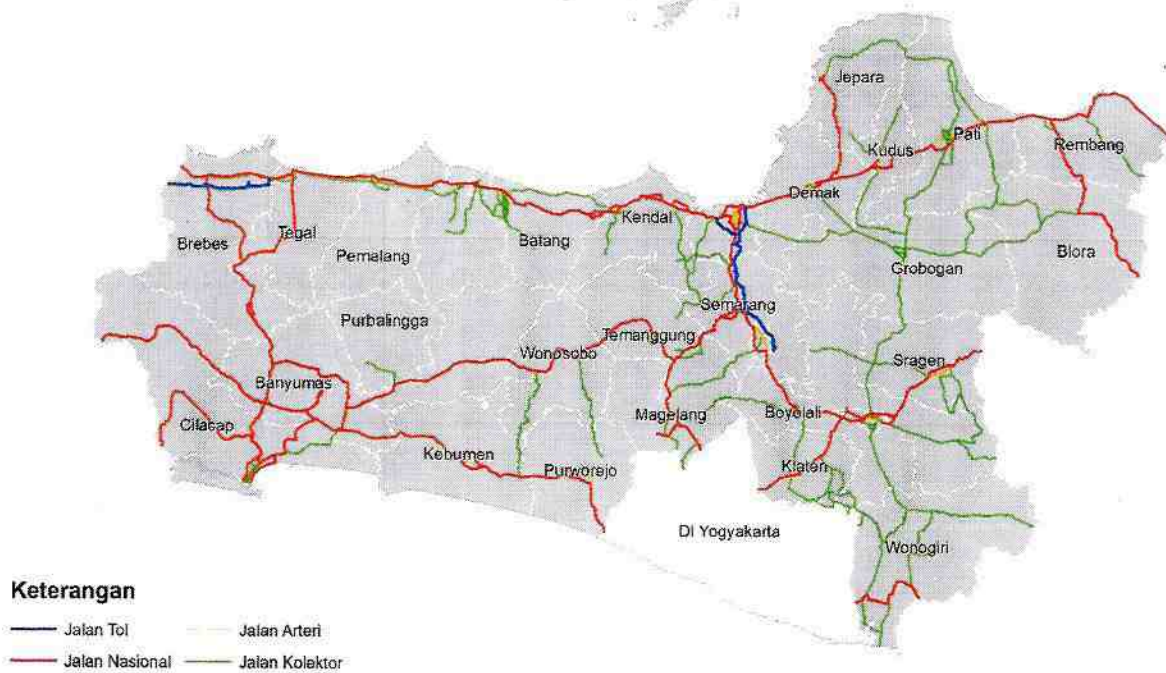
Kewenangan Jalan	Kondisi Ruas Jalan								Total Panjang (km)
	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
	km	%	km	%	km	%	km	%	
Nasional	783,65	51,62	669,86	44,13	58,460	3,85	6,11	0,4	1.518,09
Provinsi	2.154,64	89,60	250,09	10,40	0	0	0	0	2.404,74
Kab./Kota	15.293,33	57,38	5.100,36	19,14	3.446,67	12,93	2.813,29	10,55	26.653,64
Jumlah	18.215,28	59,57	6.036,67	19,74	3.505,13	11,46	2.819,40	9,22	30.576,47

Sumber: Kondisi Jalan Nasional Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah VII Jawa Tengah – DIY, 2019; Kondisi Jalan Provinsi: Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2019; Kondisi Jalan Kabupaten / Kota: Bappeda Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, 2019.

Infrasruktur jalan di Jawa Tengah untuk jalan nasional perlu dilakukan penguatan konektivitas melalui perbaikan kualitas jalan. Hal ini disebabkan 44,13% kondisi ruas jalan tergolong sedang dan 4,25% tergolong rusak ringan hingga berat. Kondisi jalan rusak berat juga terjadi pada jalan kabupaten/kota yang sebagian besar berlokasi di Kabupaten Batang dengan persentase kerusakan 35,13%, sedangkan untuk jalan nasional tergolong baik dengan kondisi ruas jalan baik sebesar 89,6%.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Gambar 59 : Peta Jaringan Jalan Jawa Tengah

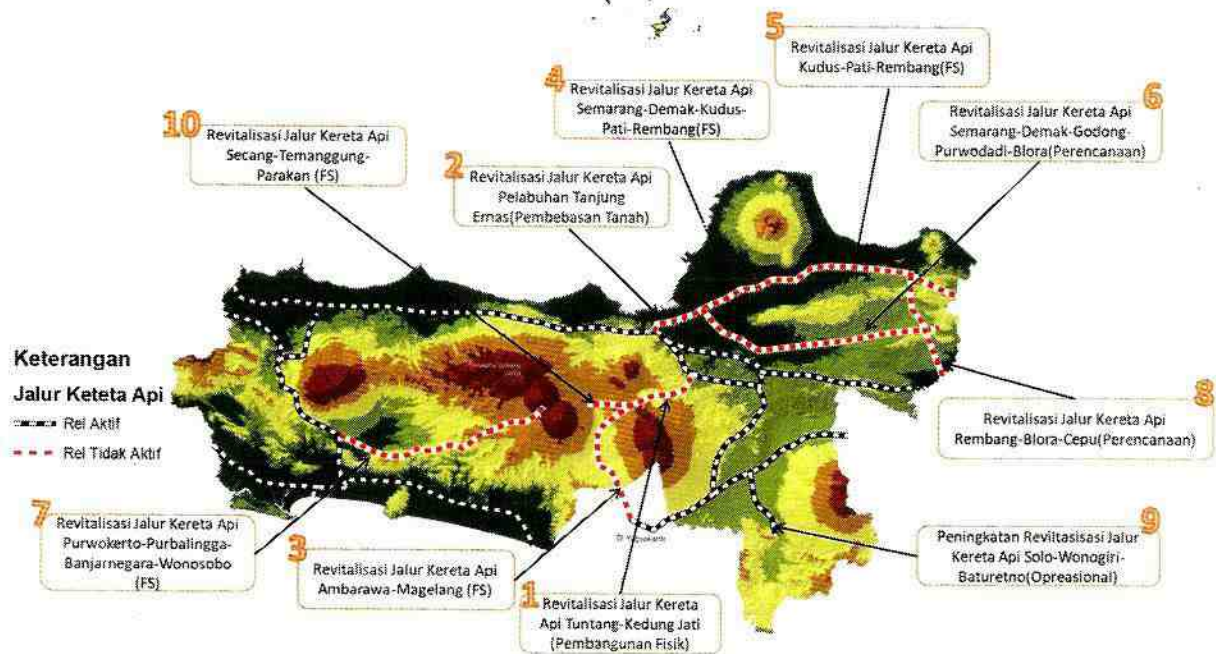
Sumber: Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2018

2) Sistem Jaringan Rel Kereta Api

Kegiatan pembangunan rel ganda (*double track*) kereta api di Jawa Tengah terdiri dari lintas utara dan lintas selatan. *Double track* lintas selatan Jawa terdiri dari *double track* Purwokerto - Kroya dan Solo - Sragen (Palur - Kedungbanteng). Pembangunan *double track* Solo - Sragen (Palur - Kedung Banteng) telah selesai dilakukan dengan panjang lintasan 27,9 km. Adapun peta sistem jaringan rel kereta api di Jawa Tengah tercantum dalam gambar sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Gambar 60 : Sistem Jaringan Rel Kereta Api di Jawa Tengah
 Sumber: Dinas Perhubungan Jawa Tengah, 2018

Total panjang jalur kereta api di Jawa Tengah sepanjang ± 1.557 km yang terdiri dari ± 894 km jalur operasi (57,42%) dan ± 663 km jalur non operasi (42,58%). Adapun rencana revitalisasi jalur kereta api non aktif di Jawa Tengah didasarkan pada Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) sepanjang $\pm 507,5$ km pada 9 jalur lintas kereta api.

Tabel 18 : Progres Revitalisasi Jalur Kereta Api Non Aktif di Jawa Tengah

No.	Reaktivasi Jalur KA Lintas	Panjang (km)	Keterangan
1.	Kedungjati - Tuntang	32	Feasibility Study (FS) 2009, Memorandum of Understanding (MoU) & Perjanjian Kerja Sama (PKS) 2013, Detail Engineering Design (DED) 2014, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 2015, proses Review DED
2.	Stasiun Tawang - Pelabuhan Tanjung Emas	2,9	FS 2012, MoU 2014, PKS 2015, DED 2015, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Reaktivasi Jalur KA Lintas	Panjang (km)	Keterangan
			(UKL-UPL) 2015, Izin Lingkungan 2016, masih terdapat tanah warga yang dalam proses gugatan di pengadilan
3.	Purwokerto - Wonosobo	94	FS 2009, Studi Trase 2015, Rekomendasi Gubernur kesesuaian RTRW 2016, rencana : 2018 - 2023
4.	Semarang - Demak - Kudus	52	Studi kereta api regional Semarang - Demak - Rembang 2006, FS Semarang - Rembang - Bojonegoro 2015. Rencana 2021 - 2030
5.	Kudus - Pati - Rembang	60	Studi kereta api regional Semarang - Demak - Rembang 2006, FS Semarang - Rembang - Bojonegoro 2015, Rencana 2021 - 2030
6.	Bedono (Secang Parakan) - Magelang - Yogyakarta :		FS 2013, Kajian Trase Bedono - Secang - Magelang 2014, Rencana 2018 - 2024
	- Magelang - Yogyakarta	46	
	- Magelang - Secang - Parakan	37	
7.	Cepu - Rembang	72	Masuk RIPNAS (Belum Ada Persiapan Dokumen) : Rencana 2025 - 2030
8.	Purwosari - Wonogiri - Baturetno	82	Masuk RIPNAS (Belum Ada Persiapan Dokumen) : Rencana 2025 - 2030
9.	Wonosobo - Magelang	29,6	Belum Ada Persiapan Dokumen
Total Panjang		507,5	

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2018



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3) Terminal Penumpang

Jumlah terminal penumpang di Jawa Tengah pada tahun 2018 sejumlah 192 terminal, terdiri dari 17 terminal tipe A (kewenangan pusat), 24 terminal tipe B (kewenangan provinsi), dan ± 151 terminal tipe C (kewenangan kabupaten/kota). Pada tahun 2017, Terminal tipe A Terboyo di Kota Semarang berhenti beroperasi dan akan dialihfungsikan menjadi terminal barang.

Tabel 19 : Perkembangan Jumlah Terminal Penumpang di Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah terminal tipe A	18	18	18	17	17
2.	Jumlah terminal tipe B	47	47	24	24	24
3.	Jumlah terminal tipe C	55	55	78	77*)	151**)
Total Terminal di Jawa Tengah		120	120	120	118	118

Sumber: Dinas Perhubungan Jawa Tengah, 2019

Keterangan: *) Kementerian Perhubungan

**) Bappeda Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah awal tahun 2019

Jumlah dan persebaran terminal tipe A dan tipe B belum memenuhi kebutuhan terminal yang direncanakan dalam Dokumen Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah. Sampai dengan tahun 2018, masih terdapat kebutuhan pembangunan terminal tipe A di 9 kabupaten/kota dan tipe B di 10 kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 20 : Persebaran Terminal Tipe A dan B di Jawa Tengah Tahun 2018

No	Kabupaten / Kota	Terminal Tipe A		Terminal Tipe B	
		Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana
Kedungsepur					
1	Kab. Kendal				√
2	Kab. Demak		√	Bintoro	√
3	Kab. Semarang	Bawen	√		
4	Kota Semarang	Margkang	√	Penggaron	√
5	Kota Salatiga	Tingkir	√		
6	Kab. Grobogan		√	Purwodadi	√
Wanarakuti					
7	Kab. Jepara		√		√
8	Kab. Kudus	Jati	√		
9	Kab. Pati		√		√
Subosukawonosraten					
10	Kab. Sukoharjo			Kartosuro, Sukoharjo	√
11	Kab. Boyolali		√	Sunggingan	√
12	Kota Surakarta	Tirtonadi	√		√
13	Kab. Karanganyar			Tegalgede, Tawangmangu	√
14	Kab. Wonogiri	Giriadipura	√	Jatisrono, Pracimantoro, Purwantoro, Baturetno	√
15	Kab. Sragen		√	Pilangsari	√
16	Kab. Klaten	Ir. Soekarno	√		
Bregasmalang					
17	Kab. Brebes			Bumiayu, Tanjung	√



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kabupaten / Kota	Terminal Tipe A		Terminal Tipe B	
		Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana
18	Kab. Tegal				√
19	Kota Tegal		√		√
20	Kab. Pemalang	Pemalang	√		√
	Petanglong				
21	Kab. Pekalongan			Kajen	√
22	Kab. Batang			Banyuputih	√
23	Kota Pekalongan	Pekalongan	√		
	Barlingmascakeb				
24	Kab. Banjarnegara		√	Banjarnegara	√
				a	
25	Kab. Purbalingga	Bobotsari	√	Purbalingga	√
26	Kab. Banyumas	Bulupitu	√		√
27	Kab. Cilacap	Gunuung Simping	√		√
28	Kab. Kebumen	Kebumen	√		√
	Purwomanggung				√
29	Kab. Purworejo	Purworejo	√	Suronegaran , Nampurejo	√
30	Kab. Wonosobo	Mendolo	√		
31	Kab. Magelang			Drs. Prayitno	√
32	Kota Magelang	Tidar	√		
33	Kab. Temanggung			Madureso	√
	Banglor				
34	Kab. Rembang		√		√
35	Kab. Blora	Cepu	√	Gagak Rimang	√
Jumlah		17	26	24	27

Sumber: Dinas Perhubungan Jawa Tengah dan RTRW Jawa Tengah, 2018
(Data Diolah)

Pada tahun 2017, terdapat 24 terminal Tipe B dan 3 terminal tidak layak menjadi terminal tipe B, yaitu Terminal

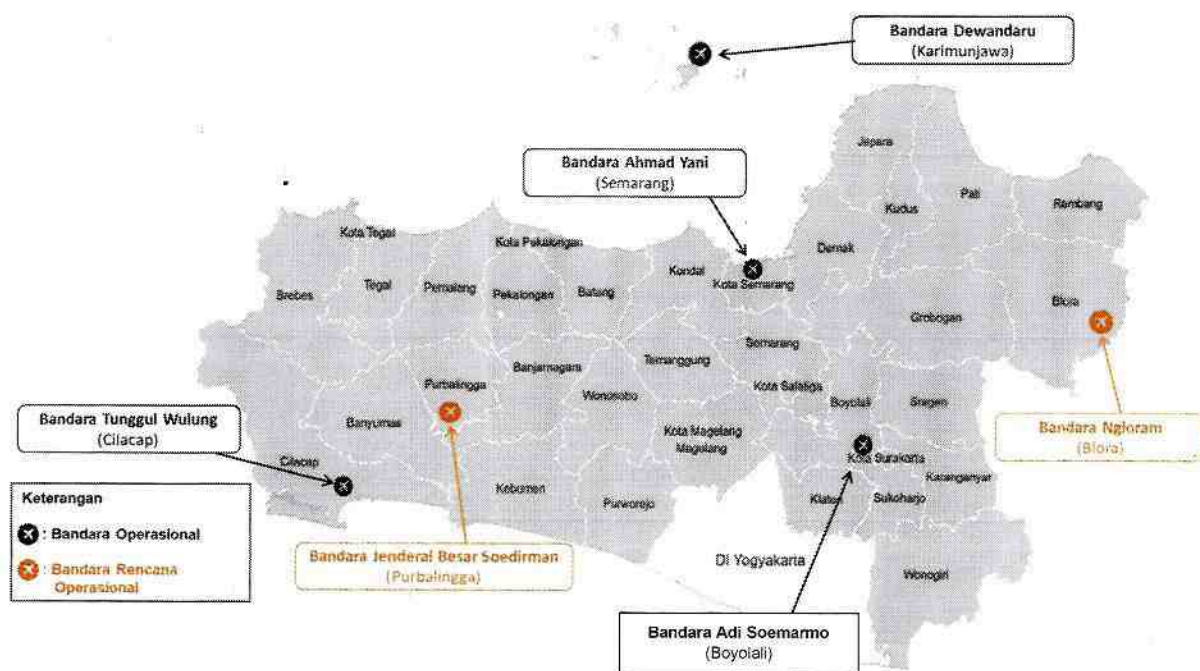


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Suronegaran dan Nampurejo di Kabupaten Purworejo, serta Terminal
drs. Prayitno Muntilan Kabupaten Magelang.

4) Simpul Transportasi Udara

Terdapat 4 (empat) bandara komersial yang sudah beroperasi yaitu Bandara Ahmad Yani di Semarang, Adi Soemarmo di Boyolali, Dewandaru di Karimunjawa Jepara, dan Tunggul Wulung di Cilacap, serta 2 rencana pengoperasian dan pengembangan bandara yaitu Bandara Jenderal Besar Soedirman (Wirasaba) di Purbalingga dan Bandara Ngloram di Blora. Saat ini, telah dioperasikan terminal penumpang baru Bandara Ahmad Yani Semarang pada tahun 2018 dengan kapasitas \pm 6 juta penumpang per tahun atau hampir 9 kali lipat dari kapasitas terminal sebelumnya.



Gambar 2 : Peta Sebaran Bandara Jawa Tengah

Sumber: Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2018

Pengembangan intermoda transportasi saat ini sedang dilakukan di Bandara Adi Soemarmo Boyolali. Pengembangan dilakukan dengan membangun kereta api bandara yang menghubungkan bandara dengan Stasiun Solo Balapan, dimana telah dilaksanakan pembebasan lahan, pembangunan jalur kereta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

api menuju Bandara Adi Soemarmo, serta pembangunan jembatan pendukung jalur kereta api.



Gambar 61 : Terminal Penumpang Baru Bandara Adi Soemarmo dan Bandara Ahmad Yani
Sumber: Bappeda Jawa Tengah, 2019

b. Sistem Logistik

Kondisi konektivitas dan sistem logistik Jawa Tengah perlu dioptimalkan. Keterbatasan konektivitas dan sistem logistik ditunjukkan melalui tingginya biaya logistik Pelabuhan Tanjung Emas, kurangnya sinergi antar-moda, serta tingginya kebutuhan akan pembangunan pelabuhan baru serta pembangunan pelabuhan *smart logistic*. Pembangunan pelabuhan *smart logistic* di Kendal menuju kapasitas 1,5 juta TEUs dapat menurunkan biaya logistik di Jawa Tengah hingga 3-5%. Dibutuhkan sinergi antar-moda khususnya pelabuhan dan kereta api sebagai pusat layanan logistik regional berbasis rel.

Terkait dengan sistem logistik pertanian, telah ditetapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga komoditas dengan perlindungan harga dan penjaminan pemasaran produk pertanian, intervensi, dan penguasaan stok oleh pemerintah dengan membeli secara langsung produk pertanian dengan menugaskan BUMD sebagai operator, serta penguatan kelembagaan petani di tingkat desa. Upaya menjaga harga komoditas pertanian dilakukan melalui implementasi Sistem Logistik Daerah (Sislogda). Pemerintah melalui BUMD menyerap produk hasil pertanian untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat. BUMD selaku operator Sislogda menjual produk pertanian kepada masyarakat dengan kebijakan *dual price*, yaitu penjualan langsung kepada masyarakat umum sesuai harga pasar dan menjual di bawah harga pasar. Penerapan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

mekanisme penjualan di bawah harga pasar diharapkan dapat menstabilkan harga. Pembelian produk hasil pertanian oleh BUMD, berfungsi untuk menjaga stok dan pasokan. Pengembangan Sislogda perlu didukung dengan pengembangan sistem informasi guna mengetahui ketersediaan stok dan arus barang secara *real time*.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB IV

KAWASAN PERCEPATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI JAWA TENGAH

1. KAWASAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI (KI) KENDAL

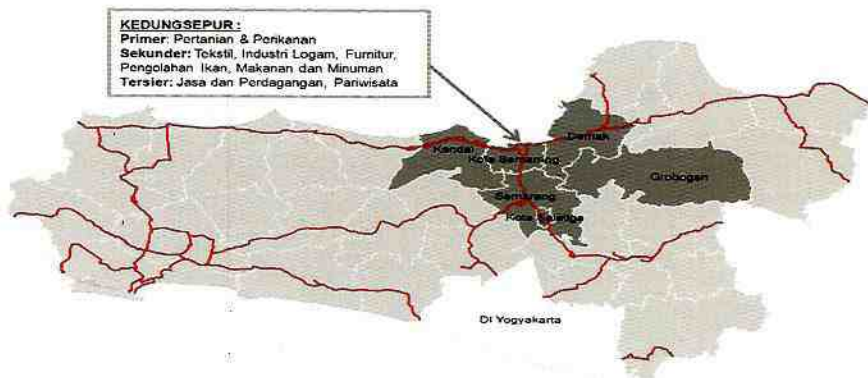
a. Kawasan Kedungsepur

1) Overview Kawasan

- Geografi Wilayah

Kawasan Kedungsepur terdiri atas Kabupaten Kendal, Demak, Semarang, Grobogan, Kota Semarang, dan Salatiga.

Kawasan Kedungsepur seluas 5.416,46 km² atau 16,5% dari total luas Jawa Tengah. Secara geografis, Kedungsepur terletak di wilayah Pantura dengan Kota Semarang sebagai Pusat Pemerintahan sekaligus PKN di Jawa Tengah. PKN Kota Semarang berorientasi pada aktivitas industri dan perdagangan/jasa. Kedungsepur menghubungkan Kawasan Purwomanggung dan Subosukawonosraten dari arah selatan dengan Petanglong dan Wanarakuti dari wilayah Pantura. Kedungsepur memiliki posisi strategis dalam mendorong perkembangan ekonomi di wilayah Pantura sekaligus sebagai penghubung 2 (dua) PKN, yakni Jakarta dan Surabaya. Posisi Kedungsepur semakin strategis dengan dikembangkannya KI Kendal sebagai usaha percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah.



Gambar 62 : Regionalisasi Kawasan Kedungsepur

Sumber: Bappeda Jawa Tengah, 2019



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Secara topografis, kondisi fisik wilayah Kedungsepur didominasi oleh wilayah datar dan landai dengan ketinggian di bawah 200 mdpl yang berbatasan dengan Laut Jawa di bagian utara. Wilayah perbukitan dan gunung api mendominasi relief di selatan hingga timur, diantaranya Gunung Api Merbabu, Andong, Telomoyo, dan Ungaran (Kabupaten Semarang) di selatan serta Perbukitan Kapur Kendeng ke arah timur (Kabupaten Grobogan). Wilayah Kedungsepur dilalui DAS utama yang berhulu di wilayah gunung api serta perbukitan dan bermuara ke Laut Jawa, diantaranya: DAS Bodri-Kuto, DAS Garang serta Wilayah Sungai Jratunseluna (terdiri atas DAS Jragung, Tuntang, Serang, dan Lusi).

- **Kependudukan dan Sosial Budaya**

Kedungsepur memiliki penduduk sebanyak 5.134.216 jiwa dengan kepadatan penduduk 947,9 jiwa/km². Adapun kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Semarang (4.680 jiwa/km²) dan Kota Salatiga (3617 jiwa/km²).

Penduduk Kawasan Kedungsepur mayoritas berada di usia produktif dengan nilai beban ketergantungan sebesar 43. Hal tersebut menunjukkan tingginya jumlah penduduk produktif sebagai potensi angkatan kerja yang mampu mengisi sektor industri dan perdagangan/jasa.

Rata-rata nilai IPM sebesar 75,1, dengan nilai tertinggi berada di Kota Semarang dan Salatiga sebesar 82,72 dan 82,41, serta nilai terendah di Kabupaten Grobogan sebesar 69,32. Perbedaan nilai IPM antar kabupaten/kota di Kedungsepur menunjukkan masih diperlukan strategi pemerataan pembangunan manusia yang tepat.

- **Sektor dan Komoditas Unggulan**

Kedungsepur memiliki keunggulan pada sektor (i) primer di bidang pertanian dan perikanan, (ii) sekunder di bidang industri tekstil, logam, furnitur, dan pengolahan ikan serta (iii) tersier di



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

bidang jasa dan perdagangan. Berdasarkan kondisi tersebut, pengembangan di Kedungsepur difokuskan pada bidang pertanian dan perikanan, industri pengolahan, dan perdagangan/jasa.

2) Potensi dan Tantangan Kawasan Kedungsepur

Kawasan Kedungsepur memiliki potensi utama pada sektor industri pengolahan dengan beberapa KI eksisting yang telah berkembang, sektor pertanian dan perikanan serta sektor perdagangan/jasa. Pengembangan potensi Kedungsepur masih menghadapi tantangan untuk dapat berkembang menjadi KI berorientasi nasional, sehingga perlu dikembangkan konsep *Integrated Smart Port – Industrial Estate 4.0*. Guna mencapai hal tersebut, pemerintah perlu menyediakan infrastruktur pendukung yang berstandar internasional serta SDM yang berkompeten. Selain hal tersebut, Kedungsepur sebagai kawasan perkotaan memunculkan tantangan pengembangan wilayah pada aspek daya dukung lingkungan yang kian menurun, salah satunya fenomena *land subsidence* dan banjir rob. Terkait hal tersebut maka Kawasan Kedungsepur harus direncanakan dengan konsep resilien yang dapat melakukan mitigasi serta adaptasi terhadap penurunan daya lingkungan tersebut. Potensi dan tantangan Kawasan Kedungsepur dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 21 : Potensi Pembangunan Kawasan Kedungsepur

No.	Aspek	Potensi
1.	Fisik	
	Fisik Alam	Karakteristik fisik beragam, mulai dari wilayah pesisir, dataran rendah hingga pegunungan dengan potensi sumber daya alam bervariasi
		Dekat dengan Laut Jawa serta potensi perikanan dan penghubung transportasi laut nasional
		Hulu dari DAS utama di pantura, seperti DAS



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Aspek	Potensi
	<p data-bbox="354 692 565 729">Infrastruktur</p> <p data-bbox="354 1197 623 1234">Interaksi wilayah</p>	<p data-bbox="683 470 1430 507">Bodri-Kuto, WS Jratunseluna dan DAS Garang</p> <p data-bbox="683 519 1430 667">Di dominasi oleh wilayah datar dan landai, sehingga memiliki lahan yang optimal bagi pengembangan wilayah</p> <p data-bbox="683 692 1430 778">Tol Trans Jawa memperkuat konektivitas Kedungsepur dengan kawasan sekitarnya</p> <p data-bbox="683 803 1430 951">Bandara dan pelabuhan internasional di Kota Semarang memberikan akses konektivitas secara nasional dan global</p> <p data-bbox="683 975 1430 1061">Terminal Tipe A Bawen meningkatkan pergerakan orang antar provinsi</p> <p data-bbox="683 1086 1430 1172"><i>Bus Rapid Transit</i> (BRT) yang mendukung pergerakan internal Kedungsepur</p> <p data-bbox="683 1197 1430 1394">PKN Kedungsepur mempunyai interaksi dan konektivitas wilayah relatif kuat sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk memperkuat pengembangan wilayah</p>
<p data-bbox="266 1431 298 1468">2.</p>	<p data-bbox="354 1431 505 1468">Ekonomi</p> <p data-bbox="354 1480 565 1567">Dukungan Infrastruktur</p> <p data-bbox="354 1702 646 1912">Perkembangan Sektor Industri dan Jasa/Perdagangan</p>	<p data-bbox="683 1480 1430 1677">Jalan Pantura yang melewati wilayah Kedungsepur memberikan manfaat aksesibilitas bagi kemudahan pergerakan barang dan jasa</p> <p data-bbox="683 1702 1430 2232">Sektor industri terutama industri makanan dan minuman, industri pengolahan dan industri logam sangat berkembang di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Demak, Kendal serta sebagian Grobogan. Selain itu, juga terdapat beberapa kawasan industri besar diantaranya: KI Lamicitra Nusantara di Semarang Utara, Tanjung Mas <i>Export Processing Zone</i>, Kawasan Industri Wijayakusuma di Tugu (Kota Semarang) serta</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Aspek	Potensi
		<p>Kawasan Industri Jatengland Industrial Park Sayung di Demak</p> <p>Sektor jasa dan perdagangan terdapat di Kabupaten Semarang dan Kota Semarang dengan pelayanan perdagangan dan jasa skala nasional hingga internasional</p>
	Perkembangan Sektor Pariwisata	<p>Sektor pariwisata di wilayah Kedungsepur didukung oleh perkembangan perhotelan yang pesat khususnya di Kota Semarang. Potensi pariwisata unggulan, meliputi:</p> <p>Kabupaten Kendal: Pantai Sendangkulo, Pantai Sendangsikucing, Plantera, Goa Kiskendo dan Bendung Singorojo</p> <p>Kabupaten Demak: Masjid Agung Demak, Makam Sunan Kalijaga Kadilangu dan Tradisi Grebeg & Sedekah Laut</p> <p>Kabupaten Semarang: Wana Wisata Penggaron, Kampung Kopi Banaran, Candi Gedongsongo, Agrowisata Umbul Sidomukti, Museum Kereta Api Ambarawa dan Taman wisata Rawa Pening</p> <p>Kota Semarang: Wisata Bahari Teluk Semarang, Masjid Agung Jawa Tengah, Kawasan Kota Lama dan Gereja Blenduk, Cagar Budaya Lawang Sewu, Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah, Wisata Museum dan Vihara Watugong</p> <p>Kota Salatiga: Agro Salib Putih, Batu Prasasti Plumpungan, Goa Asmorodono dan Agro Salak Kecandran</p> <p>Kabupaten Grobogan:</p>



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

No.	Aspek	Potensi
		Bledug Kuwu Karadenan, Api Abdi Mrapen, Gua Lawa dan Macan, Hutan Wisata Cindelaras, Waduk Simo, Wana Wisata Waduk Kedung Ombo dan Makam Ki Ageng Getas Pendowo
	Perkembangan Sektor Pertanian	<p>Sektor pertanian sangat berkembang di Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak dan Kabupaten Kendal dengan komoditas utama (1) Tanaman Pangan: padi, jagung, dan kedelai, (2) Bawang Merah serta (3) Hortikultura</p> <p>Produksi komoditas tanaman pangan di Grobogan merupakan yang tertinggi di Jawa Tengah, yakni untuk padi mencapai 732 ribu kuintal, jagung 770 ribu kuintal dan kedelai 41 ribu kuintal. Grobogan dan Demak sebagai salah satu lumbung pangan Jawa Tengah</p> <p>Pertanian hortikultura di Kendal dengan komoditas jambu biji getas merah, pisang raja bulu</p> <p>Potensi Agropolitan Sub Terminal Agribisnis (STA) Sumowono komoditas kopi dan padi organik serta Agropolitan Kota Tani Utama di Demak dengan komoditas jambu, kacang hijau, belimbing</p>
	Pertumbuhan ekonomi	Kondisi perekonomian di wilayah Kedungsepur relatif baik dengan rata-rata pertumbuhan di atas 5% sepanjang lima tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Kota Semarang dan Kabupaten Semarang mencapai angka di atas 5,5%, berturut-turut sebesar 6,22%, dan 5,62%
	Perkembangan kawasan	Kabupaten Kendal-Kota Semarang-Kabupaten Semarang-Kota Salatiga merupakan daerah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Aspek	Potensi
		yang sudah berkembang
3.	Sosial	<p>Kedungsepur memiliki indeks kualitas SDM yang baik, dengan nilai IPM yang berada di atas IPM Jawa Tengah (di atas 70,71). Kota Semarang dan Kota Salatiga memiliki IPM tertinggi dengan nilai di atas 82</p> <p>Kota Salatiga dan Semarang merupakan dua dari empat daerah di Jawa Tengah yang secara keseluruhan telah mencapai angka harapan sekolah di atas 9 (sembilan) tahun</p>
4.	Kerja sama antar daerah	Telah terjalin kerja sama antar daerah dalam pengembangan pariwisata, infrastruktur, dan pelayanan umum

Sumber: Analisis Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bappeda Jawa Tengah, 2019

Tabel 22 : Tantangan Pembangunan Kawasan Kedungsepur

No.	Aspek	Tantangan
1.	Fisik	
	Fisik Alam	<p>Wilayah Kedungsepur memiliki kawasan rawan bencana yang menjadi salah satu limitasi pembangunan, meliputi:</p> <p>Kabupaten Kendal: Memiliki kerawanan terhadap banjir rob, gelombang pasang, tanah longsor, dan abrasi pantai</p> <p>Kabupaten Demak: Memiliki kerawanan terhadap banjir rob, gelombang pasang, banjir genangan, dan kekeringan</p>



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

No.	Aspek	Tantangan
		<p>Kabupaten Semarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Memiliki kerawanan terhadap tanah longsor, banjir, kekeringan, dan angin puting beliung -Kondisi sedimentasi dan eutrofikasi menghambat pengembangan kawasan pariwisata Rawa Pening (Kabupaten Semarang). Hal ini diakibatkan oleh berkurangnya luas permukaan rawa karena tertutup tanaman eceng gondok <p>Kota Semarang:</p> <p>Memiliki kerawanan terhadap banjir rob, banjir genangan, abrasi pantai, dan gerakan tanah</p> <p>Kota Salatiga:</p> <p>Memiliki kerawanan terhadap tanah longsor</p> <p>Kabupaten Grobogan:</p> <p>Memiliki kerawanan terhadap banjir, tanah longsor, dan kekeringan</p>
	<p>Infrastruktur</p> <p>Interaksi wilayah</p>	<p>Kondisi kerusakan jalan kabupaten di Grobogan dan Kendal hingga tahun 2019 mencapai lebih dari 100 km</p> <p>Akses pelayanan air bersih belum memadai di sebagian wilayah Kabupaten Grobogan, Demak, dan Kendal</p> <p>Pengelolaan saluran air hujan (drainase) masih belum optimal</p> <p>Jalan Pantura antara Kabupaten Demak dengan Semarang rawan rusak dan rawan kecelakaan</p> <p>Konektivitas Kabupaten Grobogan dengan Kota Salatiga masih rendah</p>
<p>2.</p>	<p>Ekonomi</p>	
	<p>Dukungan infrastruktur</p>	<p>Jaringan jalan akses menuju kawasan pertanian di Kabupaten Grobogan masih kurang memadai</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Aspek	Tantangan
		Pertanian di Kabupaten Grobogan, Demak, dan Kendal masih terkendala minimnya dukungan irigasi dan bencana kekeringan
		Tingginya arus logistik di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang dan jalan Pantura yang dilewati kendaraan melebihi standar tonase
		Perlunya konektivitas langsung dari KI Kendal menuju pelabuhan di Laut Jawa
	Perkembangan sektor potensial	Ketergantungan Kabupaten Grobogan dan Kendal pada sektor pertanian menyebabkan perkembangan ekonomi stagnan sehingga harus diupayakan ke arah agroindustri
	Pertumbuhan ekonomi	Pusat perekonomian di Kedungsepur masih terfokus di Semarang, sementara target alokasi industri besar di Demak belum memberikan kontribusi yang mampu meningkatkan perekonomian di Jawa Tengah
	Perkembangan kawasan	Kesenjangan antara Kabupaten Grobogan dengan daerah sekitarnya relatif tinggi
3.	Sosial	<p>Tingkat kemiskinan di Kabupaten Grobogan dan Demak masih di atas 12%</p> <p>Masih tingginya jumlah keluarga pra sejahtera di Grobogan dan Demak</p> <p>Kabupaten Grobogan merupakan satu-satunya wilayah di Kedungsepur dengan nilai IPM di bawah angka 70</p> <p>Kabupaten Grobogan dan Demak memiliki nilai UMK (Upah Minimum Kabupaten) di bawah KHL (Kebutuhan Hidup Layak)</p> <p>Angka <i>stunting</i> di Grobogan masih tinggi yakni hingga 32,1-37,58% berdasarkan data Pemantauan Status Gizi (PSG), 2019</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Aspek	Tantangan
4.	Kerja sama antar daerah	Kerja sama antar daerah Kedungsepur bersifat parsial dan sektoral

Sumber: Analisis Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bappeda Jawa Tengah, 2019

3) Tema Pembangunan Kawasan Kedungsepur

Berdasarkan RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023, tema pembangunan untuk Kawasan Kedungsepur adalah:

“Pengembangan Wilayah Kedungsepur berbasis Perdagangan Jasa dan Industri Pengolahan yang Sinergis terhadap Kegiatan Pertanian dan Pariwisata Terpadu Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.”

Adapun maksud tema pembangunan Kawasan Kedungsepur adalah pembangunan wilayah yang dilakukan bertumpu pada sektor unggulan utama yakni perdagangan dan jasa serta industri pengolahan. Selain itu, pembangunan wilayah juga didukung sektor pertanian dan pariwisata terpadu (alam, budaya, dan buatan). Pembangunan wilayah dilakukan menggunakan prinsip berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

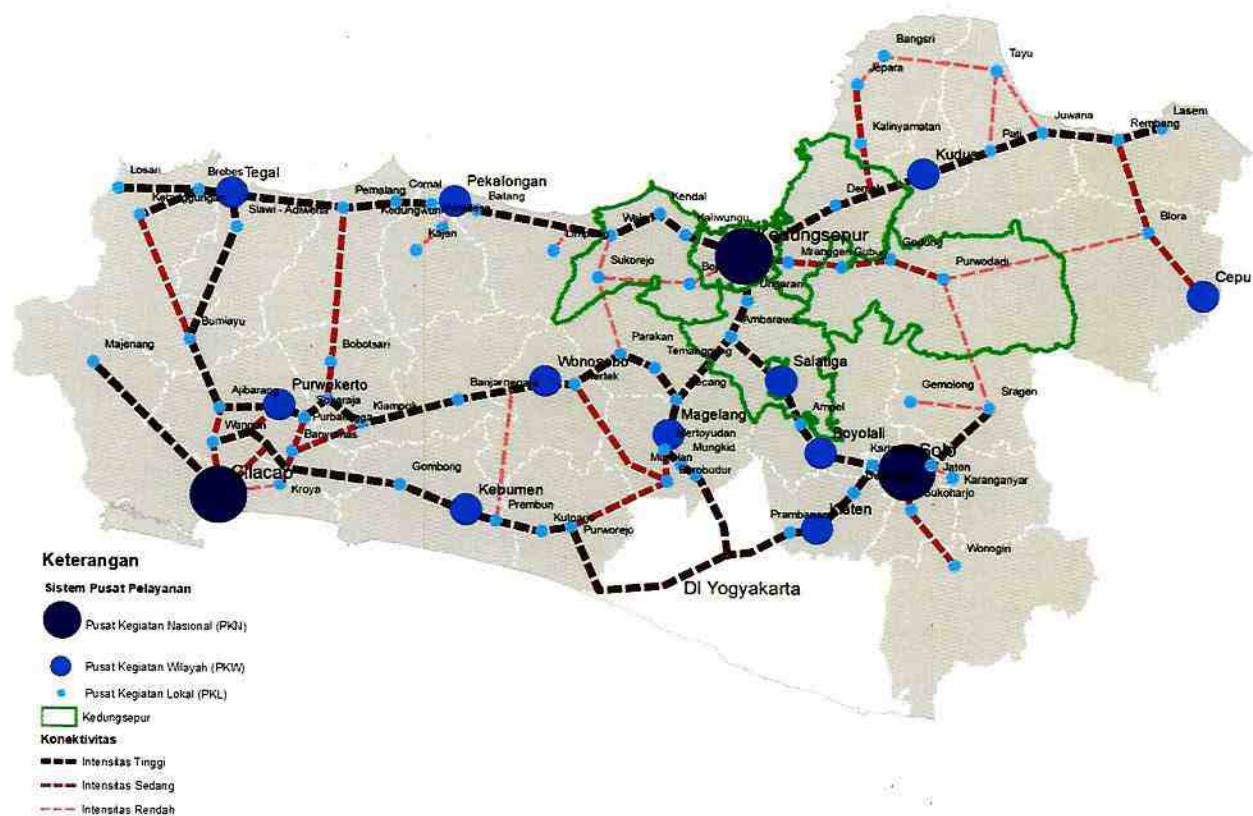
4) Penguatan Konektivitas Kawasan Kedungsepur

Kondisi eksisting konektivitas Kedungsepur didukung oleh pusat-pusat kegiatan ekonomi yaitu 1 PKN, 1 PKW, dan 12 PKL. Pusat-pusat kegiatan ekonomi tersebut dihubungkan dengan sistem transportasi darat (jalan nasional dan kereta api), transportasi udara (Bandara Ahmad Yani) serta transportasi laut (Pelabuhan Tanjung Emas). Kondisi konektivitas intensitas tinggi terletak pada jalur-jalur yang menghubungkan PKN Kedungsepur dengan PKL Demak, PKL Kaliwungu, PKL Kendal, PKL Weleri, PKL Ungaran, PKL Ambarawa, dan PKW Salatiga. Kedungsepur juga memiliki konektivitas tinggi dengan PKN Yogyakarta dan PKN Surakarta yang membentuk sistem konektivitas Joglosemar. Sistem konektivitas Joglosemar tersebut



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

memberikan dampak positif bagi Kawasan Kedungsepur, karena dapat memperlancar arus barang maupun meningkatkan jumlah wisatawan. Sedangkan konektivitas antara kawasan Kedungsepur dengan kawasan pendukung Wanarakuti dan Banglor diperkuat dengan pengembangan trase reaktivasi jalur Kereta Api Semarang – Rembang – Bojonegoro serta rencana pembangunan jalan Tol Semarang – Rembang.



Gambar 63 : Konektivitas Pusat Kegiatan Ekonomi di Kawasan Kedungsepur
Sumber : RTRW Jawa Tengah, 2019 dan Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2019

Kawasan Kedungsepur sebagai PKN di Jawa Tengah diarahkan melalui: (1) perwujudan kawasan metropolitan Semarang sebagai ibukota provinsi yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi utama Jawa Tengah; (2) pengembangan kawasan strategis ekonomi dalam konteks kawasan ekonomi khusus; (3) perwujudan dari sisi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

hubungan intraregional sebagai pusat distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitar jalur Pantura serta; (4) perwujudan secara inter-regional sebagai wilayah transit/pengumpul perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur Jawa serta pulau-pulau lainnya terutama Kalimantan.

Sementara itu, PKL meliputi 12 kawasan perkotaan Purwodadi, Gubug, Godong, Demak, Mranggen, Ungaran, Ambarawa, Kendal, Boja, Kaliwungu, Weleri, dan Sukorejo yang diharapkan menunjang kegiatan sosial ekonomi disekitarnya. Selain PKN dan PKL, juga terdapat kawasan-kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya seperti Kawasan Masjid Demak dan Kawasan Candi Gedongsongo serta kawasan strategis kepentingan ekonomi yaitu KI Kendal – Semarang – Demak.

Penguatan konektivitas Kawasan Kedungsepur dilakukan dengan pengembangan infrastruktur meliputi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi melalui:

- Pengembangan Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan (3 koridor) dan rel (Kereta Api Komuter);
- Pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas dan Kendal;
- Revitalisasi/Reaktivasi Jalur Rel Kereta Api Non Aktif pada Jalur Kedungjati – Tuntang dan Ambarawa – Secang – Magelang – Yogyakarta;
- Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak;
- Pembangunan Jalan Lingkar *Semarang Outer Ring Road* (SORR)/*Semarang Harbour Toll*;
- Pengembangan Bandara Ahmad Yani, Kota Semarang; dan
- Pengembangan konektivitas Pelabuhan Kendal dengan KI Kendal.

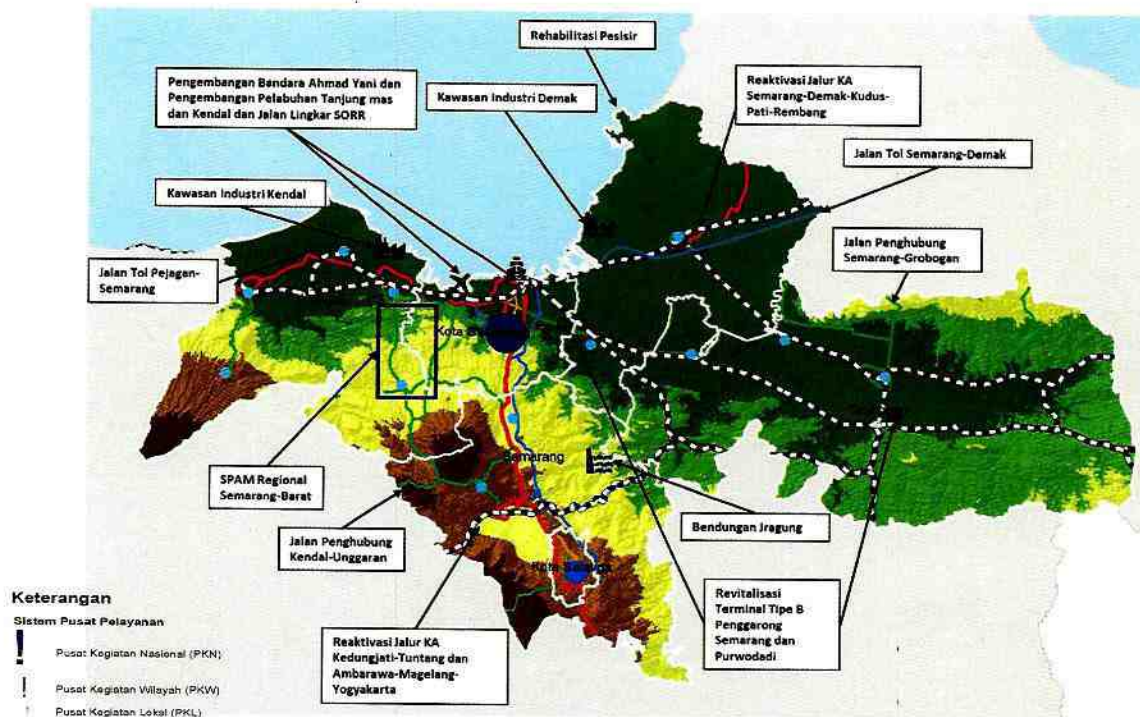
Peningkatan konektivitas Kawasan Kedungsepur juga didukung dengan Proyek Strategis Nasional, diantaranya: (1) Jalan Tol Batang - Semarang (75 km); (2) Pengembangan Bandara Ahmad Yani, Semarang; (3) Jalan Tol Semarang - Solo (72,6 km); dan (4) Jalan Tol Semarang - Demak (24,0 km).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5) Strategi Percepatan Pembangunan Kawasan Kedungsepur

Pembangunan kawasan Kedungsepur dalam RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023 ditargetkan untuk mencapai 4 (empat) indikator utama yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi pada kisaran sebesar 5,20% sampai dengan 6,50%; (2) angka kemiskinan pada kisaran 0,28% sampai dengan 9,28%; (3) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kisaran sebesar 1,70% sampai dengan 4,80%; dan (4) IPM pada kisaran 71,16 sampai dengan 83,69.



Gambar 64 : Strategi Pengembangan Kawasan Kedungsepur

Sumber: RPJMD Jawa Tengah 2018-2023 dan Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2019

KI Kendal sebagai salah satu upaya dalam percepatan pembangunan Jawa Tengah, membutuhkan dukungan dari wilayah internal maupun eksternal. Keberadaan Pelabuhan Tanjung Emas tetap diperlukan untuk mendukung aliran barang sampai dengan Kendal *Sea Port* siap beroperasi. Selain hal tersebut, KI Kendal juga membutuhkan dukungan beberapa bahan baku yang berasal dari luar Kawasan Kedungsepur sehingga dibutuhkan penguatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

konektivitas berupa pengembangan transportasi. Pengembangan kawasan industri juga diimbangi dengan upaya pengelolaan lingkungan dalam mendukung industri berkelanjutan, diantaranya: konservasi air tanah Cekungan Air Tawar (CAT) Semarang - Demak rehabilitasi pesisir (Demak, Kendal, dan Kota Semarang); penanganan daerah kritis (Kabupaten Semarang dan Grobogan) dan pembangunan pengelolaan limbah dari bahan berbahaya dan beracun (limbah B3); pembangunan *waste to energy (incenerator)*.

Gambar 65 : Perencanaan Kawasan Industri Kendal



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Jawa Tengah, 2019

b. Kawasan Pendukung Wanarakuti

1) **Overview Kawasan**

- **Geografi Wilayah**

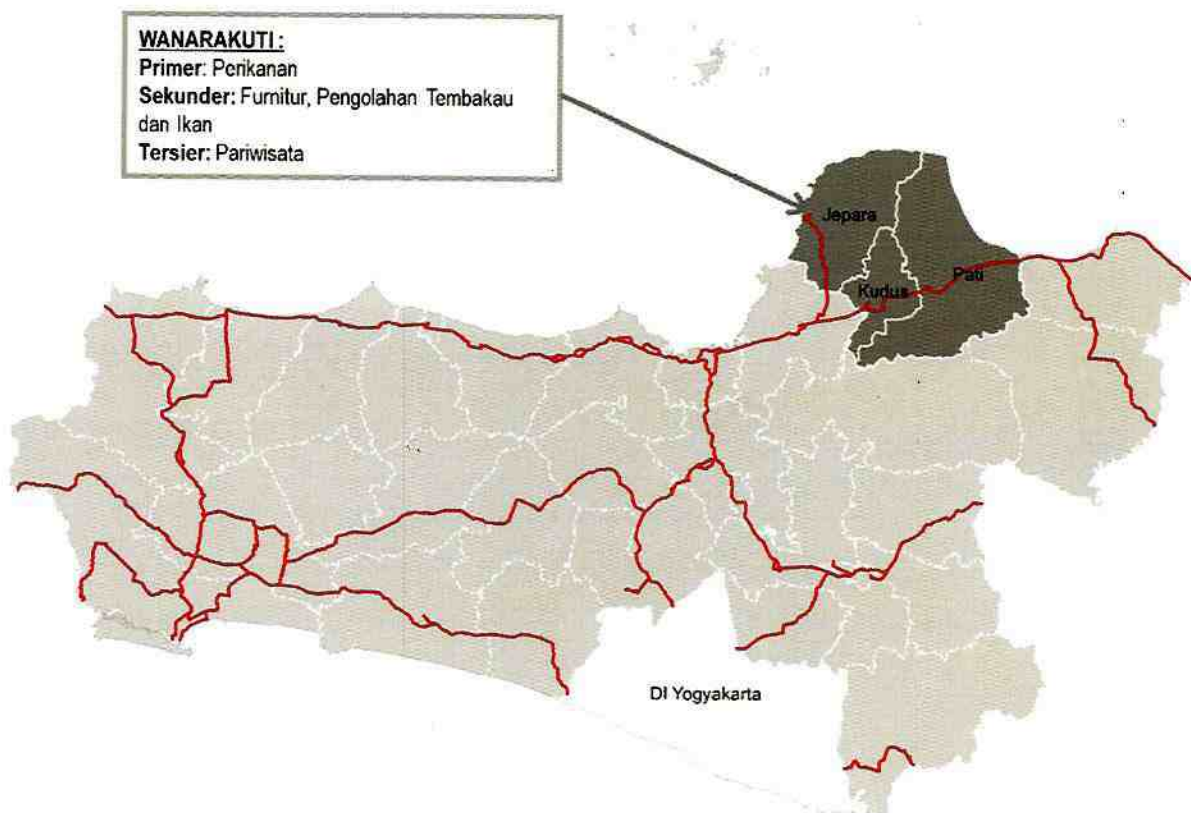
Kawasan Wanarakuti terdiri atas Kabupaten Jepara, Kudus, dan Pati. Kawasan Wanarakuti seluas 2.973,59 km² atau 9,07 % dari total luas Jawa Tengah. Secara geografis, memiliki posisi strategis berada di wilayah Pantura sebagai penghubung pusat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pemerintahan dan industri di Kawasan Kedungsepur dengan Kawasan Banglor hingga ke arah Jawa Timur. Wanarakuti juga berfungsi sebagai kawasan yang membuka akses langsung keterjangkauan barang/jasa dari Kawasan Banglor menuju Kawasan Kedungsepur maupun sebaliknya. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Karimunjawa merupakan bagian pengembangan strategis dalam Wanarakuti.

Wanarakuti memegang posisi sebagai kawasan pendukung Kedungsepur terutama pada aspek ekonomi industri dan perdagangan/jasa serta penyuplai bahan baku perikanan. Dominasi topografi dataran rendah menyebabkan Wanarakuti memerlukan perhatian perencanaan drainase yang baik dalam pengembangan wilayah sebagai bentuk mitigasi terhadap bencana banjir. Wilayah Wanarakuti dilalui tiga DAS utama yaitu DAS Serang dan DAS Juwana (sistem Wilayah Sungai Jratunseluna) serta DAS Wiso-Gelis.



Gambar 66 : Regionalisasi Kawasan Pendukung Wanarakuti

Sumber: Bappeda Jawa Tengah, 2019



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- **Kependudukan dan Sosial Budaya**

Kepadatan penduduk Kabupaten Jepara, Kudus dan Pati berturut-turut 1.235 jiwa/km², 2.026 jiwa/km², dan 840 jiwa/km². Melihat dari persentase penduduk, Kabupaten Pati merupakan daerah konsentrasi penduduk di Kawasan Wanarakuti. IPM di Kawasan Wanarakuti memiliki kategori sedang dengan nilai kisaran antara 70,71 hingga 74,58.

Kawasan Wanarakuti memiliki potensi SDM tergolong sedang. Perhitungan Dependency Ratio (DR) atau Rasio Ketergantungan di Kawasan Wanarakuti bernilai 45,13. Hal ini menunjukkan 100 penduduk dengan usia produktif (usia 15 – 65 tahun) menanggung 45 penduduk usia tidak produktif (usia 0 – 14 dan 65+ tahun). Secara aspek sosial budaya, Kawasan Wanarakuti memiliki potensi yang begitu kental dengan nilai keagamaan dan nilai kebudayaan.

- **Sektor dan Komoditas Unggulan**

Sektor dan komoditas unggulan Kawasan Wanarakuti terletak di masing-masing sektor unggulan kabupaten pendukungnya. Kabupaten Jepara memiliki banyak sentra kerajinan ukiran kayu yang telah diekspor. Kabupaten Pati memiliki potensi sektor pertanian dengan komoditas buah jambu monyet, buah manggis, padi, kacang hijau dan kopi. Selain itu, terdapat industri-industri kecil seperti tepung tapioka, industri kain batik, dan industri batu bata. Sedangkan Kabupaten Kudus memiliki komoditas tembakau dan buah jambu bol.

2) Potensi dan Tantangan Kawasan Pendukung Wanarakuti

Kawasan Wanarakuti diarahkan sebagai industri dan pengolahan serta agropolitan dan pariwisata. Sektor perikanan menjadi penopang ekonomi terbesar di Kabupaten Pati. Sektor tersebut memberikan kontribusi cukup besar bagi perikanan di



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

tingkat regional maupun nasional. Berdasarkan letak geografis diwilayah pesisir yang didukung dengan garis pantai sepanjang \pm 82 km, Kabupaten Jepara memiliki potensi untuk mengembangkan pariwisata bahari dan memiliki daerah perbukitan yang potensial untuk pengembangan perkebunan dan kehutanan. Sementara, Kabupaten Kudus berpotensi mengembangkan pariwisata alam dan pariwisata budaya.

Tabel 23 : Potensi Pembangunan Kawasan Pendukung Wanarakuti

No.	Aspek	Potensi
1.	Fisik	Fisik Alam
		Keberagaman karakteristik alam yang berdekatan dengan pesisir berpotensi dikembangkan sebagai area perikanan dan pariwisata
	Infrastruktur	
	Bandara Dewadaru sebagai simpul transportasi di Karimunjawa	
Interaksi wilayah	Interaksi dalam kawasan cukup kuat dengan dukungan bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), intensitas tinggi (antara Kudus-Jepara) melalui bus kecil serta bus sedang rute Jepara-Kudus-Pati	
	Rembang memiliki ketergantungan cukup besar terhadap daerah Pati dan Kudus serta koneksi yang tinggi antara Wanarukuti dengan KI di Kedungsepur	
2.	Ekonomi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Aspek	Potensi
	Dukungan infrastruktur	<p>Bandara Dewadaru, Karimunjawa dan pelabuhan penyeberangan sebagai akses menuju Karimunjawa baik dari Semarang maupun dari Surabaya.</p> <p>Pelabuhan pengumpan di Jobokuto, Juwana dan Karimunjawa yang mendukung konektivitas jalur laut di Laut Jawa</p>
	Perkembangan sektor industri	<p>Industri hulu-hilir banyak terdapat di Kabupaten Pati dan Jepara berupa furnitur, ikan dan tekstil</p> <p>Potensi industri besar berada di luar jalur transportasi yang menghubungkan Jekulo hingga Pati, Kaliwungu hingga Jepara serta Juwana hingga Pati</p> <p>Potensi industri kecil dan menengah di KI Mulyoharjo khususnya industri mebel, ukir, monel, dan kain troso</p> <p>Perkembangan sektor industri pengolahan sepanjang jalur Pantura di Kudus, termasuk pengolahan tembakau.</p>
	Perkembangan sektor pariwisata	<p>Wisata unggulan yang dapat dikembangkan menjadi paket wisata meliputi:</p> <p>Kabupaten Jepara: Wisata Kepulauan Karimunjawa, Pantai Kartini, Pulau Panjang, Air Terjun Songgolangit, Benteng Portugis dan Benteng VOC, Museum Kartini, Pantai Tirto Samudro, dan Agrowisata</p> <p>Kabupaten Kudus: Masjid Menara Kudus, Museum Kretek, Makam Sunan Kudus, Makam Sunan</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Aspek	Potensi
		<p>Muria, Kawasan Wisata Gunung Muria, serta Kawasan Wisata Agro Kopi dan Jeruk Pamelu</p> <p>Kabupaten Pati: Agrowisata lereng Gunung Muria, Pariwisata Air dan Gua Pancur, Kawasan Pariwisata Genuk, Kawasan Pariwisata Religi Sukolilo, dan Waduk Gunung Rowo</p>
	<p>Perkembangan sektor pertanian dan perikanan (agrominapolitan)</p>	<p>Memiliki sektor potensial pertanian khususnya (i) tanaman pangan komoditas padi sawah serta ubi kayu dan (ii) bawang merah. Kabupaten Pati memiliki potensi pertanian tertinggi di Wanarakuti dengan produksi padi sawah mencapai 547 ribu kuintal, ubi kayu 570 ribu kuintal dan bawang merah 270 ribu kuintal (BPS Jawa Tengah, 2019).</p> <p>Potensi pertanian komoditas unggulan kacang tanah dengan produksi mencapai 4,4 ribu kuintal di Jepara dan 2,6 ribu kuintal di Pati</p> <p>Potensi sektor perikanan laut, bahkan menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah, yakni mencapai tangkapan 53 ribu ton di Pati dan 8.500 ton di Jepara</p> <p>Potensi Agropolitan dan Minapolitan TPI Bajo Mulyo I dan Bajo Mulyo II di Juwana, Pati dengan komoditas cumi, kakap merah dan pindang</p>
	<p>Pertumbuhan ekonomi</p>	<p>Pertumbuhan ekonomi Pati lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah (diatas 5,5%).</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Aspek	Potensi
3.	Sosial	IPM di wilayah pengembangan Wanarakuti cukup baik ditunjukkan dengan nilai IPM Kabupaten Jepara dan Kudus (> 70,71)
		Tingkat kemiskinan dibawah 7% dan stunting pada kisaran 21-26,5% tergolong rendah untuk Jepara dan Kudus
		TPT di wilayah Wanarakuti lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Tengah
4.	Kerja sama antar daerah	Pengembangan SPAM Regional Dadi Muria menjadi bentuk kerja sama tata kelola air di Wanarakuti

Sumber: Analisis Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bappeda Jawa Tengah, 2019

Kawasan Wanarakuti memiliki tantangan kerawanan bencana yang menjadi limitasi pembangunan wilayah. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah penanganan permasalahan sosial guna mendukung pembangunan ekonomi.

Tabel 24 : Tantangan Pembangunan Kawasan Pendukung Wanarakuti

No.	Aspek	Tantangan
1.	Fisik	Fisik Alam
		Kegiatan penambangan liar di wilayah sekitar gunung di Wanarakuti menyebabkan kerusakan lingkungan, infrastruktur jalan, dan mengganggu kestabilan sumber daya air.
		Kepulauan Karimunjawa yang terpisah dari daratan Pulau Jawa menjadi tantangan untuk membuka konektivitas baik melalui laut maupun udara
		Wilayah Wanarakuti memiliki kawasan rawan bencana yang menjadi salah satu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Aspek	Tantangan
		<p>limitasi pembangunan wilayah, meliputi:</p> <p>Kabupaten Pati: Kerawanan terhadap banjir, gerakan tanah, kekeringan, dan gelombang pasang</p> <p>Kabupaten Jepara: Kerawanan terhadap abrasi, banjir, gelombang pasang, kekeringan, tanah longsor, dan angin puting beliung</p> <p>Kabupaten Kudus: Kerawanan terhadap tanah longsor dan banjir</p>
	Infrastruktur	<p>Infrastruktur jalan yang menghubungkan antar wilayah kurang memadai</p>
		<p>Jaringan jalan berstatus rusak berat masih cukup tinggi di Jepara sepanjang 175,44 km dan di Pati sepanjang 115,04 km</p> <p>Kabupaten Jepara memiliki banyak Daerah Irigasi (DI) namun masih sering terjadi kekeringan dikarenakan saluran irigasi yang rusak atau tidak berfungsi</p> <p>Dari 843 DI yang ada di Jepara, hanya 90 buah yang dalam kondisi baik, sedangkan sebanyak 753 dalam kondisi rusak sampai rusak berat.</p>
	Pemanfaatan Ruang	<p>KI hanya berkembang di perkotaan (sepanjang jalan arteri utama) sehingga sulit untuk dikembangkan karena keterbatasan lahan</p>
2.	Ekonomi	
	Pertumbuhan Ekonomi	<p>Pertumbuhan ekonomi Kudus masih berada di bawah rata-rata Jawa Tengah</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Aspek	Tantangan
		Kudus menyumbang kontribusi dari sektor pertanian dan industri pengolahan tembakau
		Pati memiliki pertumbuhan ekonomi lebih tinggi (5,51%) dibandingkan Jepara (5,24%) dan Kudus (3,46%) lima tahun terakhir
	Perkembangan kawasan	Wanarakuti memiliki kesenjangan paling tinggi di Jawa Tengah
3.	Sosial	Angka melek huruf di Pati masih di bawah rata-rata Jawa Tengah
		TPT di Kudus lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah
		Nilai IPM Pati (70,71) lebih rendah dibandingkan Jepara (71,38) dan Kudus (74,58)
4.	Kerja sama antar daerah	Belum terdapat kelembagaan bersama yang mengatur keterpaduan antar daerah

Sumber: Analisis Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bappeda Jawa Tengah, 2019

3) Tema Pembangunan Kawasan Pendukung Wanarakuti

Tema pembangunan untuk Kawasan Wanarakuti berdasarkan analisis serta potensi dan tantangan adalah:

“Pengembangan Wilayah Wanarakuti yang lestari Berbasis Industri Pengolahan dan Pariwisata yang Didukung Sektor Agrominapolitan Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.”

Adapun maksud dari tema pembangunan Kawasan Wanarakuti adalah pembangunan wilayah yang mengunggulkan sektor industri pengolahan dan pariwisata terpadu (alam dan budaya) yang didukung oleh sektor agrominapolitan (pertanian dan



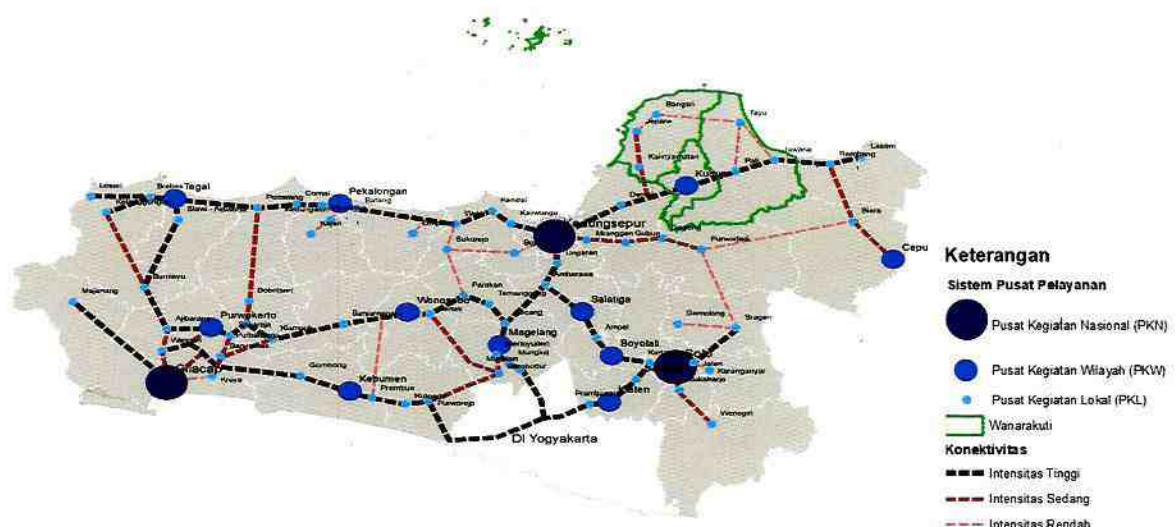
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

perikanan) sesuai dengan potensi wilayah. Pembangunan wilayah dilakukan berlandaskan prinsip berkelanjutan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

4) Penguatan Konektivitas Kawasan Pendukung Wanarakuti

Kawasan Wanarakuti berpusat di Kudus dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi, dan Nasional. Kawasan Wanarakuti difokuskan pada PKL dengan fungsi pusat kegiatan meliputi 6 (enam) kawasan perkotaan yaitu Pati, Juwana, Tayu, Jepara, Kalinyamatan, dan Bangsri. Penguatan konektivitas dan aksesibilitas dilakukan dengan pengembangan infrastruktur, yaitu:

- Pengembangan Bandara Dewadaru Karimunjawa;
- Penyediaan sarana pendukung ekonomi antara wilayah perdesaan dan perkotaan;
- Revitalisasi/reaktivasi jalur rel kereta api non aktif pada jalur Semarang- Demak – Kudus – Pati-Rembang;
- Pembangunan terminal tipe B di Kabupaten Jepara;
- Peningkatan aksesibilitas kawasan Borobudur ke Karimunjawa; serta
- Pembangunan jalan Demak- Jepara (*coastal road*).



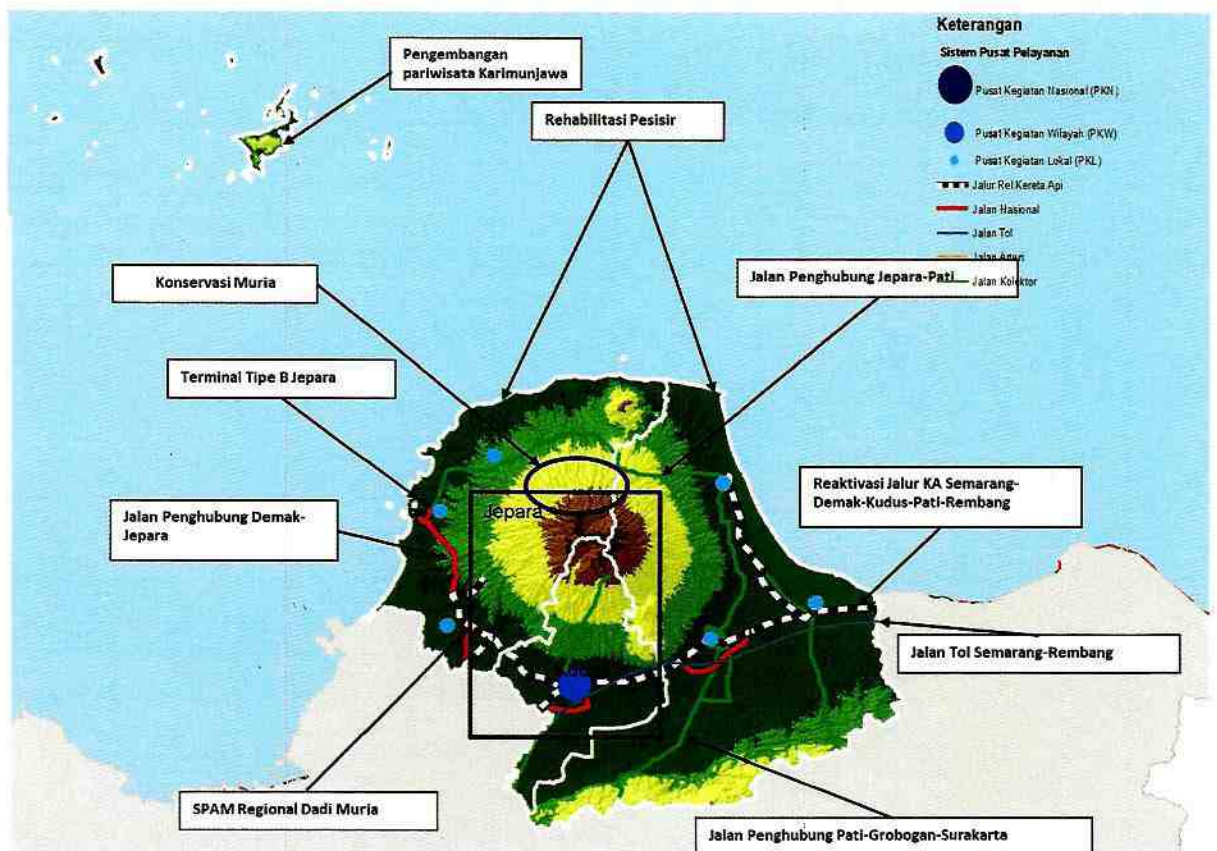
Gambar 67 : Konektivitas Pusat Kegiatan Ekonomi di Kawasan Wanarakuti
Sumber : RTRW Jawa Tengah 2019 dan Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2019



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5) Strategi Percepatan Pembangunan Kawasan Pendukung Wanarakuti

Pengembangan wilayah Wanarakuti untuk Tahun 2018 sampai dengan 2023 ditargetkan untuk bisa mencapai 4 (empat) indikator utama yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi sebesar 3,16% sampai dengan 5,70%, (2) angka kemiskinan pada kisaran 6,53% sampai dengan 9,16%, (3) TPT sebesar 2,90% sampai dengan 3,50%, serta (4) IPM pada kisaran 72,95 sampai dengan 76,48. Strategi pemenuhan kebutuhan air baku dilakukan dengan pembangunan SPAM Dadi Muria. Strategi guna menjamin ketersediaan sumber air baku dilakukan melalui konservasi DAS Juwana. Strategi pemenuhan kebutuhan listrik untuk sektor pariwisata dilakukan melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya.



Gambar 68 : Strategi Pengembangan di Kawasan Wanarakuti

Sumber: RPJMD Jawa Tengah 2018-2023 dan Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2019



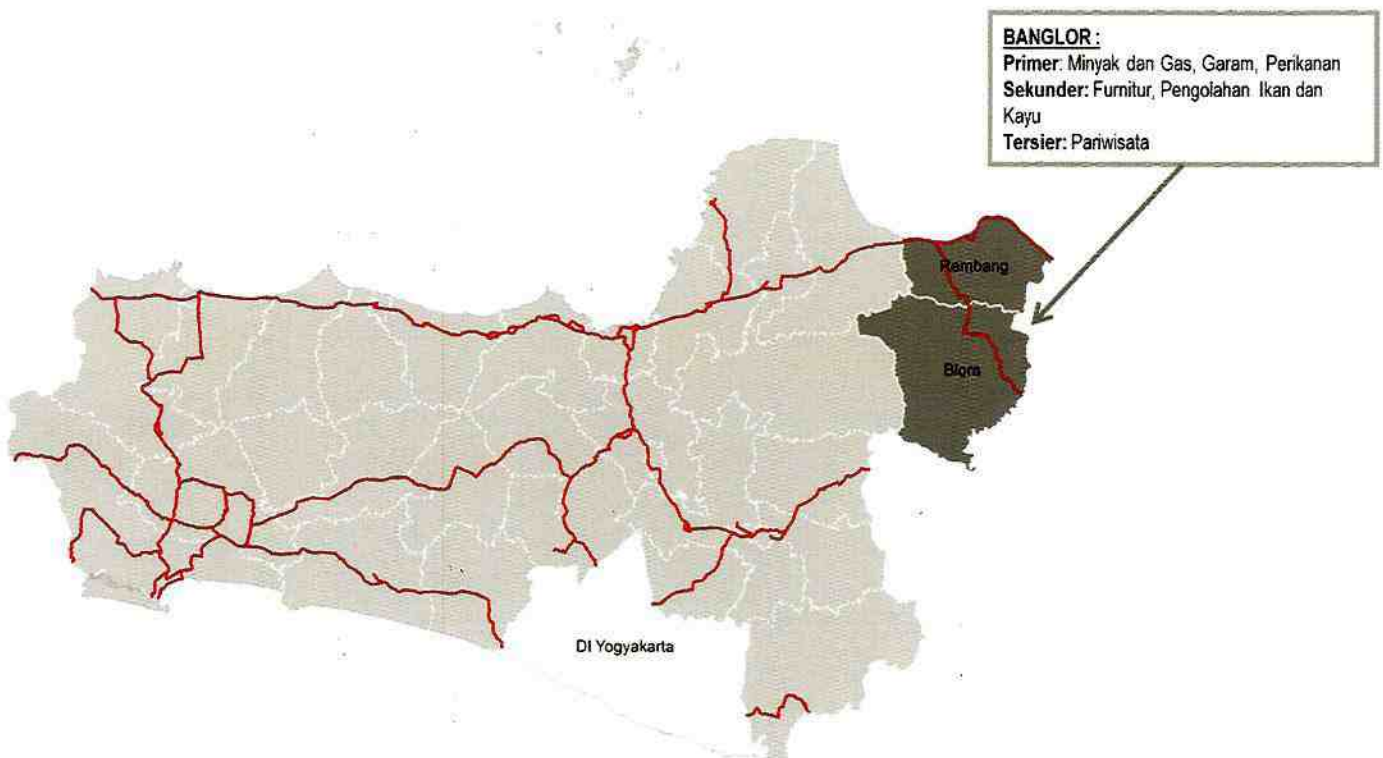
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

b. Kawasan Pendukung Banglor

1) **Overview Kawasan**

- **Geografi Wilayah**

Kawasan Banglor terdiri atas Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora. Kawasan Banglor seluas 2.691,72 km² atau 8,2 % dari total luas Jawa Tengah. Banglor secara geografis terletak di ujung timur laut Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Jawa Timur. Kawasan Banglor merupakan gerbang sebelah timur Jawa Tengah sebagai jalur penghubung antara Kedungsepur (PKN Semarang) dengan Gerbangkertosusila dan (PKN Surabaya) melalui jalur Pantura. Banglor berfungsi sebagai penyuplai minyak dan gas bumi melalui Blok Cepu di Blora.



Gambar 69 : Regionalisasi di Kawasan Pendukung Banglor

Sumber: Bappeda Jawa Tengah, 2019

Banglor berperan sebagai kawasan pendukung Kedungsepur terutama pada aspek ekonomi perdagangan/jasa dan penyuplai bahan baku pengolahan kayu. Secara topografi, kondisi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

fisik wilayah Banglor di dominasi oleh wilayah landai hingga wilayah perbukitan lipatan yang membentang dari timur Semarang hingga Lamongan (Jawa Timur) membentuk jebakan/reservoir migas di Blora. Topografi datar mendominasi wilayah utara berhubungan langsung dengan pesisir Laut Jawa. Titik tertinggi berada di Gunung Lasem dengan ketinggian 806 mdpl terletak di utara Rembang. Wilayah Banglor dilalui DAS yang merupakan bagian sistem Wilayah Sungai (WS) Jratunseluna dan Bengawan Solo.

- **Kependudukan dan Sosial Budaya**

Pertumbuhan penduduk Kawasan Banglor berdasarkan data tahun 2010 hingga 2018 beragam, dengan rata-rata Pertumbuhan Kabupaten Rembang dan Blora berturut-turut sebesar 0,84 dan 0,46. Kelas pertumbuhan penduduk tergolong rendah, cenderung menurun. Kepadatan penduduk Rembang dan Blora berturut-turut 625 jiwa/km², 480 jiwa/km².

Berdasarkan aspek kualitas penduduk, nilai IPM Rembang sebesar 67,95 dan Blora sebesar 69,46. Perhitungan DR atau Rasio Ketergantungan Kawasan Banglor bernilai 46,36. Hal ini menunjukkan 100 penduduk dengan usia produktif (usia 15 – 65 tahun) menanggung 46 penduduk usia tidak produktif (usia 0 – 14 dan 65+ tahun).

- **Sektor Komoditas Unggulan**

Sektor yang potensial dikembangkan di kawasan Banglor adalah pertambangan minyak dan gas, pertambangan mineral, perikanan, pariwisata, perhubungan, dan pertanian yang ditunjang oleh kehutanan, perkebunan dan peternakan. Potensi regional yang dimiliki Kawasan Banglor adalah: (1) primer berupa minyak dan gas, garam, perikanan; (2) sekunder berupa furnitur, pengolahan ikan; dan (3) tersier berupa pariwisata.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2) Potensi dan Tantangan Kawasan Pendukung Banglor

Rembang memiliki potensi industri unggulan genteng, batu bata, garam rakyat, gula tumbu, batik tulis Lasem, mangga, pengolahan hasil perikanan, serta pariwisata. Blora memiliki potensi industri unggulan keramik, pertanian, mineral dan bahan tambang, pariwisata, *handycraft*, mebel, pangan olahan, dan batik. Blora memiliki potensi unggulan di bidang pertambangan minyak dan gas (migas) yang terletak di Kecamatan Cepu, yang merupakan satu-satunya potensi pertambangan migas di Jawa Tengah. Selain itu, mempunyai sumber daya alam yang cukup besar antara lain batu marmer, batu onix, dan batu kapur.

Tabel 25 : Potensi Pengembangan Kawasan Banglor

No.	Aspek	Potensi
1.	Fisik	Fisik Alam
		Secara geografis berbatasan dengan Jawa Timur dan memiliki potensi kerja sama regional dengan Tuban dan Bojonegoro
		Rembang memiliki kawasan pesisir pantai yang potensial untuk pengolahan perikanan dan pelabuhan
		Blora terletak di perbukitan lipatan dan memiliki potensi Blok Migas Cepu yang merupakan Kawasan Strategis Nasional serta Rembang memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Rembang
		Perbukitan kapur Kendeng di Rembang dan Randublatung di Blora sebagai potensi SDA
	Infrastruktur	Keberadaan jalan Pantura Rembang mendukung akses pergerakan barang/jasa dalam dan antar provinsi
2.	Ekonomi	
		Dukungan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Aspek	Potensi
	infrastruktur	<p>Pantura sehingga memberikan kemudahan akses distribusi produk maupun bahan baku</p> <p>Hasil produksi sektor kehutanan (kayu) di Banglor merupakan suplai bagi industri mebel/furnitur di Jepara</p> <p>Aktivitas pertanian di Banglor didukung dengan ketersediaan air sumur dalam untuk kepentingan irigasi</p>
	Perkembangan sektor potensial	<p>Banglor memiliki sektor potensial di bidang (i) pertanian pada komoditas tanaman pangan, (ii) perikanan, dan (iii) produksi kehutanan</p> <p>Sektor pertanian di Blora memiliki komoditas unggulan padi sawah (582 ribu kuintal) dan jagung (362 ribu kuintal), di Rembang memiliki komoditas unggulan perikanan laut dengan produksi mencapai 36 ribu ton</p>
		<p>Sektor kehutanan karena memiliki luas hutan produksi tertinggi di Jawa Tengah mencapai 105.906,61 ha</p>
	Perkembangan sektor pariwisata	<p>Potensi wisata yang dapat dikembangkan, meliputi:</p> <p>Kabupaten Rembang:</p> <p>Pantai Pasir Putih, Pulau Gede dan Marongan, Pantai Soka, Wana Wisata Mantingan, Embung Lodan, Taman Wisata Alam Sumber Semen, dan Museum R.A. Kartini</p> <p>Kabupaten Blora:</p> <p>Goa Terawang, Goa Sentono, Museum Mahameru, Kraton Jipang, Grojogan Bengawan Sewu, Waduk Tempuran, dan Wana Wisata Kedung Pupur</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Aspek	Potensi
	Pertumbuhan ekonomi	Rembang dan Blora memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Tengah, mencapai 5,62% (Rembang) dan 8,73% (Blora)
3.	Sosial	<p>Angka kemiskinan tinggi, tapi cenderung menurun</p> <p>Untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia telah diprogramkan pelatihan industri kecil dan rumah tangga berkelanjutan</p> <p>Untuk peningkatan pelayanan pendidikan telah didapatkan bantuan kerja sama sekolah internasional di Cepu</p>
4.	Kerja sama antar daerah	Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan, telah terjalin kerja sama antara Rembang dan Blora dengan Tuban dan Bojonegoro

Sumber: Analisis Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bappeda Jawa Tengah, 2019

Kawasan Banglor memiliki tantangan untuk mengembangkan potensi karena jarak antar pusat kabupaten yang relatif jauh dan secara fisik alam memiliki karakteristik pegunungan dan pesisir dengan beberapa kawasan rawan bencana serta masih terkendala dukungan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 26 : Tantangan Pengembangan Kawasan Pendukung Banglor

No.	Aspek	Tantangan
1.	Fisik	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Aspek	Tantangan
	Fisik Alam	Wilayah didominasi perbukitan kapur sehingga rawan kekurangan sumber daya air
		Wilayah perbukitan menjadi limitasi dalam proses pembangunan infrastruktur
		Wilayah Banglor memiliki kawasan rawan bencana, meliputi:
		Kabupaten Blora: Rawan tanah longsor, banjir, dan kekeringan
		Kabupaten Rembang: Rawan banjir, tanah longsor, gelombang pasang, abrasi pantai, dan kekeringan
	Infrastruktur	Konektivitas Rembang dan Blora kurang didukung sarana angkutan umum yang memadai
		Intensitas perjalanan bus dalam provinsi di Kawasan Banglor merupakan yang terendah di Jawa Tengah
		Kurangnya embung di Kawasan Banglor sehingga pelayanan air bersih kurang memadai
		Blora memiliki panjang jalan rusak berat tertinggi mencapai 273,12 km, sedangkan Rembang mencapai 96,19 km sehingga menghambat kegiatan ekonomi
		Belum ada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional untuk pengelolaan sampah secara terpadu
Sarana perekonomian di kawasan perbatasan masih minim		
2. Ekonomi		
	Dukungan infrastruktur	Minimnya ketersediaan air irigasi terutama di kawasan pesisir sehingga menghambat aktivitas pertanian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Aspek	Tantangan
	Perkembangan sektor potensial	Pemanfaatan potensi kehutanan di Kabupaten Blora kurang, karena terkendala kepemilikan lahan
	Pertumbuhan ekonomi	Pendapatan regional Banglor berada di bawah rata-rata Jawa Tengah Banglor memiliki laju pertumbuhan ekonomi tinggi, namun masih belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
	Perkembangan Wilayah	Rembang dan Blora merupakan daerah relatif kurang berkembang di Jawa Tengah
3.	Sosial	<p>Nilai IPM Rembang (69,46) dan Blora (67,95) masih rendah dan di bawah rata-rata Jawa Tengah</p> <p>Banglor memiliki jumlah keluarga pra sejahtera yang tinggi di Jawa Tengah</p> <p>Pemenuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan, Rembang maupun Blora masih mengakses fasilitas dari daerah lain, seperti Pati, Grobogan, Tuban, dan Bojonegoro</p> <p>Tingginya angka stunting mencapai 32,1% - 37,58%</p> <p>Pengembangan industri kreatif di Banglor terkendala kurangnya manajemen dan kompetensi SDM</p> <p>Rembang termasuk 10 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk termiskin dengan angka 15,41%, sedangkan Blora 11,9%</p>
4.	Kerja sama antar daerah	<p>Belum adanya kebijakan yang mengatur kerjasama antar wilayah di Banglor</p> <p>Kurangnya optimalisasi tata kelola potensi kerja sama dengan wilayah Ratubangnegoro</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumber: Analisis Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bappeda Jawa Tengah, 2019

3) Tema Pembangunan Kawasan Pendukung Banglor

Tema pembangunan Kawasan Banglor berdasarkan analisis serta potensi dan tantangan adalah

“Pembangunan Wilayah Banglor Berbasis Pertambangan dan Agroforestri yang Didukung Pariwisata Terpadu Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.”

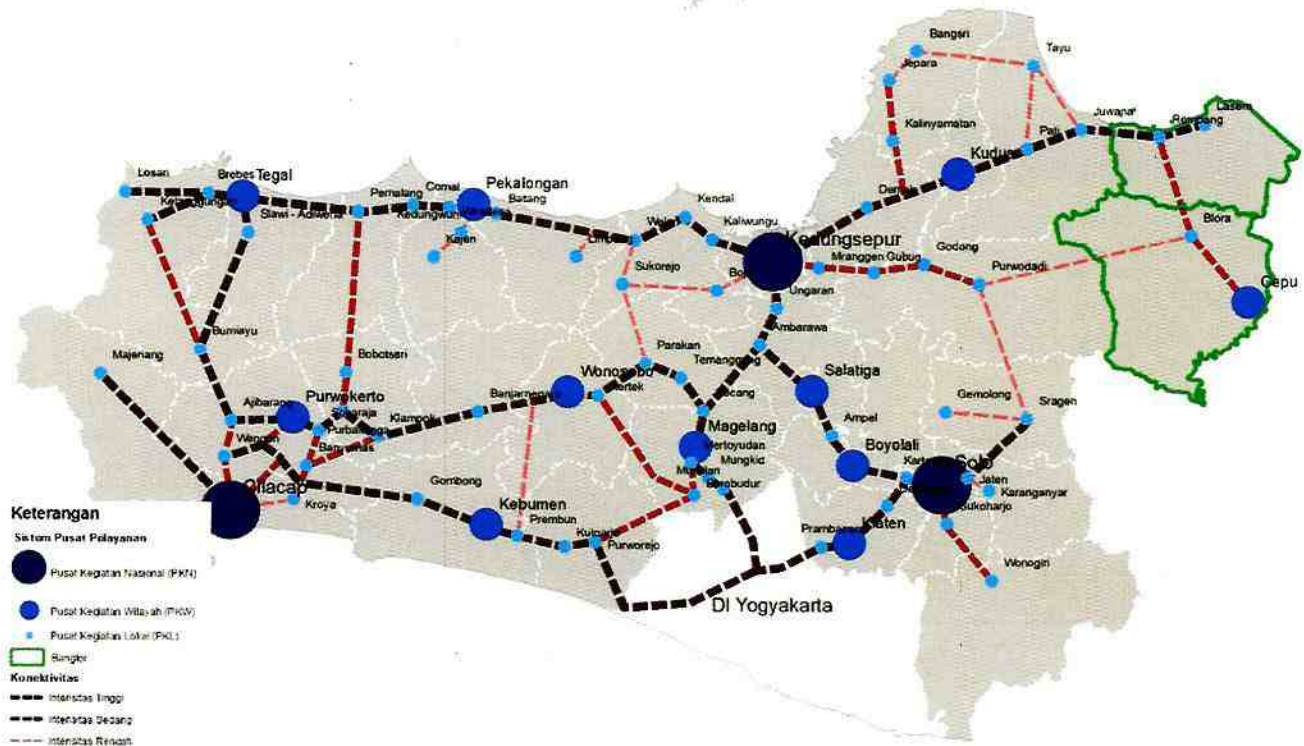
Adapun maksud tema pembangunan Kawasan Banglor adalah pembangunan wilayah yang bertumpu pada sektor unggulan utama pertambangan dan agroforestri (pengolahan hasil hutan) yang didukung sektor pariwisata terpadu (alam dan budaya). Pembangunan wilayah berlandaskan prinsip berkelanjutan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lestari.

4) Penguatan Konektivitas Kawasan Pendukung Banglor

Dalam rangka mencapai tema wilayah berbasis industri dan *agroforestry* yang didukung kepariwisataan, diperlukan pengembangan infrastruktur wilayah yang memadai antara lain: (1) pembangunan Terminal Tipe B di Rembang, (2) revitalisasi /reaktivitasi jalur rel kereta api non aktif pada jalur Semarang-Demak – Kudus – Pati – Rembang, (3) peningkatan jalan nasional Rembang – Blora – Pati, dan (4) peningkatan jalan provinsi penghubung Blora – Grobogan. Arah pengembangan wilayah difokuskan sebagai PKW dengan kawasan perkotaan Cepu sebagai simpul utama dan daerah perkotaan Rembang – Lasem sebagai penunjang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Gambar 70 : Konektivitas Pusat Kegiatan Ekonomi di Kawasan Banglor
Sumber : RTRW Jawa Tengah 2018-2023 dan Sekretariat Tim Percepatan
Kebijakan Satu Peta, 2019

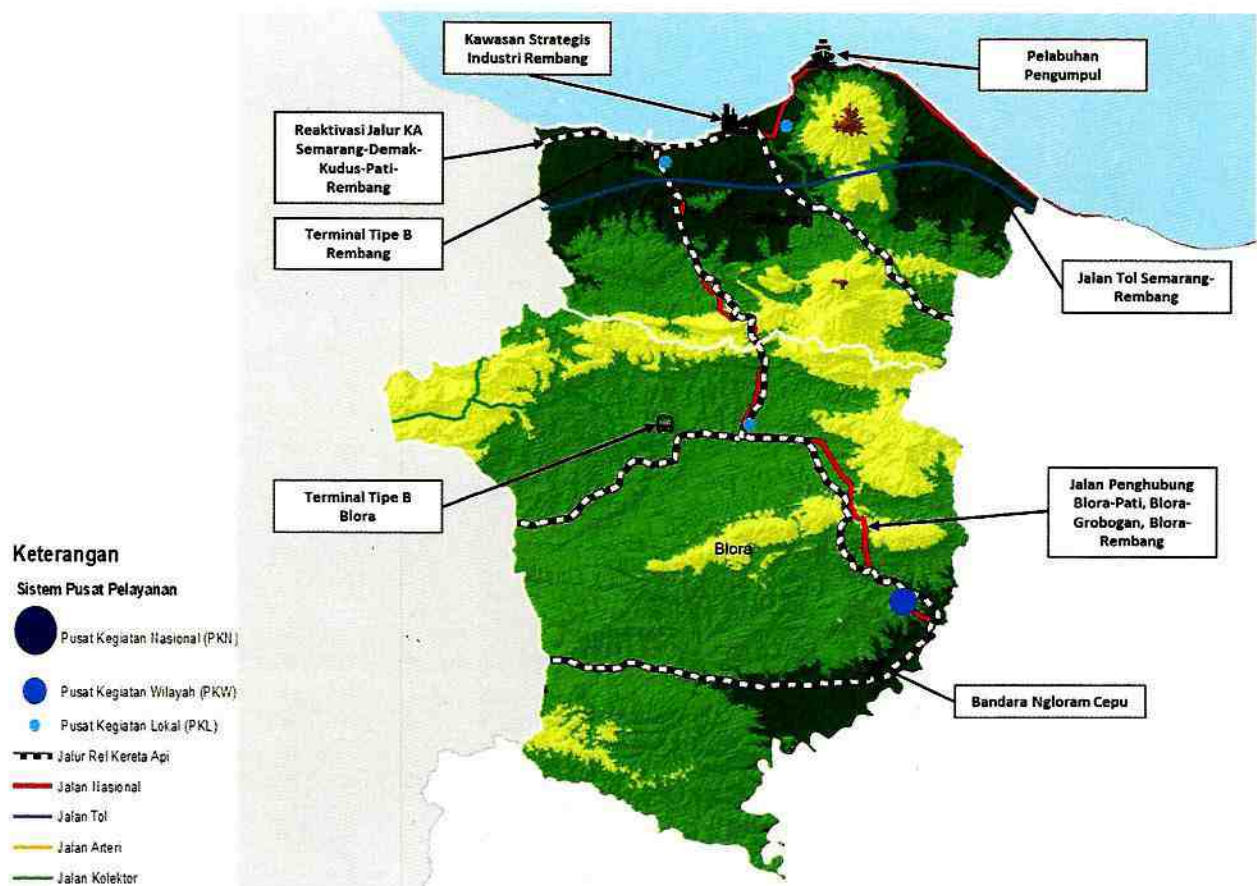
5) Strategi Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Kawasan Pendukung Banglor

Pengembangan wilayah Banglor untuk Tahun 2018 sampai dengan 2023 ditargetkan untuk bisa mencapai 4 (empat) indikator utama yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi sebesar 5,30% sampai dengan 5,75%, (2) angka kemiskinan pada kisaran 8,82% sampai dengan 9,82%, (3) TPT sebesar 2,60% sampai dengan 4,10%, dan (4) IPM pada kisaran 68,77 sampai dengan 70,70. Strategi percepatan dan pemerataan pembangunan kawasan dilakukan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, pembangunan kawasan industri baru di Rembang, dan pengembangan Bandara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Ngloram. Pembangunan tersebut diharapkan dapat memberikan daya ungkit dan memacu percepatan dan pemerataan pembangunan di wilayah ini. Kawasan Perkotaan Rembang didorong menjadi PKW untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi. Peningkatan produksi perikanan tangkap perlu didukung dengan pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan dan pengelolaan ikan di wilayah Pantura. Guna menjaga kelestarian lingkungan khususnya keberlanjutan air tanah maka dilakukan Konservasi CAT Pati - Rembang dan penanganan kerusakan pesisir (Rembang). Pemenuhan kebutuhan air baku dilakukan dengan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana air baku serta rencana pembangunan Bendungan Randugunting.



Gambar 71 : Strategi Pengembangan di Kawasan Banglora

Sumber: RPJMD Jawa Tengah, 2019 dan Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2019



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

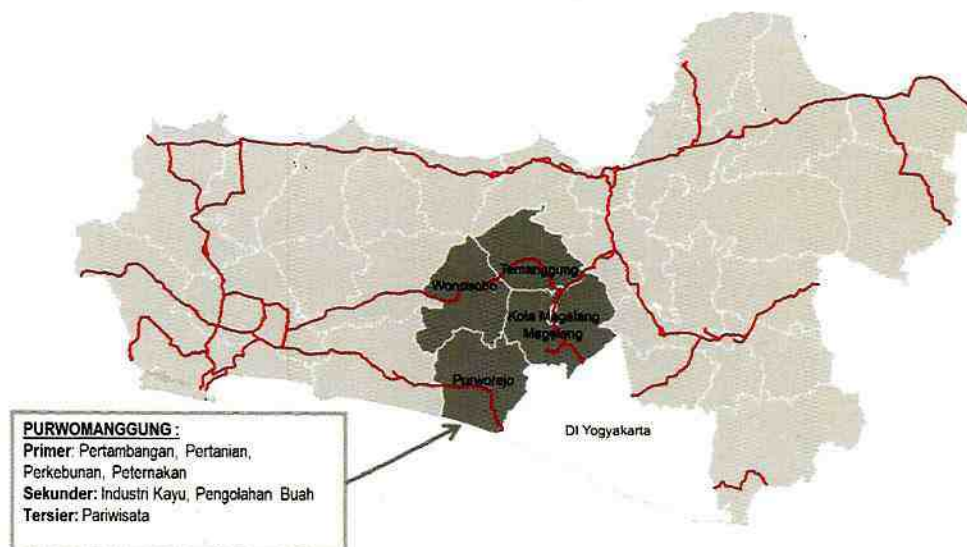
2. KAWASAN PENDUKUNG PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL (KSPN) BOROBUDUR DAN SEKITARNYA

a. Kawasan Purwomanggung

1) Overview Kawasan

- Geografi Wilayah

Kawasan Purwomanggung terdiri atas Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Magelang, Temanggung, dan Kota Magelang. Kawasan Purwomanggung seluas 4403,63 km² atau 13,42 % dari total luas Jawa Tengah. Purwomanggung secara geografis terletak di bagian tengah yang menghubungkan Kawasan Barlingmascakeb (barat) dan Subosukawonosraten (timur), dengan pusat pemerintahan dan industri di Kabupaten Magelang. Posisi strategis mendorong Purwomanggung sebagai simpul jalur tengah yang menghubungkan segitiga emas “**Joglosemar**” (Jogja-Solo-Semarang) dan keberadaan KSPN Borobudur dan sekitarnya di Magelang sebagai salah satu *Quick Win* dalam percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah serta KSPN Dieng dan sekitarnya serta KSPN Merapi-Merbabu dan sekitarnya.



Gambar 12 : Regionalisasi Kawasan Purwomanggung

Sumber: Bappeda Jawa Tengah, 2019



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Secara topografis, kondisi fisik wilayah Purwomanggung didominasi oleh wilayah perbukitan dan gunung api dengan ketinggian antara 500 hingga 1000 mdpl. Beberapa relief bergunung/berbukit diantaranya Gunung Api Sindoro, Sumbing (Wonosobo-Temanggung), Kompleks Vulkanik Dieng (Wonosobo), Merapi, Merbabu (Magelang) serta Perbukitan Serayu (Wonosobo-Purworejo). Topografi landai dan datar berada di wilayah pesisir selatan di Purworejo yang berbatasan dengan Samudera Hindia. Purwomanggung merupakan hulu dari tiga DAS utama yakni DAS Serayu, DAS Bogowonto, dan DAS Progo yang berfungsi sebagai sumber utama air baku bukan hanya Purwomanggung namun juga Kawasan Barlingmascakeb dan DI Yogyakarta.

- **Kependudukan dan Sosial Budaya**

Jumlah penduduk di Purwomanggung sebesar 3,6 juta jiwa atau 10,6% dari total penduduk Jawa Tengah. Kepadatan penduduk Purwomanggung bervariasi dengan kepadatan tinggi berpusat di kawasan perkotaan. Kepadatan sedang hingga tinggi berada di Kota Magelang (6726 jiwa/km²) dan Kabupaten Magelang (1179 jiwa/km²) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Kawasan Purwomanggung. Kabupaten Purworejo, Wonosobo, dan Temanggung sebagai pendukung pusat ekonomi cenderung memiliki kepadatan lebih rendah meliputi: Temanggung (880 jiwa/km²), Wonosobo (800 jiwa/km²) dan Purworejo (692 jiwa/km²). Perkembangan pertumbuhan penduduk di Purwomanggung tergolong rendah hingga sedang, dengan pertumbuhan tercepat di Kabupaten Magelang sebesar 0,89% dan terendah di Purworejo sebesar 0,35%.

Kondisi kependudukan berdasarkan profil umur menunjukkan bahwa Purwomanggung hingga tahun 2018 didominasi oleh penduduk usia produktif (14-64 tahun) sejumlah 2,4 juta jiwa. Beban ketergantungan berada pada angka 50,08, lebih besar dibandingkan angka beban ketergantungan di tingkat provinsi. Walaupun demikian nilai 50,08 masih memperlihatkan bahwa Purwomanggung didominasi oleh penduduk usia produktif sebagai potensi besar bagi penyediaan tenaga kerja. Tantangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

penyediaan tenaga kerja menjadi penting dalam menyerap peluang bonus demografi yang sejalan dengan upaya peningkatan IPM di Purwomanggung (saat ini masih berada di bawah angka 70).

Komoditas Unggulan

Aktivitas Ekonomi Purwomanggung didominasi sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Sektor pertanian dan perkebunan didominasi komoditas unggulan berupa (1) hortikultura, (2) tanaman pangan dan palawija, serta (3) komoditas khusus seperti kopi dan tembakau. Sektor pariwisata didukung oleh koridor KSPN Borobudur dan sekitarnya – KSPN Dieng dan sekitarnya dan koridor KSPN Borobudur dan sekitarnya – KSPN Merapi-Merbabu dan sekitarnya.

Selain itu, terdapat sektor peternakan kambing dan ayam yang berkembang di Kabupaten Temanggung dan Purworejo serta sektor industri pengolahan kayu dan buah dengan bahan baku berasal dari sentra-sentra produksi di Purwomanggung.

2) Potensi dan Tantangan Kawasan Purwomanggung

Kawasan Purwomanggung memiliki potensi utama di bidang pariwisata dan pertanian. Destinasi wisata Purwomanggung berpusat di Kawasan Candi Borobudur. Potensi pariwisata Purwomanggung tidak hanya meliputi Candi Borobudur, namun juga kawasan potensial pariwisata sejauh 50 km hingga 100 km dari Borobudur ke arah koridor Yogyakarta - Dieng (Wonosobo) - Solo/Sangiran hingga Semarang. Potensi lain Purwomanggung berasal dari sektor unggulan pertanian berupa tanaman pangan dan hortikultura yang dapat dioptimalkan sebagai agroindustri.

Tabel 27 : Potensi Pengembangan Kawasan Purwomanggung

No.	Aspek	Potensi
1	Fisik	
	Fisik Alam	Wilayah strategis yang berbatasan dengan DI Yogyakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Aspek	Potensi
		<p>Terdiri atas wilayah pegunungan dan gunung api dengan kondisi tanah subur</p> <p>Potensi aktivitas pertanian serta energi geothermal pada wilayah dataran tinggi</p> <p>Hulu dari DAS Serayu, Progo dan Bogowonto</p> <p>Potensi sumber daya air permukaan maupun air tanah yang tinggi</p>
2	<p>Ekonomi</p> <p>Perkembangan sektor potensial pariwisata</p>	<p>Sebagai jalur penghubung wilayah tengah (Barlingmascakeb – DI Yogyakarta – Kedungsepur – Subosukawonosraten)</p> <p>Konektivitas didukung oleh AKDP yang memadai serta interaksi wilayah antara Wonosobo dengan Banjarnegara serta Temanggung dengan Kendal</p> <p>Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi koridor Semarang-DI Yogyakarta dan Semarang-Purwokerto</p> <p>Pembangunan Bandara di Kulon Progo yang berbatasan dengan Purworejo</p> <p>Memiliki KPSN Borobudur dan sekitarnya dan KSPN Dieng dan sekitarnya</p> <p>Potensi wisata yang dapat dikembangkan meliputi:</p> <p><u>Kabupaten Purworejo:</u></p> <p>Pesisir Pantai Selatan, Desa Ekowisata, Goa Seplawan, dan Perbukitan Menoreh</p> <p><u>Kabupaten Magelang:</u></p> <p>Candi Borobudur, Candi Pawon dan Candi Mendut, Ketep Pass, Taman Nasional Gunung Merapi-Merbabu, Taman Rekreasi, Desa Wisata, Pusat Kerajinan, dan Agrowisata</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Aspek	Potensi
		<p><u>Kabupaten Wonosobo:</u> Dataran Tinggi Dieng, Telaga Warna, Telaga Menjer, <i>Sunrise</i> Sikunir, Pendakian Prau, Lembah Sindoro-Sumbing, Taman Kalianget, Agrowisata Tambi, Desa Wisata, dan Waduk Wadaslintang</p> <p><u>Kabupaten Temanggung:</u> Gunung Sindoro-Sumbing, Kawasan Kledung, Mata Air Jumprit, Agrowisata Soropadan, Air Terjun Lawe, Situs Liyangan, Candi Priangapus, Lembah Posong, dan Pikatan <i>Waterpark</i></p> <p><u>Kota Magelang</u> Wisata Taman Kyai Langgeng dan Alun-Alun Magelang</p>
	<p>Pengembangan sektor pertanian</p>	<p>Komoditas utama hortikultura dan tanaman pangan</p> <p>Wilayah dengan komoditas utama hortikultura di Purworejo, Wonosobo, Magelang dan Temanggung sudah memiliki STA</p> <p>Potensi tanaman pangan/palawija (padi, jagung, dan ubi jalar) dan hortikultura (cabe rawit, kubis, kentang, bawang merah, dan sayuran lainnya)</p> <p>Produksi ubi jalar Purwomanggung termasuk salah satu yang terbesar di Jawa Tengah dengan produksi hingga 48.296 kuintal</p> <p>Sektor agroindustri: Peternakan ayam dan kambing di Temanggung dan Purworejo serta komoditas khusus seperti tembakau dan kopi di Temanggung, dan carica di Wonosobo</p>
	<p>Pertumbuhan</p>	<p>Meskipun pertumbuhan ekonomi wilayah relatif</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Aspek	Potensi
	ekonomi	rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, tetapi tingkat pengangguran terbuka pada Kabupaten Purworejo, Wonosobo, dan Temanggung lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pengangguran total di Jawa Tengah. Sektor pariwisata khususnya pada KSPN Borobudur dan sekitarnya menjadi pengungkit guna mendorong pertumbuhan ekonomi Purwomanggung
	Perkembangan Kawasan	Kesenjangan kawasan Purwomanggung rendah
3	Sosial	Sebagai pusat dari wilayah pengembangan Purwomanggung, Kota Magelang mampu memberikan pelayanan pendidikan yang memadai dari jenjang SD hingga Perguruan Tinggi Sarana kesehatan di Puwomanggung telah memadai untuk melayani penduduk
4	Kerja sama antar daerah	Telah ada kerja sama antar daerah di Purwomanggung

Sumber: Analisis Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bappeda Jawa Tengah, 2019

Tantangan yang dihadapi oleh Kawasan Purwomanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 28 : Tantangan didalam Pengembangan Kawasan Purwomanggung

No.	Aspek	Tantangan
1	Fisik	
	Fisik Alam	Purwomanggung merupakan salah satu kawasan dengan pembatasan pembangunan paling tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Aspek	Tantangan
		<p>karena luasnya kawasan lindung dengan dominasi topografi gunung api dan pegunungan terjal</p> <p>Seluruh kabupaten/kota merupakan daerah rawan bencana yang memerlukan pembatasan aktivitas, yakni dengan rincian kondisi rawan bencana sebagai berikut:</p> <p><u>Kabupaten Purworejo:</u> Rawan terhadap bencana banjir, kekeringan, tsunami, dan gempa bumi</p> <p><u>Kabupaten Temanggung:</u> Rawan terhadap bencana tanah longsor, banjir, dan kekeringan</p> <p><u>Kabupaten Wonosobo:</u> Rawan terhadap bencana tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gas beracun, dan erupsi gunung api</p> <p><u>Kabupaten Magelang:</u> Rawan terhadap erupsi gunung api, banjir lahar, kekeringan, dan angin puting beliung</p> <p><u>Kota Magelang:</u> Rawan terhadap gerakan tanah (sepanjang lembah Sungai Progo dan Sungai Elo)</p>
	Infrastruktur	<p>Pengembangan infrastruktur transportasi dan distribusi logistik terkendala area perbukitan dengan lereng terjal</p> <p>Tidak tersedia infrastruktur kereta api aktif (kecuali di Purworejo)</p> <p>Kondisi jaringan jalan pada jalur tengah rusak khususnya di Wonosobo sepanjang 73,16 km dan Purworejo sepanjang 64,11 km</p>
	Lingkungan	Aktivitas penambangan mengakibatkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Aspek	Tantangan
		<p>kerusakan alam pada daerah hulu-hilir pada Sungai Serayu, area Sindoro-Sumbing, dan sungai yang berhulu di Gunung Merapi</p> <p>Penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas pertanian di wilayah hulu terutama di Dataran Tinggi Dieng dan Merapi-Merbabu</p> <p>Interaksi wilayah</p> <p>Kurangnya aksesibilitas antara Purworejo – Wonosobo</p>
2	Ekonomi	<p>Infrastruktur</p> <p>Minimnya infrastruktur yang berbatasan dengan daerah lain menjadi hambatan konektivitas antar daerah dan distribusi hasil pertanian</p> <p>Belum optimalnya pemanfaatan sarana STA</p> <p>Pertumbuhan ekonomi</p> <p>Pertumbuhan ekonomi seluruh kabupaten/kota di Purwomanggung masih di bawah 5,5%, Wonosobo menjadi salah satu yang terendah di Jawa Tengah dengan pertumbuhan 4,73%</p> <p>Tingkat kemiskinan di Purworejo, Wonosobo, dan Temanggung lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat kemiskinan di Jawa Tengah</p> <p>Potensi utama Purwomanggung adalah pertanian, namun belum didukung industri pengolahan pertanian</p> <p>Sektor industri dan jasa (selain pariwisata) kurang berkembang dan ketergantungan pada sektor pertanian masih tinggi</p> <p>Pengembangan pariwisata</p> <p>Belum optimalnya koneksi koridor antar kawasan pariwisata (Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) dan KSPN) dengan destinasi lain, seperti Pesisir Purworejo dan pariwisata di Temanggung</p> <p>Lama tinggal wisatawan ke KSPN Borobudur</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Aspek	Tantangan
		masih rendah
	Perkembangan Wilayah	Status wilayah Wonosobo dan Purworejo sebagai daerah relatif tertinggal
		Kesenjangan pembangunan cukup tinggi antara Kota Magelang sebagai pusat Purwomanggung dengan kabupaten di sekitarnya
3	Sosial	TPT di Kota Magelang dan Kabupaten Magelang masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah
		IPM di Kabupaten Wonosobo, Temanggung, dan Magelang masih rendah dibandingkan dengan IPM Jawa Tengah
		Angka kemiskinan di Purwomanggung cukup tinggi bahkan Wonosobo menjadi salah satu kabupaten termiskin di Jawa Tengah
		Kondisi stunting yang cukup tinggi, utamanya di Kabupaten Wonosobo dan Magelang
4	Kerja sama antar daerah	Belum terdapat kerja sama jasa lingkungan

Sumber: Analisis Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bappeda Jawa Tengah, 2019

3) Tema Pembangunan Kawasan Purwomanggung

Tema pembangunan Kawasan Purwomanggung berdasarkan analisis serta potensi dan tantangan adalah:

“Pengembangan Purwomanggung Berbasis Pertanian Dan Pariwisata Guna Mendorong Sektor Industri Pertanian Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.”

Adapun maksud tema pembangunan Kawasan Purwomanggung adalah pembangunan wilayah dilakukan dengan mengunggulkan sektor utama pariwisata dan pertanian sebagai penggerak ekonomi didukung oleh kegiatan industri berbasis pertanian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dan jasa pariwisata. Pembangunan wilayah berlandaskan prinsip keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4) Penguatan Konektivitas Kawasan Purwomanggung

Kondisi eksisting konektivitas Purwomanggung didukung oleh pusat-pusat kegiatan ekonomi yaitu 2 PKW dan 10 PKL. Pusat-pusat kegiatan ekonomi tersebut dihubungkan dengan sistem transportasi darat yaitu jalan nasional dan jalur kereta api. Peningkatan konektivitas dibutuhkan dalam mendorong pemerataan ekonomi dan pembangunan di Purwomanggung. Pentingnya reaktivasi jalur kereta api Purwokerto-Wonosobo dan Semarang-Ambarawa-Magelang-Yogyakarta diperlukan dalam mendukung pengembangan angkutan massa yang mudah dan cepat.

Peningkatan konektivitas untuk mendukung KSPN Borobudur dan sekitarnya memerlukan strategi yang mampu menghubungkan simpul kedatangan wisatawan melalui Bandara Adisutjipto dan Bandara Internasional Yogyakarta (DI Yogyakarta), Bandara Adi Soemarmo (Boyolali), dan Bandara Ahmad Yani (Semarang). Perlu pengembangan Jalan Bedah Menoreh (Bandara Internasional Yogyakarta-Borobudur), jalur kereta api Semarang-Ambarawa-Magelang-Yogyakarta serta peningkatan jalan nasional.

Keterangan

Sistem Pusat Pelayanan

-  Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
-  Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
-  Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Purwomanggung

Konektivitas

-  Intensitas Tinggi
-  Intensitas Sedang
-  Intensitas Rendah



Gambar 73 : Konektivitas Pusat Kegiatan Ekonomi di Purwomanggung

Sumber : RTRW Jawa Tengah, 2019 dan Sekretariat Tim Percepatan

Kebijakan Satu Peta, 2019



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5) Strategi Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Kawasan Purwomanggung

Keberadaan Kawasan Pariwisata Borobudur menjadi simpul utama yang menghubungkan aktivitas ekonomi antara Purwomanggung dengan kawasan lainnya. Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur menjadi daya tarik ekonomi pariwisata dan ditetapkannya sebagai *UNESCO World Cultural Heritage* diharapkan memberikan daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Pencapaian target pertumbuhan kunjungan wisatawan sekaligus peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui Kawasan Pariwisata Borobudur dilakukan dengan meningkatkan Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas, dan *Ancillary* (4A) unsur strategis pariwisata, diantaranya:

- Penambahan “**Atraksi**” pendukung Borobudur dalam mendukung citra pariwisata “**Capital of the World Heritage**” ;
- Peningkatan “**Aksesibilitas**” layanan transportasi yang menghubungkan Borobudur dengan pusat aktivitas di Yogyakarta-Solo dan Semarang serta pusat aktivitas pariwisata di kabupaten/kota di Purwomanggung;
- Optimasi “**Amenitas**” pariwisata untuk penyediaan layanan fasilitas pendukung dan penataan koridor Borobudur-Pawon-Mendut serta zona inti Borobudur (*Key Tourism Area (KTA)*), Sub-Pelestarian (SP) 1 dan SP 2) (dalam gambar); dan
- Penguatan “**Ancillary**” melalui Badan Otorita Pengelola (BOP) Kawasan Pariwisata Borobudur.



Gambar 74 : Skema Penataan Kawasan KSPN Borobudur
Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, 2019



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

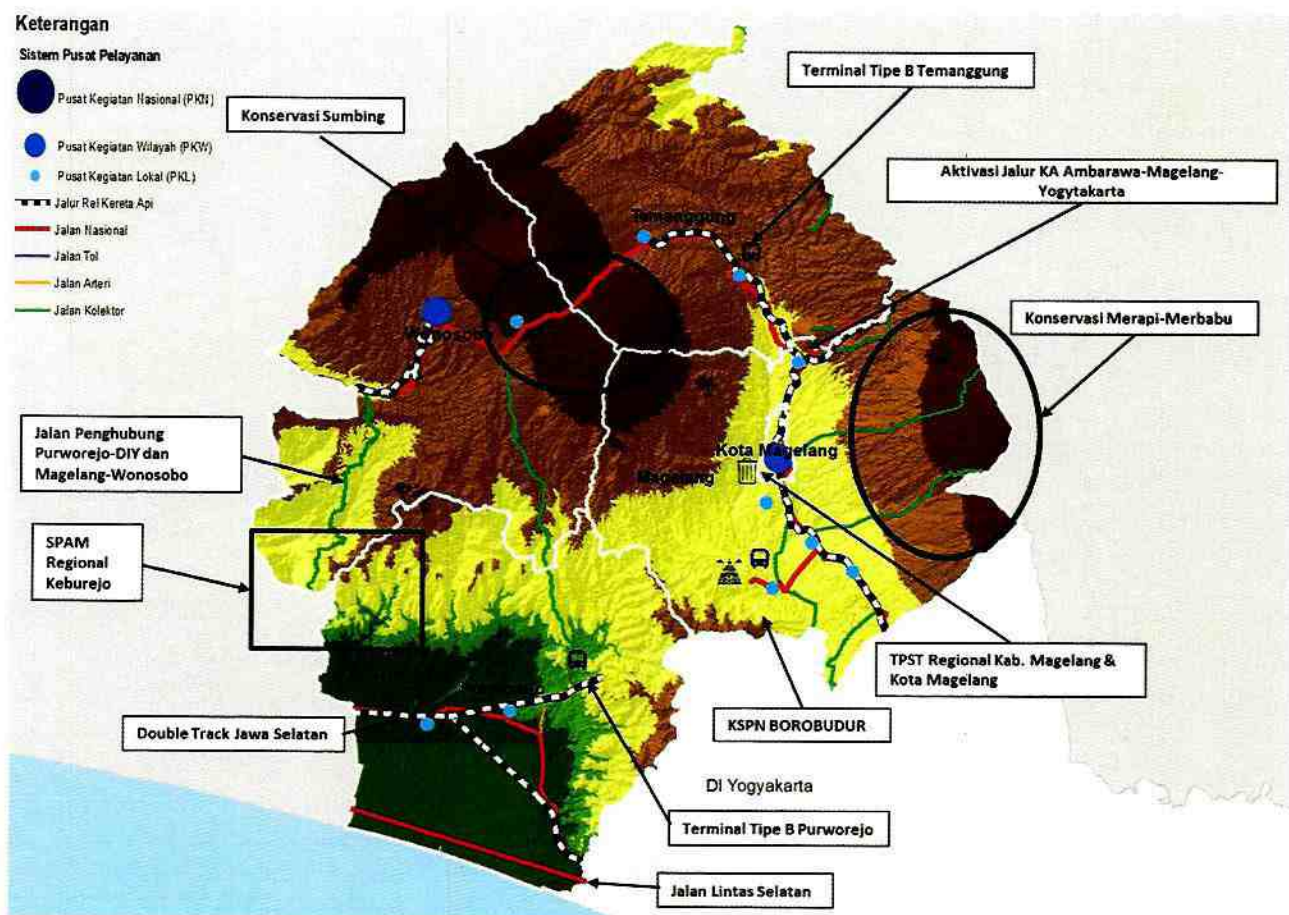
Pembangunan wilayah Purwomanggung dalam RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023 ditargetkan untuk bisa mencapai 4 (empat) indikator utama yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,00% sampai dengan 5,70%, (2) angka kemiskinan pada kisaran sebesar 6,75 sampai dengan 14,36%, (3) TPT pada kisaran 2,20% sampai dengan 4,50%, serta (4) IPM pada kisaran 68,61 sampai dengan 78,55. Oleh karena itu, diperlukan strategi percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi sebagai berikut:

- Optimasi konektivitas melalui rehabilitasi jalan, pengembangan jalan lingkar serta reaktivasi jalur kereta api untuk mendukung distribusi barang/jasa dan aktivitas ekonomi khususnya distribusi komoditas pertanian dari sentra produksi, komoditas industri hingga alur perjalanan aktivitas pariwisata;
- Pengembangan destinasi baru di koridor pendukung antar KSPN, seperti Borobudur-Dieng (Wonosobo), serta wisata alam, non-alam, dan buatan di Temanggung dan Purworejo;
- Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar: (1) potensi sumber daya air melalui pengembangan SPAM dan bendungan, (2) energi melalui pengembangan geothermal, (3) pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan, (4) utilitas seperti sistem persampahan terpadu, dan (5) layanan kesehatan;
- Mendorong terwujudnya peningkatan kualitas SDM terutama dalam mendukung pendidikan vokasi pariwisata sebagai sektor ekonomi unggulan;
- Pengembangan potensi sektor industri khususnya industri kreatif, UMKM, dan pengolahan produk lokal maupun kerajinan khas masyarakat dalam mendukung sektor pariwisata;
- Memperhatikan kelestarian lingkungan dan upaya konservasi wilayah terdampak aktivitas pertanian intensif yang memicu degradasi maupun kawasan pemanfaatan lahan intensif untuk aktivitas pariwisata; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- Mendorong status perkotaan Purworejo yang semula PKL menjadi PKW mengingat kedekatannya dengan DI Yogyakarta serta mengambil dampak positif dari pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta.



Gambar 75 : Strategi Pengembangan Kawasan Purwomanggung

Sumber: RPJMD Jawa Tengah, 2019 dan Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2019

b. Kawasan Pendukung Subosukawonosraten

1) **Overview Kawasan**

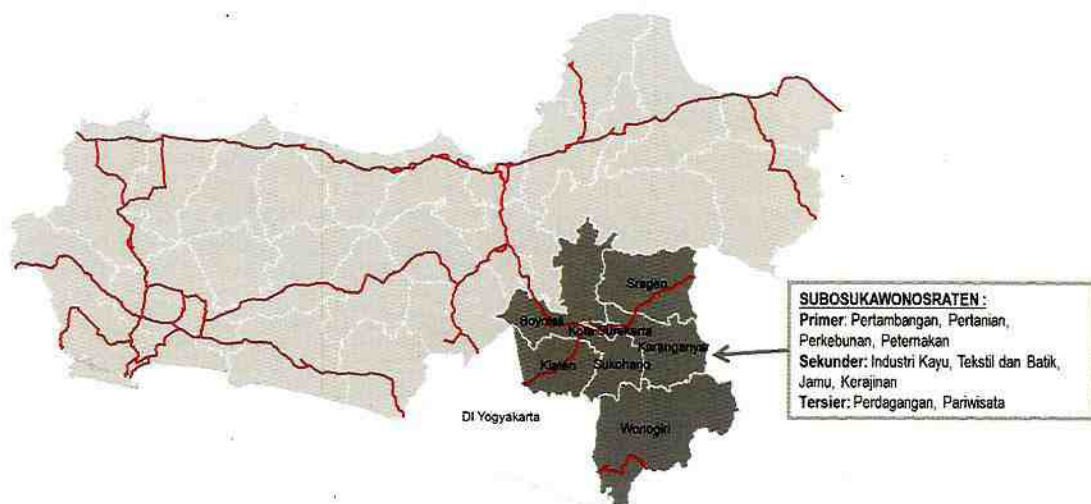
- **Geografi Wilayah**

Kawasan Subosukawonosraten terdiri dari Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Kawasan Subosukawonosraten seluas 5.712,45 km² atau 14,34 % dari total luas Jawa Tengah, memiliki PKN di Kota Surakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

atau Solo. Kawasan Subosukawonosraten berada di posisi strategis dari wilayah pengembangan segitiga emas “**Joglosemar**” dan di lintasan penghubung aktivitas ekonomi, perdagangan/jasa antara DI Yogyakarta - Jawa Tengah - Jawa Timur.



Sumber: Bappeda Jawa Tengah, 2019

Gambar 76 : Regionalisasi di Kawasan Subosukawonosraten

Secara topografis kondisi fisik Kawasan Subosukawonosraten di dominasi oleh wilayah landai hingga perbukitan dan gunung api. Terdapat wilayah gunung api di bagian timur (Gunung Lawu di Karanganyar) dan di bagian barat (Gunung Merapi-Merbabu di Boyolali) serta wilayah perbukitan karst Gunung Sewu di bagian selatan (Wonogiri). Topografi landai dan datar mendominasi bagian tengah hingga utara yang merupakan lembah aliran Bengawan Solo. Kawasan Subosukawonosraten merupakan hulu DAS Bengawan Solo, yang juga berfungsi sebagai penyedia pasokan air baku di Jawa Tengah hingga Jawa Timur.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- **Kependudukan dan Sosial Budaya**

Kawasan Subosukawonosraten memiliki penduduk sebanyak 6,27 juta jiwa atau 18,2% dari total penduduk di Jawa Tengah. Kondisi kepadatan penduduk di Kawasan Subosukawonosraten bervariasi dari rendah hingga sangat tinggi. Kepadatan penduduk sangat tinggi berada di Kota Surakarta sebesar 11.672 jiwa/km² tertinggi di Jawa Tengah, sedangkan kepadatan penduduk terendah di Kabupaten Wonogiri sebesar 524 jiwa/km². Pertumbuhan penduduk Kawasan Subosukawonosraten tergolong rendah hingga sedang dengan persentase 0,35% – 0,95% pada tahun 2010 – 2018. Namun pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan dengan persentase 0,25% – 0,86%. Kawasan Subosukawonosraten didominasi oleh penduduk usia produktif dengan DR sebesar 47,63. Kondisi ini merepresentasikan tingginya potensi penduduk usia produktif sebagai bagian dari angkatan kerja yang mampu mendukung perkembangan sektor ekonomi, khususnya di bidang industri dan jasa.

- **Komoditas Unggulan**

Kawasan Subosukawonosraten potensial dikembangkan menjadi sentra produksi pertanian dan perkebunan. Sektor primer didominasi oleh aktivitas pertanian dengan komoditas (1) Tanaman pangan berupa padi, jagung, dan kedelai serta (2) Hortikultura berupa bawang merah dan cabai. Sektor peternakan berupa ayam, kambing, dan sapi. Sektor peternakan sapi perah dan sapi potong berkembang baik di Kabupaten Boyolali dan Klaten. Sektor lain yang berkembang adalah jasa pariwisata, terutama berpusat pada koridor DPN Solo-Sangiran dan sekitarnya serta sektor industri di wilayah Surakarta-Boyolali-Klaten-Karanganyar.

2) Potensi dan Tantangan Kawasan Subosukawonosraten

Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi khususnya di Kawasan Subosukawonosraten dan Jawa Tengah pada umumnya adalah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 29 : Potensi Pengembangan Kawasan Subosukawonosraten

No.	Aspek	Potensi	
1	Fisik		
		Fisik Alam	Berbatasan dengan DI Yogyakarta dan Jawa Timur Sebagai hulu DAS Bengawan Solo Variasi bentang alam, baik wilayah gunung api, perbukitan karst hingga dataran rendah
		Infrastruktur	Kondisi jaringan jalan yang ada di wilayah Subosukawonosraten dalam kondisi baik Terdapat jaringan jalan yang menghubungkan kawasan perkotaan Semarang dengan DI Yogyakarta ke arah Madiun dan Pacitan di Jawa Timur Bandara Adi Sumarmo di Boyolali sebagai simpul transportasi Jawa Tengah di bagian timur
	Interaksi wilayah		Interaksi antar daerah yang kuat dengan simpul utama kegiatan ekonomi di PKN Surakarta Didukung trayek angkutan yang memadai Tingginya interaksi kawasan dengan DI Yogyakarta baik dari aspek ekonomi, pariwisata hingga historis budaya
		Ekonomi	
			Perkembangan sektor potensial industri dan pertanian
	Sektor potensial		Terdapat KSPN Sangiran dan sekitarnya serta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Aspek	Potensi
	pariwisata	<p>kawasan pariwisata budaya Solo untuk mendukung Kawasan Pariwisata Borobudur</p> <p>Memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan, meliputi:</p> <p><u>Kota Surakarta:</u> Keraton Surakarta, Puri Mangkunegaran, Wisata Belanja Batik, Taman Sriwedari, Wisata Kuliner hingga Pasar Tradisional</p> <p><u>Kabupaten Boyolali:</u> Pendakian Gunung Merapi dan Merbabu, Wisata Selo, Air Terjun Kedungkayang, Situs Candi Sari dan Candi Plawang, Waduk Kedungombo, dan Agrowisata Sapi Perah</p> <p><u>Kabupaten Sukoharjo:</u> Gunung Taruwangsa, Keraton Kartasura dan Pajang, Pandawa Water World</p> <p><u>Kabupaten Karanganyar:</u> Puncak Gunung Lawu, Watukadang, Candi Suku, Cetho, dan Tawangmangu</p> <p><u>Kabupaten Wonogiri:</u> Karst Gunungsewu, Museum Karst, Waduk Gajahmungkur, Pantai Selatan, Taman Rekreasi Sendang Asri, Larung Ageng Pantai Sembukan, dan Cagar Alam Donoloyo</p> <p><u>Kabupaten Sragen:</u> Museum Fossil Sangiran, Pemandian Air Panas (PAP) Bayanan, Makam Pangeran Samudro, Gunung Kemukus, dan Gemolong Edupark</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Aspek	Potensi
		<p><u>Kabupaten Klaten:</u></p> <p>Kompleks Candi Prambanan, Candi Sewu dan Plaosan, Wisata Umbul, Museum Gula Jawa Jogonalan, Wisata Rawa Jombor, Deles Indah, dan Kawasan Geologi Bayat</p>
	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir (2013-2018) cukup baik dengan pertumbuhan di atas 5% untuk Klaten, Sragen, Wonogiri dan diatas 5,5% untuk kabupaten/kota lainnya
	Perkembangan wilayah	Berkembang dengan baik dan terpengaruh positif dari pertumbuhan ekonomi DI Yogyakarta
3	Sosial	<p>IPM di atas angka 70,71, bahkan Surakarta memiliki IPM pada angka 81,46</p> <p>TPT lebih rendah dibanding TPT Jawa Tengah</p> <p>Angka stunting yang rendah di hampir seluruh kabupaten/kota, kecuali Klaten pada golongan sedang</p> <p>Tingkat kemiskinan kabupaten/kota (kecuali Sragen dan Klaten) lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah</p> <p>Potensi pengembangan sejarah dan budaya jawa yang tinggi</p>
4	Kerja sama antar daerah	<p>Pengembangan SPAM Regional Wososukas sebagai wujud kerjasama tata kelola air</p> <p>Terdapat lembaga wisata Solo Raya dengan adanya <i>Java Promo</i></p>

Sumber: Data Analisis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bappeda Jawa Tengah, 2019

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Kawasan Subosukawonosraten adalah sebagai berikut :



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

Tabel 10 : Tantangan didalam Pengembangan Kawasan Subosukawonosraten

No.	Aspek	Tantangan	
1	Fisik		
		Fisik Alam	Perkembangan wilayah yang lambat di Wonogiri dan Karanganyar dipengaruhi relief berbukit/bergunung dan merupakan kawasan lindung
			Daerah rawan bencana, meliputi:
			<u>Kota Surakarta:</u>
			Rawan terhadap banjir
			<u>Kabupaten Boyolali:</u>
			Rawan terhadap banjir, tanah longsor, kekeringan dan erupsi gunung api
			<u>Kabupaten Sukoharjo:</u>
			Rawan terhadap banjir, tanah longsor dan kekeringan
			<u>Kabupaten Karanganyar:</u>
	Rawan terhadap banjir dan tanah longsor		
	<u>Kabupaten Sragen:</u>		
	Rawan terhadap banjir, tanah longsor dan kekeringan		
	<u>Kabupaten Wonogiri:</u>		
	Rawan terhadap banjir, tanah longsor, kekeringan dan abrasi pantai		
	<u>Kabupaten Klaten:</u>		
	Rawan terhadap banjir, tanah longsor dan erupsi gunung api		
	Pemanfaatan Ruang	Berkembangnya hunian liar di pinggiran rel dan bantaran sungai	
		Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun	
		Tingginya pencemaran dan sedimentasi di	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Aspek	Tantangan
	Infrastruktur	<p>sepanjang sempadan Bengawan Solo, akibat limbah industri tekstil</p> <p>Menurunnya fungsi Waduk Gajahmungkur dikarenakan berkurangnya debit air</p> <p>Keterbatasan area Terminal Tirtonadi sebagai terminal regional</p> <p>Kesulitan dalam pemenuhan air bersih dan penyediaan lahan TPA di wilayah perkotaan</p> <p>Sarana dan prasarana pada kawasan perbatasan dengan Jawa Timur belum dikelola dengan baik</p> <p>Kemacetan tinggi pada beberapa titik di Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo</p> <p>Pemanfaatan jaringan rel kereta api sebagai alternatif angkutan barang belum optimal</p> <p>Beban jalan di Kota Surakarta sangat tinggi karena menjadi jalur penghubung antar daerah</p>
2	Ekonomi	
	Perkembangan wilayah	Rata-rata kesenjangan wilayah berada pada kategori sedang, kecuali Kabupaten Wonogiri yang berada pada kategori tinggi dengan laju pertumbuhan ekonomi paling rendah
3	Sosial	<p>Kabupaten Wonogiri menjadi satu-satunya wilayah yang memiliki nilai IPM di bawah rata-rata Jawa Tengah</p> <p>Tingkat kemiskinan pada Kabupaten Sragen dan Klaten tergolong tinggi di Jawa Tengah</p> <p>Kesejahteraan masyarakat belum merata di wilayah <i>hinterland</i> (Sragen, Klaten, Boyolali, dan Wonogiri) dan memusat hanya di Kota Surakarta</p>
4	Kerja sama antar daerah	Kerja sama antar lembaga bersifat parsial dan sektoral, salah satunya di sektor pariwisata.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sumber: Data Analisis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan
Bappeda Jawa Tengah, 2019

**3) Tema Pembangunan Kawasan Pendukung
Subosukawonosraten**

Tema pembangunan untuk Kawasan Subosukawonosraten berdasarkan analisis serta potensi dan tantangan adalah:

“Pembangunan Wilayah Subosukawonosraten Berbasis Pariwisata Terpadu yang Didukung oleh Pertanian dan Industri Pengolahan dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.”

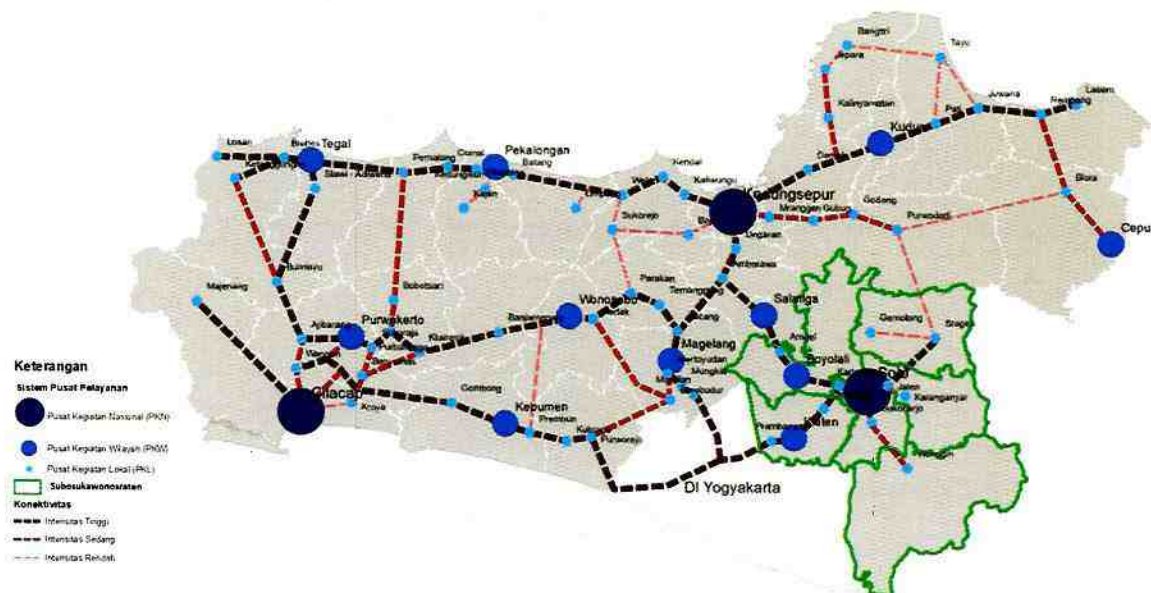
Adapun maksud dari tema pembangunan adalah pembangunan wilayah yang bertumpu pada sektor utama pariwisata terpadu (alam, budaya, dan buatan) yang didukung oleh sektor pertanian dan industri pengolahan. Pembangunan wilayah dilakukan berlandaskan prinsip berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

**4) Penguatan Konektivitas Kawasan Pendukung
Subosukawonosraten**

Kondisi eksisting konektivitas Subosukawonosraten didukung oleh pusat-pusat kegiatan ekonomi yaitu 1 PKN, 2 PKW, dan 10 PKL. Pusat-pusat kegiatan tersebut dihubungkan dengan sistem transportasi darat (jalan nasional, jalan tol, dan jalur kereta api) dan transportasi udara (Bandara Internasional Adi Soemarmo).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Gambar 77 : Konektivitas Pusat Kegiatan Ekonomi di Kawasan Subosukawonosraten

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Tengah, 2019 dan Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2019

Peningkatan konektivitas dan posisinya yang strategis berada di jalur tengah Joglosemar berdampak terhadap meningkatnya arus aliran barang dan jasa komoditas unggulan serta sektor pariwisata. Kawasan ini juga menjadi penghubung aliran barang dan jasa dari DI Yogyakarta dan Semarang menuju Jawa Timur.

5) Strategi Percepatan Pembangunan Kawasan Pendukung Subosukawonosraten

RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023 menargetkan Kawasan Subosukawonosraten dapat mencapai 4 (empat) indikator utama yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata kisaran 5,45% sampai dengan 6,80%, (2) angka kemiskinan dengan rata-rata kisaran 3,12% sampai dengan 11,50%, (3) TPT dengan rata-rata kisaran 2,05% sampai dengan 4,40% serta (4) IPM pada rata-rata kisaran 73,10 sampai dengan 84,40. Oleh karena itu, diperlukan



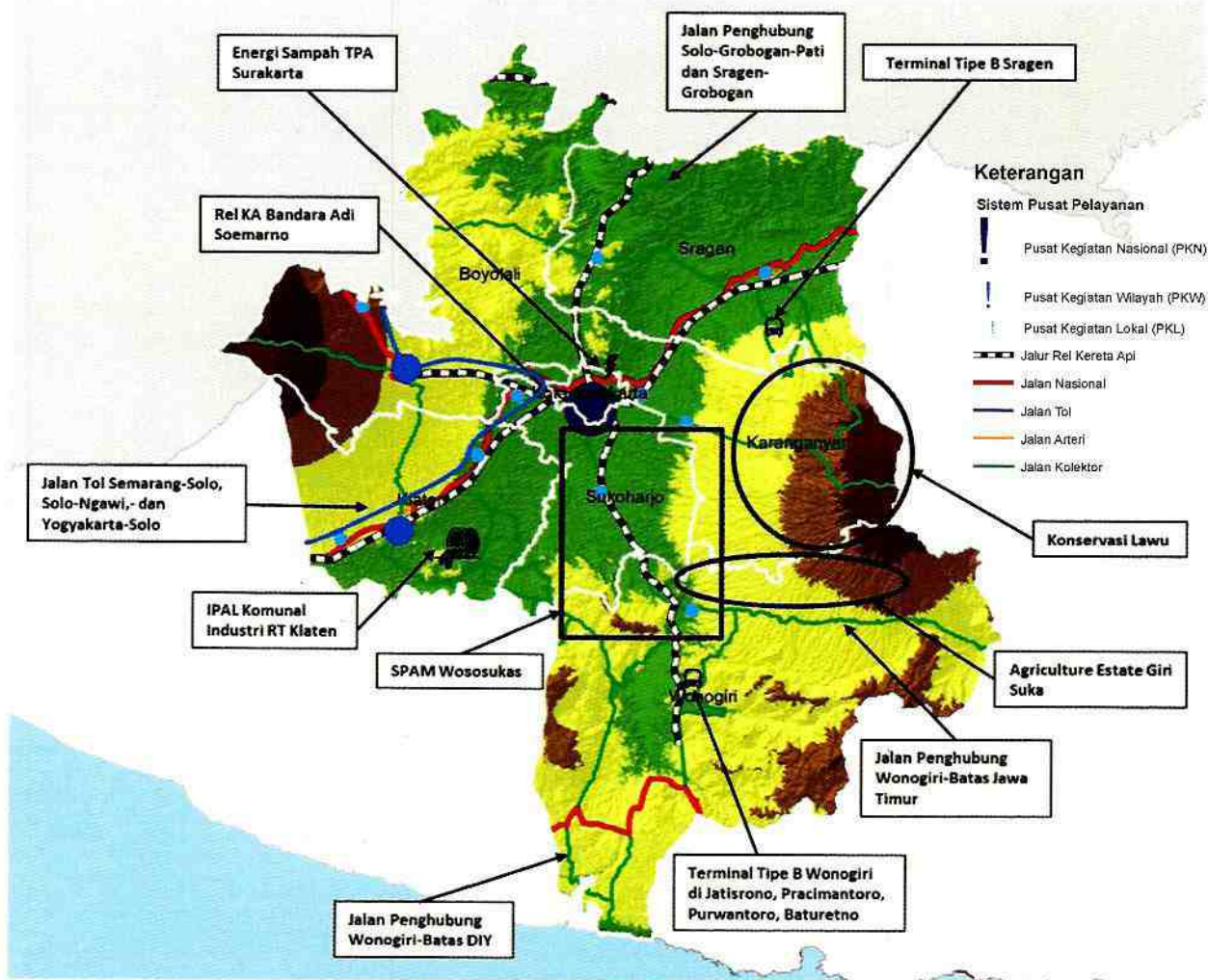
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

strategi percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi sebagai berikut:

- Optimasi konektivitas melalui rehabilitasi jalan, angkutan aglomerasi, pengembangan jalan lingkar serta jalan tol yang dapat mendukung distribusi barang/jasa dan aktivitas ekonomi khususnya distribusi komoditas pertanian, komoditas industri, mengurangi kemacetan di pusat perkotaan hingga mendukung alur perjalanan aktivitas pariwisata yang menghubungkan koridor DPN Solo-Sangiran dan sekitarnya dengan Kawasan Pariwisata Borobudur;
- Pengembangan destinasi baru di koridor antar kawasan DPN Solo-Sangiran dan sekitarnya, baik potensi wisata alam, non-alam, dan buatan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar: (1) Potensi sumber daya air melalui pengembangan SPAM dan Waduk, (2) pertanian melalui pengembangan komoditas unggulan dan pasar sentra produksi, serta (3) utilitas seperti sistem persampahan terpadu;
- Pengembangan potensi sektor industri khususnya industri kreatif, UMKM dan pengolahan produk lokal maupun kerajinan khas masyarakat dalam mendukung sektor pariwisata;
- Pengembangan sektor pertanian komoditas tanaman pangan serta peternakan utamanya komoditas sapi yang dapat diarahkan menuju sektor agro industri serta agrowisata;
- Memperhatikan kelestarian lingkungan dan upaya konservasi wilayah khususnya berfokus pada penanganan permasalahan banjir di DAS Bengawan Solo;
- Penguatan kelembagaan dalam sektor perencanaan kerja sama antardaerah di bidang Pengembangan Ekonomi Wilayah (PEW) antarwilayah administrasi di Kawasan Subosukawonosraten.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Gambar 78 : Strategi Pengembangan Kawasan Subosukawonosraten

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Tengah, 2019 dan Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2019

3. KAWASAN PENDUKUNG PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI (KI) BREBES

b. Kawasan Bregasmalang

1) Overview Kawasan

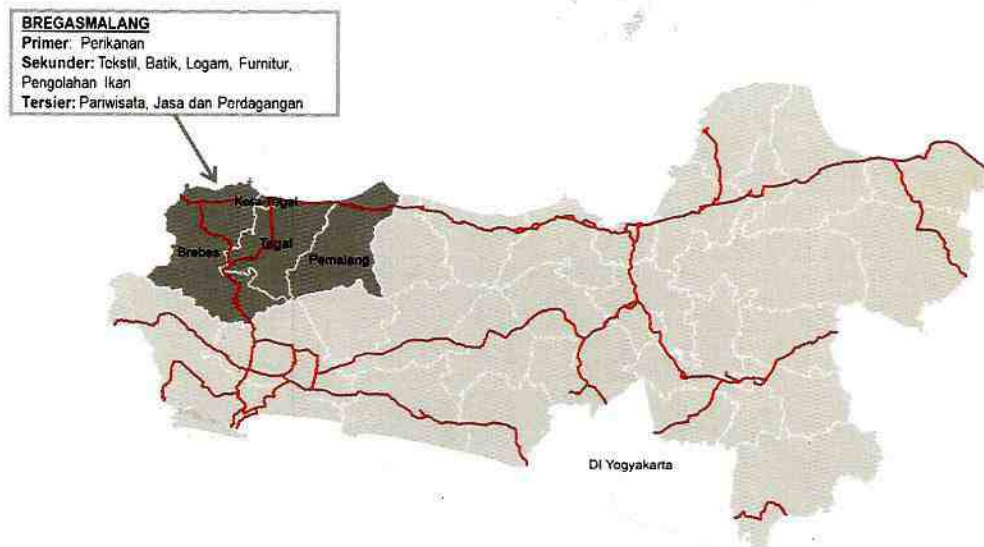
- Geografi Wilayah

Kawasan **Bregasmalang** terdiri atas **Kabupaten Brebes, Pemalang, Tegal, dan Kota Tegal**. Luas Kawasan Bregasmalang sebesar 3936,18 km² atau 12% dari total luas Jawa Tengah. Bregasmalang secara geografis terletak di pesisir utara Jawa Tengah dan pada bagian barat berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Barat. Kawasan Bregasmalang menjadi gerbang sekaligus penghubung



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

aktivitas ekonomi dari dan ke Jawa Barat dengan wilayah Pantura Jawa Tengah (Petanglong dan Kedungsepur) serta wilayah tengah dan selatan (Barlingmascakeb). Kawasan Bregasmalang juga berada di jalur penghubung antara PKN Jakarta-Bandung-Cirebon dengan PKN Semarang-Surabaya dengan keunggulan strategis pengembangan kawasan berorientasi ekonomi industri dan perdagangan/jasa. Posisi Bregasmalang semakin strategis dengan dibangunnya KI Brebes sebagai percepatan dan pemerataan pembangunan Jawa Tengah yang menjadi kunci utama dalam perkembangan perekonomian kawasan.



Gambar 79 : Regionalisasi Kawasan Bregasmalang

Sumber: Bappeda Jawa Tengah, 2019

Secara topografis, kondisi fisik Bregasmalang didominasi oleh wilayah datar hingga landai dan wilayah perbukitan hingga pegunungan dengan ketinggian hingga di atas 1000 mdpl. Titik tertinggi berada pada Gunung Slamet. Wilayah Bregasmalang dilalui dua DAS utama, yakni DAS Pemali dan DAS Comal yang berfungsi sebagai sumber air masyarakat Pantura.

- **Kependudukan dan Sosial Budaya**

Secara kependudukan Kawasan Bregasmalang memiliki penduduk sejumlah 4.788.781 jiwa. Dengan rata-rata kepadatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

penduduk sebesar 2.806 jiwa/km². Kota Tegal memiliki kepadatan penduduk tertinggi di antara Kawasan Bregasmalang, yaitu sebesar 7.220 jiwa/km². Kabupaten Brebes memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.088 jiwa/km², Kabupaten Tegal 1.634 jiwa/km², dan Kabupaten Pemalang 1.284 jiwa/km².

Potensi SDM tergolong sedang. Beban ketergantungan berada di angka 49,84 lebih rendah dari angka beban ketergantungan Jawa Tengah. IPM tergolong sedang, dengan nilai rata-rata IPM sebesar 68,28. IPM terbesar berada di Kota Tegal dengan nilai sebesar 74,44, sedangkan untuk Kabupaten Brebes sebesar 65,68, Kabupaten Tegal sebesar 67,33, dan Kabupaten Pemalang sebesar 65,67.

- **Komoditas Unggulan**

Kawasan Bregasmalang memiliki komoditas unggulan yaitu: (1) primer berupa perikanan, (2) sekunder berupa tekstil, batik, logam, furniture, dan pengolahan ikan, dan (3) tersier berupa pariwisata, jasa, dan perdagangan. Potensi unggulan yang dimiliki dan dapat terus dikembangkan:

- a. Kabupaten Brebes: industri unggulan telur asin, keramik, batik, rebana, bawang merah, cabe merah, agrowisata, rumput laut serta destinasi wisata Waduk Malahayu;
- b. Kota Tegal: industri unggulan *shuttlecock*, ikan bandeng, udang, itik, batik serta destinasi wisata Pantai Alam Indah;
- c. Kabupaten Tegal: industri unggulan komponen mesin dan perkapalan, batik, mesin, hortikultura, *shuttlecock*, padi organik serta destinasi wisata Guci dan Purwahamba; dan
- d. Kabupaten Pemalang: industri unggulan pakaian jadi (garmen), cabe, tomat, paprika, kentang, nanas, sawi, kubis, alpukat, manggis, stroberi, durian, nilam, ayam potong, ayam ras pedaging, kepiting soka, ikan bandeng, udang, serta destinasi wisata Pantai Widuri dan Agropolitan.

Produksi perikanan tangkap di kawasan Bregasmalang sebesar 51.283 ton dan perikanan budidaya perairan darat sebesar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1.698 ton. Produksi perikanan tangkap di Kawasan Bregasmalang didominasi oleh Kabupaten Pemalang, sedangkan untuk perikanan budidaya perairan darat didominasi oleh Kabupaten Brebes.

2) Potensi dan Tantangan Kawasan Bregasmalang

Kawasan Bregasmalang berpotensi untuk mendatangkan investasi di bidang pertanian, perikanan, dan industri di Jawa Tengah. Hal tersebut juga didukung dengan ketersediaan infrastruktur jaringan jalan yang memadai serta didukung kondisi alam yang ada.

Tabel 11 : Potensi Pengembangan Kawasan Bregasmalang

No.	Aspek	Potensi
1	Fisik	
	Fisik Alam	Memiliki bentang alam berupa pesisir untuk pengembangan sektor perikanan, dataran tinggi untuk pengembangan sektor pertanian dan perkebunan, serta lahan yang luas di dataran rendah untuk pengembangan kawasan industri
	Infrastruktur	Aksesibilitas tinggi yang didukung jalan Pantura dan pengembangan Tol Trans Jawa, memberi peluang peningkatan jumlah investasi dan pertumbuhan ekonomi
	Interaksi wilayah	Telah terjalin interaksi dan kerja sama dengan Jawa Barat dan kawasan lain di Jawa Tengah dalam pelayanan kebutuhan dasar dan kegiatan perekonomian
2	Ekonomi	
	Dukungan infrastruktur	Perkembangan industri Bregasmalang telah didukung secara memadai dengan keberadaan jalur Pantura dan jaringan kereta api Aktivitas perikanan didukung pelabuhan pengumpan di Kota Tegal



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Aspek	Potensi
	Perkembangan sektor pertanian dan perikanan	<p>Potensi kawasan Bregasmalang meliputi:</p> <p>Sektor Pertanian, meliputi komoditas tanaman pangan dan hortikultura. Kabupaten Brebes terdapat Agropolitan Jalabaritangkas dan STA Larangan yang memiliki komoditas bawang merah dan cabe merah, sedangkan Kabupaten Pemalang terdapat Agropolitan Waliksarimadu dan STA Belik yang memiliki komoditas hortikultura dan buah-buahan</p> <p>Sektor Perikanan, terdapat 2 (dua) Kawasan Minapolitan, yaitu di Kota Tegal dengan komoditas bandeng dan udang serta di Ulujami, Kabupaten Pemalang dengan komoditas kepiting, bandeng, dan udang</p>
	Perkembangan sektor industri	<p>Sektor Industri meliputi KI di Losari, Tanjung, Bulakamba, dan Wanasari (Kabupaten Brebes, yang berpotensi untuk menjadi KI Terpadu), Pemalang, Taman, Petarukan, Ampelgading, Comal (Kabupaten Pemalang), Margasari, Kramat, Suradadi, Wanareja (Kabupaten Tegal) serta KI Terpadu di Margadana dan Tegal Barat (Kota Tegal)</p> <p>Kondisi industri eksisting diantaranya telah merambah pasar ekspor untuk komoditas elektronik, garmen, dan sepatu (<i>footloose</i>)</p>
	Perkembangan pariwisata	<p>Potensi wisata yang dapat dikembangkan, meliputi:</p> <p>Kabupaten Brebes:</p> <p>Telaga Renjeng, Waduk Penjalin dan Malahayu, Pantai Randusanga Indah, Perkebunan Teh Kaligua, Pemandian Air Panas Cipanas Buaran</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Aspek	Potensi
		<p>Kabupaten Pemalang: Wisata Pantai Widuri dan Pantai Joko Tingkir, Goa Gunung Wangi dan Gunung Gajah, Cagar Alam Curug Bengkawah, Pendakian Gunung Slamet</p> <p>Kabupaten Tegal: Pantai Purwahamba Indah, Pemandian Air Panas Guci, Telaga Putri dan Telaga Air Cenggini, Obyek Wisata Kalibakung, Waduk Cacaban</p> <p>Kota Tegal: Pantai Alam Indah, Sabuk Hijau Muarareja, <i>Waterfront</i> Pantai Tegal</p>
	Pertumbuhan ekonomi	Ekonomi Bregasmalang tumbuh di atas 5% selama lima tahun terakhir, dengan pertumbuhan tertinggi di Pemalang dan Kota Tegal
	Perkembangan wilayah	Kesenjangan wilayah di dalam Bregasmalang cenderung kecil
3	Sosial	<p>Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan di wilayah Bregasmalang sudah memadai</p> <p>Kabupaten Pemalang memiliki Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang melayani daerah di sekitarnya</p>
4	Kerja sama antar daerah	Sudah ada kelembagaan tata kelola air yang menangani SPAM di Bregasmalang

Sumber: Data Analisis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bappeda Jawa Tengah, 2019

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Kawasan Bregasmalang adalah sebagai berikut :

Tabel 12 : Tantangan Pengembangan Kawasan Bregasmalang

No.	Aspek	Tantangan
1	Fisik	
	Fisik Alam	Bregasmalang dilalui banyak aliran sungai sehingga membutuhkan penanganan permasalahan banjir,



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

No.	Aspek	Tantangan
		<p>kerusakan DAS, dan penyimpanan air</p> <p>Memiliki karakteristik pesisir dan pegunungan sehingga rawan bencana dan menjadi hambatan pembangunan wilayah, meliputi:</p> <p><u>Kabupaten Pemalang:</u> Rawan terhadap banjir, gelombang pasang, tanah longsor, dan erupsi gunung api</p> <p><u>Kabupaten Tegal:</u> Rawan terhadap banjir, abrasi, gelombang pasang, dan tanah longsor</p> <p><u>Kabupaten Brebes:</u> Rawan terhadap banjir, abrasi, gelombang pasang, dan tanah longsor</p> <p><u>Kota Tegal:</u> Rawan terhadap banjir, abrasi, dan gelombang pasang</p>
	Infrastruktur	<p>Perlunya peningkatan konektivitas antara KI dengan kawasan sekitarnya</p> <p>Jaringan jalan di wilayah selatan memiliki tingkat kerusakan yang cukup tinggi, terutama di Kabupaten Pemalang dan Brebes</p> <p>Belum selesainya pembangunan jalan <i>bypass</i> Tegal-Brebes</p> <p>Cakupan pelayanan air bersih sistem perpipaan masih rendah terutama perpipaan Sambungan Rumah (SR) di Kawasan Perkotaan Tegal</p> <p>TPA Kota Tegal sudah melebihi kapasitas</p> <p>Menurunnya daya tampung aliran sungai dan waduk</p> <p>Jaringan drainase tidak digunakan sesuai dengan fungsinya</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Aspek	Tantangan
	Interaksi wilayah	Rendahnya interaksi antara bagian selatan dan utara karena keterbatasan infrastruktur jaringan jalan
2	Ekonomi	
	Dukungan infrastruktur	Perkembangan sektor pertanian di Kabupaten Brebes dan Pemalang sebelah selatan masih belum didukung infrastruktur jalan yang memadai
	Perkembangan sektor potensial	Keterbatasan sektor agromina industri untuk mengolah bahan baku menyebabkan sektor pertanian dan perikanan kurang memberikan kontribusi
	Perkembangan wilayah	Kabupaten Brebes dan Pemalang tergolong wilayah tertinggal Kesenjangan antara Kota Tegal dengan kabupaten di sekitarnya
3	Sosial	Nilai IPM Bregasmalang masih rendah (di bawah Jawa Tengah, sebesar 70,71) Tingkat kemiskinan di Kabupaten Brebes (17,17%) dan Pemalang (16,04%) termasuk yang terbesar di Jawa Tengah TPT Kawasan Bregasmalang di atas rata-rata TPT Jawa Tengah Stunting yang masih tinggi terutama di Kabupaten Tegal dengan angka 32,1-37,58
4	Kerja sama antar daerah	Rendahnya kerja sama antar daerah khususnya di bidang industri

Sumber: Data Analisis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bappeda Jawa Tengah, 2019

3) Tema Pembangunan Kawasan Bregasmalang

Berdasarkan RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023, tema pembangunan untuk Kawasan Bregasmalang adalah:



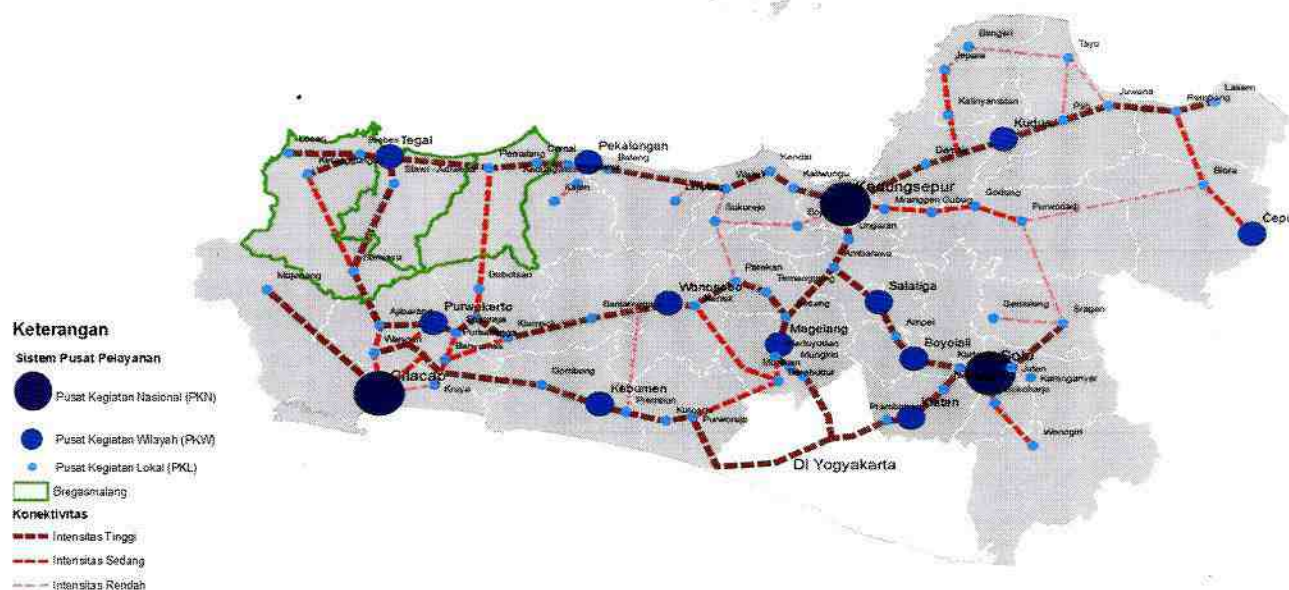
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

“Pengembangan Wilayah Bregasmalang berbasis Agrominapolitan dan Industri Pengolahan dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.”

Maksud dari tema pembangunan tersebut adalah pembangunan wilayah yang berbasis pada agrominapolitan (pertanian dan perikanan) dan industri pengolahan yang merupakan sektor unggulan utama wilayah berlandaskan prinsip berkelanjutan.

4) Penguatan Konektivitas Kawasan Bregasmalang

Kondisi eksisting konektivitas Bregasmalang didukung oleh pusat-pusat kegiatan ekonomi yaitu 1 PKW dan 7 PKL. Pusat-pusat kegiatan tersebut dihubungkan dengan sistem transportasi darat (jalan provinsi dan terminal Tipe B).



Gambar 79 : Konektivitas Pusat Kegiatan Ekonomi di Kawasan Bregasmalang

Sumber : RTRW Jawa Tengah, 2019 dan Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2019

5) Strategi Percepatan Pembangunan Kawasan Bregasmalang

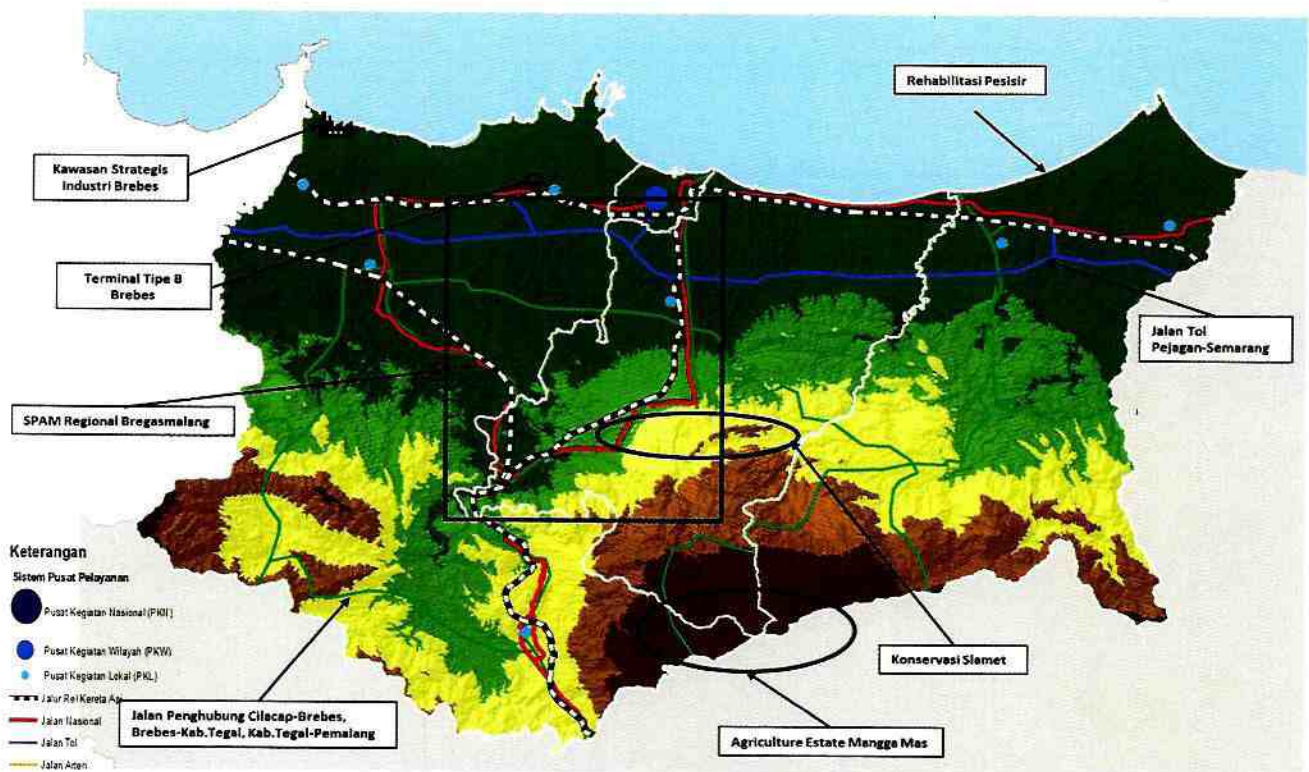
Pembangunan kawasan Bregasmalang dalam RPJMD Jawa Tengah tahun 2018-2023 ditargetkan untuk mencapai 4 (empat)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

indikator utama yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata kisaran 5,50% sampai dengan 6,55%, (2) angka kemiskinan dengan rata-rata kisaran 3,06% sampai dengan 17,62%, (3) TPT dengan rata-rata kisaran 5,20% sampai dengan 7,90% serta (4) IPM pada kisaran 66,35 sampai dengan 74,72.

Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan dilakukan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu membangun KI baru di Brebes. Pembangunan KI Brebes memerlukan dukungan infrastruktur antara lain 2 (dua) pelabuhan ekspor, 2 (dua) bandara internasional, jalur kereta api, jaringan pipa gas, listrik, air baku, telekomunikasi, fasilitas sanitasi, dan pembangunan IPAL.



Gambar 80 : Strategi Pengembangan di Kawasan Bregasmalang

Sumber: RPJMD Jawa Tengah 2018 - 2023 dan Sekretariat Tim
Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2019

Kawasan Bregasmalang juga memiliki potensi pariwisata diantaranya Kawasan Pariwisata Lereng Gunung Slamet dan Kawasan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Agropolitan Mangga Mas (Pemalang, Purbalingga, Brebes, dan Banyumas), yang dapat dioptimalkan sehingga memberikan *multiplier effect* bagi masyarakat. Sedangkan bagian selatan (Kabupaten Tegal, Pemalang, dan Brebes bagian selatan, diarahkan untuk pengembangan pariwisata alam, serta memperkuat pembangunan kawasan berbasis pertanian. Selain itu, sektor perikanan tangkap juga perlu ditingkatkan, didukung dengan pembangunan sarana prasarana pendukung, terutama di wilayah Pantura.

Guna mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan di Kawasan Bregasmalang diperlukan peningkatan infrastruktur, diantaranya: peningkatan jalan provinsi penghubung Kabupaten Brebes-Cilacap (Salem-Bandungsari); peningkatan jalan provinsi penghubung Brebes-Kabupaten Tegal; peningkatan jalan provinsi penghubung Kabupaten Tegal-Pemalang dan pembangunan jalan tol Pejagan-Semarang; peningkatan konektivitas kawasan Bregasmalang; peningkatan SPAM Regional Bregas (Kabupaten Brebes, Tegal, dan Kota Tegal); dan pembangunan sarana dan prasarana air baku. Selain itu, upaya pengelolaan lingkungan tetap diperlukan antara lain konservasi CAT Pekalongan- Pemalang; penanganan lahan kritis (Tegal, perbatasan Brebes-Kuningan, Pemalang); rehabilitasi pesisir (Brebes, Tegal, Pemalang); reklamasi bekas tambang (Pemalang); penanganan Limbah B3 (Kabupaten Tegal); dan pembuatan TPST regional.

c. Kawasan Pendukung Barlingmascakeb

1) Overview Kawasan

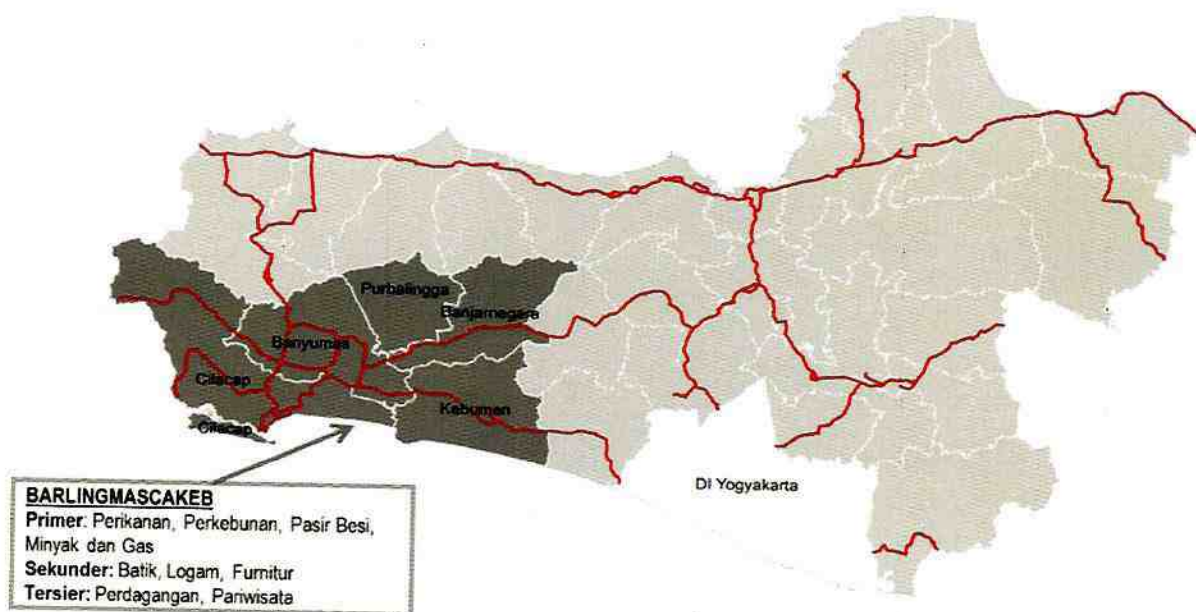
- **Geografi Wilayah**

Kawasan Barlingmascakeb memiliki peran sebagai kawasan pendukung Bregasmalang terutama pada aspek ekonomi industri, perdagangan/jasa, penyuplai bahan baku pertanian, dan migas. Secara topografis, kondisi fisik kawasan Barlingmascakeb meliputi dataran rendah, perbukitan, dan gunung api. Dataran rendah mencakup bagian selatan Barlingmascakeb, termasuk diantaranya lembah Dataran Serayu hingga pesisir selatan yang berbatasan dengan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Samudera Hindia. Perbukitan berada di sisi utara meliputi Perbukitan Serayu Utara, Perbukitan Serayu Selatan, dan Dataran Tinggi Dieng. Titik tertinggi berada di Gunung Slamet dengan status gunung api. Barlingmascakeb memiliki Pulau Nusakambangan yang berada di Segara Anakan yang merupakan bagian dari administrasi Kabupaten Cilacap. Kawasan Barlingmascakeb dilalui dua DAS utama, yakni DAS Serayu dan DAS Citanduy.



Gambar 81 : Regionalisasi Kawasan Barlingmascakeb

Sumber: Bappeda Jawa Tengah, 2019

Kependudukan dan Sosial Budaya

Secara kependudukan Kawasan Barlingmascakeb memiliki kepadatan penduduk kurang dari 1.000 jiwa/km², dengan kepadatan penduduk sedang hingga tinggi berada di Kabupaten Banyumas dan Purbalingga. Jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga sebanyak 925.193 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0,96%, sedangkan untuk Kabupaten Banyumas memiliki jumlah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

penduduk sebanyak 1.650.625 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,89%. Nilai IPM di kawasan Barlingmascakeb dikategorikan rendah dengan nilai berkisar antara 66,54-69,56. Nilai IPM yang tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Banyumas dengan nilai IPM 71,3.

Kawasan Barlingmascakeb didominasi oleh penduduk usia produktif dengan DR sebesar 37,20. Kondisi ini merepresentasikan tingginya potensi penduduk usia produktif sebagai bagian dari angkatan kerja yang mampu mendukung perkembangan sektor ekonomi, khususnya di bidang perikanan, perkebunan, dan pertambangan.

- **Sektor dan Komoditas Unggulan**

Barlingmascakeb memiliki keunggulan pada sektor (i) primer di bidang perikanan, perkebunan, pasir besi, minyak dan gas; (ii) sekunder di bidang industri batik, logam, dan furnitur; serta (iii) tersier di bidang perdagangan dan pariwisata. Berdasarkan kondisi tersebut, pengembangan di Barlingmascakeb difokuskan pada bidang perkebunan, pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan.

2) Potensi dan Tantangan Kawasan Pendukung Barlingmascakeb

Kawasan Barlingmascakeb berpotensi untuk mendatangkan investasi di bidang pertanian, pertambangan, pariwisata, dan industri pengolahan di Jawa Tengah. Hal tersebut juga didukung dengan ketersediaan infrastruktur jaringan jalan yang memadai serta didukung kondisi alam yang ada.

Tabel 33 : Potensi Pembangunan Kawasan Pendukung Barlingmascakeb

No.	Aspek	Potensi
1	Fisik	
	Fisik Alam	Mencakup pantai, dataran rendah hingga dataran tinggi Terdapat potensi kekayaan ekosistem tinggi



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

No.	Aspek	Potensi
		<p>terutama di Segara Anakan, Nusakambangan, Karst Ayah-Karangbolong hingga Kawasan Geologi Karangsambung</p> <p>DAS Serayu dan DAS Citanduy dengan potensi sumber daya air tinggi</p> <p>Memiliki potensi geotermal terutama di sekitar wilayah gunung api (Dieng dan Slamet)</p>
	Interaksi Wilayah	Berbatasan langsung dengan Jawa Barat dan menjadi jalur penghubung DI Yogyakarta-Jawa Barat melalui jalur Pansela sebagai jalur distribusi barang/jasa
	Infrastruktur	<p>Akses penghubung terkoneksi dengan trayek angkutan umum intensitas tinggi sehingga interaksi intradaerah Barlingmascakeb cukup kuat</p> <p>Potensi sumber daya air telah dimanfaatkan untuk prasarana irigasi primer, saluran sekunder, dan bangunan pelengkap irigasi</p> <p>Jaringan jalan telah terkoneksi dengan Kawasan Bregasmalang, salah satunya dengan adanya akses Cilacap-Brebes yang membuka akses peran Cilacap sebagai PKN</p> <p>Pengembangan simpul transportasi udara Bandara Jenderal Besar Soedirman (JBS) atau Bandar Udara Wirasaba di Purbalingga dan Bandara Tunggul Wulung di Cilacap serta simpul transportasi laut di Pelabuhan Tanjung Intan di Cilacap</p>
2	Ekonomi	
	Dukungan infrastruktur	<p>Pelabuhan Tanjung Intan di Cilacap menjadi sarana pendukung kegiatan industri pengolahan</p> <p>Pesatnya pertumbuhan perhotelan di Purwokerto mendorong pengembangan pariwisata di Banyumas dan daerah sekitarnya</p>



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

No.	Aspek	Potensi
		Rencana pengembangan sistem irigasi untuk sektor pertanian
		Poros Pengembangan Selatan-Selatan yang membentang dari Barlingmascakeb - Purwomanggung - Subosukawonosraten mempercepat pembangunan di koridor selatan, sehingga dapat mengurangi ketimpangan kawasan di Jawa Tengah
	Perkembangan sektor pertanian dan industri	<p>Sektor Pertanian dengan komoditas utama (i) tanaman pangan (padi dan kedelai) dan (ii) hortikultura (kentang dan kubis).</p> <p>Potensi agropolitan dengan Kota Tani Utama di Majenang, Cilacap serta adanya aglomerasi pertanian di Mangga Mas</p> <p>Sektor perikanan dengan komoditas ikan laut berkembang di Cilacap dan ikan perairan darat di Kebumen</p> <p>Sektor industri berupa industri pengolahan yang berkembang di sepanjang koridor Banjarnegara-Banyumas-Cilacap dan Kebumen-Cilacap dan kilang minyak di Cilacap.</p>
	Perkembangan sektor pariwisata	<p>Potensi wisata yang dapat dikembangkan meliputi:</p> <p><u>Kabupaten Banjarnegara:</u> Kawasan Dataran Tinggi Dieng, Kompleks Candi Arjuna, Kawah Dieng, Arung Jeram Sungai Serayu, Sentra Seni Kerajinan Klampok, dan Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas</p> <p><u>Kabupaten Purbalingga:</u> Pendakian Gunung Slamet, Goa Lawa, Bumi Perkemahan Munjul Luhur, Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman, Wisata Air Bojongsari, dan Agrowisata Serang</p>



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

No.	Aspek	Potensi
		<p><u>Kabupaten Banyumas:</u> Lokawisata Baturaden, Curug Cipendok dan Curug Gede, Wisata Sungai Serayu, Kali Logawa, Wisata Kuliner Sokaraja, Pendakian Gunung Slamet, dan Kota Lama Banyumas</p> <p><u>Kabupaten Cilacap:</u> Segara Anakan, Pantai Indah Widara Payung, Kawasan Taman Hiburan Rakyat (THR) Teluk Penyu, Gua Basma, Gua Masigit Sela, Benteng Pendem, Desa Adat Adireja, dan Wisata Sungai Serayu</p> <p><u>Kabupaten Kebumen:</u> Gua Jatijajar, Gua Petruk, Waduk Sempor, Pantai Karangbolong, Pantai Logending, Pantai Suwuk, Wisata Geologi Karangsembung, dan Mangrove Pantai Ayah</p>
	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi Barlingmascakeb di atas 5,5% selama lima tahun terakhir (2013-2018), dengan pertumbuhan tertinggi di Banyumas (6,13%)
	Perkembangan Wilayah	<p>Sarana transportasi, pendidikan, dan kesehatan telah memadai</p> <p>Posisi Banyumas sebagai PKW sangat strategis karena berbatasan dengan Jawa Barat</p>
3	Sosial	Stunting di Barlingmascakeb tergolong sedang hingga rendah, yakni 21%-26,5 %
4	Kerja sama antardaerah	Barlingmascakeb merupakan salah satu kawasan di Jawa Tengah memiliki koordinasi cukup baik di dalam pengelolaan kawasan regional.

Sumber: Data Analisis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bappeda Jawa Tengah, 2019



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Kawasan Barlingmascakeb adalah sebagai berikut:

Tabel 13 : Tantangan dalam Pengembangan Kawasan Pendukung Barlingmascakeb

No.	Aspek	Tantangan
1	Fisik	
	Fisik Alam	<p>Dataran rendah di Cilacap, Kebumen dan Banyumas disertai pertemuan alur sungai besar yang berpotensi menyebabkan banjir</p> <p>Wilayah rawan bencana di Kawasan Barlingmascakeb meliputi:</p> <p><u>Kabupaten Banjarnegara:</u> Rawan terhadap banjir, tanah longsor, dan bahaya gas beracun (Dieng)</p> <p><u>Kabupaten Purbalingga:</u> Rawan terhadap banjir, tanah longsor, dan bahaya erupsi gunung api</p> <p><u>Kabupaten Banyumas:</u> Rawan terhadap banjir, tanah longsor, dan bahaya erupsi gunung api</p> <p><u>Kabupaten Cilacap:</u> Rawan terhadap banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan abrasi</p> <p><u>Kabupaten Kebumen:</u> Rawan terhadap banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan abrasi</p>
	Infrastruktur	<p>Rendahnya konektivitas intrakawasan dan antarkawasan akibat kondisi topografis</p> <p>Perlunya pengembangan Bandara JBS di Purbalingga</p> <p>Perlunya reaktivasi jalur kereta api Purwokerto-Wonosobo</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Aspek	Tantangan
		<p>Kerusakan jalan di wilayah Barlingmascakeb cukup tinggi terutama di Banjarnegara dan Kebumen</p> <p>Infrastruktur air bersih kurang memadai terutama di wilayah pesisir seperti Kampung Laut, Cilacap</p> <p>4 TPA di Kabupaten Cilacap belum mampu melayani sistem persampahan di Barlingmascakeb</p>
2	Ekonomi	<p>Dukungan Infrastruktur Pengembangan pusat ekonomi baru sepanjang Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), pariwisata, dan pertanian memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai</p> <p>Perkembangan Sektor Potensial Perkembangan potensi pariwisata belum terkoneksi antardaerah dan kurangnya promosi</p> <p>Perikanan tangkap masih menggunakan alat tradisional dan perikanan budidaya masih memerlukan pembinaan</p> <p>Kerajinan/UMKM terkendala permodalan, kurangnya pelatihan, dan promosi</p> <p>Sektor industri pengolahan di Cilacap belum berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat</p> <p>Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi tidak merata dengan pertumbuhan paling lambat di Cilacap</p> <p>Perkembangan Wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Kebumen merupakan wilayah kurang berkembang</p> <p>Kesenjangan antara Banyumas dengan kabupaten sekitarnya</p>
3	Sosial	<p>Nilai IPM Barlingmascakeb masih rendah (dibawah 70,71) kecuali di Kabupaten Banyumas</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Aspek	Tantangan
		PDRB/kapita lebih rendah dibandingkan rata-rata Jawa Tengah dan tingkat kemiskinan masih di atas 13% yang pada umumnya masih didominasi keluarga pra sejahtera, kecuali di Cilacap
		TPT di Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, dan Cilacap lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata TPT Jawa Tengah
4	Kerja sama antardaerah	Diperlukan kerja sama di bidang konektivitas dan pariwisata

Sumber: Data Analisis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bappeda Jawa Tengah, 2019

3) Tema Pembangunan Kawasan Pendukung Barlingmascakeb

Berdasarkan RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023, tema pembangunan untuk Kawasan Barlingmascakeb adalah:

“Pengembangan Wilayah Barlingmascakeb Berbasis Agrominapolitan dan Pariwisata Terpadu yang Didukung Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan Jasa dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan”

Maksud dari tema pembangunan tersebut adalah kegiatan pembangunan kawasan yang bertumpu pada sektor agrominapolitan (pertanian dan perikanan) dan pariwisata terpadu (alam, budaya, dan buatan) serta sektor industri pengolahan dan perdagangan jasa sebagai sektor pendukung. Pembangunan kawasan Barlingmascakeb berlandaskan prinsip berkelanjutan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

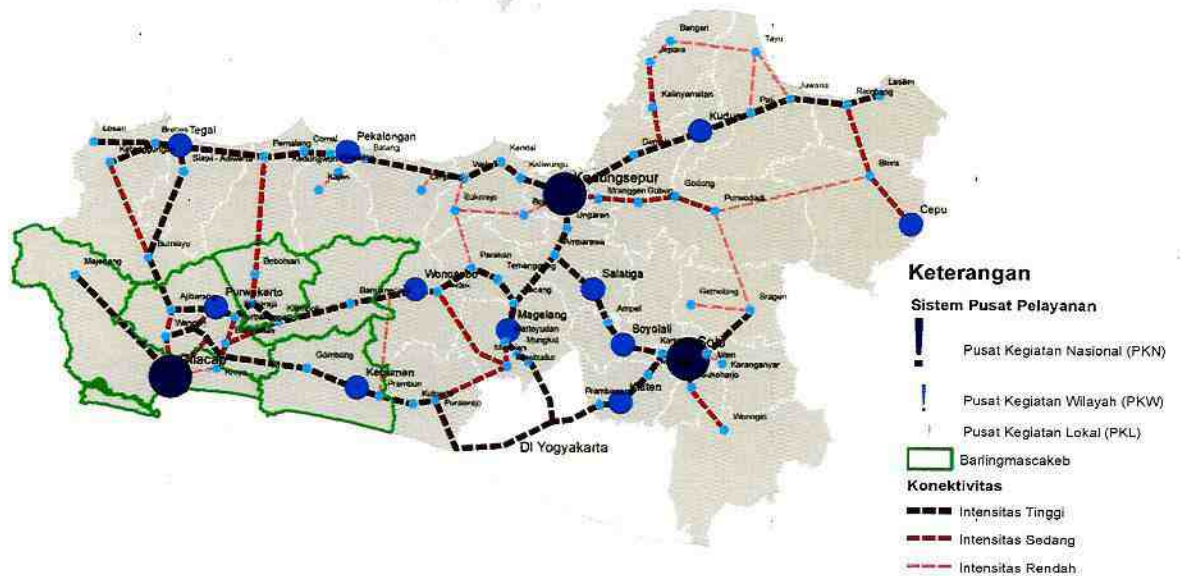
4) Penguatan Konektivitas Kawasan Pendukung Barlingmascakeb

Kondisi eksisting konektivitas Barlingmascakeb didukung oleh pusat-pusat kegiatan ekonomi yaitu 1 PKN, 2 PKW, dan 12 PKL. Pusat-pusat kegiatan tersebut dihubungkan dengan sistem transportasi darat (JJLS dan jalan provinsi), transportasi laut



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(Pelabuhan Tanjung Intan), dan transportasi udara (Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman (JBS) dan Tunggul Wulung).



Gambar 82 : Konektivitas Pusat Kegiatan Ekonomi di Kawasan Barlingmascakeb

Sumber : RTRW Provinsi Jawa Tengah, 2019 dan Sekretariat Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2019

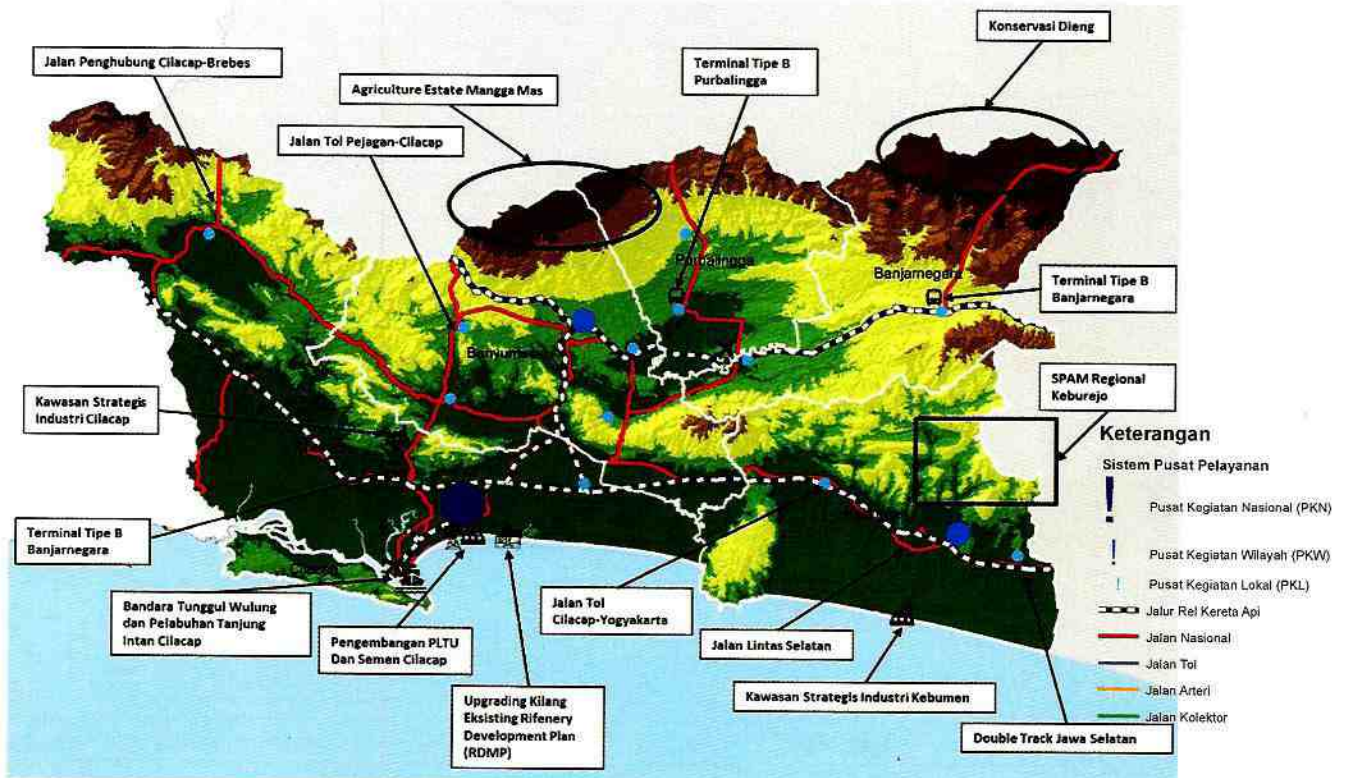
5) Strategi Percepatan Pembangunan Kawasan Pendukung Barlingmascakeb

Pembangunan kawasan Barlingmascakeb dalam RPJMD Jawa Tengah tahun 2018-2023 ditargetkan untuk mencapai 3 (tiga) indikator utama yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata kisaran 4,15% sampai dengan 6,65%, (2) angka kemiskinan dengan rata-rata kisaran 11,13% sampai dengan 15,25%, dan (3) TPT dengan rata-rata kisaran 1,97% sampai dengan 5,9%.

Strategi percepatan pemenuhan kebutuhan air baku dilakukan melalui pembangunan SPAM. Strategi pembangunan sektor sumber daya alam dilakukan melalui pembangunan bendungan serta untuk strategi percepatan pembangunan pada sektor KI dilakukan pengembangan KI Petanahan. Selain itu, upaya pengelolaan lingkungan dilakukan dengan pembangunan DAS serta pembangunan *Waste to Energy/Refused Derived Fuel*.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Gambar 83 : Strategi Pengembangan di Kawasan Barlingmascakeb

Sumber: RPJMD Jawa Tengah, 2018-2023 dan Sekretariat Tim

Percepatan Kebijakan Satu Peta, 20

d. Kawasan Pendukung Petanglong

1) **Overview Kawasan**

- **Geografi Wilayah**

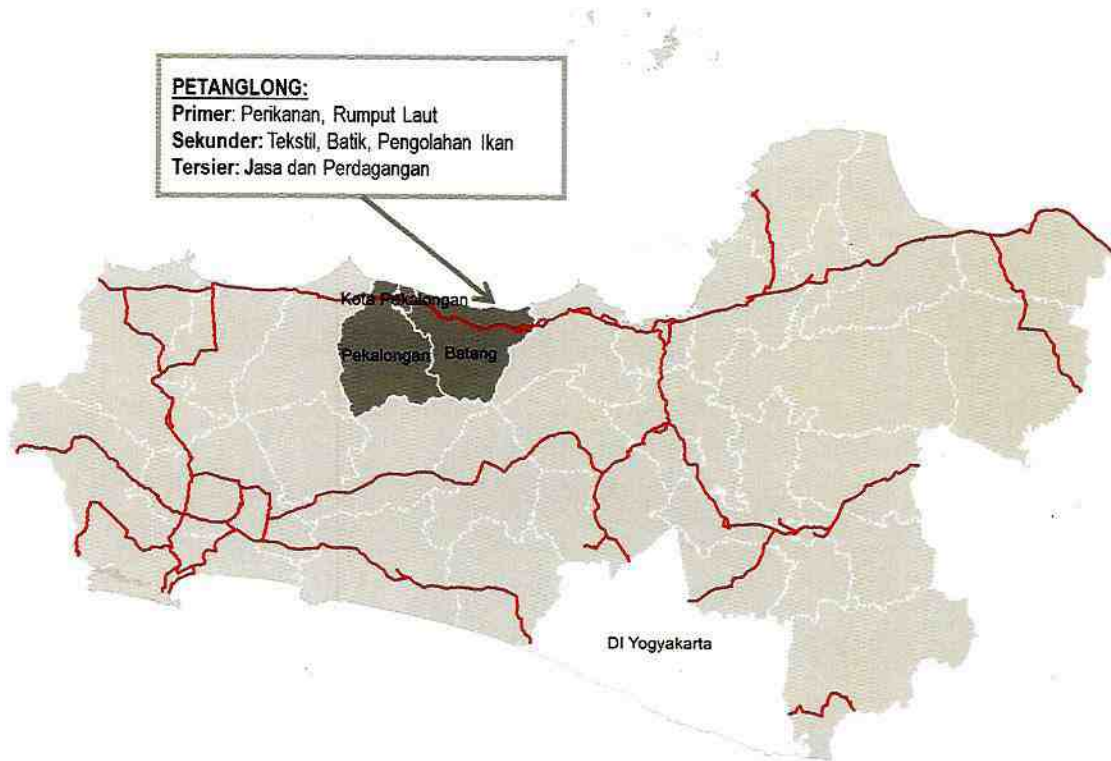
Kawasan Petanglong terdiri atas Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Pekalongan. Kawasan Petanglong seluas 1670,9km² atau 5,09% dari total luas Jawa Tengah. Secara geografis, Kawasan Petanglong terletak di pesisir utara Jawa Tengah sehingga berperan sebagai penghubung Kawasan Bregasmalang dan Kawasan Kedungsepur. Simpul utama Kawasan Petanglong berada di kawasan perkotaan Pekalongan dan sekitarnya.

Petanglong merupakan kawasan pendukung Bregasmalang terutama di sektor industri dan perdagangan/jasa serta penyuplai komoditas perikanan. Secara topografis, Petanglong didominasi oleh wilayah datar dan landai serta wilayah perbukitan dan jalur gunung api dengan titik tertinggi berada di Pegunungan Dieng. Petanglong



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dilalui dua DAS utama, yakni DAS Sragi-Sengkarang di Pekalongan dan DAS Boyo-Lampir di Batang.



Gambar 84 : Regionalisasi Kawasan Petanglong
Sumber: Bappeda Jawa Tengah, 2019

Kependudukan dan Sosial Budaya

Secara kependudukan, Kawasan Petanglong memiliki penduduk sejumlah 1.918.189 jiwa. Kawasan Petanglong memiliki rata-rata kepadatan penduduk sebesar 2.935 jiwa/km². Kota Pekalongan memiliki kepadatan penduduk tertinggi di antara Kawasan Petanglong, yaitu sebesar 6.613 jiwa/km². Kabupaten Pekalongan memiliki kepadatan penduduk sebesar 4.000 jiwa/km² dan Kabupaten Batang sebesar 959 jiwa/km².

Potensi SDM tergolong sedang. Beban ketergantungan berada di angka 45,12, lebih rendah dari angka beban ketergantungan Jawa Tengah. IPM tergolong sedang, dengan nilai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

rata-rata IPM sebesar 70,3. IPM terbesar berada di Kota Pekalongan dengan nilai 74,24 sedangkan untuk Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang berturut-turut bernilai 68,97 dan 67,86.

- **Komoditas Unggulan**

Kawasan Petanglong memiliki sektor unggulan berupa perikanan, industri, jasa, dan perdagangan. Adapun komoditas unggulan diantaranya: (i) primer berupa perikanan dan rumput laut; (ii) sekunder berupa tekstil batik, logam, furniture, dan pengolahan ikan; dan (iii) tersier berupa jasa dan perdagangan.

Sektor perikanan di Kawasan Petanglong menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 15,83%. Proporsi produksi perikanan laut didominasi oleh Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang. Pada tahun 2017, produksi perikanan tangkap sebesar 32.415 ton. Produk utama pengolahan ikan diantaranya produk pengalengan ikan dan tepung ikan.

Sektor industri tekstil merupakan salah satu sektor unggulan yang berpusat di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Industri TPT menyerap tenaga kerja hingga 2,79 juta jiwa dan menempati ranking tiga ekspor nasional dengan nilai kontribusi sebesar 8,17%. Sejalan dengan hal tersebut, berkembang sektor perdagangan pengolahan hasil produk tekstil berupa batik. Sektor unggulan jasa dan pariwisata berupa agrowisata Clapar, Bandar *Ecopark* di Kabupaten Batang, dan Mangrove Park di Kota Pekalongan. Perkembangan sektor pariwisata diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penyediaan penginapan dan UMKM cinderamata.

2) Potensi dan Tantangan Kawasan Pendukung Petanglong

Kawasan Petanglong berpotensi untuk mendukung pembangunan ekonomi dengan prinsip keberlanjutan dari aspek sumber daya alam, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan kependudukan.



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

Tabel 35 : Potensi Pengembangan Kawasan Pendukung Petanglong

No.	Aspek	Potensi
1	Fisik	
	Fisik Alam	Berada di Pesisir Utara Pulau Jawa dengan ketersediaan sumber daya alam laut yang beraneka ragam
	Infrastruktur	Dilalui Jalur Pantura yang mendorong konektivitas barang/jasa
		Tersedia infrastruktur jaringan jalan yang memadai
		Kebutuhan listrik terpenuhi melalui sistem minihidro yang memanfaatkan sumber air dan PLTU Batang di Ujungnegero
		Tersedia pelabuhan pengumpan di Kabupaten Pekalongan dan Batang
Interaksi wilayah	Konektivitas intrakawasan sudah baik	
	Petanglong menghubungkan Kawasan Bregasmalang dan Kawasan Kedungsepur melalui jalur Pantura	
	Konektivitas melalui jalur laut berpotensi untuk dikembangkan	
2	Ekonomi	
	Dukungan infrastruktur	Keberadaan pelabuhan perikanan nasional yang dikembangkan di Kota Pekalongan mampu menopang perkembangan kawasan
	Perkembangan sektor pertanian, perikanan dan industri	Sektor Pertanian dengan komoditas utama tanaman pangan, buah-buahan (rambutan, durian, jambu) dan hortikultura (bawang daun dan cabai rawit)
Sektor Perikanan berkembang di Batang dan Pekalongan dengan produksi perikanan laut mencapai 32 ribu ton		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Aspek	Potensi
		<p>Sektor industri dan perdagangan berkembang di Pekalongan, khususnya industri kreatif, industri batik, dan produk kerajinan lokal</p> <p>Potensi industri besar berada di Kabupaten Batang (KPI Ujungnegoro dan Celong), Kabupaten Pekalongan (KPI Siwalan, Tirto, Wonokerto) serta Kota Pekalongan (KPI Krapyak Lor dan Degayu)</p>
	Perkembangan sektor pariwisata	<p>Potensi wisata yang dapat dikembangkan meliputi:</p> <p>Kota Pekalongan: Kawasan Kota Lama, Wisata Pantai Pekalongan, Wisata Belanja Batik dan Kerajinan Tenun</p> <p>Kabupaten Batang: Pantai Ujungnegoro, Pantai Sigandu, Wisata Alam Kebun Teh Pagilaran</p> <p>Kabupaten Pekalongan: Pantai Depok, Kampung Batik dan International Batik Centre, Wisata Linggoasri, dan Petungkriyono</p>
	Pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, dengan pertumbuhan seluruhnya di atas 5%
3	Sosial	<p>Tingkat kemiskinan di kawasan Petanglong lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah</p> <p>Nilai IPM Petanglong di atas rata-rata IPM Jawa Tengah dengan nilai rata-rata IPM sebesar 70,3.</p>
4	Kerja sama antardaerah	Sudah terdapat kerja sama antar daerah

Sumber: Data Analisis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bappeda Jawa Tengah, 2019

Kawasan Petanglong memiliki berbagai tantangan dalam pembangunan ekonomi dengan prinsip keberlanjutan dari aspek sumber daya alam, infrastruktur, ekonomi, dan lingkungan hidup.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 36 : Tantangan Pembangunan Kawasan Pendukung Petanglong

No.	Aspek	Tantangan	
1	Fisik		
		Fisik Alam	Wilayah rawan bencana di Kawasan Petanglong, meliputi: Kabupaten Pekalongan: Rawan terhadap banjir dan erosi, tanah longsor, abrasi, dan gelombang pasang Kota Pekalongan: Rawan terhadap banjir rob dan abrasi pantai Kabupaten Batang: Rawan terhadap banjir rob, tanah longsor, dan abrasi pantai
		Infrastruktur	Sebagian prasarana jalan di Kabupaten Batang dan Pekalongan dalam kondisi rusak
		Interaksi wilayah	Batang memiliki interaksi yang paling rendah dengan daerah lainnya, namun tidak memiliki kecenderungan bergantung pada wilayah lain di luar kawasan. Konektivitas masih rendah dengan kawasan Barlingmascakeb dan Purwomanggung akibat kendala topografis yang terjal
2	Ekonomi		
		Dampak perkembangan ekonomi	Petanglong yang berada di pesisir utara memiliki kerentanan tinggi terhadap pencemaran air permukaan dan air tanah, akibat dari sektor domestik dan industri khususnya konveksi batik dan industri pengolahan lainnya
	Perkembangan wilayah	Kota Pekalongan tumbuh lebih cepat dibandingkan Kabupaten Pekalongan dan Batang	
3	Sosial	IPM di Kabupaten Pekalongan dan Batang masih di bawah Jawa Tengah (70,71), kecuali Kota Pekalongan (74,27)	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Aspek	Tantangan
		Stunting di Kabupaten Pekalongan masih tinggi, yakni pada angka 32,1-37,58
4	Kerja sama antar daerah	Kerja sama antar daerah belum optimal terutama pada strategi pengembangan komoditas dan pengelolaan lingkungan

Sumber: Data Analisis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Bappeda Jawa Tengah, 2019

3) Tema Pembangunan Kawasan Pendukung Petanglong

Berdasarkan RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023, tema pembangunan untuk Kawasan Petanglong adalah :

“Pengembangan Wilayah Petanglong Berbasis Industri Pengolahan Kreatif dan Pertanian dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan”

Maksud dari tema pembangunan tersebut adalah kegiatan pembangunan kawasan yang bertumpu pada sektor pertanian, pariwisata, industri, dan perikanan, yang berlandaskan pada prinsip berkelanjutan.

4) Penguatan Konektivitas Kawasan Pendukung Petanglong

Kondisi eksisting konektivitas Petanglong didukung oleh pusat-pusat kegiatan ekonomi yaitu 1 PKW dan 5 PKL. Pusat-pusat kegiatan tersebut dihubungkan dengan sistem transportasi darat (jalan provinsi dan jalan tol).



Gambar 85 : Konektivitas Pusat Kegiatan Ekonomi di Petanglong

Sumber: RTRW Jawa Tengah, 2019 dan Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, 2019



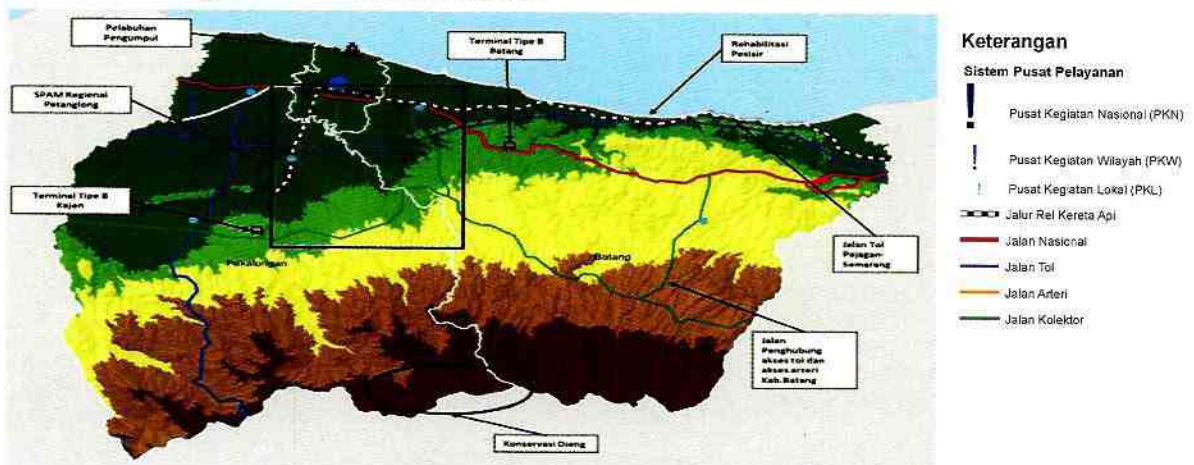
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5) Strategi Percepatan Pembangunan Kawasan Pendukung Petanglong

Pengembangan Kawasan Petanglong berdasarkan RPJMD Jawa Tengah tahun 2018 – 2023 ditargetkan untuk dapat mencapai 3 (tiga) indikator utama yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata kisaran 5% sampai dengan 5,60%, (2) angka kemiskinan dengan rata-rata kisaran 4,5% sampai dengan 9,13%; dan (3) TPT dengan rata-rata kisaran 4,05% sampai dengan 5,55%.

Strategi percepatan pembangunan, secara garis besar diantaranya:

- Menjadikan batik sebagai penggerak ekonomi mikro berbasis industri kreatif dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- Meningkatkan daya saing produk;
- Pemerataan pertumbuhan wilayah dengan mengoptimalkan potensi jasa dan perdagangan;
- Meningkatkan fungsi pelabuhan di Pekalongan sebagai pusat perdagangan ikan;
- Peningkatan mitigasi bencana;
- Peningkatan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur dan sarana serta prasarana; dan
- Peningkatan kualitas SDM.



Gambar 86 : Strategi Pengembangan Kawasan Petanglong

Sumber: RPJMD Jawa Tengah 2018-2023 dan Sekretariat Tim Percepatan
Kebijakan Satu Peta, 2019



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB V

PELAKSANAAN DAN TATA KELOLA RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KAWASAN DI JAWA TENGAH

1. Tahapan Pelaksanaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, pada tahun 2025 Indonesia diharapkan dapat menciptakan manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia, serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan berkelanjutan yang didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah dengan didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai.

Sesuai semangat RPJPN, Pemerintah berusaha mewujudkan hal tersebut melalui percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kawasan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*quality of life*) di seluruh wilayah, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan meningkatkan keserasian pemanfaatan ruang dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan semangat tersebut, Presiden menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemasang.

Melalui Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah akan berfokus kepada pengembangan wilayah yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang, yang dilakukan melalui pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah, distribusi pusat-pusat pertumbuhan wilayah/kawasan strategis (PKN, KI, KEK, dan KSPN) ke wilayah belum berkembang, dan peningkatan daya saing wilayah yang inklusif.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Guna keberhasilan pelaksanaan Peraturan Presiden ini perlu sebuah Rencana Induk yang harus diimplementasikan secara berkesinambungan dan terintegrasi. Kunci keberhasilan pelaksanaan Rencana Induk pada tahun 2020-2024 meliputi:

a. Sektor Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur

- 1) **Pemenuhan Dokumen Perencanaan**, perlu dilakukan percepatan pemenuhan dokumen perencanaan atas pelaksanaan program/kegiatan yang telah masuk dalam Rencana Induk sehingga pelaksanaan program/kegiatan dapat sesuai dengan Rencana Induk yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini.
- 2) **Dorongan *creative financing* dan peningkatan kerja sama antar Pemerintah Daerah**, Pemerintah Daerah perlu mendorong adanya skema pendanaan baru selain menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau skema pendanaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) **Pembangunan dan pengembangan infrastruktur perkotaan**, yang dilakukan melalui pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis rel dan jalan serta pengembangan *Transit Oriented Development* (TOD).
- 4) **Pembangunan dan peningkatan infrastruktur kebutuhan dasar**, dilakukan melalui pembangunan SPAM, jaringan gas, dan infrastruktur kebutuhan dasar lainnya.
- 5) **Pengembangan dan peningkatan infrastruktur ekonomi**, dilakukan melalui pembangunan jaringan jalan nasional dan jalur kereta api di Jawa Tengah yang terintegrasi dengan kawasan, pembangunan pelabuhan, dan pengembangan bandara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

b. Sektor Peningkatan Sumber Daya Manusia

- 1) **Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas**, dilakukan melalui peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran khususnya bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan vokasi.
- 2) **Penguatan pendidikan tinggi berkualitas**, dilakukan melalui pengembangan perguruan tinggi sebagai produsen IPTEK-inovasi dan pusat unggulan (*center of excellence*).
- 3) **Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja**, dilakukan melalui peningkatan peran dan kerja sama pendidikan dan pelatihan vokasi dengan dunia usaha.
- 4) **Peningkatan produktivitas dan daya saing**, dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri serta peningkatan kualitas pada pendidikan vokasi.

c. Sektor Pengembangan IPTEK

- 1) **Peningkatan kapabilitas IPTEK dan penciptaan inovasi**, dilakukan melalui inovasi teknologi produksi untuk pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.
- 2) **Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil dan industrialisasi**, dilakukan melalui peningkatan industri berbasis perikanan dan pertanian, peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata serta meningkatkan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan KI.

d. Sektor Industri

- 1) **Memperkuat kewirausahaan dan UMKM**, dilakukan melalui peningkatan kemitraan, akses pembiayaan, kapasitas, jangkauan, dan inovasi serta nilai tambah usaha sosial.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2) **Optimalisasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan kawasan**, antara lain KEK, KI, kawasan pariwisata, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan dengan didukung konektivitas antarkawasan, operasionalisasi, dan peningkatan investasi.

Guna mendukung pelaksanaan Rencana Induk perlu dilakukan reformasi birokrasi, melalui terwujudnya manajemen institusi pemerintah yang berstandar internasional yang menggunakan sistem informasi berbasis teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas bagi institusi pemerintah.

2. Sumber Pendanaan

Rencana Induk yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini disusun untuk mencapai sasaran percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan yang dilakukan melalui skala prioritas yang berdasarkan strategi pembangunan nasional serta kerangka pendanaannya meliputi kebijakan pada belanja pemerintah pusat, transfer daerah serta kebijakan pembiayaan pembangunan.

APBN digunakan mendanai program/kegiatan yang nilainya terlalu besar jika dibiayai melalui APBD dan program/kegiatan yang merupakan tugas dan fungsi dari Kementerian/Lembaga. Selain itu, dalam mendukung pencapaian prioritas nasional di daerah, perlu upaya untuk optimalisasi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Dengan keterbatasan pendanaan maka penguatan DAK akan meliputi penajaman bidang yang mendapat DAK, cakupan kegiatan dan daerah penerima. Strategi pembangunan nasional dan hasil evaluasi pelaksanaan akan menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan penganggaran DAK.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



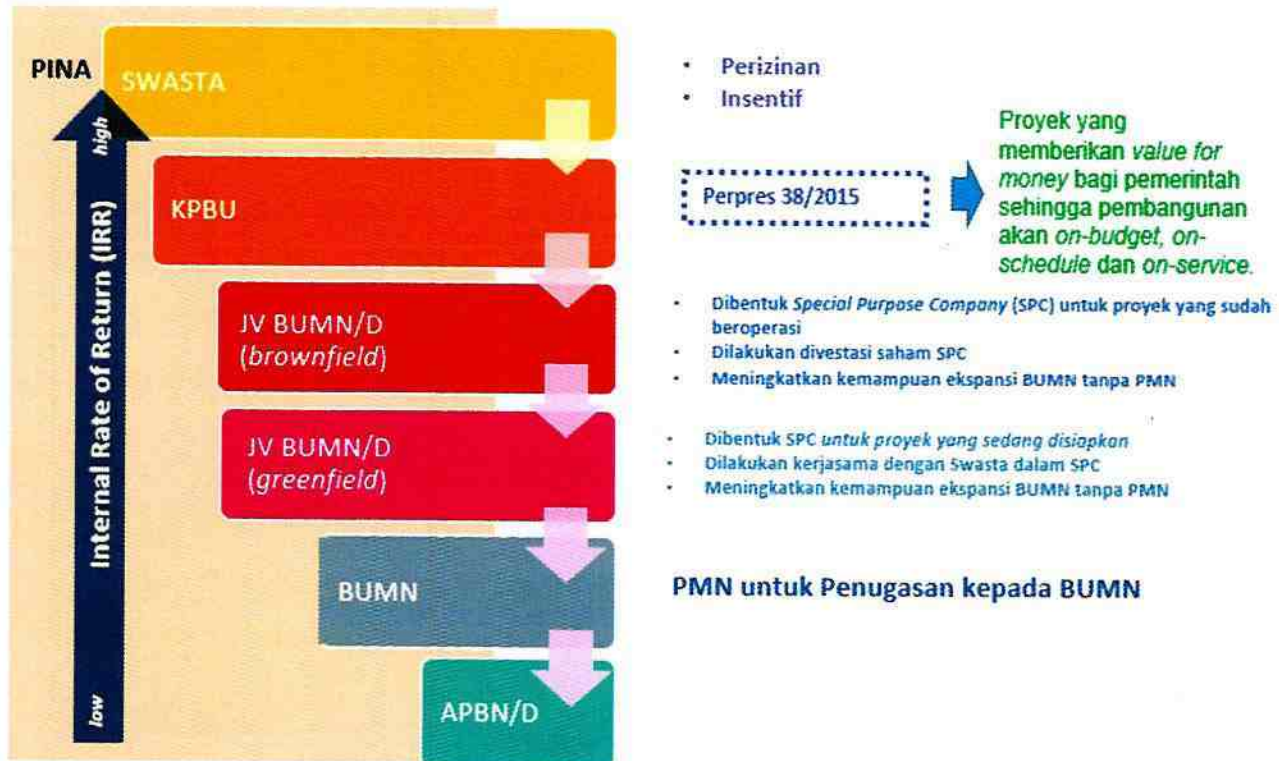
Gambar 87 : Pola Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Sumber : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pengembangan potensi pembiayaan pembangunan dilakukan dengan meningkatkan pemanfaatan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan kerja sama antar Pemerintah Daerah dan Penugasan BUMN/BUMD. KPBU merupakan salah satu paradigma yang harus dikedepankan dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional dan kawasan dengan melibatkan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur publik. Selain itu, juga masih dimungkinkan untuk memanfaatkan skema pendanaan lain yang berbasis *creative financing* lainnya, antara lain Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA), Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), dan skema pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam skema paradigma di bawah ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Gambar 88 : Paradigma Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur
Sumber: Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

KPBU dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan ketentuan yang mengacu pada spesifikasi khusus yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan tetap memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak terkait. Manfaat penggunaan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur adalah penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, tepat waktu, dan berkesinambungan dalam proses perencanaan, konstruksi, operasi, dan pemeliharaan serta mampu mengatasi keterbatasan kapasitas pendanaan pemerintah melalui pengalihan dana swasta, sehingga penyediaan infrastruktur dapat lebih dioptimalisasi.

Saat ini, penyelenggaraan skema KPBU dapat diterapkan ke dalam 19 (sembilan belas) sektor infrastruktur, baik infrastruktur ekonomi, yaitu transportasi, jalan, ketenagalistrikan, minyak, gas, dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

energi baru terbarukan, konservasi energi, serta telekomunikasi dan informatika, maupun infrastruktur sosial, yaitu air minum, pengelolaan limbah setempat, pengelolaan limbah terpusat, pengelolaan sampah, sumber daya air dan irigasi, fasilitas perkotaan, perumahan rakyat, pariwisata, fasilitas pendidikan, lembaga pemasyarakatan, sarana olahraga, kesenian dan budaya, kawasan, dan kesehatan, dengan landasan hukumnya yang telah termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa bentuk pengembalian investasi kepada pihak swasta (badan usaha) atas penyediaan infrastruktur dapat bersumber dari pembayaran oleh pengguna infrastruktur dalam bentuk tarif (*user fee*), pembayaran oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) melalui skema ketersediaan layanan (*availability payment*), ataupun pembayaran dalam bentuk lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Proyek infrastruktur dengan skema KPBU dapat diprakarsai oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah yang disebut dengan *solicited project* maupun KPBU yang diprakarsai oleh pihak swasta/badan usaha/BUMN/BUMD yang disebut sebagai *unsolicited project*. Proses pelaksanaan skema KPBU *solicited* dan *unsolicited project* memiliki tahapan yang sama, yaitu tahap perencanaan, penyiapan, dan transaksi



Gambar 89 : Skema KPBU

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PINA merupakan mekanisme pembiayaan untuk proyek investasi yang bersifat prioritas, dengan pendanaannya yang bersumber selain dari anggaran pemerintah dan pelaksanaannya didorong dan difasilitasi oleh pemerintah. Penyediaan infrastruktur yang menggunakan skema PINA harus memenuhi minimal 4 (empat) kriteria utama, yaitu memiliki manfaat ekonomi dan sosial yang tinggi, memiliki kelayakan komersial, memenuhi kriteria kesiapan (*readiness criteria*), serta mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional. Dengan nilai investasi dan imbal hasil yang relatif menarik, umumnya pemerintah hanya berperan sebagai regulator dan promotor.

Dalam Rencana Induk, telah dilakukan penghitungan nilai investasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang terlampir dalam Rencana Induk sebagaimana dimaksud. Sumber pendanaan tersebut, berasal dari APBN, APBD, KPBU, BUMN, BUMD, Swasta dengan total program/kegiatan berjumlah 270 program/kegiatan dengan nilai Rp353.411,3 M.

Tabel 37 : Rincian Jumlah dan Nilai Program/Kegiatan Berdasarkan Sumber Pendanaan

Sumber Pendanaan	Jumlah Program/Kegiatan	Nilai
APBN	205	Rp46.183,3 Miliar
KPBU	31	Rp150.402 Miliar
BUMN/BUMD/Swasta	33	Rp156.726 Miliar
APBD	1	Rp100 Miliar

3. Kemudahan Dalam Perizinan dan Fasilitas Insentif

Rencana Induk ditetapkan untuk mendorong laju pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara lokal dan regional sehingga membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Penggunaan istilah “percepatan” membuat pelaksanaan dari Rencana Induk ini tidak dapat dilakukan dan/atau diperlakukan dengan tata laksana seperti biasa (*bussiness as usual*), akan tetapi harus diperlakukan secara khusus, sehingga target yang telah dicanangkan dalam Rencana Induk dapat segera tercapai.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Perlakuan khusus tersebut juga diberikan untuk mendorong munculnya inisiatif pembiayaan lain selain dari APBN dan APBD, misalnya melalui mekanisme KPBU atau pembiayaan mandiri dari pihak swasta. Bentuk perlakuan khusus tersebut adalah dengan memperlakukan rencana kegiatan/rencana pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk ini seperti PSN. PSN merupakan proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Perlakuan khusus yang diberikan untuk Rencana Induk seperti halnya perlakuan terhadap PSN membuat semua kemudahan beserta insentif yang diterima oleh PSN sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 dapat diterapkan pula untuk rencana kegiatan/rencana pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Induk ini.

4. Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi

Dalam rangka mengawal implementasi berbagai langkah percepatan pembangunan ekonomi kawasan, agar dapat lebih efektif dalam mempercepat pengambilan keputusan yang diperlukan untuk menangani berbagai permasalahan yang muncul, dalam tahap pelaksanaannya dapat didukung tim pelaksana yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk melakukan pengendalian, koordinasi, dan evaluasi, yang beranggotakan seluruh pemangku kepentingan yang terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha. Pada tingkat daerah, Gubernur akan menjadi ujung tombak bagi pelaksanaan program-program pembangunan di dalam Rencana Induk. Untuk itu, diharapkan Gubernur memperkuat forum kerjasama antar Bupati/Walikota yang telah ada agar tercipta kesatuan gerak langkah pelaksanaan yang harmonis di dalam maupun antar kawasan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Evaluasi dilakukan dalam rangka menilai pencapaian tujuan kebijakan, program, ataupun kegiatan dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi sehingga dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kinerja pembangunan. Hasil evaluasi dapat menyediakan data dan informasi tentang efisiensi, efektivitas, kebutuhan, manfaat, dan dampak program atau kegiatan sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai masukan dalam perencanaan dan penganggaran.

Tujuan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk:

1. Mengetahui hasil pelaksanaan Rencana Induk, identifikasi permasalahan, rencana tindak lanjut, serta kebutuhan akan perubahan rencana induk guna penyesuaian pelaksanaan rencana induk terhadap kondisi di lapangan.
2. Penentuan sasaran dan target pelaksanaan Rencana Induk.

Dalam mendukung pelaksanaan pengendalian, monitoring, dan evaluasi dapat memanfaatkan sistem informasi berbasis teknologi yang dapat diakses oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian/Lembaga terkait, dan Pemerintah Daerah.

Waktu pelaksanaan evaluasi Rencana Induk dilakukan selama kurun waktu 2020 hingga 2024. Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah dan digunakan sebagai masukan/*feedback* dalam rangka pengambilan kebijakan dan proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VI

LAMPIRAN DAFTAR PROGRAM/KEGIATAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KAWASAN DI JAWA TENGAH

Berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah disepakati 270 usulan program/kegiatan di Provinsi Jawa Tengah dengan total estimasi nilai investasi sebesar Rp353.411,3 M. Adapun dari 270 usulan program/kegiatan tersebut dibiayai melalui beberapa macam sumber, diantaranya: (1) APBN terdiri dari 205 usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp46.183,3 M atau sebesar 13,07%; (2) KPBU terdiri dari 31 usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp150.402 M atau sebesar 42,56%; (3) BUMN/BUMD/Swasta terdiri dari 33 usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp156.726 M atau sebesar 44,35%; dan (4) APBD terdiri dari 1 (satu) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp100 M atau sebesar 0,03%. Mayoritas usulan program/kegiatan di Provinsi Jawa Tengah berasal dari sektor sumber daya air (20,7%), jalan/jembatan (18,5%), transportasi (7,8%), pariwisata (7,8%) serta perikanan dan kelautan (7,0%).

1. KAWASAN KEDUNGSEPUR

Berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah disepakati 56 usulan program/kegiatan di Kawasan Kedungsepur dengan total estimasi nilai investasi sebesar Rp107.583 M. Adapun dari 56 usulan program/kegiatan tersebut dibiayai melalui 5 (lima) macam sumber, diantaranya: (1) APBN terdiri dari 33 usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp10.481 M; (2) KPBU terdiri dari 7 (tujuh) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp32.386 M; (3) BUMN terdiri dari 5 (lima) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp10.950 M; (4) BUMD terdiri dari 3 (tiga) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp950 M; dan (5) Swasta terdiri dari 8 (delapan) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp52.816 M. Mayoritas usulan program/kegiatan di Kawasan Kedungsepur berasal dari sektor sumber daya air, jalan/jembatan dan pariwisata. Rincian 56 usulan program/kegiatan di Kawasan Kedungsepur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 38 : Usulan Program/Kegiatan Kawasan Kedungsepur

NO	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
KAWASAN KEDUNGSEPUR				
1	Kab. Kendal	Pembangunan Bendung Karet Sungai Blorong, Kab. Kendal	250,0	APBN
2	Kab. Kendal	Pembangunan Bendungan Bodri, Kab. Kendal	3.500,0	APBN
3	Kab. Kendal	Pembangunan Bendung Karet Sungai Bodri, Kab. Kendal	250,0	APBN
4	Kab. Kendal	Revitalisasi Kawasan Bekas Sungai Bodri, Kab. Kendal	600,0	APBN
5	Kota Semarang dan Kab. Kendal	Pembangunan Tanggul Laut Kota Semarang - Kendal, Kota Semarang dan Kab. Kendal	500,0	APBN
6	Kab. Grobogan	Pembangunan Waduk Ngemplak, Kab. Grobogan	50,0	APBN
7	Kab. Semarang dan Kab. Grobogan	Pembangunan Waduk Jragung, Kab. Semarang dan Kab. Grobogan	1.500,0	APBN
8	Kota Semarang	Normalisasi Sungai Bringin, Kota Semarang	100,0	APBN
9	Kab. Demak	Pembangunan Bendung Karet Kali Kontrak, Kab. Demak	60,0	APBN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
10	Kab. Demak	Pembangunan Kolam Retensi/ <i>Water Storage</i> dengan pompa di Kawasan Tol Tanggul Laut, Kab. Demak	1.000,0	APBN
11	Kab. Kendal	Pembangunan prasarana konservasi SDA Sungai Blorong, Kab. Kendal	100,0	APBN
12	Kab. Kendal	Pembangunan Jalan Akses KEK Kendal - KPI Patebon dan Akses Jalan Pantura Kendal ke KPI Patebon, Kab. Kendal	500,0	APBN
13	Kab. Kendal	Pembangunan <i>interchange</i> di Arteri Kaliwungu ke KI Kendal, Kab. Kendal	200,0	APBN
14	Kab. Kendal	Pembangunan <i>Outer Ringroad</i> Kendal-Semarang (<i>Harbor Toll</i>), Kab. Kendal	15.000,0	KPBU
15	Kab. Semarang	Pembangunan <i>interchange</i> Jateng Park - Penggaron, Kab. Semarang	350,0	APBN
16	Kota Semarang	Pembangunan <i>Fly Over</i> Madukoro, Kota Semarang	200,0	APBN
17	Kota Semarang	Pembangunan Jembatan Spondol - Sekaran, Kota Semarang	200,0	APBN
18	Kota Semarang	Pembangunan <i>Fly Over</i> Jalan Setiabudi, Kota	200,0	APBN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
		Semarang		
19	Kota Salatiga	Penataan Jl. Jend. Sudirman, Kota Salatiga	85,0	APBN
20	Kab. Demak	Pembangunan TPA, Kab. Demak	80,0	KPBU
21	Kab. Demak	Pembangunan IPA 100Lt/dt, Kab. Demak	60,0	APBN
22	Kota Semarang	Pembangunan <i>Underground</i> Simpang Lima, Kota Semarang	850,0	KPBU
23	Kab. Demak dan Kota Salatiga	Peningkatan Terminal Tipe A Kab. Demak dan Tingkir Kota Salatiga	100,0	APBN
24	Kota Semarang	Pembangunan BRT <i>Dedicated Lane</i> , Kota Semarang	600,0	KPBU
25	Kota Semarang, Kab Kendal, Kab Demak dan Kab Grobogan	Pengembangan transportasi massal berbasis rel, Kota Semarang, Kab. Kendal, Kab. Demak dan Kab. Grobogan	1.000,0	BUMN
26	Kota Semarang dan Kab. Kendal	Pembangunan jalur rel dari Tanjung Emas menuju Kendal <i>Sea Port</i> , Kota Semarang dan Kab. Kendal	1.000,0	KPBU
27	Kota Semarang	Pengembangan LRT Perkotaan, Kota Semarang	14.760,0	KPBU
28	Kota Semarang	Pembangunan Terminal <i>Cruise</i> Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang	5.000,0	BUMN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
29	Kota Semarang	Optimalisasi kapasitas Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang	2.000,0	BUMN
30	Kab. Kendal	Pembangunan Kendal <i>Sea Port</i> , Kab. Kendal	7.000,0	Swasta
31	Kab. Kendal	Pembangunan Gardu Induk KI Kendal (150 KV), Kab. Kendal	110,0	Swasta
32	Kab. Kendal	Pembangunan Pipa Gas Distribusi Semarang-Kendal, Kab. Kendal	2.900,0	BUMN
33	Kab. Kendal dan Kab. Semarang	Penanganan Limbah B3 Migas, Kab. Kendal dan Kab. Semarang	500,0	Swasta
34	Kab. Kendal	Pembangunan Rusunawa1 KI Kendal, Kab. Kendal	25,0	APBN
35	Kab. Kendal	Pembangunan Rusunawa2 KI Kendal, Kab. Kendal	25,0	APBN
36	Kota Semarang	Pembangunan Rusun pekerja, Kota Semarang	25,0	APBN
37	Kota Salatiga	Pembangunan Rusun MBR, Kota Salatiga	25,0	APBN
38	Kota Semarang	Pembangunan Pusat Logistik Berikat KI Wijayakusuma, Kota Semarang	50,0	BUMN
39	Kab. Kendal	Pembangunan Pusat Logistik Berikat KI Kendal, Kab. Kendal	50,0	Swasta
40	Kab. Kendal	Pembangunan industri berbasis baja, Kab.	37.000,0	Swasta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
		Kendal		
41	Kab.Kendal	Pengembangan KI Kendal, Kab. Kendal	7.000,0	Swasta
42	Kab. Grobogan	Pengembangan sistem resi gudang dan pengelolaan hasil pasca panen komoditas padi, jagung dan kedelai, Kab. Grobogan	50,0	APBN
43	Kab. Grobogan	Pengembangan tempat wisata Bledug Kuwu, Kab. Grobogan	50,0	APBN
44	Kab. Semarang	Pembangunan Jateng Park, Kab.Semarang	1.000,0	Swasta
45	Kab. Semarang	Pembangunan Edupark Tlogo Wening, Kab. Semarang	156,0	Swasta
46	Kab. Semarang	Pengembangan wisata Rawa Pening, Kab. Semarang	51,0	APBN
47	Kota Semarang	Pembangunan pusat bisnis dan wisata international PRPP, Kota Semarang	700,0	BUMD
48	Kota Semarang	Pengelolaan limbah medis, Kota Semarang	200,0	BUMD
49	Kab. Grobogan	Pembangunan RSUD Tipe C Gubug, Kab. Grobogan	96,0	KPBU
50	Kota Semarang	Pembangunan Technopark, Kota Semarang	75,0	APBN
51	Kab. Semarang	Pengembangan	50,0	BUMD



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
		peternakan sapi potong, Kab. Semarang		
52	Kab. Grobogan	Pembangunan STA (Sub Terminal Agrobisnis), Kab. Grobogan	50,0	APBN
53	Kab. Demak	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak, Kab. Demak	100,0	APBN
54	Kab. Kendal	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang, Kab. Kendal	100,0	APBN
55	Kab. Demak	Pengembangan pengolahan rajungan, Kab. Demak	50,0	APBN
56	Kota Semarang	Pembangunan <i>Dry Port</i> Ex Terminal Terboyo, Kota Semarang	50,0	APBN

2. KAWASAN WANARAKUTI

Berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah disepakati 18 usulan program/kegiatan di Kawasan Wanarakuti dengan total estimasi nilai investasi sebesar Rp1.585 M. Adapun dari 18 usulan program/kegiatan tersebut dibiayai melalui 5 (lima) macam sumber, diantaranya: (1) APBN terdiri dari 14 usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp1.155 M; (2) KPBU terdiri dari 1 (satu) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp200 M; (3) BUMD terdiri dari 1 (satu) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp80 M; (4) BUMD/Swasta terdiri dari 1 (satu) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp50 M; dan (5) BUMD terdiri dari 1 (satu) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp80 M. Mayoritas usulan program/kegiatan di Kawasan Wanarakuti berasal dari sektor perikanan dan kelautan serta sumber daya air. Rincian 18 usulan program/kegiatan di Kawasan Wanarakuti dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 39 : Usulan Program/Kegiatan Kawasan Wanarakuti

NO	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
KAWASAN WANARAKUTI				
1	Kab. Pati	Normalisasi Sungai Juwana, Kab. Pati	300,0	APBN
2	Kab. Jepara	Pembangunan Embung Legonlele Pulau Karimunjawa, Kab. Jepara	60,0	APBN
3	Kab. Jepara	Pembangunan Embung Pulau Parang, Kab. Jepara	50,0	APBN
4	Kab. Kudus	Pembangunan Jalan Karangbener (UMK) - Ngembalrejo, Kab. Kudus	125,0	APBN
5	Kab. Pati	Pelebaran 4 lajur Jalan Kabupaten Pati, Batas Kabupaten Kudus/Kabupaten Rembang, Kab. Pati	300,0	APBN
6	Kab. Jepara	Peningkatan reservoir di Perkotaan Karimunjawa, penataan alun-alun karimunjawa, pembangunan pusat daur ulang (PDU) dan pembangunan TPST Karimunjawa, Kab. Jepara	50,0	APBN
7	Kab. Jepara	Pengembangan Bandara Dewadaru, Kab. Jepara	20,0	APBN
8	Kab. Jepara	Pembangunan PLTS di Pulau Parang, Kab. Jepara	10,0	APBN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
9	Kab. Jepara	Pembangunan PLTS di Pulau Nyamuk dan Genting Karimun Jawa, Kab. Jepara	10,0	APBN
10	Kab. Jepara	Pembangunan Rusus, Kab. Jepara	10,0	APBN
11	Kab. Jepara	Pembangunan Kawasan Permukiman Bulu, Kab. Jepara	70,0	APBN
12	Kab. Kudus	Pembangunan sentra IKM logam rekayasa dan Kopi, Kab. Kudus	25,0	APBN
13	Kab. Jepara	Pengembangan atraksi dan amenitas desa wisata di Karimunjawa, Kab. Jepara	25,0	APBN
14	Kab. Kudus	Pembangunan Gedung Instalasi Bedah-Sentral (IBS) RSUD Lukmonohadi, Kab. Kudus	200,0	KPBU
15	Kab. Pati	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo, Kab. Pati	100,0	APBD
16	Kab. Jepara	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa, Kab. Jepara	100,0	APBN
17	Kab. Pati	Pembangunan Pabrik Garam, Kab. Pati	80,0	BUMD
18	Kab. Pati	Pengembangan Industri Garam Rakyat, Kab. Pati	50,0	BUMD/ Swasta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. KAWASAN BANGLOR

Berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah disepakati 18 usulan program/kegiatan di Kawasan Banglor dengan total estimasi nilai investasi sebesar Rp2.736,5 M. Adapun dari 18 usulan program/kegiatan tersebut dibiayai melalui 3 (tiga) macam sumber, diantaranya: (1) APBN terdiri dari 16 usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp2.636,5 M; (2) KPBU terdiri dari 1 (satu) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp50 M; dan (3) BUMD/Swasta terdiri dari 1 (satu) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp50 M. Mayoritas usulan program/kegiatan di Kawasan Banglor berasal dari sektor sumber daya air, jalan/jembatan serta perikanan dan kelautan. Rincian 18 usulan program/kegiatan di Kawasan Banglor dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 40 : Usulan Program/Kegiatan Kawasan Banglor

NO	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
KAWASAN BANGLOR				
1	Kab. Rembang	Optimalisasi pemanfaatan sumber semen sale untuk air minum, Kab. Rembang	112,0	APBN
2	Kab. Blora	Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko, Kab. Blora	750,0	APBN
3	Kab. Rembang	Pembangunan <i>Long Storage</i> Sungai Pang, Kab. Rembang	50,0	APBN
4	Kab. Blora	Pembangunan Embung Karangjati, Kab. Blora	50,0	APBN
5	Kab. Rembang	Pembangunan Embung Pasedan, Trenggulunan, Kaliombo, Kab. Rembang	200,0	APBN
6	Kab. Rembang	Pembangunan Jalan Lingkar Rembang -	500,0	APBN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
		Lasem, Kab. Rembang		
7	Kab. Rembang dan Kab. Blora	Peningkatan Jalan Kab. Rembang - Bts. Kota Blora - Cepu Kab. Rembang - Kab. Blora	289,0	APBN
8	Kab. Blora	Peningkatan Jalan Randublatung - Getas Kecamatan dan Getas - Perbatasan Ngawi, Kab. Blora	95,5	APBN
9	Kab. Rembang	Pengembangan TPA Landoh, Kab. Rembang	50,0	KPBU
10	Kab. Rembang	Pengolahan air laut menjadi air baku, Kab. Rembang	100,0	APBN
11	Kab. Blora	Pengembangan Bandara Ngloram, Kab. Blora	35,0	APBN
12	Kab. Rembang	Pengembangan Kluster Industri Batik Lasem, Kab. Rembang	50,0	APBN
13	Kab. Rembang	Pembangunan Pasar Kota Rembang, Kab. Rembang	120,0	APBN
14	Kab. Rembang	Revitalisasi Situs Prau Kuno dan pengembangan Kawasan Wisata Kota Pusaka Lasem, Kab. Rembang	95,0	APBN
15	Kab. Rembang	Revitalisasi dan/atau reorientasi BLK, Kab. Rembang	40,0	APBN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
16	Kab. Rembang	Pembangunan STA, Kab. Rembang	50,0	APBN
17	Kab. Rembang	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung, Kab. Rembang	100,0	APBN
18	Kab. Rembang	Pengembangan industri garam rakyat, Kab. Rembang	50,0	BUMD/Swasta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4. KAWASAN PURWOMANGGUNG

Berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah disepakati 35 usulan program/kegiatan di Kawasan Purwomanggung dengan total estimasi nilai investasi sebesar Rp45.280,5 M. Adapun dari 35 usulan program/kegiatan tersebut dibiayai melalui 3 (tiga) macam sumber, diantaranya: (1) APBN terdiri dari 28 usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp4.280,5 M; (2) KPBU terdiri dari 6 (enam) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp32.500 M; dan (3) BUMN terdiri dari 1 (satu) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp8.500 M. Mayoritas usulan program/kegiatan di Kawasan Purwomanggung berasal dari sektor jalan/jembatan dan pariwisata. Rincian 35 usulan program/kegiatan di Kawasan Purwomanggung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 42 : Usulan Program/Kegiatan Kawasan Purwomanggung

NO	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
KAWASAN PURWOMANGGUNG				
1	Kab. Magelang	Pembangunan Bendungan Pasuruhan, Kab. Magelang	1.500,0	APBN
2	Kab. Magelang dan Kota Magelang	Revitalisasi sempadan Sungai Progo (<i>river amenity</i>), Kab. Magelang dan Kota Magelang	50,0	APBN
3	Kab. Kendal dan Kab. Temanggung	Pembangunan prasarana konservasi SDA Sungai Bodri, Kab. Kendal dan Kab. Temanggung	150,0	APBN
4	Kab. Magelang	Pembangunan Jalan Tol Ruas Tol Bawen-Yogya, Kab. Magelang	30.000,0	KPBU
5	Kab. Purworejo	Pembangunan <i>Ringroad</i> Timur Purworejo, Kab. Purworejo	176,0	APBN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
6	Kab. Temanggung dan Kab. Wonosobo	Pembangunan Jalan Lingkar Parakan, Kab. Temanggung dan Kab. Wonosobo	350,0	APBN
7	Kab. Wonosobo	Pembangunan Jalan Lingkar Utara Kertek, Kab. Wonosobo	85,0	APBN
8	Kab. Magelang	Pembangunan Jalan Magelang -Kaliangkrik- Bts. Kab. Wonosobo, Kab. Magelang	45,0	APBN
9	Kab. Purworejo	Peningkatan Jalan Tumbakanyar- Banyuasin-Sedayu- Pagerharjo-Batas DIY, Kab. Purworejo	100,0	APBN
10	Kab. Purworejo	Peningkatan jalan akses ke Zona Otorita Borobudur dari Purworejo (Benowo- Bener atau Sedayu- Loano), Kab. Purworejo	100,0	APBN
11	Kab. Purworejo	Peningkatan Jalan Banyuasin - Tridadi - Pucungroto - Batas DIY, Kab. Purworejo	100,0	APBN
12	Kab. Magelang	Pembangunan ruas Jalan Manglong- Kalikodil, Kab. Magelang	52,0	APBN
13	Kab. Magelang	Pembangunan Gedung Pusat Pemadam Kebakaran Kawasan Borobudur, Kab. Magelang	65,0	APBN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
14	Kab. Magelang	Peningkatan infrastruktur di Kawasan Borobudur, Kab. Magelang	100,0	APBN
15	Kab. Magelang	Penyediaan TPST Penyangga Kawasan Borobudur, Kab. Magelang	100,0	APBN
16	Kab. Purworejo	Pembangunan SPAM Regional Keburejo (JDU), Kab. Purworejo	92,0	APBN
17	Kab. Purworejo	Pembangunan IKK SPAM Bagelen, Kab. Purworejo	50,0	APBN
18	Kab. Magelang	Pembangunan TPA/TPST Regional, Kab. Magelang	200,0	KPBU
19	Kab. Magelang	Penataan akses poros Mendut-Pawon-Borobudur, Kab. Magelang	57,0	APBN
20	Kab. Magelang	Pembangunan gerbang dan koridor Palbapang-Borobudur, Blondo-Borobudur, Gerbang/ <i>Rest Area</i> -Koridor Kembanglimus-Borobudur, Kab. Magelang	50,0	APBN
21	Kab. Magelang	Penataan kawasan ruang terbuka publik Candi Borobudur, Kab. Magelang	68,0	APBN
22	Kab. Magelang	Pembangunan Anjungan Cerdas Candi Borobudur, Kab. Magelang	1.100,0	KPBU



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
23	Kota Magelang	Peningkatan Terminal Tipe A Tidar, Kota Magelang	50,0	APBN
24	Kab. Wonosobo dan Kab. Banjarnegara	Pengembangan panas bumi WKP Dieng Area Dieng, Kab. Wonosobo dan Kab. Banjarnegara	8.500,0	BUMN
25	Kab. Magelang	Revitalisasi Pasar Ngablak, Pasar Kaponan, Pasar Salaman, Pasar Mungkid dan Pasar Windusari, Kab. Magelang	265,5	APBN
26	Kab. Wonosobo	Pengembangan Geopark Dieng, Kab. Wonosobo	50,0	APBN
27	Kab. Magelang	Pembangunan wisata kreatif Simpang Mendut (Taman Kreasi Mendut/Museum Widayat/Taman Anggrek), Kab. Magelang	50,0	APBN
28	Kota Magelang	Pembangunan RSUD Tipe C, Kota Magelang	50,0	KPBU
29	Kota Magelang	Pembangunan RSUD Rujukan Kanker, Kota Magelang	900,0	KPBU
30	Kab. Wonosobo	Pembangunan RSUD KRT Setjonegoro, Kab. Wonosobo	250,0	KPBU
31	Kab. Magelang	Pembangunan Sekolah vokasi Pariwisata/SMK Pariwisata, Kab. Magelang	200,0	APBN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
32	Kab. Purworejo	Pembangunan Sekolah Vokasi Pariwisata/SMK Pariwisata, Kab. Purworejo	200,0	APBN
33	Kab. Wonosobo	Pembangunan STA Kab. Wonosobo	50,0	APBN
34	Kab. Temanggung	Peningkatan Jalan Pringsurat - Secang - Batas Yogya, Kab. Temanggung	25,0	APBN
35	Kab. Temanggung	Pengembangan Kawasan Kopi dan Pengembangan Kawasan Agropolitan PRING KRAKAL (Pringsurat, Kranggan, Kaloran), Kab. Temanggung	100,0	APBN

5. KAWASAN SUBOSUKAWONOSRATEN

Berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah disepakati 28 usulan program/kegiatan di Kawasan Subosukawonosraten dengan total estimasi nilai investasi sebesar Rp 29.768 M. Adapun dari 28 usulan program/kegiatan tersebut dibiayai melalui 3 (tiga) macam sumber, diantaranya: (1) APBN terdiri dari 25 usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp2.239 M; (2) KPBU terdiri dari 2 (dua) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp27.429 M; dan (3) Swasta terdiri dari 1 (satu) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp100 M. Mayoritas usulan program/kegiatan di Kawasan Subosukawonosraten berasal dari sektor sumber daya air dan jalan/jembatan. Rincian 28 usulan program/kegiatan di Kawasan Subosukawonosraten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 42 : Usulan Program/Kegiatan Kawasan Subosukawonosraten

NO	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
KAWASAN SUBOSUKAWONOSRATEN				
1	Kab. Sukoharjo	Pembangunan tanggul Sungai Bengawan Solo, Kab. Sukoharjo	200,0	APBN
2	Kab. Wonogiri	Pengembangan air baku Pidekso, Kab. Wonogiri	70,0	APBN
3	Kab. Klaten	Pengendalian banjir Sungai Dengkeng, Sungai Bengawan Solo, Kab. Klaten	100,0	APBN
4	Kab. Klaten	Revitalisasi Rowojombor, Kab. Klaten	300,0	APBN
5	Kota Surakarta	Pengendalian Banjir Sungai Pepe, Sungai Bengawan Solo, Kota Surakarta	100,0	APBN
6	Kab. Boyolali	Revitalisasi Waduk Cengklik, Kab. Boyolali	50,0	APBN
7	Kab. Wonogiri	Pembangunan jaringan Daerah Irigasi Pidekso, Kab. Wonogiri	100,0	APBN
8	Kota Solo	Pembangunan <i>Viaduct</i> Gilingan, Kota Solo	50,0	APBN
9	Kota Solo	Pembangunan Jalan Tol Ruas Tol Solo-Yogya, Kota Solo	26.400,0	KPBU
10	Kab. Sragen	Pembangunan <i>Fly Over/Underpass</i> Pilangsari, Kab. Sragen	175,0	APBN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
11	Kab. Sragen	Peningkatan struktur dan kapasitas Jalan Surakarta-Gemolong-Geyer/batas Kab. Grobogan, Kab. Sragen	19,0	APBN
12	Kab. Sragen	Pembangunan Jembatan Ganevo, Kab. Sragen	30,0	APBN
13	Kab. Wonogiri	Pembiayaan SPAM Regional Wososukas, Kab. Wonogiri	1.029,0	KPBU
14	Kota Surakarta	Pembangunan Rusun MBR "Putri Cempo", Kota Surakarta	25,0	APBN
15	Kota Surakarta	Pengembangan Sentra IKM, Kota Surakarta	120,0	APBN
16	Kab. Sukoharjo	Pengembangan Kawasan Pusat Furniture Indonesia, Kab. Sukoharjo	100,0	Swasta
17	Kab. Boyolali	Pembangunan Pasar Induk Simo dan Ampel, Kab. Boyolali	50,0	APBN
18	Kab. Karanganyar	Revitalisasi Pasar Kwadungan, Kab. Karanganyar	50,0	APBN
19	Kab. Sragen	Revitalisasi pasar, Kab. Sragen	200,0	APBN
20	Kab. Sragen	Pengembangan amenities Kawasan Wisata Sangiran, Kab. Sragen	50,0	APBN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
21	Kota Surakarta	Pengembangan Kawasan Wisata Balekambang, Kota Surakarta	50,0	APBN
22	Kab. Karanganyar	Pengembangan olah raga dan rekreasi Bumi Perkemahan Delingan, Kab. Karanganyar	50,0	APBN
23	Kota Surakarta	Pengembangan ekonomi kreatif, Kota Surakarta	150,0	APBN
24	Kab. Sragen	Pengembangan sapi, Kab. Sragen	50,0	APBN
25	Kab. Sukoharjo	Pengembangan <i>Agriculture Estate</i> melalui <i>Corporate Farming</i> , Kab. Sukoharjo	50,0	APBN
26	Kab. Karanganyar	Pembangunan STA Kab. Karanganyar	50,0	APBN
27	Kab. Wonogiri	Pembangunan STA Kab. Wonogiri	50,0	APBN
28	Kab. Boyolali	Pembangunan Infrastruktur Pendukung KI Klego, Kab. Boyolali	100,0	APBN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

6. KAWASAN BREGASMALANG

Berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah disepakati 50 usulan program/kegiatan di Kawasan Bregasmalang dengan total estimasi nilai investasi sebesar Rp21.413 M. Adapun dari 50 usulan program/kegiatan tersebut dibiayai melalui 5 (lima) macam sumber, diantaranya: (1) APBN terdiri dari 40 usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp12.133 M; (2) KPBU terdiri dari 4 (empat) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp750 M; dan (3) BUMN terdiri dari 3 (tiga) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp2.150 M; (4) BUMD terdiri dari 1 (satu) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp80 M; dan (5) Swasta terdiri dari 2 (dua) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp6.300 M. Mayoritas usulan program/kegiatan di Kawasan Bregasmalang berasal dari sektor sumber daya air dan jalan/jembatan. Rincian 50 usulan program/kegiatan di Kawasan Bregasmalang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 43 : Usulan Program/Kegiatan Kawasan Bregasmalang

NO	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
KAWASAN BREGASMALANG				
1	Kab. Brebes	Pembangunan Waduk Bantarkawung, Kab. Brebes	1.500,0	APBN
2	Kab. Brebes	Rehabilitasi Waduk Penjalin dan Waduk Malahayu, Kab. Brebes	500,0	APBN
3	Kab. Brebes	Pengendalian banjir sistem Sungai Cisanggarung, Sungai Tanjung, Sungai Kabuyutan, Sungai Babakan dan Sungai Kluwut, Kab. Brebes	1.000,0	APBN
4	Kab. Brebes	Penanganan abrasi Pantai Losari-Brebes, Kab. Brebes	500,0	APBN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
5	Kota Tegal	Pengendalian banjir dan normalisasi Muara Sungai Sibelis, Kota Tegal	100,0	APBN
6	Kab. Tegal	Pengendalian banjir dan normalisasi Muara Sungai Jimat dan Sungai Rambut, Kab. Tegal	100,0	APBN
7	Kota Tegal	Pengendalian banjir dan normalisasi Muara Sungai Kemiri, Kota Tegal	100,0	APBN
8	Kab. Brebes	Rehabilitasi Sungai Gangsa- Sungai Sigeleng, Sungai Pemali, Kab. Brebes	250,0	APBN
9	Kab. Brebes	Pembangunan Bendung Karet Sungai Pemali, Sungai Kabuyutan, Sungai Babakan dan Sungai Cisanggarung, Kab. Brebes	1.000,0	APBN
10	Kab. Tegal	Pengembangan sumber air baku PAM Perkotaan, Kab. Tegal	300,0	APBN
11	Kab. Tegal	Pembangunan Bendungan Jatinegara, Kab. Tegal	1.500,0	APBN
12	Kab. Pemalang	Pembangunan jaringan air baku, Kab. Pemalang	200,0	APBN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
13	Kab. Tegal	Optimalisasi Waduk Cacaban, Kab. Tegal	400,0	APBN
14	Kab. Pemalang	Pembangunan Bendungan Karanganyar, Kab. Pemalang	1.500,0	APBN
15	Kab. Tegal	Pengendalian banjir Sistem Sungai Cacaban, Kab. Tegal	150,0	APBN
16	Kab. Brebes dan Kab. Tegal	Pembangunan prasarana konservasi SDA Sungai Pemali, Kab. Brebes dan Kab. Tegal	150,0	APBN
17	Kab. Pemalang	Penanganan kerusakan pantai, Kab. Pemalang	500,0	APBN
18	Kab. Brebes dan Kab. Tegal	Peningkatan Jalan Akses Kaligua Guci, Kab. Brebes dan Kab. Tegal	50,0	APBN
19	Kab. Brebes	Pembangunan Jalan Lingkar Industri Brebes - Tegal (Kecipir- Blangko-Kelampok), Kab. Brebes	250,0	APBN
20	Kab. Brebes	Pembangunan perlintasan tidak sebidang KA pada Ruas Pejagan - Ketanggungan, Kab. Brebes	100,0	APBN
21	Kab. Brebes	Peningkatan jalan kabupaten akses kawasan industri, Kab. Brebes	100,0	APBN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
22	Kota Tegal	Pembangunan <i>Fly Over</i> Tirus, Kota Tegal	158,0	APBN
23	Kab. Tegal	Peningkatan Jalan Yomani - Guci, Kab. Tegal	60,0	APBN
24	Kab. Tegal	Peningkatan jalan dan perlengkapan Ruas Ketanggungan - Prupuk, Kab. Tegal	60,0	APBN
25	Kab. Brebes	Pembangunan TPA Ketanggungan, Kab. Brebes	50,0	KPBU
26	Kota Tegal	Pembangunan TPA Bokongsemar, Kota Tegal	100,0	KPBU
27	Kota Tegal	Peningkatan Terminal Tipe A, Kota Tegal	50,0	APBN
28	Kab. Brebes	Pembangunan jalur rel kereta api Kawasan Industri Brebes - Pelabuhan Tegal, Kab. Brebes	500,0	KPBU
29	Kota Tegal	Pengembangan Pelabuhan Tegal, Kota Tegal	140,0	BUMN
30	Kab. Brebes	Pembangunan pipa gas transmisi Cirebon - Semarang, Kab. Brebes	5.300,0	Swasta
31	Kab. Brebes	Pembangunan Gardu Induk Ketanggungan, Kab. Brebes	10,0	BUMN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
32	Kab. Pematang	Pembangunan Kawasan Energi Terpadu, Kab. Pematang	1.000,0	Swasta
33	Kab. Brebes	Pembangunan Rusun untuk MBR, Kab. Brebes	125,0	APBN
34	Kab. Tegal	Fasilitasi pengembangan industri klaster logam, Kab. Tegal	100,0	APBN
35	Kab. Brebes	Pembangunan KI Brebes, Kab. Brebes	2.000,0	BUMN
36	Kab. Brebes	Revitalisasi Pasar Induk, Kab. Brebes	150,0	APBN
37	Kab. Pematang	Pembangunan Pasar Pagi, Kab. Pematang	250,0	APBN
38	Kab. Tegal	Revitalisasi Pasar Adiwerna, Balamoa, Bumijawa, Guci, Kab. Tegal	80,0	APBN
39	Kab. Tegal	Pembangunan pasar ikan dan revitalisasi balai benih ikan (BBI), Kab. Tegal	50,0	APBN
40	Kab. Brebes	Pembangunan RSUD Ketanggungan, Kab. Brebes	100,0	KPBU
41	Kab. Brebes	Pembangunan Politeknik Industri, Kab. Brebes	50,0	APBN
42	Kab. Brebes	Pembangunan BLK, Kab. Brebes	70,0	APBN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
43	Kab. Brebes	Pengembangan Kawasan Peternakan Sapi Jabres, Kab. Brebes	100,0	APBN
44	Kab. Pemalang	Pembangunan STA, Kab. Pemalang	50,0	APBN
45	Kab. Brebes	Pembangunan STA (Sub Terminal Agrobisnis) Manggamas, Kab. Brebes	50,0	APBN
46	Kab. Tegal	Pengembangan pertanian bawang putih, Kab. Tegal	30,0	APBN
47	Kab. Tegal	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan, Kab. Tegal	150,0	APBN
48	Kota Tegal	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, Kota Tegal	150,0	APBN
49	Kab. Pemalang	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Asem Doyong, Kab. Pemalang	100,0	APBN
50	Kab. Brebes	Pembangunan pabrik garam, Kab. Brebes	80,0	BUMD



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

7. KAWASAN BARLINGMASCAKEB

Berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah disepakati 32 usulan program/kegiatan di Kawasan Barlingmascakeb dengan total estimasi nilai investasi sebesar Rp79.970,8 M. Adapun dari 32 usulan program/kegiatan tersebut dibiayai melalui 4 (empat) macam sumber, diantaranya: (1) APBN terdiri dari 25 usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp5.806,8 M; (2) KPBU terdiri dari 3 (tiga) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp1.164 M; (3) BUMN terdiri dari 3 (tiga) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp71.000 M; dan (4) BUMD terdiri dari 1 (satu) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp2.000 M. Mayoritas usulan program/kegiatan di Kawasan Barlingmascakeb berasal dari sektor jalan/jembatan dan transportasi. Rincian 32 usulan program/kegiatan di Kawasan Barlingmascakeb dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 44 : Usulan Program/Kegiatan Kawasan Barlingmascakeb

NO	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
KAWASAN BARLINGMASCAKEB				
1	Kab. Cilacap	Pembangunan Bendungan Matenggeng, Kab. Cilacap	3.000,0	APBN
2	Kab. Banyumas	Pembangunan Waduk Kaliurip, Kab. Banyumas	50,0	APBN
3	Kab. Cilacap	Pembangunan tanggul Pantai Teluk Penyu, Kab. Cilacap	100,0	APBN
4	Kab. Purbalingga	Peningkatan Jalan Banyumas - Klampok, Kab. Purbalingga	155,0	APBN
5	Kab. Cilacap	Pembangunan <i>Fly Over</i> Kroya, Kab. Cilacap	100,0	APBN
6	Kab. Cilacap dan Kab. Kebumen	Pembangunan Jalan Ruas JJLS, Kab. Cilacap dan Kab. Kebumen	1.200,0	APBN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
7	Kab. Cilacap	Pembangunan Jembatan Citanduy 3, Kab. Cilacap	100,0	APBN
8	Kab. Banyumas	Pembangunan Jembatan Kali Serayu Ds. Pegalongan – Ds. Mandirancan, Kab. Banyumas	50,0	APBN
9	Kab. Banyumas	Pembangunan Anjungan Pelayanan Jalan (APJ), Kab. Banyumas	61,8	APBN
10	Kab. Banyumas	Pembangunan <i>Fly Over</i> Tambaknegara, Kab. Banyumas	60,0	APBN
11	Kab. Banyumas	Pembangunan <i>Fly Over</i> Veteran, Kab. Banyumas	100,0	APBN
12	Kab. Cilacap	Pembangunan <i>Fly Over</i> Kubangkangkung, Kab. Cilacap	100,0	APBN
13	Kab. Purbalingga	Pengembangan SPAM Bandara JBS, Kab. Purbalingga	108,0	KPBU
14	Kab. Banyumas dan Kab. Purbalingga	Peningkatan Terminal Tipe A Kab. Banyumas dan Bobotsari, Purbalingga	100,0	APBN
15	Kab. Purbalingga	Reaktivasi kereta Purwokerto-Wonosobo melalui Purbalingga, Kab. Purbalingga	1.000,0	KPBU
16	Kab. Cilacap	Pengembangan Pelabuhan Tanjung	500,0	BUMN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
		Intan, Kab. Cilacap		
17	Kab. Purbalingga	Pengembangan Bandara JB Soedirman, Kab. Purbalingga	500,0	BUMN
18	Kab. Cilacap	Percepatan pembangunan Pertamina RDMP RU IV, Kab. Cilacap	70.000,0	BUMN
19	Kab. Kebumen	Fasilitasi untuk pelaku industri pengolahan gula semut, Kab. Kebumen	34,0	APBN
20	Kab. Kebumen	Pengembangan Kawasan Industri Petanahan, Kab. Kebumen	2.000,0	BUMD
21	Kab. Banjarnegara	Pengembangan Kawasan Wisata Telaga Merdada, Kab. Banjarnegara	20,0	APBN
22	Kab. Pekalongan	Pembangunan RSUD Kesesi, Kab. Pekalongan	56,0	KPBU
23	Kab. Cilacap	Pengembangan politeknik, Kab. Cilacap	97,0	APBN
24	Kab. Cilacap	Revitalisasi BLK, Kab. Cilacap	97,0	APBN
25	Kab. Banjarnegara	Revitalisasi BLK Transmigrasi, Kab. Banjarnegara	45,0	APBN
26	Kab. Purbalingga	Revitalisasi dan/atau Reorientasi BLK, Kab.	12,0	APBN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
		Purbalingga		
27	Kab. Banjarnegara	Pembangunan STA, Kab. Banjarnegara	50,0	APBN
28	Kab. Banyumas	Pembangunan STA (Sub Terminal Agrobisnis), Kab. Banyumas	50,0	APBN
29	Kab. Cilacap	Pengembangan Kawasan Agrowisata Bantarsari, Kab. Cilacap	25,0	APBN
30	Kab. Cilacap	Pembangunan sarana dan prasarana bagi pembudidaya udang vaname, Kab. Cilacap	50,0	APBN
31	Kab. Kebumen	Peningkatan produksi garam di Pansela, Kab. Kebumen	50,0	APBN
32	Kab. Kebumen	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Logending, Kab. Kebumen	100,0	APBN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

8. KAWASAN PETANGLONG

Berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah disepakati 19 usulan program/kegiatan di Kawasan Petanglong dengan total estimasi nilai investasi sebesar Rp6.430 M. Adapun dari 19 usulan program/kegiatan tersebut dibiayai melalui 4 (empat) macam sumber, diantaranya: (1) APBN terdiri dari 15 usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp4.100 M; (2) KPBU terdiri dari 2 (dua) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp630 M; dan (3) BUMN terdiri dari 1 (satu) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp200 M; dan (4) Swasta terdiri dari 1 (satu) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp1.500 M. Mayoritas usulan program/kegiatan di Kawasan Petanglong berasal dari sektor sumber daya air dan jalan/jembatan. Rincian 19 usulan program/kegiatan di Kawasan Petanglong dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 45 : Usulan Program/Kegiatan Kawasan Petanglong

NO	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
KAWASAN PETANGLONG				
1	Kab. Pekalongan	Pembangunan waduk sumber air baku SPAM Regional Petanglong, Kab. Pekalongan	1.500,0	APBN
2	Kab. Batang	Pengendalian banjir dan perbaikan muara Sungai Sambong (Sungai Lojahan), Kab. Batang	100,0	APBN
3	Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan	Pengendalian banjir Sistem Sungai Loji/Pekalongan/Kupang, Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan	300,0	APBN
4	Kab. Pekalongan	Pengendalian banjir Sistem Sungai Sragi Lama dan Sragi Baru, Kab. Pekalongan	200,0	APBN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
5	Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan	Pengendalian banjir Sistem Sungai Sengkarang, Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan	250,0	APBN
6	Kota Pekalongan dan Kab. Batang	Pengendalian banjir dan rob, Kota Pekalongan dan Kab. Batang	500,0	APBN
7	Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan	Penyempurnaan sistem banjir dan rob, Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan	500,0	APBN
8	Kab. Pekalongan	Pelebaran dan peningkatan Jalan Doro-Petungkriyono, Kab. Pekalongan	50,0	APBN
9	Kab. Pekalongan	Pembangunan perlintasan tak sebidang kereta api Waru Ruas Wiradesa - Kalibening, Kab. Pekalongan	100,0	APBN
10	Kab. Pekalongan	Pelebaran jalan provinsi ruas Wiradesa-Kalibening, Kab. Pekalongan	100,0	APBN
11	Kab. Batang	Akses menuju Pelabuhan Gas, Kab. Batang	100,0	APBN
12	Kab. Pekalongan	Pengembangan SPAM Regional Petanglong, Kab. Pekalongan	200,0	KPBU
13	Kab. Pekalongan	Pembangunan TPST Regional, Kab. Pekalongan	200,0	APBN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
14	Kota Pekalongan	Pengembangan TOD (<i>Transit Oriented Development</i>) Stasiun Pekalongan, Kota Pekalongan	200,0	BUMN
15	Kab. Batang	Pengembangan infrastruktur penyediaan LNG/Gas berkelanjutan Jawa Tengah, Kab. Batang	1.500,0	Swasta
16	Kab. Pekalongan	Revitalisasi Pasar Wiradesa, Kab. Pekalongan	120,0	APBN
17	Kota Pekalongan	Pembangunan RSUD dengan pelayanan unggulan Ibu dan Anak, Kota Pekalongan	430,0	KPBU
18	Kab. Batang	Revitalisasi dan/atau reorientasi BLK, Kab. Batang	30,0	APBN
19	Kab. Batang	Pengembangan Pelabuhan Pantai Klidanglor, Kab. Batang	50,0	APBN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

9. LINTAS KAWASAN

Berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah disepakati 14 usulan program/kegiatan yang berada pada lintas kawasan dengan total estimasi nilai investasi sebesar Rp58.694,5 M. Adapun dari 14 usulan program/kegiatan tersebut dibiayai melalui 2 (dua) macam sumber, diantaranya: (1) APBN terdiri dari 9 (sembilan) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp3.401,5 M; dan (2) KPBU terdiri dari 5 (lima) usulan program/kegiatan dengan estimasi nilai investasi Rp55.293 M. Mayoritas usulan program/kegiatan yang berada pada lintas kawasan berasal dari sektor jalan/jembatan dan transportasi. Rincian 14 usulan program/kegiatan lintas Kawasan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 46 : Usulan Program/Kegiatan Lintas Kawasan

NO	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
LINTAS KAWASAN				
1	Kab. Brebes, Kab. Cilacap dan Kab. Banyumas	Pembangunan Tol Pejagan-Cilacap, Kab. Brebes, Kab. Cilacap dan Kab. Banyumas	20.000,0	KPBU
2	Kab. Demak, Kab. Kudus, Kab. Pati dan Kab. Rembang	Pembangunan Jalan Tol Ruas Tol Demak- Kudus-Pati - Rembang	15.000,0	KPBU
3	Kab. Kudus, Kab. Pati, Kab. Jepara dan Kab. Grobogan	Pembangunan SPAM Regional Dadi Muria, Kab. Kudus, Kab. Pati, Kab. Jepara dan Kab. Grobogan	1.200,0	KPBU
4	Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Kudus, Kab. Pati dan Kab. Rembang	Reaktivasi rel kereta api Semarang-Demak- Kudus-Pati-Rembang, Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Kudus, Kab. Pati dan Kab. Rembang	8.000,0	KPBU



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
5	Kota Semarang, Kab. Semarang, Kab. Magelang dan Kota Magelang	Reaktivasi pembangunan jalur KA Semarang- Ambarawa- Magelang-Borobudur, Kota Semarang, Kab. Semarang, Kab. Magelang dan Kota Magelang	11,093,0	KPBU
6	Seluruh Kabupaten/Kota	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Jawa Tengah	2.187,5	APBN
7	Kab. Magelang, Kota Surakarta, Kab. Sragen, Kab. Karanganyar, Kab. Banjarnegara, Kab. Wonosobo, Kab. Purbalingga, Kab. Temanggung, Kab. Blora, Kab. Klaten, Kab. Tegal, Kab. Grobogan, Kab. Brebes, Kab. Cilacap, Kab. Pekalongan, Kab. Purworejo, Kab. Banyumas, Kab. Boyolali, Kab. Jepara dan Kab. Semarang	Pengembangan amenitas pariwisata berbasis <i>homestay</i> /desa wisata, Kab. Magelang, Kota Surakarta, Kab. Sragen, Kab. Karanganyar, Kab. Banjarnegara, Kab. Wonosobo, Kab. Purbalingga, Kab. Temanggung, Kab. Blora, Kab. Klaten, Kab. Tegal, Kab. Grobogan, Kab. Brebes, Kab. Cilacap, Kab. Pekalongan, Kab. Purworejo, Kab. Banyumas, Kab. Boyolali, Kab. Jepara dan Kab. Semarang	100,0	APBN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
8	Kab. Purworejo, Kab. Blora, Kab. Grobogan, Kab. Demak, Kab. Klaten, Kab. Sragen, Kab. Banyumas, Kab. Rembang, Kab. Banjarnegara, Kab. Purbalingga, Kab. Pemalang, Kab. Brebes, Kab. Kebumen, dan Kab. Wonosobo	Pengembangan ekonomi berbasis koperasi dan UMKM serta bantuan alat tangkap ikan ramah lingkungan (Pantura), Kab. Purworejo, Kab. Blora, Kab. Grobogan, Kab. Demak, Kab. Klaten, Kab. Sragen, Kab. Banyumas, Kab. Rembang, Kab. Banjarnegara, Kab. Purbalingga, Kab. Pemalang, Kab. Brebes, Kab. Kebumen dan Kab. Wonosobo	1.090,5	APBN
9	Kab. Purworejo, Kab. Blora, Kab. Grobogan, Kab. Demak, Kab. Klaten, Kab. Sragen, Kab. Banyumas, Kab. Rembang, Kab. Banjarnegara, Kab. Purbalingga, Kab. Pemalang, Kab. Brebes, Kab. Kebumen dan Kab. Wonosobo	Pengembangan ekonomi berbasis pesantren, Kab. Purworejo, Kab. Blora, Kab. Grobogan, Kab. Demak, Kab. Klaten, Kab. Sragen, Kab. Banyumas, Kab. Rembang, Kab. Banjarnegara, Kab. Purbalingga, Kab. Pemalang, Kab. Brebes, Kab. Kebumen dan Kab. Wonosobo	250,0	APBN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
10	Kab. Blora, Kab. Banyumas, Kab. Boyolali, Kab. Purbalingga, Kab. Sragen, Kab. Jepara, Kab. Temanggung, Kab. Pati, Kab. Wonogiri, Kota Tegal, Kab. Brebes, Kab. Kendal, Kab. Rembang, Kab. Wonosobo, Kab. Pemalang, Kab. Pekalongan, Kab. Banjarnegara, Kab. Tegal dan Kab. Magelang	Penanggulangan dan pencegahan stunting dan gizi buruk, Kab. Blora, Kab. Banyumas, Kab. Boyolali, Kab. Purbalingga, Kab. Sragen, Kab. Jepara, Kab. Temanggung, Kab. Pati, Kab. Wonogiri, Kota Tegal, Kab. Brebes, Kab. Kendal, Kab. Rembang, Kab. Wonosobo, Kab. Pemalang, Kab. Pekalongan, Kab. Banjarnegara, Kab. Tegal dan Kab. Magelang	100,0	APBN
11	Kota Semarang, Kab. Banyumas, Kota Surakarta, Kab. Jepara dan Kab. Klaten	Pengadaan alat kesehatan di 7 RS Provinsi (RSUD Moewardi Solo, RSUD Prof. Margono Soekaharjo, RS. Tugurejo, RS. Kelet, RSJD Amino Gondohutomo, RSJD Soedjarwadi, RSJD Surakarta)	310,0	APBN
12	Seluruh Kabupaten/Kota	Pengembangan SDM bidang IPTEK di Jawa Tengah	125,0	APBN
13	Kab. Brebes dan Kab. Jepara	Pengembangan budidaya rumput laut, Kab. Brebes dan Kab. Jepara	100,0	APBN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI NILAI INVESTASI (IDR M)	SUMBER DANA
14	Kab. Purworejo, Kab. Cilacap, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Sragen, Kab. Rembang, Kab. Demak, Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Brebes, Kab. Banyumas, Kab. Kebumen, Kab. Grobogan, Kab. Blora, Kab. Jepara, Kab. Pati, Kab. Batang, dan Kab. Semarang	Pembangunan dan Pengembangan prasarana SMK unggulan (sektor industri, pariwisata, industri kreatif, ketahanan pangan, kemaritiman)	229,0	APBN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Kemaritiman,



Agustina Murbaningsih
Agustina Murbaningsih